



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

- R P J M D -

**KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018 - 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2019



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Sinjai.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

pembangunan dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 3

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi misi dan prioritas program pembangunan daerah dengan penjabaran pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 4

Rincian visi, misi dan prioritas program Pembangunan sebagaimana di maksud Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sistimatika RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 terdiri dari :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Bab III : Gambaran pengelolaan keuangan daerah;
- d. Bab IV : Analisis isu-isu strategis;
- e. Bab V : Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. Bab VI : Strategi dan arah kebijakan;
- g. Bab VII : Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. Bab VIII : Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. Bab IX : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- j. Bab X : Penutup.

Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023.

Pasal 7

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.

- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN **2019** NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN **B.HK. HAM.02.009.19**

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah *subhanahu wata'ala* atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sinjai, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat, serta mendorong peran serta masyarakat dalam di berbagai bidang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini, kami ucapkan terima kasih.

Sinjai, Januari 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-3
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.5 Sistematika Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-24
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-29
2.1.4 Aspek Demografi	II-29
2.1.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	II -32
2.1.6 Daya Dukung berdasarkan Indikatif Jasa Ekosistem Lingkungan.....	II -37
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-42
2.2.1 Pertumbuhan PDRB	II-42
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-52
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-72
2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-74
2.2.5 Fokus Iklim Berprestasi	II-84
2.2.6 Fokus Sumber Daya Manusia	II-90
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-91
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-91
2.4.2 Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-130
2.4.3 Layanan Urusan Pilihan	II-178
2.4.4 Pelayanan Penunjang Urusan	II-187
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2 Neraca Daerah	III-11

	3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masalalu	III-17
	3.2.1	Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	III-18
	3.2.2	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-18
	3.2.3	Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-21
	3.2.4	Analisis Pembiayaan Daerah	III-22
	3.3	Kerangka Pendanaan	III-26
	3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-26
	3.3.2	Penghitung Kerangka Pendanaan	III-41
BAB IV		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
	4.1	Permasalahn Pembangunan Daerah	IV-1
	4.2	Permasalahan untuk Penyelenggaraan Urusan	IV-9
	4.3	Analisis Isu Strategis	IV-19
BAB V		VISI DAN MISI	V-1
	5.1	Visi	V-1
	5.2	Misi	V-2
	5.3	Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI		STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1	Strategi	VI-1
	6.2	Arah Kebijakan	VI-4
	6.3	Program Pembanguan Daerah	VI-10
BAB VII		KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
	7.2	Program Perangkat Daerah	VII-5
BAB VIII		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX		BAB IX PENUTUP	IX-1
	9.1	Pedoman Transisi	IX-1
	9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HAL
1.1	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sinjai Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
1.2	Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	I-12
2.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan	II-2
3.1	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2014-2018	III-2
3.2	Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Sinjai, Periode 2014-2018	III-3
3.3	Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Sinjai, 2014 dan 2018	III-4
3.4	Perkembangan Alokasi Balanja Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2014 dan 2018 (persen)	III-8
3.5	Hasil Proyeksi Korelasi Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023	III-27
3.6	Hasil Proyeksi Postur Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, Selama Periode 2019-2023 (persen)	III-32
3.7	Hasil Proyeksi Postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai, Selama Periode 2019-2023 (persen)	III-33
3.8	Proyeksi Postur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023 (Persen)	III-34
3.9	Gambaran Korelasi Target Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah dengan Kebutuhan Alokasi Total Belanja Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Modal Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023	III-35
3.10	Proyeksi Postur Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023	III-37
3.11	Proyeksi Postur Alokasi Belanja Langsung Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023	III-38
3.12	Proyeksi Postur Pembiayaan Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019 2023	III-40
5.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	V-4

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HAL
2.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan/desa, dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan	II-2
2.2	Jumlah dusun/lingkungan Kabupaten Sinjai	II-2
2.3	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Ketinggian Diatas Permukaan Laut di Kabupaten Sinjai	II-5
2.4	Beberapa sungai besar yang ada dalam wilayah kabupaten sinjai	II-7
2.5	Luas lahan persawahan di kabupaten sinjai dirinci menurut kecamatan	II-10
2.6	Luas Lahan Perkebunan di Kabupaten Sinjai dirinci menurut kecamatan	II-10
2.7	Data Daya Tarik Wisata (DTW) Kabuapten Sinjai Tahun 2019	II-14
2.8	Luas lahan persawahan di kabupaten sinjai Tahun 2017	II-25
2.9	Luas Lahan Perkebunan di Kabupaten Sinjai Tahun 2017	II-25
2.10	Potnesi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Sinjai berdasarkan lokasi kegiatan	II-26
2.11	Sebaran Luas Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai Dirinci Menurut Kecamatan	II-27
2.12	Sebaran luas hutan produksi terbatas di kabupaten Sinjai dirinci menurut kecamatan	II-27
2.13	Potensi tambang menurut jenisnya di kabupaten Sinjai tahun 2017	II-28
2.14	Perkembangan dan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sinjai	II-30
2.15	Jumlah penduduk kabupaten sinjai berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio tahun 2017	II-30
2.16	Jumlah Penduduk Kabupaten sinjai menurut jenis kelamin dan golongan umur tahun 2017	II-31
2.17	Jumlah penduduk menurut kecamatan kabupaten sinjai tahun 2017	II-32
2.18	Kriteria Penggunaan Lahan untuk setiap kemampuan lahan	II-34
2.19	Kelas kemampuan LAhan di KABupaten Sinjai	II-35
2.20	Status Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Sinjai	II-35
2.21	Hubungan antara kebutuhan air dan ketersediaan air bersih per tahun di Kabupaten Sinjai	II-36
2.22	Hubungan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di kabupaten sinjai	II-37
2.23	Daya dukung daya tamping (Dddt) berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Tata Air	II-38
2.24	Daya Dukung Daya Tampung (Dddt) Berbasis Indeks JAsa Ekosistem Aspek Genetik Kabupaten Sinjai	II-39
2.25	Daya Dukung Daya Tampung (Dddt) Berbasis Indeks JAsa Ekosistem Aspek Air Bersih Kabupaten Sinjai	II-39
2.26	Daya dukung Daya Tampung (Dddt) berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Ketersediaan Energi Wilayah Kabupaten Sinjai	II-40
2.27	Daya dukung daya tampung (Dddt) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Pangan Kabupaten Sinjai	II-40
2.28	Daya dukung daya tampung (Dddt) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek tingkat kondisi iklim Kabupaten Sinjai	II-41
2.29	Daya dukung daya tampung (Dddt) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek tingkat Potensi Bencana Kabupaten Sinjai	II-41
2.30	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha	II-43

TABEL	URAIAN	HAL
	Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	
2.31	PDRB Atas dasar Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-45
2.32	Perkembangan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai	II-47
2.33	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2012-2017	II-48
2.34	PDRB Per Kapita Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-49
2.35	Indeks Gini Ratio dan Nasional Tahun 2012-2017	II-49
2.36	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-50
2.37	Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun 2017	II-50
2.38	Rasio Kesenjangan Kemiskinan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-51
2.39	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-51
2.40	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-52
2.41	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-52
2.42	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-53
2.43	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-53
2.44	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013-2017 Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sinjai	II-53
2.45	Persentase angka pendidikan yang ditamatkan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-54
2.46	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-55
2.47	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sinjai	II-56
2.48	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sinjai	II-57
2.49	IPG dan IDG Kabupaten Sinjai	II-57
2.50	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2017	II-58
2.51	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Sinjai	II-58
2.52	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Sinjai	II-58
2.53	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sinjai	II-59
2.54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sinjai	II-59
2.55	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sinjai	II-60
2.56	Rasio penduduk yg bekerja di Kabupaten Sinjai	II-61
2.57	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai	II-62
2.58	Indeks Kepuasan MasyarakatKabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-63
2.59	Persentase PAD terhadap pendapatanKabupaten Sinjai	II-63
2.60	Indeks Reformasi Birokrat Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-63
2.61	Capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah {SAKIP} Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-64
2.62	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-64
2.63	Pencapaian skor pola pangan harapan Tahun 2013-2017	II-64
2.64	Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-65

TABEL	URAIAN	HAL
2.65	Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-65
2.66	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-66
2.67	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-66
2.68	Produksi Sektor Pertanian Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-67
2.69	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-67
2.70	Produksi Sektor Perkebunan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-67
2.71	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-68
2.72	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-68
2.73	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-69
2.74	Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-69
2.75	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-70
2.76	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-70
2.77	Potensi Populasi Aren Tahun 2017 Kabupaten Sinjai	II-70
2.78	Potensi Pengrajin Gula Aren Tahun 2017 Kabupaten Sinjai	II-71
2.79	Rata-rata Produksi Gula Aren / Hari Tahun 2017 Kabupaten Sinjai	II-72
2.80	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-73
2.81	Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Sinjai	II-73
2.82	Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Sinjai	II-73
2.83	Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Sinjai	II-74
2.84	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai	II-74
2.85	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	II-75
2.86	Nilai Tukar Petani Kabupaten Sinjai Tahun 2017	II-76
2.87	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai	II-77
2.88	Produktivitas Total Daerah Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai	II-77
2.89	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai	II-78
2.90	Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Tahun 2017 Kabupaten Sinjai	II-78
2.91	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-78
2.92	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun Kabupaten Sinjai tahun 2015-2017	II-79
2.93	Luas Kawasan Perkotaan Berdasarkan RTRW Tahun 2017 Kabupaten Sinjai	II-81
2.94	Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Sinjai Tahun 2017	II-82
2.95	Jenis dan Jumlah Hotel/ Penginapan Di Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-82
2.96	Persentase penduduk berakses air minum Tahun 2013-2017Kabupaten Sinjai	II-82

TABEL	URAIAN	HAL
2.97	Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Sinjai	II-83
2.98	Rasio ketersediaan daya listrik Kabupaten Sinjai	II-83
2.99	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-83
2.100	Angka Kriminalitas yang tertangani Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai	II-84
2.101	Jumlah Demo di Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-84
2.102	Lama Perizinan Tahun 2017Kabupaten Sinjai	II-85
2.103	Jumlah dan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-90
2.104	Jumlah Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2017	II-91
2.105	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Sinjai Tahun 2013 - 2017	II-91
2.106	APS Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-92
2.107	Angka putus Sekolah Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-93
2.108	Angka Kelulusan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-93
2.109	Angka Melanjutkan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-94
2.110	Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Bangunan Baik Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-95
2.111	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-96
2.112	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menengah Tahun 2013 -2017 Kabupaten Sinjai	II-97
2.113	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Sinjai	II-97
2.114	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Sinjai	II-98
2.115	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 th perempuan & laki-laki Kabupaten Sinjai	II-98
2.116	Penduduk yg berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Sinjai	II-99
2.117	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Di Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-100
2.118	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai	II-101
2.119	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai	II-101
2.120	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Sinjai	II-101
2.121	Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai	II-102
2.122	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-102
2.123	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-103
2.124	Rasio Rumah Sakit Tahun 2017 Kabupaten Sinjai	II-103
2.125	Rasio Dokter Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-104
2.126	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-104
2.127	Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani Kabupaten Sinjai	II-105
2.128	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-105

TABEL	URAIAN	HAL
2.129	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-105
2.130	Proporsi penduduk dgn asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yg digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari) Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-106
2.131	Non polio AFP rate per 1000 penduduk Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-106
2.132	Cakupan balita pnemonia yang ditangani Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-107
2.133	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC dan BTA Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-107
2.134	Tingkat prevalensi Tuberkulosis Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-108
2.135	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-108
2.136	Proporsi kasus tuberculosi yg terdeteksi dl program DOTS Tahun 2013-207 Kabupaten Sinjai	II-108
2.137	Proporsi kasus tuberculosi yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-109
2.138	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-109
2.139	Angka Kejadian Malaria Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-109
2.140	Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-110
2.141	Proporsi Anak Balita yg Tidur dgn Kelambu Berinsektisida Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-110
2.142	Pravlensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-110
2.143	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yg Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-111
2.144	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-111
2.145	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-112
2.146	Cakupan Puskesmas Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-112
2.147	Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-112
2.148	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-113
2.149	Cakupan pelayanan Nifas Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-113
2.150	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani kabupaten Sinjai	II-113
2.151	Cakupan pelayanan anak balita Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-114
2.152	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-114
2.153	Cakupan penjaingan kesehatan Siswa SD dan setingkat Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-114
2.154	Cakupan pelayanan pasien miskin di sarkes strata 1 Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-115
2.155	Cakupan Desa/KEL. Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-115
2.156	Proporsi jalan dalam kondisi baik Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-115
2.157	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-116

TABEL	URAIAN	HAL
2.158	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-116
2.159	Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-116
2.160	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-117
2.161	Persentase drainase dalam kondisis baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-117
2.162	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-117
2.163	Persentase irigasi Kabupaten Sinjai dalam kondisi baik Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-118
2.164	Rasio jaringan irigasi kabupaten Sinjai tahun 2013-2017	II-118
2.165	Persentase penduduk berakses air minum Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-119
2.166	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-119
2.167	Persentase rumah areal kawasan kumuh Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-119
2.168	Rasio tempat pekuburan umum persatuan penduduk Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-120
2.169	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-120
2.170	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-120
2.171	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-121
2.172	Rasio bangunan ber IMB Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-121
2.173	Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-122
2.174	Rasio rumah layak huni Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-122
2.175	Rasio pemukiman layak huni Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-123
2.176	Cakupan ketersediaan Rumah layak huni Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-123
2.177	Persentase pemukiman yang tertata Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-124
2.178	Persentase Lingkungan permukiman kumuh Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-124
2.179	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-125
2.180	Proporsi Rumah tangga kumuh perkotaan Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-126
2.181	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-126
2.182	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-127
2.183	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-128
2.184	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajmen kebakaran (WMK) Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-128
2.185	Persentase penegakan PERDA tahun Tahun 2013-2017 kabupaten	II-128

TABEL	URAIAN	HAL
	Sinjai	
2.186	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-129
2.187	Persentase PMKS yang tertangani Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-129
2.188	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-130
2.189	Persentase panti social yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-130
2.190	Persentase panti social yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-131
2.191	Persentase wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-131
2.192	Besaran pencari kerja yg terdaftar yg ditempatkan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-132
2.193	Besaran pekerjaan / buruh yg menjadi peserta program Jamsostek Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-132
2.194	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelathan Berbasis Komptensi Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-133
2.195	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-133
2.196	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-134
2.197	Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Tahun 203-2017 Kabupaten Sinjai	II-134
2.198	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-135
2.199	Proporsi kursi yg diduduki perempuan di DPR Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-135
2.200	Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2013-2017 kabupaten sinjai	II-136
2.201	Rasio KDRT tahun 2013-2017 kabupaten sinjai	II-136
2.202	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2013-2017 kabupaten sinjai	II-136
2.203	Partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-137
2.204	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2013-2017 kabupaten sinjai	II-137
2.205	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit tahun 2013-2017 kabupaten sinjai	II-138
2.206	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2013-2017 kabupaten sinjai	II-138
2.207	Cakupan penegakan hukum dr tingkat penyidikan sampai dgn putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-139

TABEL	URAIAN	HAL
2.208	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan bantuan hukum Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-139
2.209	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-140
2.210	Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-140
2.211	Rasio APM perempuan / laki-laki di SD Tahun 2013-2017 kabupaten sinjai	II-141
2.212	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-141
2.213	Rasio APM perempuan / laki-laki di SMA Tahun 2013-2017 kabupaten sinjai	II-142
2.214	Rasio APM perempuan / laki-laki di perguruan tinggi tahun 2013 - 2017 kabupaten sinjai	II-142
2.215	Rasio Angka Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pd kelompok usia 15-24 tahunan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-143
2.216	Prosentase Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-143
2.217	Ketersediaan pangan utama Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-143
2.218	Ketersediaan energi dan protein per kapita Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-144
2.219	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-144
2.220	Persentase luas lahan bersertifikat Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-145
2.221	Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-145
2.222	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-146
2.223	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-146
2.224	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-146
2.225	Hasil pengukuran Indeks kualitas air Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-147
2.226	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-147
2.227	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-148
2.228	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH, PUU yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-149
2.229	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-149
2.230	Timbulan sampah yg ditangani Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-150
2.231	Persentase jumlah sampah yg berkurang melalui 3R Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-150
2.232	Persentase cakupan area pelayanan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-151
2.233	Persentase jumlah sampah yg tertangani Kabupaten Sinjai	II-151
2.234	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten Kabupaten Sinjai	II-152

TABEL	URAIAN	HAL
2.235	Rasio penduduk ber KTP per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-152
2.236	Rasio bayi berakte kelahiran Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-153
2.237	Rasio pasangan berakte nikah Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-153
2.238	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-154
2.239	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Sinjai	II-154
2.240	Cakupan penertiban kartu tanda penduduk (KTP) Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-155
2.241	Cakupan penertiban akte kelahiran Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-155
2.242	Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Tahun 2013-2017 kabupaten Sinjai	II-156
2.243	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kabupaten Sinjai	II-156
2.244	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-157
2.245	Persentase LSM aktif Tahun 2013-2017 Di Kabupaten Sinjai	II-157
2.246	Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Sinjai	II-157
2.247	PKK Aktif Sinjai Tahun 2013-2017	II-158
2.248	Persentase posyandu aktif kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-158
2.249	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-159
2.250	Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2013-2017	II-159
2.251	Persentase Perangkat Daerah yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-159
2.252	Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-160
2.253	Rasio Akseptor KB Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-160
2.254	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 – 49 tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-160
2.255	Angka Kelahiran remaja (Perempuan usia 15 – 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-161
2.256	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yg istrinya di bawah 20 Tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-161
2.257	Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-162
2.258	Persentase menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-162
2.259	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-162
2.260	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-163
2.261	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-163
2.262	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber – KB Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-164

TABEL	URAIAN	HAL
2.263	Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-164
2.264	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kanseling remaja/mahasiswa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-164
2.265	Cakupan PKB/PLKB yg di dayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-165
2.266	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber -KB mandiri Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-165
2.267	Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-166
2.268	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-166
2.269	Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yg bekerjasama dgn BPJS dan memberikan pelayanan KBKR Sesuai dgn standarnisasi pelayanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-167
2.270	Persentase remaja yg terkena inflesi menular seksual (IMS) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-167
2.271	Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-167
2.272	Cakupan keluarga yg mempunyai balita dan anak yg memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-168
2.273	Rata-rata usia kawin pertama wanita Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-168
2.274	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD & APBDesa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-168
2.275	Jumlah arus penumpang Angkutan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-169
2.276	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-169
2.277	Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-170
2.278	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-171
2.279	Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-171
2.280	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-172
2.281	Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-173
2.282	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-173
2.283	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun Kabupaten Sinjai tahun 2015-2017	II-174
2.284	Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	II-175
2.285	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-175

TABEL	URAIAN	HAL
2.286	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-176
2.287	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-176
2.288	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017	II-177
2.289	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-177
2.290	Persentase UKM non BPR/LKM aktif Kabupaten Sinjai	II-178
2.291	Persentase BPR/LKM aktif Kabupaten Sinjai	II-178
2.292	Persentase Usaha Mikro dan kecil Kabupaten Sinjai	II-178
2.293	Jumlah Investor berkala nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Sinjai	II-179
2.294	Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (PMDN / PMA)Kabupaten Sinjai	II-179
2.295	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai	II-180
2.296	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Sinjai	II-180
2.297	Persentase organisasi pemuda yg aktif Kabupaten Sinjai	II-181
2.298	Persentase wirausaha muda Kabupaten Sinjai	II-181
2.299	Cakupan pembinaan olahraga Kabupaten Sinjai	II-181
2.300	Cakupan pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Sinjai	II-182
2.301	Cakupan pembinaan atlet muda Kabupaten Sinjai	II-182
2.302	Jumlah atlet berprestasi Kabupaten Sinjai	II-182
2.303	Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Sinjai	II-183
2.304	Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi Kabupaten Sinjai	II-183
2.305	Buku “ Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Sinjai	II-183
2.306	Buku PDRB Kabupaten Sinjai	II-184
2.307	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai	II-184
2.308	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Sinjai	II-184
2.309	Benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan Kabupaten Sinjai	II-185
2.310	Jumlah karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi Kabupaten Sinjai	II-185
2.311	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Kabupaten Sinjai	II-185
2.312	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Kabupaten Sinjai	II-186
2.313	Koleksi buku yg tersedia di dalam perpustakaan daerahKabupaten Sinjai	II-186
2.314	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Kabupaten Sinjai	II-186
2.315	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /Tahun Kabupaten Sinjai	II-187
2.316	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Kabupaten Sinjai	II-187
2.317	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku Kabupaten Sinjai	II-188
2.318	Peningkatan SDM pegelola kearsipan Kabupaten Sinjai	II-188
2.319	Kunjungan wisata Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-188
2.320	Lama kunjungan wisata Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-189
2.321	Kontribusi sector pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sinjai	II-189
2.322	Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap Kabupaten Sinjai	II-190
2.323	Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	II-190

TABEL	URAIAN	HAL
	Kabupaten Sinjai	
2.324	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Sinjai	II-191
2.325	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Sinjai	II-191
2.326	Cakupan bina kelompok petani Kabupaten Sinjai	II-192
2.327	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	II-192
2.328	Kerusakan Kawasan Hutan	II-193
2.329	Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Sinjai	II-193
2.330	Rasio ketersediaan daya listrik Kabupaten Sinjai	II-193
2.331	Cakupan Bina Usaha Informal / Pedagang Kabupaten Sinjai	II-193
2.332	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab. Sinjai	II-194
2.333	Produksi perikanan 2013-2017 Kab. Sinjai Tahun	II-194
2.334	Konsumsi Ikan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-195
2.335	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai	II-195
2.336	Produksi perikanan kelompok nelayan Kab. Sinjai Tahun 2013-2017	II-196
2.337	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Sinjai Tahun 2013-2017	II-196
2.337	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Sinjai Tahun 2013-2017	II-197
2.338	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kab. Sinjai Tahun 2013-2017	II-197
2.339	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Sinjai Tahun 2013-2017	II-197
2.340	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-198
2.341	Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-198
2.342	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Kab. Sinjai Tahun 2013-2017	II-198
2.343	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kab. Sinjai Tahun 2013-2017	II-199
2.344	Persentase SILPA Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-199
2.345	Persentase SILPA terhadap APBD Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-200
2.347	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-200
2.348	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-200
2.349	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-201
2.350	Bagi hasil Kabupaten / Kota dan Desa Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-201
2.351	Bagi hasil Kabupaten & Desa Kab. Sinjai Tahun 2013-2017	II-201
2.352	Penetapan APBD Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-202
2.353	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-202
2.354	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-203
2.355	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-203
2.356	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-203
2.357	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-204

TABEL	URAIAN	HAL
2.358	Persentase Implementaasi Rencana Kelitbangan Tahun 2014-2017 Kab. Sinjai	II-204
2.359	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2104-2017 Kab. Sinjai	II-205
2.360	Persentase perangkat daerah yg di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Tahun 2104-2017 Kab. Sinjai	II-205
2.361	Persentase Kebijakan Inovasi yg Diterapkan di Daerah Tahun 2014-2017 Kab. Sinjai	II-206
2.362	Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai	II-206
2.363	Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai	II-207
2.364	Jumlah Temuan BPK Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai	II-207
2.365	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai	II-207
2.366	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi RPJM dan RKPD Kabupaten Sinjai	II-208
2.367	Terintegritas program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Setwan DPRD Kabupaten Sinjai	II-208
2.368	Cakupan Koordinasi Penyusunan Pelaksanaan & Evaluasi Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai	II-209
2.369	Pendidikan Dasar Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-210
2.370	Pendidikan Kesetaraan Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-231
2.371	Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-231
2.372	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-231
2.373	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-232
2.374	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-232
2.375	Pelayanan Kesehatan Balita Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-232
2.376	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-233
2.377	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-233
2.378	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-233
2.379	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-234
2.380	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-234
2.381	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-234
2.382	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-234
2.383	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-235
2.384	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-235
2.385	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-235

TABEL	URAIAN	HAL
2.386	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-235
2.387	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-236
2.388	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-236
2.389	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-237
2.390	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-237
2.391	Pelayanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-237
2.392	Pelayanan Penyelamatan dan evaluasi Bencana Kebakaran Kabupaten Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai	II-238
2.393	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-238
2.394	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-238
2.395	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-239
2.396	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-239
2.397	Perlindungan & Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-239
2.398	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-240
3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sinjai tahun 2014 - 2018	III-6
3.2	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tahun 2014-2018	III-10
3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2015-2017	III-12
3.4	Perkembangan Rasio Likuiditas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015-2017	III-14
3.5	Perkembangan Rasio Solvabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015-2017	III-16
3.6	Perkembangan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015-2017	III-17
3.7	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sinjai	III-19
3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2018	III-20
3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2018	III-21
3.10	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2018	III-22
3.11	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2018	III-23
3.12	Komposisi Penutup Defisi Riil Anggaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2018	III-24
3.13	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sinjai Tahun 2015-2017	III-25

TABEL	URAIAN	HAL
3.14	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sinjai	III-26
3.15	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 (Rupiah)	III-29
3.16	Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Sinjai	III-41
3.17	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 (Rupiah)	III-42
3.18	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 (Rupiah)	III-43
4.1	Identifikasi Isu Strategis	IV-20
4.2	Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	IV-23
5.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	V-1
5.2	Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	V-2
5.3	Visi Misi Tujuan dan Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	V-6
6.1	Strategi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	VI-1
6.2	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	VI-5
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-11
6.4	Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sinjai 2018-2023	VI-46
7.1	Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2019-2023	VII-2
7.2	Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Sinjai Tahun	VII-4
7.3	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	VII-4
7.4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sinjai	VII-6
7.5	Indikasi Program Prioritas Kabupaten Sinjai dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	VII-46
8.1	Tabel Penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Sinjai 2018-2023	VIII-1
8.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sinjai 2018-2023	VIII-4
8.3	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	VIII-43
8.4	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	VIII-48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan selama masa periode Bupati/Wakil Bupati Sinjai Periode 2018-2023.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang. Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Sinjai juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Sinjai. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi lingkungan strategis di

daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Andi Seto Gadhista Asapa, SH,LLM sebagai **Bupati Sinjai** dan **Hj. Andi Kartini Ottong, SP** sebagai **Wakil Bupati Sinjai** pada tanggal 26 September 2018, dilantik berdasarkan peraturan per undang – undangan maka Pemerintah kabupaten sinjai menyusun RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 yang disusun merupakan dokumen yang sangat penting untuk setiap kepala daerah, karena akan menjadi alat mewujudkan visi misi dan semua program yang telah dijanjikan saat pencalonan dahulu Provinsi Sulawesi Selatan.

Seluruh isi dari dokumen RPJMD agar kiranya mampu menjawab semua permasalahan dan isu strategis yang kita hadapi di Sinjai, utamanya yang menjadi fokus sesuai visi misi untuk lima tahun ke depan yaitu, penanggulangan kemiskinan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, air minum dan sanitasi, pertanian dan perikanan, perbaikan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Olehnya itu setiap tahapan penyusunan RPJMD berjalan dengan seoptimal mungkin agar dapat menjadi pegangan bersama untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama; Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye kedalam RPJMD.

Kedua, pendekatan teknokratis. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Keempat, pendekatan *top down* dan *bottom up* lanjut, bahwanya dokumen ini juga telah mempertimbangkan rencana lima tahun melalui keselarasan dan sinkronisasi antara kebijakan dan perencanaan tingkat Kabupaten termasuk didalamnya tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan *idiil* dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6133);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
22. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 189i);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154i);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154i);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
38. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan daerah; Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

40. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
41. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
44. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 96);
45. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi kawasan Perkotaan Tahun 2018 - 2038, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 119);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan 5 tahun kedepan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD. Rancangan RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW, memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Rancangan RPJMD menjadi

pedoman OPD dalam menyusun rancangan renstra OPD. Selanjutnya rancangan renstra OPD menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra OPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan antar Dokumen tersebut dilihat sebagai berikut untuk itu keterkaitan dokumen perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah Nasional yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah dapat dilaksanakan di Kabupaten Sinjai menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 Sinkronisasi/keterkaitan pada rancangan pembangunan yang terstratifikasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah agar tercapai efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional yang juga menjadi sasaran pembangunan daerah. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan di Propinsi dengan pembangunan di Kabupaten Sinjai, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan serta prioritas pembangunan.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tetangga.

Dalam perumusan berbagai kebijakan yang menyangkut kewilayahan maupun sebagai daerah yang memiliki keterikatan dengan wilayah lain, maka perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 akan diselaraskan dengan beberapa perencanaan pembangunan sekitarnya. Kebijakan pembangunan wilayah sekitar yang menjadi bahan untuk rumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Sinjai adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-

2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan tahapan 20 (dua puluh) tahun menjadi acuan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018.

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

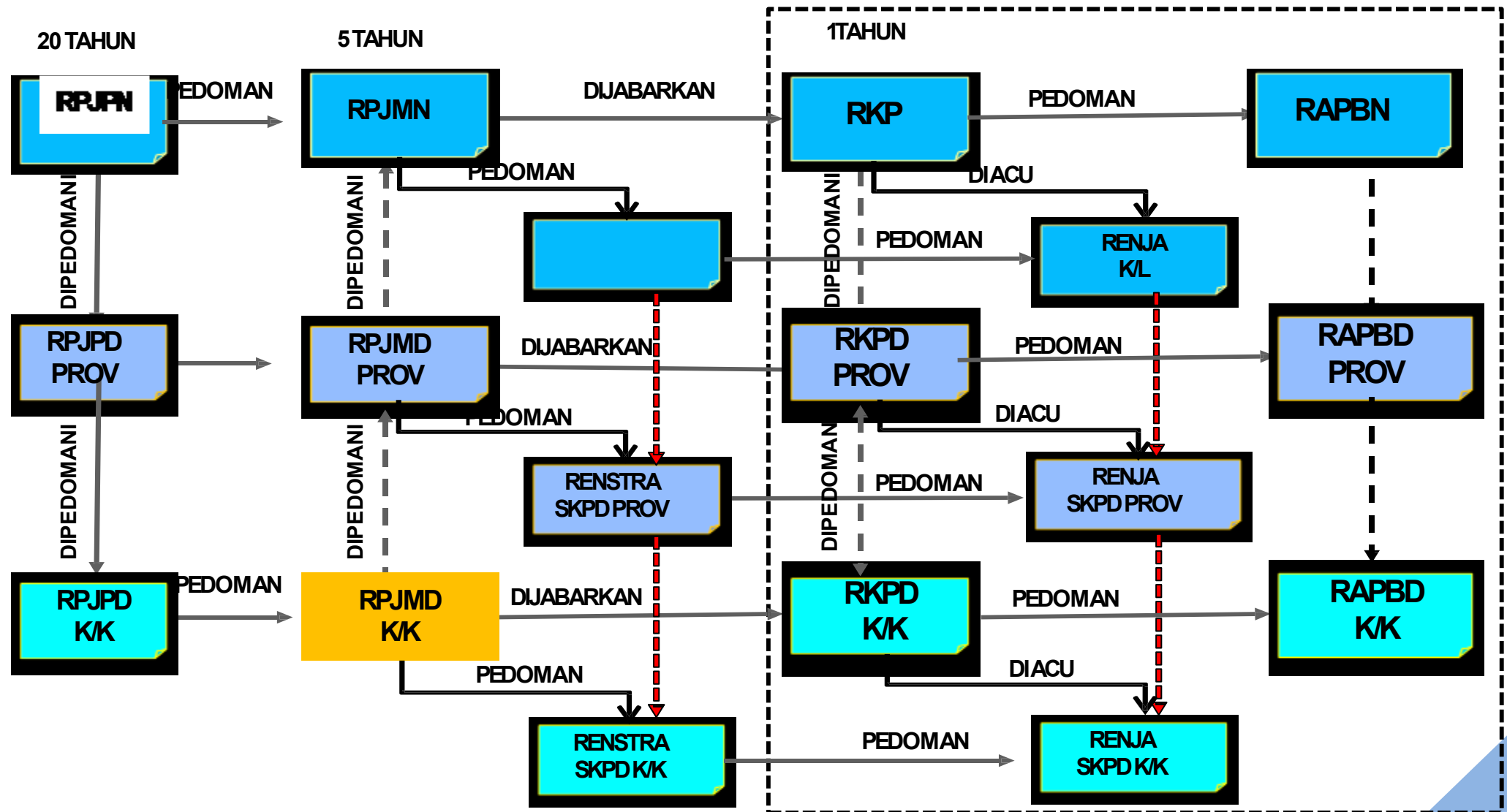
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penjabaran dari Visi, Misi dan Arah Kebijakan pembangunan Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2028

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2028 menjadi salah satu acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 terutama dalam implikasi kebijakan dan program pembangunan ke dalam konteks ruang dan wilayah.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sinjai dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sinjai Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

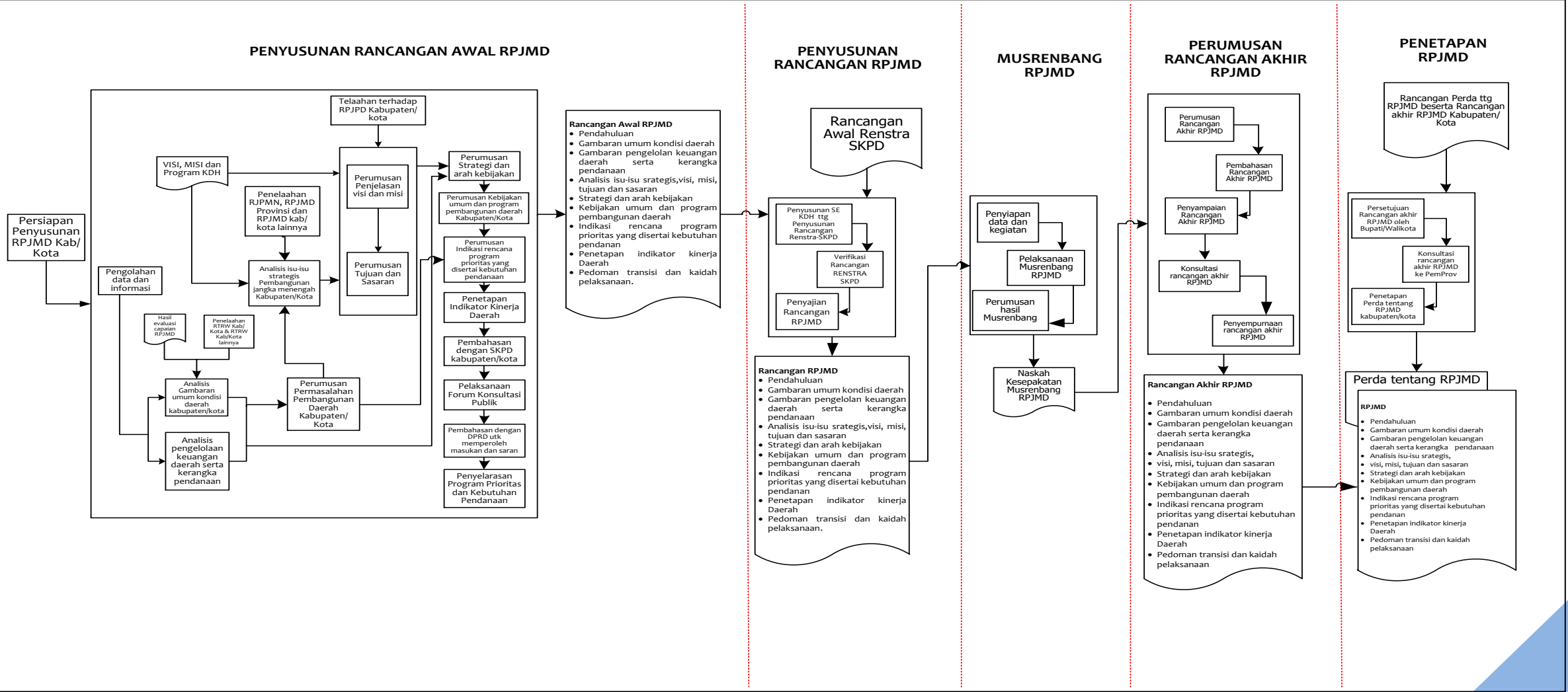


Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini memuat Visi, Misi, Strategi dan Prioritas Program Pembangunan yang dalam penyusunannya dilakukan secara partisipatif, teknokratis dan politis dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD ini juga menjadi pedoman penyusunan RKPD yang mengacu pada RKP Nasional yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan rencana pendanaan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Sehingga RPJMD menjadi dokumen perencanaan bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

Tahapan-tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, mengacu pada Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023



1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, dimana RPJMD juga sebagai dokumen perencanaan manajerial strategis daerah untuk periode lima tahun yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sinjai, bersifat adaptif, fleksibel, dan mampu mengakomodir penyesuaian atas perkembangan yang muncul serta dapat memanfaatkan peluang yang ada, menggambarkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang merupakan indikator keberhasilan setiap organisasi pemerintah. Oleh karena itu, pola pelayanan yang perlu dibangun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan sebagai dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai yang merupakan penjabaran dari kehendak, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang secara resmi memperoleh kekuatan hukum serta mengikat seluruh komponen masyarakat melalui pengesahaan DPRD.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Disamping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Oleh karena itu, isi dan substansi RPJMD mencakup indikasi rencana program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Sinjai, dalam upaya menetapkan prioritas program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dan mekanisme monitoring serta evaluasi pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah;

- b. Merupakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Sinjai, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBN;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi daerah;
- d. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- f. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas dan terukur.

1.5 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN, memuat latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan yang berisikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya, hubungan antar dokumen yang memuat Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya , maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai, dan sistematika penulisan. Adapun susunan sub bab pada bab pertama RPJMD ini adalah : latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH, memuat kondisi geografis dan demografi, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana daerah dan pemerintah umum yang menggambarkan kinerja pembangunan daerah dan kondisi

eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJMD selama kurun waktu 5 tahun terakhir (kondisi 2018-2028); yang dirangkum dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Juga pada bab ini memuat berbagai tinjauan kebijakan pembangunan dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Menjelaskan sinergisitas antar dokumen perencanaan, baik RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD Kabupaten Sinjai, RTRW Kabupaten Sinjai dalam kaitannya dengan RPJMD Kabupaten Sinjai saat ini. Adapun urutan sub bab pada bab kedua RPJMD ini sebagai berikut; aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH adalah bab yang menjelaskan arah pengelolaan pendapatan daerah dan arah pengelolaan belanja daerah serta kebijakan keuangan daerah; yang merangkum kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan selanjutnya. Pada bab ketiga ini, sub bab terdiri dari ; kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Menjelaskan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Menjelaskan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan dan urusan pemerintahan yang merujuk identifikasi masalah. Juga pada bab ini mengkaji isu strategis yang dihadapi baik saat ini dan dimasa yang akan datang, juga memahami isu strategis yang dihadapi nasional dan provinsi dalam kaitan dengan Visi dan Misi daerah serta faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan selama 5 (Lima) tahun ke depan; bab ini juga menjelaskan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu lima tahun ke depan serta tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan. Adapaun sub bab pada bab keempat RPJMD ini sebagai berikut : permasalahan pembangunan, isu strategis.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN yang menjelaskan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu lima tahun ke depan serta Tujuan dan Sasaran setiap Misi pembangunan. Susunan sub bab pada bab kelima ini : visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB VI: STRATEGI , ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH. Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan;

BAB IX : PENUTUP , Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak Geografis dan Administrasi

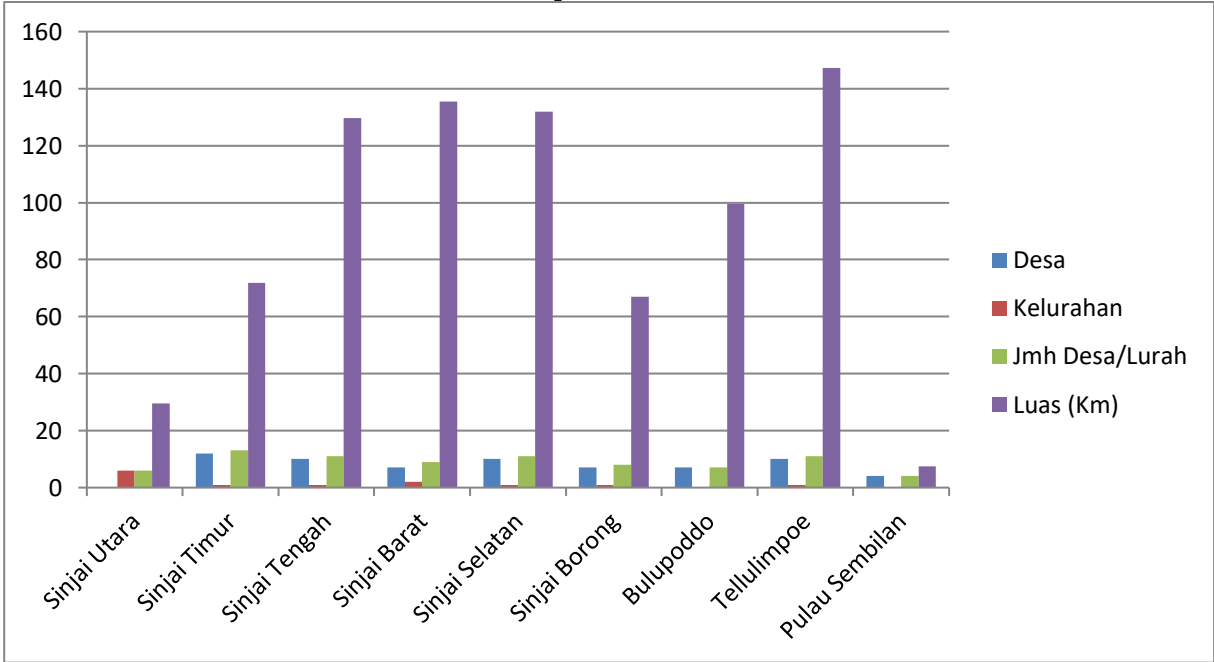
Secara geografis, Kabupaten Sinjai berada di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya terletak diantara 5°2'56"-5°21'16" Lintang Selatan (LS) dan antara 119°56'30" - 120°25'33" Bujur Timur (BT). Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah 798,96 km² (79.896 Ha), dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Jarak antara Kabupaten Sinjai dengan Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari 3 (tiga) jarak tempuh Sinjai ke Makassar, yaitu 233 Km melalui jalur selatan (Sinjai-Bantaeng-Makassar), 164 Km melalui jalur barat (Sinjai-Malino-Makassar), dan 186 km melalui jalur utara (Sinjai-Maros-Makassar).

Secara administratif, Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 Kecamatan, 67 Desa, 13 Kelurahan dan 321 Dusun/Lingkungan, dimana ibukota Kabupaten berada di Kecamatan Sinjai Utara. Adapun rincian jumlah kecamatan, kelurahan/desa, dan luas wilayah masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah
Setiap Kecamatan



No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas(km²)
1	Sinjai Utara	-	6	6	29,57
2	Sinjai Timur	12	1	13	71,88
3	Sinjai Tengah	10	1	11	129,70
4	Sinjai Barat	7	2	9	135,53
5	Sinjai Selatan	10	1	11	131,99
6	Sinjai Borong	7	1	8	56,97
7	Bulupoddo	7	-	7	99,47
8	Tellulimpoe	10	1	11	136,30
9	Pulau Sembilan	4	-	4	7,55
Jumlah		67	13	80	798,96

Sumber: Sinjai Dalam Angka 2018

Tabel 2.2
Jumlah Dusun/Lingkungan Kabupaten Sinjai

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Lingkungan	Jumlah Dusun
1	Sinjai Utara	Lamatti rilau	4	-
		Alehanuae	4	-
		Lappa	7	-
		Balangnipa	5	-
		Bongki	4	-
		Biringere	5	-
	JUMLAH		29	-
2	Sinjai Timur	Samataring	5	-
		Sanjai	-	3
		Pattalassang	-	4

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Lingkungan	Jumlah Dusun
		Panaikang	-	3
		Saukang	-	4
		Kampala	-	3
		Lasiai	-	5
		Biroro	-	3
		Kaloling	-	3
		Pasimarannu	-	3
		Tongke-Tongke	-	5
		Bongki Lengcese	-	3
		Salohe	-	3
JUMLAH		5	42	
3	Sinjai Tengah	Samaenre	4	-
		Mattunreng Tellue	-	7
		Kompang	-	3
		Baru	-	4
		Pattongko	-	4
		Saotengnga	-	4
		Saohiring	-	5
		Kanrung	-	6
		Saotanre	-	4
		Bonto	-	3
		Gantarang	-	3
		JUMLAH		4
4	Sinjai Selatan	Sangiaseri	5	-
		Puncak	-	6
		Songing	-	4
		Aska	-	5
		Talle	-	6
		Palae	-	4
		Bulu Kamase	-	6
		Palangka	-	5
		Polewali	-	5
		Alenangka	-	4
		Gareccing	-	3
		JUMLAH		5
5	Sinjai Barat	Balakia	4	-
		Tassililu	4	-
		Gunung Perak	-	6
		Arabika	-	3
		Bonto Salama	-	5
		Turungan Baji	-	5
		Barania	-	3
		Bonto Lempangan	-	4

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Lingkungan	Jumlah Dusun
		Terasa	-	8
	JUMLAH		8	34
6	Sinjai Borong	Pasir Putih	3	-
		Batu Belerang	-	4
		Biji Nangka	-	3
		Barambang	-	4
		Bonto Sinala	-	3
		Kassi Buleng	-	4
		Bonto Katute	-	4
		Bonto Tengnga	-	4
	JUMLAH		3	26
7	Bulupoddo	Lamatti Riattang	-	4
		Lamatti Riaja	-	5
		Bulu Tellue	-	6
		Duampanuae	-	7
		Tompobulu	-	7
		Lamatti Riawang	-	4
		Lappa Cinrana	-	2
JUMLAH		-	36	
8	Tellulimpoe	Mannanti	6	-
		Saotengah	-	4
		Kalobba	-	5
		Tellu Limpoe	-	5
		Massaile	-	4
		Lembang Lohe	-	4
		Pattongko	-	5
		Bua	-	5
		Suka Maju	-	4
		Era Baru	-	4
	Samaturue	-	4	
JUMLAH		6	44	
9	Pulau Sembilan	Pulau Buhung Pitue	-	3
		Pulau Harapan	-	4
		Pulau Padaelo	-	3
		Pulau Persatuan	-	3
	JUMLAH		-	13
Jumlah			60	261

Sumber : Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2018

2. Kondisi Topografi

Bila dilihat dari segi topografi, karakteristik wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu terdiri dari daerah laut atau pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi.

Sekitar 38,26 % atau seluas 31.370 ha merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan 0-15 %. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan diatas 40 %, diperkirakan seluas 25.625 Ha atau 31,25 %.

Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (dpl), wilayah Kabupaten Sinjai terbagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi ketinggian, dengan rincian luasan sebagai berikut :

- Area ketinggian 0-25 m dpl, seluas 45,41 km²;
- Area ketinggian 25–100 m dpl, seluas 79,83 km²;
- Area ketinggian 100–500 m dpl, seluas 455,35 km²;
- Area ketinggian 500–1.000 m dpl, seluas 173,68 km²;
- Area ketinggian >1.000 m dpl, seluas 65,69km².

Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian, di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut, maka pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas.

Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, kecamatan yang memiliki wilayah dataran yang cukup luas adalah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Pulau Sembilan. Dataran yang memiliki sumber daya air yang cukup dimanfaatkan masyarakat sebagai areal persawahan. Ketinggian dari permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai, bervariasi dari 0–1.000 meter dpl. Untuk lebih jelasnya, kondisi ketinggian diatas permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Ketinggian Diatas Permukaan Laut di Kabupaten Sinjai

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSEN (%)
1	Sinjai Barat	<25 Meter	-	-
		25-100 Meter	-	-
		100-500 Meter	1.885	13,91
		500-1000 Meter	6.747	49,78
		>1000	4,921	36,31
LUAS KECAMATAN SINJAI BARAT			13.553	100,00
2	Sinjai Borong	<25 Meter	-	-
		25-100 Meter	-	-
		100-500 Meter	69	4,19
		500-1000 Meter	3.980	69,86
		>1000	1.648	28,93
LUAS KECAMATAN SINJAI BORONG			5.697	100,00

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSEN (%)
3	Sinjai Selatan	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	81 206 12.256 656 -	0,61 1,56 96,86 4,97 -
LUAS KECAMATAN SINJAI SELATAN			13.199	100,00
4	Tellu Limpoe	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	288 2.254 11.088 - -	2,11 16,54 81,35 - -
LUAS KECAMATAN TELLU LIMPOE			13.630	100,00
5	Sinjai Timur	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	1.974 1.379 3.835 - -	27,46 19,18 53,35 - -
LUAS KECAMATAN SINJAI TIMUR			7.188	100,00
6	Sinjai Tengah	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	- - 9.554 3.416 -	- - 73,66 26,34 -
LUAS KECAMATAN SINJAI TENGAH			12.970	100,00
7	Sinjai Utara	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	1.443 1.452 62 - -	48,80 49,10 2,10 - -
LUAS KECAMATAN SINJAI UTARA			2.957	100,00
8	Bulupoddo	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	- 2.592 5.786 1.569 -	- 26,06 66,32 15,77 -
LUAS KECAMATAN BULUPODDO			9.947	100,00
9	Pulau Sembilan	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	755 - - - -	100 - - - -
LUAS KECAMATAN PULAU SEMBILAN			755	100,00

Sumber : Sinjai Dalam Angka, Tahun 2018

3. Kondisi Geologi

Secara umum keadaan geologi atau jenis batuan merupakan gambaran proses dan waktu pembentukan bahan induk serta penampakan morfologis tanah, seperti tebing, kaldera gunung dan sebagainya. Persebaran jenis batuan di Kabupaten Sinjai terbagi dalam 5 (lima) kelompok atau golongan yaitu : batuan vulkanik/beku, batuan endapan, batuan mikan atau metamorf, batuan alluvial dan batuan organik.

Sepsifikasi jenis batuan di Kabuoaten Sinjai merupakan batuan yang termuda berumur Plesistosen dan tersusun batuan induk, lava, breksi, endapan lahar dan tufa, diatas menindih tidak selaras endapan alluvial yang berupa pasir kerikil, lempung dna lahar yang umumnya masih terlepas. Di kawasan pantai umumnya terdapat hamparan pasir laut yang cukup tebal dengan struktur tanah keras berada di kedalaman 1,5-2 meter dari permukaan lapisan pasir atau tanah.

4. Kondisi Hidrologi

Ada 2 (dua) jenis kategori hidrologi yang melingkupi wilayah Kabupaten Sinjai, yaitu 1} jenis air permukaan 2} jenis air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kedua jenis air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (*run-off*) dan sebagian lagi meresap kedalam tanah.

- Untuk jenis air permukaan, beberapa diantaranya adalah sungai-sungai yang mengalir melalui wilayah ini, diantaranya Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Kalamisu, Sungai Bua, Sungai Lolisang, Sungai Balantieng serta beberapa sungai kecil lainnya, yang sebagian besar bermuara ke Teluk Bone.
- Berdasarkan penelitian, potensi sumber air permukaan (1998) sebesar 15.137.280 ribu m3 atau debit sekitar 3,12 m3 / detik dan sebagian besar potensi air tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Mengenai air tanah dangkal dengan kedalaman sekitar 6 meter berupa sumur gali banyak mengandung kapur dan air tanah dalam dengan kedalaman 75–100 meter berupa sumur bor, banyak dimanfaatkan penduduk untuk keperluannya.

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan beberapa sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada dalam wilayah Kabupaten Sinjai:

Tabel 2.4
Beberapa Sungai Besar yang Ada Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai

NO .	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)	LEBAR (M)	(DEBIT M ³ /DETIK)	
				Maks.	Min.
1	Tangka	72,00	90	25,00	10,00
2	Mangottong	47,00	55	25,00	8,00
3	Kalamisu	57,00	40	30,00	11,00
4	Bua	81,45	30	10,20	3,53

NO .	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)	LEBAR (M)	(DEBIT M ³ /DETIK)	
				Maks.	Min.
5	Lolisang	29,40	25	10,00	4,50
6	Balangtieng	20,00	15	7,50	2,41

Sumber: Sinjai Dalam Angka Tahun 2018

5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Sinjai merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan pada periode April-Oktober dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober-April. Dari keseluruhan tipe iklim yang ada tersebut, Kabupaten Sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2.000–4.000 mm/tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100–160 hari hujan/tahun. Kelembaban udara rata-rata tercatat berkisar antara 64–87 persen, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21,2°C-32,4°C.

Selain itu ada 3 (tiga) tipe iklim menurut *Schmidt & Fergusson* yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini, yaitu iklim tipe B2, C2, D2 & tipe D3.

- Area/zona dengan iklim tipe B2 dimana bulan basah berlangsung selama 7-9 bulan berturut-turut, sedangkan bulan kering berlangsung 2–4 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Sinjai Selatan.
- Zona dengan iklim tipe C2, dicirikan dengan adanya bulan basah yang berlangsung antara 5–6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3–5 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Selatan dan Sinjai Tengah.
- Zona dengan iklim tipe D2, mengalami bulan basah selama 3–4 bulan, & bulan keringnya berlangsung selama 2–3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bagian tengah Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Barat.
- Zona dengan iklim tipe D3, dicirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3–4 bulan, bulan kering berlangsung antara 3–5 bulan. Penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah dan Sinjai Selatan

6. Penggunaan Lahan

Luas Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah 798,96 km² (79,896 Ha), Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas Kabupaten Sinjai secara resmi.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yaitu kawasan yang dilihat dari kondisi fisik potensi sumber daya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan pembangunan kawasan budidaya terdiri atas :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih. kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Sinjai mencapai 7.193 Ha.

Sebaran luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Sinjai, terdapat pada 4 (empat) wilayah kecamatan, Yang memiliki sebaran terbesar berlokasi di Kecamatan Sinjai Barat, dengan luas 3.548 Ha. Sedangkan sebaran luas hutan produksi terbatas terkecil berlokasi di Kecamatan Sinjai Selatan, dengan luas 281 Ha.

- b. Sebaran yang dikonversi

Kawasan hutan produksi konversi di Kabupaten Sinjai, berupa kawasan hutan bakau yang meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Utara, dengan luas total 1.524,87 Ha.

- c. Hutan Raya (Taman Hutan Raya)

Penetapan kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Sinjai, didasarkan pada SK. Menhut No. 434 Tahun 2009, seluas 724 Ha, ditetapkan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Hutan Raya Abdul Latief. Lokasi taman hutan raya yang ada di Kabupaten Sinjai berada di Kecamatan Sinjai Borong.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Potensi masing- masing sumberdaya yang ada satu sama lain tentunya sangat berbeda, yang disebabkan oleh ketersediaan sumberdaya yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sinjai. Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sinjai terbagi atas:

Jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Sinjai adalah padi, palawija, buah-buahan dan sayuran, dimana jenis tanaman pangan utama yang dikembangkan adalah padi. Tingkat perkembangan luas lahan, tingkat produksi dan tingkat produktivitas pada setiap tahunnya selalu berbeda. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kegagalan panen dan perubahan fungsi guna lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian khususnya fungsi urban guna memenuhi kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian. Luas Lahan persawahan di Kabupaten Sinjai seluas 13.539 Ha, sedangkan kawasan cadangan potesi pertanian tanaman pangan seluas 9.000 Ha, kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas 8.501 Ha. Berikut ini adalah luas lahan persawahan yang ada di Kabupaten Sinjai, dirinci tiap kecamatan.

Tabel 2.5
Luas Lahan Persawahan di Kabupaten Sinjai Dirinci
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Lahan Persawahan (HA)	Persentase (%)
1	Sinjai Barat	1.688,00	12,42
2	Sinjai Borong	733,00	5,39
3	Sinjai Selatan	3.353,00	24,67
4	Tellulimpoe	2.257,00	16,60
5	Sinjai Timur	2.355,00	17,33
6	Sinjai Tengah	1,568,00	11,54
7	Sinjai Utara	690,00	5,08
8	Bulupoddo	949,00	6,98
Total Luas		13,593,00	100

Sumber: RTRW Kab. Sinjai.

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 638/KPTS/Um/8/1981 kriteria fisik wilayah untuk penentuan lokasi tanaman tahunan adalah lokasi yang mempunyai skor atau nilai untuk faktor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujannya adalah 125-175.

Komoditi perkebunan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sinjai meliputi komoditi kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi cengkeh, lada, kakao, kapuk, vanili, pala, tembakau, karet, kayu manis, dan beberapa jenis komoditas perkebunan lainnya. Tanaman perkebunan pada dasarnya dapat dibedakan dalam tanaman semusim (Season Plant) dan tanaman tahunan (annual plant).

Dalam perkembangannya tanaman perkebunan menunjukkan gejala ke arah lebih baik. Untuk lebih jelasnya luas lahan perkebunan di Kabupaten Sinjai dirinci tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas Lahan Persawahan di Kabupaten Sinjai Dirinci
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Lahan Perkebunan (HA)	Persentase (%)
1	Sinjai Barat	6.155,00	9,45
2	Sinjai Borong	4,684,00	10,85
3	Sinjai Selatan	5.106,00	16,71
4	Tellulimpoe	7.977,00	27,09
5	Sinjai Timur	4.441,00	6,80
6	Sinjai Tengah	7.378,00	15,53
7	Sinjai Utara	2.006,00	1,44
8	Bulupoddo	4.555,00	12,00
9	Pulau IX	67,00	0,14
Total Luas		42.369,00	100

4. Kawasan Peruntukan Peternakan

Rencana pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Sinjai, Telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 392 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan Kabupaten Sinjai, akan tetapi disatukan dengan areal lahan perkebunan.

Model pengembangan seperti ini dimaksudkan untuk ketersediaan pakan dan areal penggembalaan ternak.

Potensi pembangunan sector peternakan di Kabupaten Sinjai sangat potensial khususnya pengembangan komoditi Sapi Potong, hal ini di dukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta lahan pengembangan yang cukup luas, disamping daya dukung pakan hijauan dan limbah pertanian yang melimpah.

Selain sapi potong, komoditi Unggulan yang dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai yaitu Ayam Kampung. Sejak Tahun 2013 silam Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, telah melakukan terobosan baru di Pernggasan yaitu pembibitan Ayam Kampung Unggul Indonesia yang merupakan kerjasama dengan PT. Aki Sukabumi, di Sinjai sendiri dikenal dengan Ayam Kampung Unggul Sinjai (AKUSI) dan telah di kembangkan serta disebarluaskan kepada masyarakat baik di Sinjai maupun di luar daerah Sinjai.

Sejalan dengan hal tersebut, produksi DOC Akusi yang berkualitas di sebarakan ke masyarakat baik secara komersial maupun berupa bantuan kepada keluarga miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Sinjai, meliputi :

- a. Kawasan sentra produksi unggulan Sapi Potong terdapat di kecamatan Sinjai Selatan, Tellulimpoe, Sinjai Borong juga memiliki kawasan penyangga yakni di Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Tengah dan Bulupoddo.
- b. Kawasan sentra produksi Sapi Perah terdapat di Kecamatan Sinjai Barat.
- c. Kawasan sentra produksi Kambing di kecamatan Bulupoddo, Tellulimpoe juga memiliki kawasan penyangga di Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Tengah.
- d. Kawasan sentra produksu Ayam Kampung tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sinjai, yaitu Kecamatan Sinjai tengah, Bulupoddo, Sinjai Utara, Sinjai Barat, Sinjai Timur, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellulimpoe dan Pulau Sembilan.

5. Kawasan Peruntukan Perikanan

- a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pulau IX, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Sinjai Utara, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Tellulimpoe dengan wilayah penangkapan mencakup kawasan perairan Teluk

Bone, Laut Flores, dan Selat Makassar berdasarkan cakupan batas wilayah kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari:
 - a. kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat;
 - b. kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 717 (tujuh ratus tujuh belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe;
 - c. kawasan budidaya perikanan air laut dengan luasan 187 (seratus delapan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.
 - c. Kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur.
 - d. Pelabuhan perikanan ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara, dan Pelabuhan Perikanan Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur.
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang akan dikembangkan di Kabupaten Sinjai adalah kawasan pertambangan yang telah mempunyai izin eksplorasi dan eksploitasi, bahan tambang yang akan direncanakan dan dapat di eksplorasi adalah tambang mineral dan non mineral.

Terdapat beberapa jenis bahan galian yang memiliki nilai strategis yang terdapat di Kabupaten Sinjai, seperti emas di Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo, pasir besi di Kecamatan Sinjai Timur telah dieksplorasi dan di Kecamatan Tellulimpoe, batu bara di Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Bulupoddo yang saat ini telah dilakukan eksplorasi, Mangan terdapat di Kecamatan Bulupoddo, Timah Hitam (*Galena*) terdapat di Kecamatan Sinjai Borong, telah dieksplorasi dan Sinjai Barat. Potensi tambang lainnya yang memiliki prospek pengembangan di Kabupaten Sinjai, meliputi andesit, trakit, basal, granodiorite, flint/jasperoid, lempung merah, pasir silica, sirtu sungai, batu apung kaolin, batu pasir halus/marmot, batu gamping.

7. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- a. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.
 - b. Kawasan peruntukan industri menengah merupakan kawasan industri pengolahan komoditas pertanian, hasil hutan dan perkebunan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara.
 - c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga berupa industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Beragam tujuan maupun obyek wisata dalam berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam darat maupun laut, budaya, sejarah, olahraga, konvensi dan belanja tersebar di kawasan pedesaan maupun perkotaan di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.

Objek wisata di Kabupaten Sinjai meliputi objek wisata bersejarah, wisata alam, wisata bahari. Adapun objek wisata dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
DATA DAYA TARIK WISATA (DTW) KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

A. DTW ALAM/ BAHARI

No	Nama DTW	Daya Tarik Utama	Jarak tempuh/waktu dari ibukota	Lokasi	Sudah Dikelola /Belum	Pengelola/No. Telp	Ket.
1.	Air terjun lembang saukang	- air terjun bertingkat - panorama alam yang indah - transportasi lancar - kawasan pengembangan buah-buahan dan perkebunan - keamanan terjamin	30 Km	Tellulimpoe	sudah	Disparbud Pemkab Sinjai	- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
2	Pantai Karampuang	- pasir putih - perbatasan sinjai-bulukumba - hutan kelapa - hutan nipa	20 Km	Tellulimpoe	Belum	-	- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
3.	Air Terjun Pincuni	Air terjun Hutan dan persawahan	45 Km	Sinjai Barat	Belum	-	- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
4.	Air Terjun Barania	Air terjun Hutan dan persawahan	30 Km	Sinjai Barat	Belum	-	- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
5	Kawasan wisata air panas Tondong	- Suhu TMP 55 C - Daerah Pebukitan - Diapit Sungai Besar	7 Km	Sinjai Timur	Sudah	Masyarakat Desa	- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
6.	Hutan Bakau Tongke-Tongke	- Sarana dan Prasarana Permanen Terdiri dari pedestrian setapak, shelter, gazebo	7 km	Sinjai Timur	Sudah	Disparbud Pemkab. Sinjai	- Akses Jalan Memadai - Sarana dan Prasarana Permanen

		<ul style="list-style-type: none"> - Flora dan Fauna Pantai - Keindahan Panorama Hutan Bakau - Pusat restorasi bakau - Keamanan Terjamin 					
7.	Air Panas Panggong/Kaloling	<ul style="list-style-type: none"> - Suhu TMP 34 C - Daerah Lembah 	10 Km	Sinjai Timur	Sudah	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
8.	Pantai Ujung Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Pesisir pantai dengan sebaran batu tebing yang kecil - Dikelilingi pebukitan dan tebing - Luas lahan pantai hingga 20 ha - Kawasan lahan persawahan 	13 km	Sinjai Timur	Belum		<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
9.	pantai marannu	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai dengan pesisir yang luas - Dikelilingi pohon kelapa dan bakau 	14 km	Sinjai Timur	Belum	-	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
10	bukit tiro lembang	disuguhkan panorama alam yang sangat indah berupa perbukitan yang dihiasi dengan pepohonan yang tampak menghijau, areal persawahan	7 km	Tellulimpoe	Sudah	Pemerintah Desa Batu Belerang	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
11	bukit baku bodo panaikang	Dari atas perbukitan kita bisa menikmati beberapa fasilitas seperti gazebo, tempat duduk dan rumah pohon untuk melihat hamparan pepohonan yang hijau di sekitar area perbukitan	7 km	Sinjai Timur	Sudah	Komunitas Pencinta Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
12	kawasan hubat	pengunjung bisa melewati jalan setapak yang terbuat dari kayu layaknya sebuah jembatan sambil menikmati hamparan hutan mangrove yang menghijau	15 Km	Sinjai Timur	Sudah	Dinas perikanan , Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen

						Pemkab Sinjai	
13	Kawasan Wisata Air Terjun Kembar Batua Barae	Air Terjun Kembar dengan ketinggian masing-masing lebih kurang 15 m Panorama pegunungan yang indah dan sejuk Bendungan Permandian	37 km	Sinjai Borong	Sudah	Disparbud Pemkab Sinjai	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
14. *	Taman Hutan Raya (TAHURA)	- Rimbunan Hutan dan Satwa serta - berbagai spesies lainnya - Transportasi Lancar - Keamanan Terjamin - Merupakan Event Tahunan - Pembudidayaan dan Penanaman - Bersama	40 km	Sinjai Barat	Sudah	Pemkab Sinjai	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen
15	bukit pattirotiroang di bonto tengnga	disuguhkan panorama alam yang sangat indah berupa perbukitan yang dihiasi dengan pepohonan yang tampak menghijau, areal persawahan	41 km	Sinjai Borong	Sudah	Pemerintah desa Bonto Tengnga	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen
16	Wisata Kuliner TPI Lappa	Tempat Pendaratan Ikan yang sangat ramai Panorama sangat menarik Sarana Pembakaran berbagai jenis ikan laut segar dan tradisional, baik bakar langsung maupun siap saji	0,5 km	Sinjai Utara	Sudah	Pemkab Sinjai	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen
17	bukit pelangi dan Bamboo Village	disuguhkan panorama alam yang sangat indah berupa perbukitan yang dihiasi dengan pepohonan yang tampak menghijau, areal persawahan	0,5 km	Sinjai Utara	Sudah	Komunitas My Trip My Adventure Sinjai	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen
18 *	Wisata Bahari Pulau Larea-Rea Kepulauan Sembilan	Daratan 9 buah pulau-pulau kecil dengan pantai/bunging pasir putih Arena Penyelaman dengan Panorama Terumbu Karang	3 mil laut	Pulau IX	Sudah	Disparbud Pemkab Sinjai	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen

		Pusat Jajan Kuliner Tarapung Mushalla Terapung Taman Pulau Pasir putih tempat permandian Diving Center Keramba budidaya ikan Kerapu, Napoleon, Udang Lobster dll					
19.	Air Terjun Bijje-e	Luas Kawasan sekitar 7 ha Bebatuan besar diselingi air sungai yang jernih	20 Km		Belum		- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
20	Air terjun Lamatti	Tinggi sekitar 15 m Luas Kawasan sekitar 10 ha Dikelilingi semi hutan Jati dan Persawahan	15 km	Bulupoddo	sudah	Pemerintah dea bulupoddo	- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
21	Air Terjun Laliakko	Air terjun dengan debit air 5000 debit air perdetik	45 km		Belum		- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
22	Air Terjun Bintula Tassoso		34 km	Sinjai Barat	Belum		- Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
23	Air Terjun Barania		23 km	Sinjai Barat	belum		

B. DTW BUDAYA/SEJARAH/TRADISI/ZIARAH/DESA WISATA

No	Nama DTW	Daya Tarik Utama	Jarak tempuh/w aktu dari ibukota	Lokasi / Kecamatan	Sudah Dikelola/B elum	Pengelola/No. Telp	Ket.
1.	Sejarah dan budaya Pulau Buhung Pitue	<ul style="list-style-type: none"> - Sumur Tujuh Rasa - Situs Batu Balandae - Makam Putri Ayu Belanda - Gua Laskar Kris Muda 	1 mil Laut		Belum		<ul style="list-style-type: none"> - Akses Jalan Laut Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
2.	Kumpulan Makam Tertua dan Bersejarah Kab. Sinjai	<ul style="list-style-type: none"> - Makam Sulewatan Sumappa Dg. Manajai Putta Ri Pao di Biringere - Makam Panglima Perang Bulu-bulu A. Mandisini La Pute Isi - Makam Torumba dg Masompa / barugae di kalaka - Makam Raja Lamatti di Bulu Paijo Cennig - Makam Lamappa Soko Lamanue Tanrune - Makam To Palekke di Mangottong/Ismail Dg Malengo - Makam puang Belle di Tana Tekko di Kampala - Makam Raja Bulu La Ganing di Tampung Cidue - Makam Puang Janggo - Makam Petta Karaeng di Baringeng - Makam Syech Abdurahman di Batu Lappa - Makam Tua Caropo di Sereng - Makam Bosying TelluppoloE(To Barani Jerrung) 	1 km – 45 km	<p>Sinjai Utara</p> <p>Sinjai Utara</p> <p>Sinjai Utara</p> <p>Sinjai Utara</p> <p>Sinjai Timur</p> <p>Sinjai Timur</p> <p>Sinjai Timur</p> <p>Sinjai Timur</p> <p>Sinjai Timur</p> <p>Sinjai Timur</p> <p>Sinjai Timur</p> <p>Bulupoddo</p> <p>Bulupoddo</p>	sudah	Sebagian dikelola oleh balai peninggalan cagar budaya makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim

		<ul style="list-style-type: none"> - Makam penyebar agama islam di aruhu - Makam Cappae di Takkuro - Makam Tua Alehanuae Manimpahoi - Situs Makam Pattontongan - Makam I Bonjeng - Makam La Bolong Daeng Makketti - Makam Puatta Massabang'e - Makam La Patosa Arung Nangka di Nangka - Makam Massainri Daeng di Lita Lita - Makan Penganjur Agama Islam Turungeng - Makam Srikandi Balakia di Balakia 		<p>Bulupoddo</p> <p>Sinjai Tengah Sinjai Barat Sinjai Tengah</p> <p>Sinjai Selatan Sinjai Selatan</p> <p>Sinjai Selatan Sinjai Barat</p>			
3. *	Pesta rakyat ma'rimpa salo	<ul style="list-style-type: none"> - iringan ratusan perahu berhias - atraksi musik tradisional - gendang, pencak silat, dan budaya 	20 km	Sinjai Timur	Sudah	Masyarakat dan pemkab Sinjai	<ul style="list-style-type: none"> - Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
4.	Situs Gua dan bentukan alam	<ul style="list-style-type: none"> - Gua Soppeng di Terasa - Gua Serre di Serre - Gua Lambere - Gua Puang Balasuka di Takkuro - Gua Buku-Bukue - Gua Pattenning - Gua Karebosi 	10 km – 56 km	Sinjai Barat Tellulimpoe Sinjai Tengah Sinjai Tengah Sinjai Tengah Sinjai Tengah	Belum		<ul style="list-style-type: none"> - Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
5.	Mesjid Tua (Masjid Nur) Balangnipa	Mesjid tua Karakter bangunan bergaya islam kuno	0,5 km	Sinjai Utara	sudah	Pemkab Sinjai	<ul style="list-style-type: none"> - Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
6.	Rumah Adat Arung Lappa	Rumah Saoraja / Raja/ Arung di kawasan Lappa Arsitektur Bugis Kuno	0,5 km	Sinjai Utara	Belum		<ul style="list-style-type: none"> - Akses Jalan Memadai - Sarana Prasarana

							Semi Permanen
7.	Istana Raja Bulu-bulu di Lompu	Saoraja/ Arung Bulu-bulu Arsitektur Bugis Semi Modern	0,5 km	Sinjai Utara	Belum		- Akses Jalan Memadai - Sarana dan Prasarana Permanen
8.	Rumah Adat Larea-area di Larea-rea	Arsitekutr Adat bugis Ditengah kawasan perikanan dan pesisir	0, 5 km	Sinjai Utara	Sudah	Milik Keluarga	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
9.	Batu Pelantikan Raja Lamatti di Palla	Situs Peninggalan Ditemukannya beberapa peninggalan benda-benda kuno	2 km	Bulupoddo	Belum		- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
10 *	Situs Perjanjian Topekkong	Tempat pelaksanaan perjanjian topekkong Dua batu sebagai simbol duduknya para sombayya dan mangkau Sebagai dasar terbentuknya/lahirnya kabupaten Sinjai	7 km	Sinjai Utara	Sudah	Disparbud Pemkab Sinjai	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
11 *	Benteng Balangnipa	Benteng peninggalan Belanda yang masih utuh Suaka Peninggalan Sejarah Keperbukalaan	0,5 km	Sinjai Utara	sudah	Balai Peninggalan cagar budaya makassar dan Pemkab Sinjai	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen
12 *	Taman Purbakala Batu Pake Gojeng	Suaka Peninggalan Sejarah Keperbukalaan Keindahan Ibukota Sinjai Kawasan Situs/ makam Tertua Punden Berundak undak Situs Batu hieroglif Taman Bermain Anak anak	0, 5 km	Sinjai Utara	Sudah	Disparbud Sinjai	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen

		Kajian Pendidikan dan Budaya					
13	pesanggrahan kassi buleng	Rumah Persinggahan NIPPON	42 km	Sinjai Borong	Belum		<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
14	Bongkasae (Bendera Kerajaan di Tondong)	Peralatan Kerajaan di rumah Saoraja Kampala	8 km	Sinjai Timur	Sudah	Para Keturunan Arung/ Raja/Pemangku Adat Tondong	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
15	Saoraja Linrung di Saukang	Rumah Adat Keturunan dari Arung Rombo	8 km	Sinjai Timur	Belum		<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen
16 *	Pesta Adat Mappogau Sihanua	Prosesi Adat selama satu minggu Puncak acara dalam kawasan rumah adat karampuang	30 km	Bulupoddo	sudah	Masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
17	Kawasan Wisata Adat dan Budaya Karampuang	2 buah rumah adat purba Gua-gua (leang-leang) Kawasan hutan adat Kelembagaan adat Event tahunan mappogau sihanua Kuburan tua Makanan tradisional Seni budaya tradisional	30 km	Bulupoddo	Sudah	Masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Permanen
18	Akkitang Essoe	Tempat dimana pemangku adat menentukan waktu mulai panen Menentukan waktu hujan dan keadaan cuaca lainnya	17 km	Sinjai Tengah	Belum		<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen

19	leang panning peppara saohiring	dinding gua kelelawar sangat menawan karena menyuguhkan gradasi warna yang terjadi secara alami	13 km	Sinjai Selatan	Sudah	Masyarakat desa	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
20.	Bulu Sapiri	Tempat pertemuan raja tanralili dengan masyarakatnya Tempat rapat sebelum dan sesudah panen, Tempat dimana pemangku adat menentukan waktu mulai panen	15 km	Sinjai Tengah	Belum		- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana minim
21.	rumah adat bola toae di saohiring	tempat mabissa lompoa dan arajang	17 km	Sinjai Selatan	Sudah	Masyarakat desa	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
22	Saoraja Bikeru	Rumah adat arung/raja bulo bulo Tempat pertemuan adat	23 km	Sinjai Selatan	Sudah	Keturunan	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana minim
23	Lesung Batu di Babara	Untuk menumbuk padi Arsitektur benda bugis kuno	32 km	Sinjai Selatan	sudah	Dikuasai masyarakat desa	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Semi Permanen
24	Pasanggarahan Manipi	Rest house Ruang pertemuan	55 km	Sinjai Barat	Sudah	Pemerintah Kec.Sinjai Barat	- Akses jalan memadai - Sarana Prasarana Minim

C. DTW BUATAN

No	Nama DTW	Daya Tarik Utama	Jarak tempuh/waktu dari ibukota	Lokasi / Kecamatan	Sudah Dikelola /Belum	Pengelola/No. Telp	Ket.
			23 Km		Sudah	Faisal	- Akses Jalan Laut

1.	Kolam Renang familiy	- Kolam Renang dengan fasilitas anak-anak dan dewasa		Sinjai Utara			Memadai - Sarana Prasarana Masih Minim
2.	bukit vandiam	disuguhkan panorama alam yang sangat indah berupa perbukitan yang dihiasi dengan pepohonan yang tampak menghijau, areal persawahan	2 km	Sinjai Timur	Sudah	Komunitas pencinta wisata	-
3.	Wisata kuliner TPI Lappa	Pusata jajanan kuliner dari laut	0,5 km	Sinjai Utara	sudah	Pemkab sinjai	-
4.	Pantai muara sungai tangka	Deretan usaha kuliner Sepanjang sungai tangka nan indah Muara lepas pantai	0,5km	Sinjai Utara	sudah	Pemkab sinjai	-

Sumber

:

Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan

Kab.

Sinjai

9. Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.

Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, tersedianya sumber air baku, serta memiliki akses yang tinggi. Berdasarkan kriteria kawasan budidaya kawasan permukiman terbagi atas dua yaitu:

- a. Peruntukan permukiman perkotaan
- b. Peruntukan permukiman perdesaan

10. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah, guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Sinjai mutlak ada dan diperlukan, baik untuk perlindungan pada lingkup ruang wilayah Kabupaten Sinjai maupun untuk perlindungan pada wilayah sekitarnya. Perlindungan ini dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya beserta aktivitasnya dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam, dan/atau ulah manusia dan makhluk hidup lainnya yang merusak kealamian, kelestarian dan keselamatan tata kehidupan.

Kawasan lindung adalah kawasan yang fungsinya tidak diperkenankan adanya kegiatan manusia. Yang termasuk kawasan lindung di Kabupaten Sinjai terbagi atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Suaka Alam, Pelesterian Alam dan Cagar Budaya serta
- e. Kawasan Rawan Bencana Alam.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah suatu daerah, maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti budidaya perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Sinjai terdiri dari 3 dimensi wilayah, yakni wilayah laut/pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Hal ini menggambarkan potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah utamanya dalam bidang pertanian.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai yang dapat dijadikan sebagai aset untuk pengembangan ke depan, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 – 2031 secara umum meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Potensi Pertanian

Jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Sinjai adalah padi, palawijaya, buah – buahan dan sayuran, dimana jenis tanaman pangan utama yang dikembangkan adalah padi. Tingkat perkembangan luas lahan, tingkat produksi dan tingkat produktivitas pada setiap tahunnya selalu berbeda. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kegagalan panen dan perubahan fungsi guna lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian khususnya fungsi urban guna memenuhi kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian.

Tabel 2.8
Luas Lahan Persawahan di Kabupaten Sinjai Tahun 2017

No	Kecamatan	Lahan Persawahan (Ha)	Persentase (%)
1	Sinjai Utara	690,00	5,08
2	Sinjai Timur	2.355,00	12,33
3	Sinjai Selatan	3.353,00	24,67
4	Sinjai Tengah	1.568,00	11,54
5	Sinjai Barat	1.688,00	12,42
6	Sinjai Borong	733,00	5,39
7	Bulupoddo	949,00	6,98
8	Tellulimpoe	2.257,00	16,60
	Total Luas	13.593,00	100,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

2. Potensi Perkebunan

Jenis komoditi tanaman perkebunan yang dikembangkan oleh penduduk di Kabupaten Sinjai adalah kelapa hibrida, kepala dalam, kopi, coklat, cengkeh, kemiri, vanili, lada, dan lain – lain. Dari segi jumlah produksi, jenis tanaman kelapa dalam dan Coklat memiliki jumlah produksi yang tertinggi, yaitu sebesar 4.063,00 ton dan 3.023,00 Ton.

Tabel 2.9
Luas Lahan Perkebunan Di Kabupaten Sinjai Tahun 2017

No	Kecamatan	Lahan Persawahan (Ha)	Persentase (%)
1	Sinjai Utara	2.006,00	1,44
2	Sinjai Timur	4.441,00	6,86
3	Sinjai Selatan	5.106,00	16,71

4	Sinjai Tengah	7.378,00	15,53
5	Sinjai Barat	6.155,00	9,45
6	Sinjai Borong	4.684,00	10,85
7	Bulupoddo	4.555,00	12,00
8	Tellulimpoe	7.997,00	27,09
9	Pulau Sembilan	67,00	0,14
	Total Luas	42.369,00	100,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

3. Perikanan dan Kelautan

Wilayah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah perairan laut yang berbatasan dengan Teluk Bone, memiliki prospek untuk pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan, seperti perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya payau dan budidaya air tawar. Pada wilayah Kabupaten Sinjai, terdapat potensi unggulan sumberdaya perikanan dan kelautan yang bernilai ekonomis penting, diantaranya Ikan Napoleon, Lobster, Teripang, Ikan Kerapu Sunu, Rumput Laut, Ikan Tongkol, Ikan Cakalang dan beberapa jenis sumberdaya perikanan lainnya.

Tabel 2.10
Potensi Perikanan dan Kelautan Di Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Lokasi Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Potensi (Ton & Ha)	Lokasi (Kecamatan)
1	Penangkapan	55.000	Pulau Sembilan, Sinjai Utara, Sinjai Timur dan Tellulimpoe
2	Budidaya Jaring Apung	-	
3	Budidaya Tambak	615,43	Sinjai Utara, Sinjai Timur, Tellulimpoe Dan Pulau IX
4	Budidaya Kolam	89,37	Tellulimpoe, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, dan Sinjai Barat
5	Budidaya Minapadi	1.015	Sinjai Selatan, Sinjai Barat dan Sinjai Borong
6	Budidaya Rumput Laut Di Laut	694,5	Pulau Sembilan
7	Budidaya Laut Sistem Penculture	-	
	JUMLAH	57.414,30	

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sinjai

4. Potensi Kehutanan

Sumberdaya hutan yang terdapat di Kabupaten Sinjai, meliputi: hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan bakau. Sumberdaya hutan tersebut merupakan potensi sektor kehutanan Kabupaten Sinjai yang memerlukan penanganan dan pengendalian untuk kelangsungan pelestariannya.

a. Sebaran luas hutan lindung

Sebaran luas hutan lindung di Kabupaten Sinjai terdapat di 5 (lima) wilayah kecamatan. Untuk lebih jelasnya, sebaran hutan lindung di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Sebaran Luas Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai Dirinci Menurut Kecamatan

No	Lokasi (Kecamatan)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kec. Sinjai Tengah	1.225,25	11,86
2	Kec. Sinjai Selatan	1.848,08	17,89
3	Kec. Sinjai Barat	5.779,29	55,94
4	Kec. Bulupoddo	205,88	1,99
5	Kec. Tellulimpoe	621,63	6,02
6	Kec. Sinjai Borong	651,01	6,30
	JUMLAH	10.996,00	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Sinjai

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa luas hutan lindung di Kabupaten Sinjai yang memiliki sebaran terbesar berlokasi di Kecamatan Sinjai Barat dengan luas 5.779,29 Ha, sedangkan sebaran luas hutan lindung terkecil berlokasi di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas 621,63 Ha.

b. Sebaran luas hutan produksi terbatas

Sebaran luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Sinjai terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan. Untuk lebih jelasnya, sebaran luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Sebaran Luas Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sinjai Dirinci Menurut Kecamatan

No	Lokasi (Kecamatan)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kec. Sinjai Barat	695,51	49,98
2	Kec. Sinjai Selatan	548,62	12,23
3	Kec. Sinjai Tengah	1.088,96	24,28
4	Kec. Bulupoddo	2.152,23	47,98
	JUMLAH	7.193,00	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Sinjai

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa luas hutan produksi terbatas di Kabupaten Sinjai yang memiliki sebaran terbesar berlokasi di Kecamatan Sinjai Barat, dengan luas 3.548 Ha. Sedangkan sebaran luas hutan produksi terbatas terkecil berlokasi di Kecamatan Sinjai Selatan, dengan luas 281 Ha.

c. Sebaran yang dikonversi

Kawasan hutan produksi konversi di Kabupaten Sinjai, berupa kawasan hutan bakau yang meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tellulimpoe,

Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Utara, dengan luas total 1.524,87 Ha.

d. Hutan Raya (Taman Hutan Raya)

Penetapan kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Sinjai, didasarkan pada SK. Menhut No. 434 Tahun 2009, seluas 724 Ha, ditetapkan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Hutan Raya Abdul Latief. Lokasi taman hutan raya yang ada di Kabupaten Sinjai berada di Kecamatan Sinjai Borong.

5. Potensi Tambang dan Sumberdaya Mineral

Potensi tambang dan sumberdaya mineral di Kabupaten Sinjai cukup besar, hal ini ditandai dengan beraneka ragamnya potensi pertambangan dan galian yang ada di wilayah ini. Potensi sumberdaya alam berupa mineral dan bahan galian, tentunya menjadikan wilayah Kabupaten Sinjai berpeluang untuk mendapatkan devisa yang cukup besar pada sektor pertambangan.

Tabel 2.13
Potensi Tambang Menurut Jenisnya Di Kabupaten Sinjai Tahun 2017

NO	BAHAN GALIAN	GOL.	LOKASI	POTENSI / CADANGAN PERKIRAAN
1	Andesit	Batuan	Kec. Sinjai Tengah (Ds. Pattongko, Saotanre, Saotengnga), Kec. Sinjai Timur (Desa Saukang) dan Kec. Bulupoddo (Desa Tompo Bulu)	827.443,30 M ³
2	Trakit	Batuan	Kec. Bulupoddo (Ds. Duampanua, Lamatti Riaja, Lamatti Riattang, dan Kec. Sinjai Selatan	103.412,10 M ³
3	Basal	Batuan	Kec. Sinjai Selatan (Ds. Polewali, Aska), Kec. Sinjai Barat (Desa Bonto Salama, Kel. Tassililu), Kec. Sinjai Tengah	255.493,00 M ³
4	Granodiorit	Batuan	Kec. Bulupoddo (Ds. Tompobulu)	2.563.840,00 M ³
5	Flint / Jasperoid	Batuan	Kec. Sinjai Tengah (Ds. Talle), Kec. Sinjai Selatan (Ds. Songing)	3.496,50 M ³
6	Lempung Merah	Batuan	Kec. Bulupoddo (Ds. Tompobulu)	55.700,00 M ³
7	Pasir Silika	Batuan	Kec. Sinjai Utara, Kec. Sinjai Borong, Kec. Bulupoddo	980,340 M ³
8	Sirtu Sungai	Batuan	Kec. Sinjai Utara, Kec. Sinjai Timur, Kec. Sinjai Selatan, Kec. Sinjai Tengah	15.632,00 M ³
9	Batu Apung	Batuan	Kec. Tellulimpoe (Ds. Sao Tengah)	647,50 M ³
10	Kaolin	Batuan	Kec. Sinjai Borong (Ds.	16.474,00 M ³

NO	BAHAN GALIAN	GOL.	LOKASI	POTENSI / CADANGAN PERKIRAAN
			BontoKatute)	
11	Batu Pasir Halus / Marmo	Batuan	Kec. Sinjai Tengah	2.788,20 M ³
12	Batu Gamping	Batuan	Kec. Sinjai Selatan (Ds. Talle)	2.650.000,00 M ³
13	Pasir Besi	Logam	Kec. Sinjai Timur	8.142.150 Ton
14	Batu bara	Batubara	Kec. Sinjai Timur, Kec. Sinjai Utara, Kec. Bulupoddo dan Kec. Sinjai Selatan	5.000.000 Ton
15	Mangan	Logam	Kec. Bulupoddo (Ds. Tompobulu)	1.395.744 Ton
16	Emas	Logam	Kec. Sinjai Borong, Kec. Bulupoddo	2,45 Ton
17	Timah Hitam (Galena)	Logam	Kec. Sinjai Borong (Ds. BontoKatute), Kec. Sinjai Barat (Ds. Botolempangan)	329.315 Ton

Sumber: RTRW Kabupaten Sinjai

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah suatu daerah, maka dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Bila dilihat dari karakteristik wilayahnya, Kabupaten Sinjai sendiri merupakan wilayah yang berpotensi longsor memiliki variasi potensi longsor dari sangat rendah (tidak rawan atau tidak ada potensi longsor), hingga potensi longsor sangat tinggi (sangat rawan). Hanya Sekitar 20% dari luas total keseluruhan wilayah ini merupakan wilayah dengan potensi longsor tinggi (sangat rawan). Sebagian besar wilayah Kabupaten Sinjai relatif aman terhadap potensi longsor kurang yang luasnya mencapai lebih dari 47%. Sementara wilayah yang memiliki tingkat potensi longsor sedang (rawan) memiliki persentase luas sekitar 31%. Kabupaten Sinjai juga memiliki wilayah rawan banjir yaitu sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur.

2.1.4. Aspek Demografi

Kondisi demografi merupakan kondisi kependudukan yang meliputi jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Kondisi kependudukan merupakan hal yang dapat dipengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah yang berkelanjutan.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi kependudukan Kabupaten Sinjai meliputi laju pertumbuhan, jumlah penduduk menurut rasio jenis kelamin dan umur, serta persebaran dan kepadatan penduduk.

2.1.4.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara demografis, berdasarkan *Kabupaten Sinjai Dalam Angka Tahun 2018*, jumlah penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah 252.627 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 100 persen selama sepuluh tahun terakhir, ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan dan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Sinjai

Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan
	2016	2017	
Sinjai Barat	24.089	24.848	3,10
Sinjai Borong	16.106	17.244	6,83
Sinjai Selatan	38.741	40.433	4,27
Tellulimpoe	33.054	36.451	9,78
Sinjai Timur	30.550	32.807	7,13
Sinjai Tengah	26.994	27.822	3.02
Sinjai Utara	46.637	48.516	3,94
Bulupoddo	15.947	17.002	6,40
Pulau Sembilan	7.571	7.504	0,88
Kabupaten Sinjai	239.689	252.627	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 124.957 Jiwa penduduk laki-laki dan 127.670 Jiwa penduduk perempuan. Sementara Rasio Jenis Kelamin yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah, untuk Kabupaten Sinjai adalah 100. Rasio Jenis Kelamin dibawah 94 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki atau terdapat 94 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dapat dilihat lebih jelas menurut kecamatan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai Berdasarkan Jenis Kelamin
dan Sex Ratio Tahun 2017

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Sinjai Barat	12.462	12.386	24.848	99
Sinjai Borong	8.754	8.490	17.244	98

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Sinjai Selatan	19.895	20.538	40.433	93
Tellulimpoe	17.963	18.488	36.451	91
Sinjai Timur	16.157	16.650	32.807	89
Sinjai Tengah	13.961	13.861	27.822	97
Sinjai Utara	23.631	24.885	48.516	93
Bulupoddo	8.393	8.609	17.002	94
P. Sembilan	3.741	3.763	7.504	96
Kabupaten Sinjai	124.957	127.670	252.627	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur
Tahun 2017

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00 - 04	9.595	8.706	18.301
05 - 09	12.179	11.370	23.549
10 - 14	14.216	13.504	27.720
15 - 19	12.547	12.431	24.978
20 - 24	10.063	10.123	20.186
25 - 29	8.877	8.897	20.186
30 - 34	9.177	9.421	18.598
35 - 39	9.285	9.677	18.962
40 - 44	8.885	9.494	18.379
45 - 49	8.546	8.785	17.331
50 - 54	5.949	6.835	12.784
55 - 59	5.052	5.710	10.762
60 - 64	3.853	4.239	8.092
65 - 69	2.596	3.231	5.827
70 - 74	1.819	2.435	4.254
75 +	2.318	2.812	5.130
Jumlah	124.957	127.670	252.627

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Tabel menunjukkan bahwa penduduk dengan golongan umur 15 - 19 tahun merupakan penduduk terbanyak, baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki dengan jumlah 24.978 Jiwa. Sementara itu, penduduk dengan jumlah paling sedikit adalah penduduk dengan golongan umur 70 - 74 dengan total jumlah 4.254 Jiwa.

2.1.4.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk di suatu wilayah, dimana dapat dilihat apakah persebaran penduduk merata atau tidak.Sementara, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara banyaknya penduduk suatu daerah dengan luas wilayahnya. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan adalah km². Kepadatan penduduk di suatu daerah tidaklah sama. Kepadatan

Penduduk Kabupaten Sinjai adalah 310 jiwa per km², dimana distribusi penduduk terbesar ada di Kecamatan Sinjai Utara yaitu sebesar 48.516 jiwa per km² dengan kepadatan sebesar 1.673 jiwa per km². Kecamatan Bulupoddo merupakan kecamatan dengan angka kepadatan penduduk terendah yaitu 172 Jiwa per km² dari total jumlah penduduk 252.627 jiwa. Persebaran dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sinjai dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Sinjai Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	KK	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rata-Rata Anggota KK
1	Sinjai Barat	135,53	7.017	24.848	184	4
2	Sinjai Borong	56,97	4.863	17.244	261	4
3	Sinjai Selatan	131,99	10.658	40.433	309	4
4	Tellulimpoe	136,30	9.837	36.451	248	3
5	Sinjai Timur	71,88	8.716	32.807	462	4
6	Sinjai Tengah	129,70	7.672	27.822	216	4
7	Sinjai Utara	29,57	12.312	48.516	1.673	4
8	Bulupoddo	99,47	4.884	17.002	172	3
9	Pulau IX	7,55	2.056	7.504	1.072	4
	Kabupaten Sinjai	798,96	68.015	252.627	310	4

Sumber: Kabupaten Sinjai Dalam Angka Tahun 2018

2.1.5. Kajian Lingkungan Hidup Starategis tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia.. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap korbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi dayadukung secara komprehesif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secar tepat guna dalam penentuan kebijakan

pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu :

1. Jasa penyediaan (provisioning);
2. Jasa pengaturan (regulating);
3. Jasa budaya (cultural);
4. Jasa pendukung (supporting).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan

Melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan. Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Sinjai akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Sinjai. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18 Kriteria Penggunaan Lahan untuk setiap kemampuan lahan

No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Pertanian sangat intensif
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Pertanian sangat intensif dan Pertnian intensif (hanya Pertanian intensif sedang)
4	IV	Pertanian Terbatas. Semua jenis pengembalan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalan (Penggembala intensif, Penggembala sedang, Penggembala) semua jenis hutan
6	VI	Penggembala sedang, Penggembala terbatas, semua jenis hutan
7	VII	Pengembalaan terbaas, Hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sinjai. Hasilnya 46,71 % luas lahan kelas V, 28,30% luas lahan kelas VI, 19,19 % luas lahan kelas IV, 4,50 % luas lahan kelas VII, dan hanya 0,40% luas lahan kelas II, dan 0,90% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Sinjai umumnya hanya mampu untuk penggunaan semua jenis

Penggembalaan dan hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif.

Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Sinjai umumnya mengandung krikil atau batuan dan jenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Sementara lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan budidaya hanya 19,19 % dari total luas wilayah KabupatenSinjai, itupun pertanian yang terbatas.

Tabel 2.19. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sinjai

No	Kelas Lahan Luas (Ha)	Luas Lahan	Persen (%)
1	Kelas I	352,96	0,40
2	Kelas IV	16.924,69	19,19
3	Kelas V	41.189,29	46,71
4	Kelas VI	24.958,23	28,30
5	Kelas VII	3.969,47	4,50
6	Kelas VIII	792,32	4,50

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa eksosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (supley) dan kebutuhan (demand) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Untuk Kabupaten Sinjai status daya dukung penyediaan air bersihnya 99 % dari luas wilayahnya belum melewati ambang batas dan hanya 1 % dari luas wilayahnya telah melewati ambang batas. Kecamatan di Kabupaten Sinjai yang terbesar presentase dari wilayahnya yang sudah melampaui ambang batas penyediaan air adalah Kecamatan Sinjai Utara yaitu sekitar 8,19 % atau sekitar 274,21 Ha. Hal ini dikarenakan wilayah Sinjai Utara merupakan ibu Kota Kabupaten Sinjai, dimana seluruh kegiatan perkotaan terpusat pada wilayah tersebut

Tabel 2.20 Status Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Sinjai

Kecamatan	Belum melampaui ambang batas		Sudah melampaui ambang batas	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Bulupoddo	10.056,38	100,00		0,00
Pulau IX	186,96	100,00		0,00
Sinjai Barat	14.762,39	100,00		0,00
Sinjai Selatan	14,108,39	98,23	253,78	1,77

Sinjai Tengah	12.654,36	100,00		0,00
Sinjai Timur	7.299,73	96,19	289,02	3,81
Sinjai Utara	3.072,64	91,81	274,21	8,19
Sinjai Borong	9.210,56	100,00		0,00
Tellulimpoe	14.043,92	99,70	42,71	0,30
Total	85.395,34		859,72	
%	99,00		1,00	

Sumber : Diolah dari Data DDDTLH Ekoregion Sulsel Oleh KLHK, Tahun 2017

Untuk daya dukung dan daya tampung lainnya berdasarkan jasa ekosistem akan dijelaskan selanjutnya pada uraian kajian muatan KLHS lainnya yaitu kajian kinerja layanan jasa ekosistem. Terdapat 6 layanan jasa ekosistem yang akan diuraikan selanjutnya. Daya dukung diwakili oleh layanan jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik, penyedia air bersih, penyedia energi (bahan bakar, kayu, dan fosil), penyedia pangan. Sementara daya tampung diwakili oleh layanan jasa ekosistem pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam.

Tabel 2.21
Hubungan antara Kebutuhan air dan ketersediaan air bersih per tahun di Kabupaten Sinjai

Kecamatan	Ketersediaan (M3 / Tahun)	Kebutuhan (M3 / Tahun)	Selisih (M3/Tahun)
Bulupoddo	6.624.252,58	3.012.400,85	3.611.851,73
Sinjai Barat	10.861.723,80	3.209.575,31	7.652.148,50
Sinjai Selatan	9.968.162,59	4.309.073,57	5.659.089,03
Sinjai Tengah	8.083.638,38	3.320.933,52	4.762.704,86
Sinjai Timur	5.770.986,68	3.144.288,12	2.626.698,56
Sinjai Utara	2.796.927,98	1.411.611,59	1.385.316,39
Sinjai Borong	7.074.282,14	2.298.419,24	4.775.862,91
Tellulimpoe	9,715.030,65	3.871.756,85	5.843.273,81
Total	60.895.004,80	24.578.059,02	36.316.945,78

Dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan air bersih terhadap kebutuhan air bersih hingga tahun 2030 masih sangat cukup memadai untuk semua kecamatan di kabupaten Sinjai. Ketersediaan sumber daya air bersih yang cukup melimpah ini menjadi modal utama pembangunan kabupaten Sinjai ke depan.

Tabel 2.22
Hubungan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan
di kabupaten Sinjai

Kecamatan	Ketersediaan (KKAL/THN)	Kebutuhan (KKAL/THN)	Selisih (KKAL/THN)
Bulupoddo	69.321.943,51	54.081.182,76	15.240.760,75
Sinjai Barat	109.541.286,51	59.784.442,08	49.756.844,43
Sinjai Selatan	101.655.234,88	77.105.239,68	24.549.995,20
Sinjai Tengah	74.178.772,75	50.826.133,20	23.352.639,55
Sinjai Timur	76.946.565,81	73.106.369,76	3.840.196,05
Sinjai Utara	41.727.958,11	35.943.996,96	5.783.961,15
Sinjai Borong	64.896.832,42	40.855.693,92	24.041.138,50
Tellulimpoe	81.877.746,51	64.004.834,88	17.872.911,63
Total	620.146.340,49	455.707.893,24	164.438.447,25

Dapat diketahui rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan di kabupaten Sinjai hingga tahun 2030 cenderung terbatas atau mendekati ambang batas rasio yang seharusnya. Seperti yang tampak pada kecamatan Sinjai Utara, dimana diprediksi akan terjadi krisis pangan disebabkan pertumbuhan penduduk yang tidak di dukung pertumbuhan produksi pangan yang memadai.

2.1.6. Daya Dukung Berdasarkan Indikatif Jasa Ekosistem Lingkungan

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (provisioning), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (regulating) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (supporting), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (cultural), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005). Diasumsikan semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu :

- a. Layanan/fungsi penyedia (provisioning services) : Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air.
- b. Layanan/fungsi pengatur (regulating services) : Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, dan pengaturan iklim.

- c. Layanan/fungsi budaya (cultural services) : Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (supporting services) : Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, dan air.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya. Adapun hasil analisis penyediaan jasa ekosistem di Kabupaten Sinjai diperlihatkan pada uraian dibawah ini :

Tabel 2.23
Daya Dukung Daya Tampung (Dddt) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Tata Air

NO.	KECAMATAN	KLASIFIKASI KERENTANAN										Grand Total	
		RENDAH	%	SANGAT RENDAH	%	SANGAT TINGGI	%	SEDANG	%	TINGGI	%		
	KEC. SINJAI BARAT					3,28						8,56	
								4,65					
	KEC. SINJAI UTARA		10,87		0,97								

Berdasarkan hasil olahan data awal dengan membagi menjadi 5 (lima) klasifikasi indeks yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi, diketahui bahwa untuk Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Penataan Air Wilayah Kabupaten Sinjai

Kecamatan Sinjai Barat sebagai kecamatan yang memiliki tingkat penataan air yang sangat tinggi yakni sebesar 3,28%, kemudian Kecamatan Sinjai Selatan dengan tingkat penataan air yang sedang yakni sebesar 4,65% sedangkan Kecamatan Tellulimpoe sebagai kecamatan dengan tingkat penataan air yang sangat rendah yakni sebesar 0,97%. Secara umum tata air dan banjir di Kabupaten Sinjai terkategori rendah sehingga potensi terjadinya banjir cukup tinggi.

Tabel 2.24
 Daya Dukung Daya Tampung (Dddt) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem
 Aspek Genetik Kabupaten Sinjai

NO.	KECAMATAN	KLASIFIKASI KERENTANAN										Grand Total	
		RENDAH	%	SANGAT RENDAH	%	SANGAT TINGGI	%	SEDANG	%	TINGGI	%		
	KEC. SINJAI BARAT					3,19						1,58	
	KEC. SINJAI SELATAN							9,34					
	KEC. TELLULIMPOE		10,72	0,94									

Berdasarkan hasil olahan data awal dengan membagi menjadi 5 (lima) klasifikasi indeks yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi, diketahui bahwa untuk Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Sumber Daya Genetik wilayah Kabupaten Sinjai.

Kecamatan Sinjai Barat sebagai kecamatan yang memiliki tingkat ketersediaan Sumber Daya Genetik yang sangat tinggi yakni sebesar 3,19%, kemudian Kecamatan Sinjai Selatan dengan tingkat ketersediaan Sumber Daya Genetik yang sedang yakni sebesar 9,34% dan Kecamatan Tellulimpoe dengan tingkat ketersediaan Sumber Daya Genetik yang sangat rendah yakni sebesar 0,94%. Secara umum penyediaan sumber daya genetik di Kabupaten Sinjai terkategori rendah.

Tabel 2.25
 Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem
 Aspek Air Bersih Kabupaten Sinjai

NO.	KECAMATAN	KLASIFIKASI KERENTANAN										Grand Total	
		RENDAH	%	SANGAT RENDAH	%	SANGAT TINGGI	%	SEDANG	%	TINGGI	%		
	KEC. SINJAI BORONG							6,46					
	KEC. SINJAI SELATAN			2,71								1,88	
	KEC. SINJAI TIMUR					1,66							
	KEC. TELLULIMPOE		10,46										

Berdasarkan hasil olahan data awal dengan membagi menjadi 5 (lima) klasifikasi indeks yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi, diketahui bahwa untuk Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Ketersediaan Air Bersih Wilayah Kabupaten Sinjai

Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur sebagai kecamatan yang memiliki tingkat ketersediaan Air Bersih yang sangat tinggi yaitu 1,66%, kemudian Kecamatan Sinjai Borong dengan tingkat tingkat ketersediaan Air Bersih yang sedang yakni sebesar 6,46% dan Kecamatan Sinjai Selatan dengan tingkat tingkat ketersediaan Air Bersih yang sangat rendah yakni sebesar 2,71%. Secara umum penyediaan air bersih di Kabupaten Sinjai terkategori rendah.

Tabel 2.26
 Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem
 Aspek Ketersediaan Energi Wilayah Kabupaten Sinjai

NO.	KECAMATAN	KLASIFIKASI KERENTANAN										Grand Total	
		RENDAH	%	SANGAT RENDAH	%	SANGAT TINGGI	%	SEDANG	%	TINGGI	%		
	KEC. SINJAI BARAT					5,11				6,72			
	KEC. SINJAI SELATAN							3,84					
	KEC. TELLUMPOE	14,21		1,02									

Berdasarkan hasil olahan data awal dengan membagi menjadi 5 (lima) klasifikasi indeks yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi, diketahui bahwa untuk Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Ketersediaan Energi Wilayah Kabupaten Sinjai.

Kecamatan Sinjai Barat sebagai kecamatan yang memiliki tingkat ketersediaan Energi yang sangat tinggi yakni sebesar 5,11%, kemudian Kecamatan Sinjai Selatan dengan tingkat ketersediaan Energi yang sedang yakni sebesar 3,84% dan Kecamatan Tellulimpoe dengan tingkat ketersediaan Energi yang sangat rendah yakni sebesar 1,02%. Secara umum penyediaan energi di Kabupaten Sinjai terkategori rendah.

Tabel 2.27
 Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem
 Aspek Pangan Kabupaten Sinjai

NO.	KECAMATAN	KLASIFIKASI KERENTANAN										Grand Total	
		RENDAH	%	SANGAT RENDAH	%	SANGAT TINGGI	%	SEDANG	%	TINGGI	%		
												7,53	
				3,03									
						0,92		3,18					
		10,07											

Berdasarkan hasil olahan data awal dengan membagi menjadi 5 (lima) klasifikasi indeks yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi, diketahui bahwa untuk Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Ketersediaan Pangan Wilayah Kabupaten Sinjai

Kecamatan Sinjai Borong sebagai kecamatan yang memiliki tingkat Ketersediaan Pangan yang sangat tinggi yakni sebesar 7,53%, kemudian Kecamatan Sinjai Timur dengan tingkat Ketersediaan Pangan yang sedang yakni sebesar 3,18% dan Kecamatan

Sinjai Selatan juga sebagai kecamatan dengan tingkat Ketersediaan Pangan yang sangat rendah yakni sebesar 3,03%.

Tabel 2.28
Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Tingkat Kondisi Iklim Kabupaten Sinjai

No.	Kecamatan	Klasifikasi Kerentanan										Grand Total	%
		Rendah	%	Sangat Rendah	%	Sangat Tinggi	%	Sedang	%	Tinggi	%		
	Kec. Sinjai Barat					5,11							
	Kec. Tellulimpoe	10,12		0,84									

Berdasarkan hasil olahan data awal dengan membagi menjadi 5 (lima) klasifikasi indeks yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi, diketahui bahwa untuk Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Kondisi Iklim Wilayah Kabupaten Sinjai.

Kecamatan Sinjai Barat sebagai kecamatan yang memiliki Kondisi Iklim yang sangat tinggi yakni sebesar 5,11%, kemudian Kecamatan Sinjai Timur dengan Kondisi Iklim yang sedang yakni sebesar 3,23% dan Kecamatan Tellulimpoe dengan tingkat Kondisi Iklim yang sangat rendah yakni sebesar 0,84%.

Tabel 2.29
Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Tingkat Potensi Bencana Kabupaten Sinjai

No.	Kecamatan	Klasifikasi Kerentanan										Grand Total	%
		Rendah	%	Sangat Rendah	%	Sangat Tinggi	%	Sedang	%	Tinggi	%		
		1,58				3,19		8,64					
				10,83									

Berdasarkan hasil olahan data awal dengan membagi menjadi 5 (lima) klasifikasi indeks yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi, diketahui bahwa untuk Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Berbasis Indeks Jasa Ekosistem Aspek Kondisi Bencana Wilayah Kabupaten Sinjai

Kecamatan Sinjai Barat sebagai kecamatan yang memiliki tingkat Potensi Bencana yang sangat tinggi yakni sebesar 3,19%, kemudian Kecamatan Sinjai Borong dengan tingkat Potensi Bencana yang sedang yakni sebesar 8,64% dan Kecamatan Tellulimpoe dengan tingkat Potensi Bencana yang sangat rendah yakni sebesar 10,83%.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan nilai output bersih yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dapat menjadi salah satu indikator kondisi perekonomian suatu daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hasil penghitungan dari PDRB disajikan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

a. Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan.

Sama dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan secara total. Sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB pada tahun 2017 adalah Rp. 4.247.418,14 atau 46,22 % sementara sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai Rp. 5.817,02 atau 0,06% hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel .2.30
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	SEKTOR	2013		2014		2015 (*)		2016 (*)		2017 (*)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.535.503,24	45,26	2.999.106,52	46,25	3.497.982,06	46,53	3.842.133,83	46,26	4.247.418,14	46,22
2	Pertambangan dan Penggalian	117.890,09	2,1	159.767,26	2,46	201.741,71	2,69	220.442,20	2,65	239.090,69	2,60
3	Industri Pengolahan	153.024,45	2,73	177.358,51	2,74	204.991,71	2,73	227.277,41	2,73	253.708,71	2,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.635,17	0,08	5.371,02	0,08	4.654,54	0,06	6.096,96	0,07	7.401,73	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	4.893,99	0,09	5.182,58	0,08	5.421,63	0,07	5.841,24	0,07	6.346,07	0,07
6	Konstruksi	682.669,76	12,19	790.139,86	12,18	920.719,62	12,26	1.028.059,51	12,37	1.132.864,50	12,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil	671.801,06	11,99	741.541,21	11,44	848.327,07	11,29	962.013,87	11,57	1.093.297,22	11,90
8	Transportasi dan Pergudangan	84.228,79	1,5	101.616,41	1,57	116.949,48	1,56	128.247,33	1,54	136.886,98	1,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.622,38	0,39	24.068,24	0,37	26.300,41	0,35	28.706,60	0,35	31.794,83	0,35
10	Informasi dan Komunikasi	175.891,49	3,14	185.727,10	2,86	194.470,47	2,59	220.676,62	2,65	245.059,71	2,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	166.224,39	2,97	189.079,02	2,92	213.993,53	2,85	253.173,29	2,83	270.030,27	2,94
12	Real Estate	141.534,96	2,53	161.941,27	2,5	186.055,69	2,48	204.185,95	2,46	223.589,31	2,43
13	Jasa Perusahaan	3.849,19	0,07	4.213,34	0,06	4.702,26	0,06	5.192,87	0,06	5.817,02	0,06
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan	356.700,68	6,37	402.154,14	6,2	477.485,58	6,36	501.952,92	6,04	539.629,11	5,87
15	Jasa Pendidikan	362.540,37	6,47	400.121,96	6,17	450.448,24	6	494.382,32	5,95	558.206,96	6,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82.586,18	1,47	97.408,63	1,5	114.058,60	1,52	127.280,23	1,53	141.645,89	1,54
17	Jasa Lainnya	35.872,19	0,64	39.973,81	0,62	45.974,73	0,61	50.997,48	0,61	97.124,27	0,62
	PDRB	5.601.468,37	100	6.484.769,87	100	7.511.140,76	100	8.312.547,86	12,26	9.189.912,49	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai

b. Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap atau harga suatu tahun dasar yang digunakan selama satu tahun

Secara total PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan dari tahun. Pada Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan secara total. Sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Nilai kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB pada tahun 2017 adalah Rp. 2.722.250,15 atau 6,74 % sementara sektor dengan kontribusi terendah adalah sector jasa perusahaan dengan nilai Rp. 4.295,80 hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.31
PDRB Atas dasar Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	SEKTOR	2013		2014		2015 (*)		2016 (**)		2017 (**)	
		(Rp)	(%)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.070.290,37	43,99	2.222.512,89	44,14	2.393.831,61	44,2	2.550.437,25	44,02	2.722.250,15	6,74
2	Pertambangan & Penggalian	87.394,16	1,86	100.655,17	2	111.489,62	2,06	123.352,55	2,13	138.900,30	12,60
3	Industri Pengolahan	123.874,55	2,63	132.067,56	2,62	140.619,78	2,6	149.990,08	2,58	161.376,60	7,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.147,34	0,11	6.177,94	0,12	6.360,90	0,11	7.032,75	0,12	7.435,42	5,73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	4.468,08	0,09	4.641,79	0,09	4.670,85	0,09	4.968,47	0,09	5.326,80	7,21
6	Konstruksi	568.947,28	12,09	603.843,20	11,99	646.208,95	11,93	688.900,26	11,87	733.912,10	6,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	589.954,14	12,53	641.728,22	12,74	691.452,18	12,77	760.828,96	13,11	833.339,10	9,53
8	Transportasi dan Pergudangan	74.059,48	1,57	81.113,39	1,61	85.199,03	1,57	86.911,66	1,49	93.078,40	7,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.469,48	0,39	19.969,93	0,4	21.108,00	0,39	22.468,53	0,39	24.448,70	8,81
10.	Informasi dan Komunikasi	173.272,92	3,68	182.084,29	3,62	196.767,41	3,63	214.599,84	3,69	232.213,10	8,21
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	134.280,86	2,85	142.084,10	2,82	153.561,92	2,84	177.507,50	3,06	180.768,68	1,80
12.	Real Estate	117.059,77	2,49	124.676,26	2,48	132.454,76	2,45	140.013,41	2,41	149.701,30	6,92
13.	Jasa Perusahaan	3.408,80	0,07	3.549,47	0,07	3.701,56	0,07	3.948,74	7	4.295,80	8,79
14.	Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan	298.445,69	6,34	309.471,99	6,15	330.748,36	6,13	338.896,97	5,84	353.926,14	4,85
15.	Jasa Pendidikan	331.785,80	7,05	346.405,34	6,88	373.099,25	6,89	398.682,50	6,87	434.290,40	8,93
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.937,58	1,55	80.006,50	1,59	864.444,83	1,6	92.174,98	1,59	99.897,20	8,38
17.	Jasa Lainnya	32.876,40	0,7	34.712,27	0,69	37.061,25	0,68	39.964,29	0,69	43.555,30	9,26
	PDRB	4.706.672,69	100	5.035.700,32	100	5.414.779,96	100	5.802.600,18	100	6.218.715,48	7,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai

c. Perkembangan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Pada bagian ini dijelaskan perkembangan konstibusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Sinjai. Sektor Pertanian merupakan sector yang mendominasi kontribusi terhadaap PDRB dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, baik untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada tahun 2013, kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK adalah 5,96 % dan pada tahun 2017 sebesar 6,74 %. Sementara terhadap APDR ADHB, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2013 adalah 45,26 % dan tahun 2017 sebesar 46,22 %, terjadi persentase kenaikan kontribusi sector terhadap PDRB ADHB disebabkan meningkatnya kontibusi sector-sektor lainnya. Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 tercatat Rp. 5.601.468,37 dan meningkat menjadi Rp. 9.189.912,49 pada tahun 2017. Perkembangan kontribusi sector terhadap PDRB dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel. 2.32
Perkembangan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai

NO	SEKTOR	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	45,26	5,96	46,25	7,35	46,53	7,71	46,26	6,55	46,22	6,74
2	Pertambangan & Penggalian	2,1	9,85	2,46	15,17	2,69	10,76	2,65	10,64	2,60	12,50
3	Industri Pengelohan	2,73	8,22	2,74	6,61	2,73	6,48	2,73	6,66	2,76	7,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	17,75	0,08	20,02	0,06	-4,2	0,07	10,56	0,08	5,73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,09	10,09	0,08	3,89	0,07	0,63	0,07	6,63	0,07	7,21
6	Konstruksi	12,19	10,07	12,18	6,13	12,26	7,02	12,37	6,61	12,33	6,53
7	Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi	11,99	9,72	11,04	8,78	11,29	7,75	11,57	10,03	11,90	9,53
8	Transportasi dan Pergudangan	1,5	6,15	1,57	9,52	1,56	5,04	1,54	2,01	1,49	7,10
9	Penyediaan Akomodasi dan makan	0,39	6,57	0,37	8,12	0,35	5,7	0,35	6,45	0,35	8,81
10	Informasi dan Komunikasi	3,14	21,19	2,86	5,09	2,59	8,06	2,65	9,06	2,67	8,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	11,17	2,92	5,81	2,85	8,08	3,05	15,59	2,94	1,80
12	Real Estate	2,53	5,47	2,5	6,51	2,48	6,24	2,46	5,71	2,43	6,92
13	Jasa Perusahaan	0,07	4,19	0,06	4,13	0,06	4,28	0,06	6,68	0,06	8,79
14	Administrasi Pemerintahan	6,37	3,62	6,2	3,69	6,36	7,27	6,04	1,86	5,87	4,85
15	Jasa Pendidikan	6,47	8,58	6,17	4,41	6	7,71	5,95	6,86	6,07	8,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	10,6	1,5	9,69	1,52	8,05	1,53	6,63	1,54	8,38
17	Jasa Lainnya	0,64	5,21	0,62	5,58	0,61	0,61	0,61	7,56	0,62	9,26
	Jumlah	100	7,79	100	6,98	100	7,54	100	7,16	100	7,23

2.2.1.2. Laju Inflasi

laju inflasi mengakibatkan kenaikan pada harga barang dan jasa lainnya.Tingkat inflasi dapat dilihat berdasarkan laju inflasi Kabupaten Bone. Laju inflasi Kabupaten Sinjai berdasarkan data dari Bank Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Namun, kenaikan harga yang terjadi hanya pada satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas sehingga suatu daerah dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam mengendalikan perekonomiannya, dalam hal ini kenaikan harga barang dan jasa.

Perhitungan inflasi untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan hanya dilakukan di 5 (lima) daerah yaitu Bulukumba, Bone, Makassar, Pare-Pare, dan Palopo. Untuk Kabupaten Sinjai, perkembangan Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sinjai beserta perbandingannya dengan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2012-2017

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Sinjai	6,86	5,38	0,97	1,50	5,10	3.72
Provinsi	6,22	8,61	3,85	2,94	4,44	4.91
Nasional	8,38	8,36	4,48	3,02	3,61	5.39

Sumber :BPS Kabupaten Sinjai

2.2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. PDRB per kapita merupakan nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh setiap penduduk sebagai akibat dari aktivitas perekonomian.Secara umum, PDRB per kapita dapat memberikan gambaran kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah yang diukur melalui perbandingan PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari jumlah penduduk, maka hal ini menandakan bahwa PDRB per kapita atau pendapatan penduduk meningkat. Namun, jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari jumlah penduduk, maka hal ini menandakan bahwa PDRB per kapita atau pendapatan per kapita penduduknya menurun. Untuk Kabupaten Sinjai, nilai PDRB per kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
PDRB Per Kapita Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

TAHUN	NILAI PDRB (Rp)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	PDRB Per Kapita (Rp/Jiwa)
2013	5.601.468,38	234.886	23.847.604
2014	6.484.769,88	236.497	27.420.093
2015	7.511.200,78	238.099	31.546.544
2016	8.312.547,86	239,689	34,680.56
2017	9.189.912,15	252.627	38.10 juta

Sumber : Sinjai Dalam Angka Tahun 2018

Dari Tebel di atas menunjukkan bahwa PDRB per Kapita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dimana setiap tahunnya sektor yang paling tertinggi dengan kontibusi tertinggi terhadap PDRB adalah sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB adalah sector pertanian, kehutanan dan perikanan. sementara sector dengan kontribusi terendah adalah sector jasa perusahaan .

2.2.1.4. Indeks Gini

Ketimbangan Pembangunan merupakan salah satu prime priority pembangunan saat ini, mengacu pada data statistic yang ada ketimpangan pembangunan yang di gambarkan dari nilai Gini Ratio (GR) memperlihatkan bahwa pembangunan social dan ekonomi Kab. Sinjai .

Tabel 2.35
Indeks Gini Ratio
dan Nasional Tahun 2012-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sinjai	0,352	0,376	0,396	0,428	0,376
Provinsi	0,43	0,43	0,42	0,42	0,43
Nasional	0,106	0,111	0,102	0,291	0,39

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai

2.2.1.5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan dapat dihitung berdasarkan angka kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 Angka Kemiskinan Kabupaten Sinjai adalah 10,32 % dan pada Tahun 2017 mengalami penurunan hingga 9,24%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung jumlah penduduk diatas garis kemiskinan adalah :

100 - angka kemiskinan = 100 - 9,26 = 90,74

Perkembangan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan, dan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Angka Kemiskinan (%)	Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)
1.	2013	24.300	10,32	90,25
2.	2014	22.630	9,56	90,98
3.	2015	22.050	9,26	90.74
4.	2016	22.510	9,41	90,59
5.	2017	22.250	9,24	90,76

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai,

2.2.1.6. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan
Kabupaten Sinjai Tahun 2017

NO.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
1.	Sinjai Utara	6.880	1.593
2.	Sinjai Timur	12.888	3.310
3.	Sinjai Selatan	11.576	2.903
4.	Sinjai Borong	9.940	2.513
5.	Sinjai Tengah	14.829	3.730
6.	Bulupoddo	7.763	2.027
7.	Tellulimpoe	14.003	3.684
8.	Sinjai Barat	15.011	3.702
9.	Pulau IX	4.267	944
	Jumlah	97.157	24.406

Sumber : Kemensos (Hasil Rakor Kemiskinan)

2.2.1.7. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode 2013 - 2017 dan pra sejahtera mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai 6.409 di banding dengan tahun 2016 mencapai 9.029 sedangkan keluarga sejahtera 1 juga mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai 11.412 di bandingkan dengan pada tahun 2016 sebesar 32.367 di sebabkan karena pada tahun 2017 sudah mengalami perubahan masuk di keluarga sejahtera II, III dan IV. Rasio kesenjangan kemiskinan ini disebabkan oleh tingkat pendapatan dan pengangguran yang cenderung berubah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Rasio Kesenjangan Kemiskinan
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	KECAMATAN	URAIAN / TAHUN									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		PRA SEJAHTER	KS 1	PRA SEJAHTER	KS 1	PRA SEJAHTER	KS 1	PRA SEJAHTER	KS 1	PRA SEJAHTER	KS 1
1	SINJAI BARAT	598	1.622	598	1.622	598	1.622	816	4.198	360	1.143
2	SINJAI SELATAN	1.381	1.652	1.381	1.652	1.931	1.652	1.913	5.931	1.005	1.316
3	SINJAI TIMUR	713	2.926	713	2.926	2.414	2.926	2.004	4.233	737	2.280
4	SINJAI TENGAH	990	1.480	990	1.480	514	1.480	443	3.433	668	632
5	SINJAI UTARA	885	1.535	885	1.535	1.193	1.535	1.216	3.810	1.010	2.177
6	SINJAI BORONG	405	1.285	405	1.285	380	1.285	119	698	91	554
7	BULUPODDO	1.564	534	1.564	534	1.036	534	928	2.734	779	956
8	TELLULIMPOE	1.518	1.555	1.518	1.555	1.454	1.555	1.434	6.364	1.743	2.104
9	PULAU IX	503	236	503	236	153	236	156	966	16	250
	JUMLAH	8.557	12.825	8.557	12.825	9.673	12.825	9.029	32.367	6.409	11.412

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai

2.2.1.8. Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari

Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai selama periode 2013 - 2017 cenderung menurun. Pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 10,32 persen dan pada tahun 2017 sebesar 9,24. Demikian juga dengan angka kemiskinan cenderung menurun selama periode 2013 - 2017. Proporsi pendapatan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dengan rata- rata di atas USD 1,00.. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Proporsi penduduk dengan pendapatan kuran dari USD 1,00 (PPP)
per kapita per hari Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan (%)
1.	2013	24.300	10,32
2.	2014	22.630	9,56
3.	2015	22.050	9,26
4.	2016	22.510	9,41
5.	2017	22.250	9,24

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai, Bappeda Kab. Sinjai *diolah

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan suatu daerah dapat ditunjukkan melalui kemajuan pembangunan sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi capaian kemajuan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perkembangan IPM Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kabupaten Sinjai	63,47	63,83	64,48	65,36	65,80
2	Provinsi	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34
3	Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa IPM Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2013, IPM Kabupaten Sinjai adalah 68,31 dan mencapai 70,81 pada Tahun 2017, berarti terdapat peningkatan 2,24 dalam lima tahun. IPM ini berkaitan dengan pemenuhan indikator-indikator dalam fokus kesejahteraan masyarakat.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	AMH Usia 15 > Tahun Kab.Sinjai	90,16	94,49	89,12	89,19	90,70

Sumber : BPS Kab.Sinjai

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, angka melek huruf penduduk berusia diatas 15 Tahun adalah 90,16. Sedangkan pada Tahun 2017, angka

melek huruf mencapai angka 90,70. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 2017 penduduk Sinjai yang berusia diatas 15 Tahun dapat membaca dan menulis.

2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Selain Angka Melek Huruf (AMH), indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator ini memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk daerah tersebut. Lamanya sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya seorang duduk di bangku sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai pada jenjang pendidikan terakhir. Di Kabupaten Sinjai, rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-Rata Lama Sekolah Sinjai	7,76	7,03	7,05	7,06	7,28
2	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi	8,01	7,49	7,64	7,75	7,95
3	Rata-Rata Lama Sekolah Nasional	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10

Sumber : BPS Kab.Sinjai

2.2.2.3. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di kabupaten sinjai dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan provinsi masih berada dibawah rata-rata sebesar 13,28 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat harapan lama sekolah masih perlu ditingkatkan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Sinjai	11,79	11,96	12,34	12,83	12,84
2	Provinsi	12,52	12,90	12,99	13,16	13,28
3	Nasional	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85

Sumber : BPS Kab.Sinjai

2.2.3.4. Angka Partisipasi Kasar

Tabel 2.44
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013-2017
Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sinjai

NO	Uraian	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	SD/MI/Sederajat :	105,98	101,25	105,63	108,89	113,98
2	SMP/MTS/Sederajat:	116,51	109,12	109,04	89,46	82,08
3	SMA/MA/Sederajat:	82,22	83,93	83,31	85,53	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sinjai

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Hal ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Perkembangan angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat pada tahun 2013 mencapai 105,98 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai 113,98 % dan tingkat SMP/MTS/Sederajat pada tahun 2013 mencapai 116,51 % mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai 82,08 % sedangkan tingkat SMA/ MA/sederajat pada tahun 2013 mencapai 82,22 dengan tiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai 85,53 %. Pembangunan Pendidikan Menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat selama periode 2013-2016 capaian APK SMA/SMK/MA sebesar 85,53% dan untuk tahun 2017-2018 sudah beralih ke tingkat Provinsi.

2.2.2.5. Angka Pendiidkan yang ditamatkan

Tabel 2.45
Persentase angka pendidikan yang ditamatkan Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Sederajat :					
1.1.	Σ penduduk yg tamat pada usia 12 thn	5.123	5.166	5.280	5.211	4.853
1.2	Σ penduduk usia 12 th	-	-	-	-	-
1.3	Persentase	-	-	-	-	-
2	SMP/MTS/Sederajat:	4.069	4.167	4.360	4.333	4.627
2.1	Σ penduduk yg tamat pada usia 15 thn	-	-	-	-	-
2.2	Σ penduduk usia 15 th	-	-	-	-	-
2.3	Persentase	-	-	-	-	-
3	SMA/MA/Sederajat:					
3.1	Σ penduduk yg tamat pada usia 18 thn	3.211	3.218	3.298	3.255	-
3.2	Σ penduduk usia 18 th	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.3	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sinjai

Persentase angka pendidikan yang ditamatkan adalah jika responden telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia mencapai pendidikan menengah. Separuh penduduk umur 15 tahun ke atas menyelesaikan SMP/ sederajat. Sedikitnya satu dari empat penduduk tamat SM/ sederajat. Kurang dari 10 persen penduduk umur 15 tahun ke atas yang lulus perguruan tinggi

2.2.2.6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.4.1	SD/MI/paket A					
1.4.1.1	JUMLAH MURID USIA 7-12 THN	31.692	28.617	30.396	29.498	27.350
1.4.1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	32.381	32.381	34.545	29.498	27.350
1.4.1.3	APM SD/MI/Paket A	98,47	88.38	87,99	99,50	100
1.4.2	SMP/MTS/paket B					
1.4.2.1	Jumlah murid usia 13-15 thn	12.043	11.274	13.960	13.508	13.176
1.4.2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	14.050	14.132	17.485	13.784	13.176
1.4.2.3	APM SMP/MTS/Paket B	85,72	79.78	79,84	78,27	100
1.4.3	SMA / SMK/MA/PAket C					
1.4.3.1	JUMLAH MURID USIA 16-18 THN	11.148	9.198	11.525	12.405	-
1.4.3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	14.901	14.975	19.883	16.296	-
1.4.3.3	APM SMA / SMK / MA / PAket C	74,81	61.42	57,96	68,37	-

Sumber : Dinas Pedidikan Kabupaten Sinjai

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah peresentase jumlah anak pada kelompok uisa sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Angka partisipasi murni dari tahun ke tahun cenderung meningkat meskipun trend usia penduduk cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 APM tingkat SD sederajat mencapai 98,4 % dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 100 %, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2017 usia 7 - 12 tahun sebanyak 32.281 orang dan tahun 2017 cederung menurun menjadi 27.350 orang.

Untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2013 APM mencapai 85,72 % dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 100 %. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2013 usia 13-15 sebanyak 14.050 orang dan tahun 2017 cenderung menurun menjadi 13.176 orang. Sedangkan pada tingkat SMA sederajat pada tahun 2013 APM 74,81 % dan apada tahun 2017 telah berpindah menjadi kewenangan Provinsi namun pada tahun 2016 telah APM SMA seedrajat menurun menjadi 68,37 %. Perkembangan APM pada semua tingkat pendidikan tidak terlepas dari program penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan program pendidikan menengah dan kejuruan yang mewajibkan penduduk usia 7-12, 13-15 dan tahun 16-18 tahun memperoleh pendidikan.

2.2.2.7. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang di tempuh seseorang selama hidup dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Di Kabupaten Sinjai, angka harapan hidup mengalami peningkatan dari 66,33 pada tahun 2013 menjadi 66,61 pada tahun 2017. Hal ini dapat menunjukkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sinjai. AHH Sinjai juga menunjukkan angka yang lebih tinggi dari AHH Provinsi Sulawesi Selatan dan AHH Nasional.

Tabel 2.47
Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kabupaten Sinjai	66,33	66,36	66,46	66,54	66,61
2	Prov. Sul-Sel	70,60	69,60	69,80	69,82	69,84
3	Nasional	70,07	70,59	70,78	70,90	71,06

Sumber : BPS Kab.Sinjai

2.2.2.8. Angka Kelangsungan hidup bayi

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup mengalami penurunan dari 30/1000 KH pada tahun 2014 menjadi 18/1000 KH pada tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018 sebesar 13/1000 KH maka tingkat pencapaian AKB masih di bawah target. secara umum dapat dijelaskan bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi mengalami peningkatan yang cukup Significan dari tahun ke Tahun. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.48
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi	Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 Tahun)	AKHB
1	2014	30	4.281	128	970
2	2015	17	4.326	73	983
3	2016	19	4.092	138	981
4	2017	18	4.047	71	982

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

2.2.2.9. IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

Secara umum Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sinjai cenderung mengalami peningkatan selama periode 2013 - 2017. Namun untuk pemenuhan pada legislatif masih di bawah kuota 30 persen untuk peran perempuan dalam legislatif. Sedangkan untuk Indeks Pemberdayaan Gender cenderung mengalami kenaikan dan penurunan khususnya pada tahun 2015 mengalami penurunan hanya sebesar 69,69.

Tabel 2.49
IPG dan IDG Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPG	98,48	98,52	98,61	-	98,01
2	IDG	59,99	70,44	69,69	-	72,56

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

2.2.2.10. Persentase Balita Gizi Buruk

Presentase balita gizi buruk berguna untuk mengukur kinerja pelayanan bidang kesehatan di kabupaten/kota. Semakin tinggi jumlah balita dengan status gizi buruk di suatu daerah, maka semakin buruk pula kondisi kesehatan penduduk di daerah tersebut. Hal ini dapat mengindikasikan rendahnya layanan dan akses kesehatan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Di Kabupaten Sinjai, jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan. Pada tahun 2013, jumlah balita dengan gizi buruk adalah 79 orang dengan presentase 0,56 , sedangkan pada tahun 2017, jumlah balita dengan gizi buruk adalah 3 orang dengan

rasio 0,16. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tingkat pelayanan kesehatan dan akses kesehatan di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.50
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sinjai
Tahun 2013 – 2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Balita Gizi Buruk (BGM)	79	151	103	1	3
2	Jumlah Balita	14.068	18.158	17.779	18.158	18.176
3	Persentase	0,56	0,83	0,57	0,50	0,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

2.2.2.11. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Persentase Balita gizi kurang pada tahun 2014 mencapai 0,83 % dan pada tahun 2017 mencapai 0,81 %, jumlah balita gizi kurang mengalami penurunan pada tahun 2014 mencapai 15 1 balita mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 147 balita sedangkan jumlah balita selama empat tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 14.068 balita mengalami peningkatan sebanyak 18,176 pada tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Prevalensi Balita Gizi Kurang
Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ balita gizi kurang	-	151	173	159	147
2	Jumlah Balita	14.068	18.158	17.779	18.158	18.176
3	Persentase	-	0,83	0,97	0,88	0,81

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

2.2.2.12. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif selama lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 83,33 % mengalami peningkatan sebanyak 60 pada tahun 2017, jumlah desa siaga aktif pada tahun 2013 sebanyak 50 desa pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 60 desa sedangkan jumlah desa siaga yang di bentuk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 60 desa. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ desa siaga aktif	50	53	56	59	60
2	Σ desa siaga yg dibentuk	60	60	60	60	60
3	Cakupan	83,33	83,33	93,33	83,33	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

2.2.2.13. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2.53
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angkatan kerja 15 thn ke atas	114.010	113.001	108.593	-	118.332
2	Σ penduduk usia 15 thn ke atas	162.389	164.287	166.348	-	169.981
3	Cakupan	70,21	68,78	65,28	-	69,61

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Angka partisipasi angkatan kerja (APAK) merupakan bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Semakin tinggi APAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif atau produksi barang dan jasa dalam periode tertentu.

Persentase APAK pada periode tahun 2013 sampai tahun 2017 cenderung fluktuatif, dimana tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan dari 70,21 persen menjadi 65,28 persen, namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi sebesar 69,61 persen. Penurunan terjadi akibat adanya kenaikan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas secara signifikan dari tahun 2013 sebesar 162.389 orang menjadi 169,981 di tahun 2017, sementara jumlah penduduk angkatan kerja turun dari angka 114.010 di tahun 2013 menjadi 108.593 ditahun 2015.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan aktifitas ekonomi, sementara jumlah angkatan kerja cenderung menurun.

2.2.2.14. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2.54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Penduduk Angkatan	114.010	113.001	108.593	-	118.332

	Kerja					
2	Σ Penduduk usia kerja (15-64) thn	145.941	147.535	149.041	-	151.828
3	Persentase	78,12	76,59	72,86	-	77,94

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja (PUK). Dengan mengetahui TPAK dan jumlah PUK, maka angkatan kerja untuk tiap kelompok dapat diketahui dengan menghitung angkatan kerja = TPAK x PUK. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi maupun faktor demografis. Beberapa faktor demografis yang dianggap penting pengaruhnya terhadap TPAK adalah jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan.

Persentase TPAK mengalami penurunan di tahun 2013 sampai tahun 2015, namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2017. Penurunan terjadi karena jumlah penduduk angkatan kerja turun dari angka 114.010 di tahun 2013 menjadi 108.593 di tahun 2015, sementara jumlah penduduk usia kerja mengalami kenaikan, dimana tahun 2013 sebanyak 145.941 orang, naik menjadi 149.041 orang di tahun 2015. Namun, tahun 2017 jumlah penduduk angkatan kerja kembali naik ke angka 118.332, sementara penduduk usia kerja sebesar 151.828, dengan persentase sebesar 77,94.

2.2.2.15. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.55

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ pengangguran terbuka usia angkatan kerja	478	989	1.684	-	5.362
2	Σ Penduduk angkatan kerja	110.830	113.001	108.593	-	118.332
3	Persentase	0,42	0,88	1,55	-	4,53

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Penganggur merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Namun masalah lainnya yang juga sangat penting adalah setengah penganggur yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu. Setengah penganggur ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang

kondusif, misalnya karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda, karena penganggur adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah penganggur menggunakan pendekatan jam kerja.

Penganggur terbuka adalah mereka yang (a) mencari pekerjaan, (b) yang mempersiapkan usaha, (c) yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dilihat dari jumlah pengangguran dari tahun 2013-2017 pengangguran di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2013 sebanyak 478 orang, naik menjadi 989 orang ditahun 2014, kembali naik ditahun 2015 menjadi 1.684 orang, dan naik drastis ditahun 2017 menjadi 5.362 orang.

Tingkat penganggur terbuka mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana tahun 2013 sebesar 0,42 persen, naik menjadi 4,53 persen di tahun 2017. Kenaikan angka pengangguran ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah angkatan kerja dimana tahun 2015 angkatan kerja kabupaten sinjai sebesar 108.593, tahun 2017 naik sebanyak 9.739 atau menjadi 118.332, dimana kenaikan angkatan tersebut tersebut tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang terbuka untuk menyerap kenaikan angkatan kerja tersebut.

2.2.2.16. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tabel 2.56
Rasio penduduk yg bekerja di Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk yang bekerja	113.532	112.012	106.909	-	112.970
2	Angkatan Kerja	114.010	113.001	108.593	-	118.332
3	Rasio	99,58	99,12	98,45	-	95,47

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Penduduk yang bekerja adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan sekurang-kurangnya 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu sebelum pencacahan. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja (PYB) di Kabupaten Sinjai selama periode tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. PYB pada tiga tahun pertama cenderung semakin menurun, yakni dari 113.532 orang pada tahun 2013, bergerak turun menjadi 112.012 orang pada tahun 2014, dan kembali turun menjadi 106.909 orang pada tahun 2015, namun ditahun 2017 bergerak naik menjadi 112.970 orang.

Rasio penduduk yang bekerja tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan akibat terjadinya penurunan jumlah angkatan kerja. Meskipun di tahun 2017 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan, namun terjadinya kenaikan jumlah penduduk yang bekerja tidak mampu mendorong kenaikan persentase rasio penduduk yang bekerja di kabupaten Sinjai.

Tahun 2013 hingga 2017 dari seluruh penduduk yang bekerja, lebih dari 50 persen bekerja pada sektor pertanian (sektor primer). Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kontribusi sektor pertanian merupakan yang terbesar dalam pembentuk PDRB Kabupaten Sinjai. Keadaan ini juga hampir sejalan dengan keadaan bahwa sebagian besar penduduk angkatan kerja yang bekerja berpendidikan maksimum SD. Walaupun tidak bisa disimpulkan secara pasti, tetapi angka-angka ini setidaknya mengindikasikan bahwa lima tahun terakhir di kabupaten Sinjai, sebagian besar penduduk angkatan kerja yang bekerja berpendidikan maksimum SD bekerja pada sektor pertanian, karena sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja tanpa memandang keahlian maupun tingkat pendidikan, selain itu lahan pertanian yang masih melimpah di Kabupaten Sinjai.

2.2.2.17. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Tabel 2.57

Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PDRB	4.706.672,89	5.035.299,46	5.414.779,96	5.802.600,18	6.218.715,48
2	Σ Tenaga kerja	-	4.963	5.940	6.954	10.010
3	Persentase	-	101,45	91,14	83,43	62,14

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan output perekonomian yang lebih dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan lapangan kerja seluas-luasnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan baik di dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yakni kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi pada lingkup wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang cepat diharapkan dapat dapat mengurangi ketimpangan atau distribusi pendapatan yang diterima oleh anggota masyarakatnya.

Sesuai tabel diatas, laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja di Kabupaten Sinjai tahun 2013-2017 menunjukkan terjadinya penurunan, dimana tahun 2014 sebesar 101,45 persen, turun menjadi 91,14 persen pada tahun 2015, turun kembali menjadi 83,43 persen pada tahun 2016, dan kembali turun di tahun 2017 pada angka 62,14 persen. Penurunan terjadi akibat pertambahan jumlah tenaga kerja yang lebih besar/cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto, sehingga membuat laju pertumbuhan PDB melambat.

2.2.2.18. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam menentukan suatu pelayanan yang telah sesuai standar operasional prosedur. Untuk pelayanan kepada masyarakat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat pelayanan. Untuk Kabupaten Sinjai standar pelayanan masyarakat di lakukan penilaian pada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu Catatan Sipil, Rumah Sakit Daerah dan Pelayanan PTSP dengan data IKM seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Data IKM Capil	65,24	-	76,91	84,30	76,14
2.	Data IKM RSUD	68,48	-	78,03	88,40	73,09
3	Data IKM PTSP	65,14	-	76,67	81,60	75,29

Sumber : Sekertariat Daerah Kab. Sinjai

2.2.2.19. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai sebesar 79.491.453.854,80 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 113.973.757.128,76 . Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel 2.59
Persentase PAD terhadap pendapatan
Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PAD	-	46.404.259.984	75.599.713.319,86	79.491.453.854,80	113.973.757.128,76
2	Σ Pendapatan daerah	-	782.995.287.787,62	985.110.700.599,91	1.122.559.586.106,60	1.076.481.144.522,76
3	Persentase	-	5,93	7,67	7,08	10,59

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai

2.2.2.20. Indeks Reformasi Birokrat

Kinerja pelayanan kepala daerah dapat dilihat melalui e - government. Kabupaten Sinjai dalam menjalankan pelayanan berasaskan reformasi birokrasi telah melakukan beberapa kebijakan seperti pengintegrasian perencanaan dan penganggaran secara online. Indeks reformasi birokrasi terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.60
Indeks Reformasi Birokrat Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Reformasi Birokrat	-	43,97	67,2	71,85	75,13

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Sinjai

2.2.2.21. Capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)

Nilai Akuntabilitas pemerintah sebagai bentuk penilaian akuntabilitas pemerintah daerah oleh Kemenpan. Kabupaten Sinjai kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan Nilai SAKIP secara signifikan dan pada tahun 2017 nilai SAKIP sudah mendapatkan nilai “B”. Kabupaten Sinjai selama

Tabel 2.61
Capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah {SAKIP}
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
SAKIP	C	C	CC	CC	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Sinjai

2.2.2.22. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Kabupaten Sinjai selama tiga tahun berturut-turut sejak Tahun 2013 hingga 2015 Telah mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan selama dua tahun berturut-turut sejak Tahun 2016 hingga 2017 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Tabel 2.62
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinjai

2.2.2.23. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan

Pencapaian skor pola pangan harapan tiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 mencapai 83,20 % sedangkan tahun 2017 mencapai 87,00 % . Angka kecakupan gizi mengalami fluktuasi tiap tahun pada tahun 2017 mengalami penurunan

sebanyak 1.879 dan bobot masing-masing kelompok pangan setiap tahun sama sebanyak 11,5. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Pencapaian skor pola pangan harapan Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka kecukupan gizi	2147	2012	1785	2150	1879
2.	Bobot masing-masing kelompok pangan	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
3.	Pencapaian	83,2	85,2	81,5	83,8	87,0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai

2.2.2.24. Penguatan Cadangan Pangan

Jumlah cadangan pangan kabupaten dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 24 ton tidak ada perubahan. Penguatan cadangan pangan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami perubahan karena kondisi ketersediaan pangan utama kabupaten Sinjai sangat tersedia(surplus) .Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64
Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ cadangan pangan Kabupaten	24	24	24	24	24
2.	100 Ton	100	100	100	100	100
3.	Persentase	24	24	24	24	24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai

2.2.2.25. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Tingkat ketersediaan pangan utama beras dan ketersediaan pangan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari 2.1044 sampai dengan 5.087,34. Hal ini disebabkan ketersediaan pangan beras dan pangan lainnya sangat tersedia. Sehingga penanganan daerah rawan pangan dalam kategori aman. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.65
Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2013-2017
Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan Pangan	2.104,4	2.189,62	3.474,84	4.201,70	5.087,34
2.	Ketersediaan Beras	1.040,7	1.637,93	2.265,17	2.203,45	2.791,09
3.	Persentase	2.104,4	2.189,62	3.474,84	4.201,70	5.087,34

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai

2.2.2.26. Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector pertanian/perkebunan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 2.535.503,24 meningkat menjadi 4.247.419,14 sedangkan jumlah PDRB juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 5.601.468,37 menjadi 9.189.912,46 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya turun naik dari tahun 2013 mencapai 45,26 % naik menjadi 46,25 % pada tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami penimngkatan mencapai 46,53 % dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 46,26 % sedang pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 46,22 %. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.66
Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sector pertanian /perkebunan	2.535.503,24	2.999.105,52	3.497.982,06	3.842.133,83	4.247.419,14
2.	Jumlah PDRB	5.601.468,37	6.484.191,29	7.517.873,63	8.305.892,43	9.189.912,46
3.	persentase	45,26	46,25	46,53	46,26	46,22

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

2.2.2.27. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector pertanian/perkebunan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 462.019,40 meningkat menjadi 4.247.49,14 sedangkan jumlah PDRB sector pertanian/perkebunan juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 2.535.503,24 meningkat menjadi 4.247.419,14 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya turun naik dari tahun 2013 mencapai 18,22 % turun menjadi 17,87 % pada tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami penimngkatan mencapai 17,56 % dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 17,12 % sedang pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 17,34 %. Disebabkan karena adanya iklim tidak menentu. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.67
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sektor pertanian	462.019,40	535.880,17	3.497.982,06	3.842.133,83	4.247.419,14

	(Palawija)					
2.	Σ PDRB sector pertanian /perkebunan	2.535.503,24	2.999.105,52	3.497.982,06	3.842.133,83	4.247.419,14
3.	persentase	18,22	17,87	17,56	17,12	17,34

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

2.2.2.28. Produksi Sektor Pertanian

Jumlah produksi komoditi pertanian dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 129.480 Ton meningkat menjadi 153.222 Ton pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada table berikut .

Tabel 2.68
Produksi Sektor Pertanian Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Produksi Komoditas pertanian/ton	129.480	134.344	142.128	141.552	153.222

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

2.2.2.29. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi perkebunan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 308.012,93 mengalami peningkatan menjadi 491.001,65 tahun 2017 sedangkan jumlah PDRB sector pertanian/perkebunan juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 2.535.503,24 meningkat menjadi 4.247.419,14 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya tiap tahunnya mengalami penurunan tahun 2013 mencapai 12,15 % turun menjadi 11,56 % pada tahun 2017. Disebabkan karena adanya iklim tidak menentu. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.69
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi Perkebunan (Tan.Keras)	308.012,93	357.253,45	409.543,74	438.464,31	491.001,65
2.	Σ PDRB sector pertanian /perkebunan	2.535.503,24	2.999.105,52	3.497.982,06	3.842.133,83	4.247.419,14
3.	Persentase	12,15	11,91	11,71	11,41	11,56

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

2.2.2.30. Produksi Sektor Perkebunan

Jumlah produksi komoditas perkebunan dari tahun 2013 mencapai 10.335 ton mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 18.790 ton dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 19.014 ton dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 18.692 ton hal ini di sebabkan karena faktor cuaca / iklim dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 19.300 ton. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.70
Produksi Sektor Perkebunan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Produksi Komoditas perkebunan/ton	10.335	18.790	19.014	18.692	19.300

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

2.2.2.31. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB dari tahun 2013 mencapai 69,92 % mengalami kenaikan pad atahun 2017 sebesar 76,73 %. Jumlah Produksi padi /bahan pangan utama lokal hasil Kelompok tani (Ton) pada tahun 2013 sebesar 84,150 Ton pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 100.875 ton sedangkan jumlah produksi padi /bahan pangan utama di daerah pada tahun 2013 sebesar 120.341 ton dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 131.476 ton. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Produksi padi/bahan pangan utama local hasil kelompok petani (Ton)	84.150	84.300	84.300	99.225	100.875
2.	Σ produksi padi/bahan pangan utama di daerah	120.341	128.788	117.074	126.686	131.476
3.	Persentase	69.92	65,46	72,00	78,30	76,73

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

2.2.2.32. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector kehutanan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 4.331,91 mengalami peningkatan menjadi 5.148,49 tahun 2017 sedangkan jumlah PDRB juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 5.601.468,37 meningkat menjadi 9.189.912,46 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya tiap tahunnya mengalami penurunan tahun 2013 mencapai 0,08 % turun menjadi 0,06 % pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.72
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sector kehutanan	4.331,91	4.684,40	4.738,44	4.824,51	5.148,49
2.	Σ PDRB	5.601.468,37	6.484.191,29	7.517.873,63	8.305.892,43	9.189.912,46
3.	Persentase	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06

Sumber : BPS Kab. Sinjai

2.2.2.33. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector pertambangan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 117.890,09 meningkat menjadi 239.090,69 tahun 2017 sedangkan jumlah PDRB juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 5.601.468,37 meningkat menjadi 9.189.912,46 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya dari tahun 2013 mencapai 2,10 % mengalami peningkatan menjadi 2,46 % pada tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami peningkatan mencapai 2,62 % dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,77 % sedang pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,60 %. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.73
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sector Pertambangan	117.890,09	159.767,26	196.741,71	230.442,20	239.090,69
2.	Σ PDRB	5.601.468,37	6.484.191,29	7.517.873,63	8.305.892,43	9.189.912,46
3.	Persentase	2,10	2,46	2,62	2,77	2,60

Sumber : BPS Kab. Sinjai

2.2.2.34. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector kelautan dan perikanan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 829.810,13 meningkat menjadi 1.696.592,53 sedangkan jumlah PDRB juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 5.601.468,37 meningkat menjadi 9,189.912,46 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 14,81 % meningkat menjadi 18,46 % pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.74
Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan terhadap PDRB
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari	829.810,13	1.057.636,89	1.294.853,05	1.471.588,94	1.696.592,53

	sector Kelautan dan Perikanan					
2.	Σ PDRB	5.601.468,37	6.484.191,29	7.517.873,63	8.305.892,43	9.189.912,46
3.	Persentase	14,81	16,31	17,22	17,22	18,46

Sumber : BPS Kab. Sinjai

2.2.2.35. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector perdagangan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 671.801,06 meningkat menjadi 1.093.297,22 sedangkan jumlah PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 5.601.468,37 meningkat menjadi 9,189.912,46 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 11,99 % mengalami penurunan menjadi 11,44 % pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 11,28 % dari tahun 2015 mengalami peningkatan tahun 2017 mencapai 11,90 %. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.75
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sector Perdagangan	671.801,06	741.541,21	848.327,07	962.013,87	1.093.297,22
2.	Σ PDRB	5.601.468,37	6.484.191,29	7.517.873,63	8.305.892,43	9.189.912,46
3.	Persentase	11,99	11,44	11,28	11,58	11,90

Sumber : BPS Kab. Sinjai

2.2.2.36. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri pada tahun 2013 sebesar 153.024,45 meningkat menjadi 177.358,51 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 204.934,71 dan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 227.277,41 dan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 253.708,71 sedangkan jumlah PDRB juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 5.601.468,37 meningkat menjadi 9,189.912,46 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 2,73 % mengalami peningkatan sebesar 2,76 %. Pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.76
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sector	153.024,45	177.358,51	204.934,71	227.277,41	253.708,71

	Industri					
2.	Σ PDRB	5.601.468,37	6.484.191,29	7.517.873,63	8.305.892,43	9.189.912,46
3.	Persentase	2,73	2,74	2,73	2,74	2,76

Sumber : BPS Kab. Sinjai

2.2.2.37. Potensi Populasi Aren

Tabel 2.77
Potensi Populasi Aren
Tahun 2017 Kabupaten Sinjai

NO	Kecamatan	Desa/ Kel.	TM (Pohon)	TBM (Pohon)	Jumlah (Pohon)
1.	Sinjai Utara	2	89	96	185
2.	Sinjai Timur	4	379	282	661
3.	Sinjai Selatan	7	2.037	3.414	5.451
4.	Sinjai Tengah	10	3.167	3.610	6.777
5.	Bulupoddo	7	2.865	4.182	7.047
6.	Tellulimpoe	4	892	735	1.627
7.	Sinjai Barat	5	5.434	4.965	10.339
8.	Sinjai Borong	6	5.964	6.037	12.001
	Jumlah	45	20.827	23.321	44.148

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai

Potensi populasi aren di Kabupaten Sinjai tersebar pada 8 (Delapan) Kecamatan yang ada di daerah. Saat ini dari total populasi aren sebesar 44.148 pohon, terdapat 20.827 tanaman menghasilkan. Akan tetapi karena keterbatasan teknologi dan peralatan yang dimiliki petani baru sekitar 30 % dari tanaman menghasilkan tersebut yang disadap oleh petani untuk diolah menjadi gula aren.

Program dan kegiatan pemerintah didorong untuk memaksimalkan potensi yang belum dimanfaatkan tersebut di samping untuk meningkatkan produksi mendukung ketahanan pangan sebagai substitusi gula pasir, juga dapat membantu pencipta lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani penggarap

2.2.2.38. Potensi Pengrajin Gula Aren

Tabel 2.78
Potensi Pengrajin Gula Aren
Tahun 2017 Kabupaten Sinjai

NO	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pengrajin (KK)
1.	Sinjai Utara	2	5
2.	Sinjai Timur	4	17
3.	Sinjai Selatan	7	276
4.	Sinjai Tengah	10	317
5.	Bulupoddo	7	224

6.	Tellulimpoe	4	65
7.	Sinjai Barat	5	216
8.	Sinjai Borong	6	329

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Kabupaten Sinjai mempunyai konstitusi yang kuat untuk mendorong pengembangan seluruh potensi ekonomi yang ada agar dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Termasuk komoditi aren yang menjadi tumpuan pendapatan setidaknya 1.449 KK atau sekitar 6.000 jiwa (sekitar 2,5 % penduduk sinjai). Sebagai wujud dukungan pemerintah Kabupaten Sinjai akan menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi serta dukungan program untuk mendukung pengembangan industrialisasi gula aren.

2.2.2.39. Rata-rata Produksi Gula Aren / Hari

Tabel 2.79
Rata-rata Produksi Gula Aren / Hari
Tahun 2017 Kabupaten Sinjai

NO	Kecamatan	Desa/Kel.	Rata-rata Produksi /Hari (Kg)
1.	Sinjai Utara	2	35
2.	Sinjai Timur	4	127
3.	Sinjai Selatan	7	2.760
4.	Sinjai Tengah	10	3.170
5.	Bulupoddo	7	2.240
6.	Tellulimpoe	4	520
7.	Sinjai Barat	5	2.592
8.	Sinjai Borong	6	3.948
	Jumlah	45	15.392

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai

Produksi gula aren yang dilakukan oleh para petani di Kabupaten Sinjai rata-rata sebesar 15.392 Kg perhari. Produksi sebesar itu mempunyai nilai ekonomi sekitar Rp. 231.000.000 /hari merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat yang cukup signifikan.

Pengelolaan produksi gula aren yang dihasilkan masyarakat dilakukan secara tradisional dengan sedikit sekali sentuhan teknologi. Produksi dan nilai ekonomisnya dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi jika diberikan sentuhan teknologi produksi pengemasan dan pemasaran. Hal tersebut yang menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah daerah untuk dilaksanakan sesuai RPJMD 2018-2023. Diharapkan

melalui program ini akan memberikan dampak nilai tambah ekonomi bagi keluarga petani gula aren yang ada saat ini.

2.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahrag sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Kualitas hidup manusia yang baik memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya saingnya. Kemampuan masyarakat suatu daerah untuk bersaing adalah faktor penting untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai penggerak roda pembangunan daerahnya.

2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk

Tabel 2.80
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Grup Kesehatan	11	11	12	13	
2.	Jumlah Penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3.	Persentase	0,46	0,47	0,50	0,54	

2.2.3.2. Cakupan pembinaan olahraga

Tabel 2.81
Cakupan pembinaan olahraga
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ cabang olahraga yg dibina	24	24	24	24	24
2	Σ seluruh cabang olahraga yg ada /terdaftar	24	24	24	24	24
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan jumlah cabang olahraga yang dibina dan terdaftar sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 24 cabang olahraga, persentase olahraga yang dibina dengan cabang olahraga yang ada/terdaftar adalah 100 %.

2.2.3.3. Cakupan pembinaan atlet muda

Tabel 2.82
Cakupan pembinaan atlet muda
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ atlet pelajar yg dibina	60	70	80	85	100
2	Σ seluruh atlet pelajar	100	100	130	170	210
3.	Persentase	60,00	70,00	61,54	50,00	47,62

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan jumlah atlet pelajar yang dibina pada tahun 2013 sebanyak 60 orang dari jumlah keseluruhan atlet pelajar 100 orang, setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah atlet pelajar meningkat menjadi 210 orang dan yang dibina berjumlah 100 orang.

2.2.3.4. Jumlah prestasi olahraga

Tabel. 2.83
Jumlah prestasi olahraga
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yg di menangkan dalam 1 Thn	9	6	-	-	9

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan pada tahun 2013 jumlah cabang olahraga yang berprestasi ada 9 cabang, tahun 2014 berjumlah 6 cabang sedangkan tahun 2017 berjumlah 9 cabang olahraga, prestasi dicapai pada PORDA di Pinrang.

2.2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2.4.1 Fokus Kemampuan Daerah

2.2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan. Total pengeluaran rumah tangga dan jumlah

rumah tangga tiap tahun meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada table berikut :

Tabel 2.84
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran RT	6,084,000	6,939,400	7,152,800	7,883.500	8.808.900
2	Jumlah RT	12,644,000	14,479,400	17,810,000	16.125.700	0
3	Persentase	0,48	0,48	4,02	0	0

Sumber ; Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai

2.2.4.1.2. Rata-rata Pengeluaran Perkapita

Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Sinjai secara umum masih rendah dibandingkan dengan rata-rata per kapita Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari data menunjukkan perbedaan yang cukup jauh. Perbedaan rata-rata pengeluaran ini disebabkan oleh rata-rata pendapatan per kapita masyarakat. Rata-rata pengeluaran perkapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.85
Rata-rata Pengeluaran Perkapita

NO	Rata-rata Pengeluaran perkapita	Sinjai	Provinsi
1.	Makanan	385.633	859.529
2.	Non Makanan	352.321	407.389
3.	Total Pengeluaran	737.954	1.266.918

Sumber ; Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai

2.2.4.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan indicator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani di suatu daerah. Untuk Kabupaten Sinjai, NTP rata-rata 2017 adalah 100,85. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Indeks yang diterima petani lebih tinggi dan menjadi lebih besar dari indeks yang dibayar petani. Untuk lebih rinci, penjabaran NTP Kabupaten Sinjai untuk tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.86
Nilai Tukar Petani Kabupaten Sinjai Tahun 2017

No	URAIAN	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks yang diterima Petani (It)	122,44	122,04	121,35	120,71	121,30	122,30	122,59	123,49	122,58	123,34	124,26	124,90	122,61
2	Indeks yang di bayar Petani (Ib)	119,85	120,34	120,46	120,57	120,80	121,65	122,37	122,61	122,56	122,41	122,45	122,80	121,57
3	NTP	102,16	101,41	100,74	100,11	100,41	100,54	100,18	100,72	100,02	100,76	101,48	101,71	100,85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Kab. Sinjai

2.2.4.1.4. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan perkapita

Pengeluaran RT non pangan setiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 6.560.300 mengalami peningkatan tahun 2017 sebesar 8,166.800 sedangkan jumlah pengeluaran setiap thun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 12.644.000 dan pada tahun 2017 sebesar 16.25.700 sedangkan presentase tiap berubah2 ubah tiap tahunnya, tahun 2013 sebesar 51,88 % mengalami peningkatan sebesar 52,07 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 52,94 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 50,52 % dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 50,64 %. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.87
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran RT Non Pangan	6,560,300	7,540,000	8,047,900	8,049,200	8,166,800
2	Total Pengeluaran	12,644,000	14,479,400	15,200,700	15.932.700	16.125.700
3	Persentase	51,88	52,07	52,94	50,52	50,64

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai

2.2.4.1.5. Produktivitas Total Daerah

Nilai tambah sector dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 3 mengalami peningkatan sebesar 36 pada tahun 2017, sedangkan jumlah angkatan kerja tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 sebesar 80 tidak mengalami perubahan pada tahun 2017 sebesar 80 sedangkan prosentasenya mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 3,75 % mengalami peningkatan sebesar 45,00 % pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.88
Produktivitas Total Daerah
Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai tambah sector	3	5	7	29	36
2	Σ Angkatan kerja	80	80	80	80	80
3	Persentase	3,75	6,25	8,75	23,75	45,00

2.2.4.1.6. Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total Desa

Nilai tambah sector dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 3 mengalami peningkatan sebesar 36 pada tahun 2017, sedangkan jumlah angkatan kerja tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 sebesar 80 tidak

mengalami perubahan pada tahun 2017 sebesar 80 sedangkan prosentasenya mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 3,75 % mengalami peningkatan sebesar 45,00 % pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.89
Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa
Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Desa atau Kel. Berswasembada	3	5	7	19	36
2	Σ Desa atau Kel.	80	80	80	80	80
3	Persentase	3,75	6,25	8,75	23,75	45,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sinjai

2.2.4.1.7. Rasio Ketergantungan

Tabel 2.90
Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Tahun 2017
Kabupaten Sinjai

KELOMPOK UMUR	JUMLAH
Kelompok Usia Belum Produktif: 0 – 14 Tahun	72.064 Jiwa
Kelompok Usia Produktif: 15 – 64 Tahun	149.041 Jiwa
Kelompok Usia Tidak Produktif: 65 +	16.994 Jiwa
Total	238.099 Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai

2.2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.2.4.2.1. Jumlah Orang / Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.91
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Orang	Orang	231.012	256.680	285.200	316.889	288.081
2	Σ Barang	Ton	2.310.122	2.566.802	2.852.002	3.168.891	2.880.810

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2017 yaitu menggmambarkan mengalami peningkatan secara signifikan , yaitu rata-rata hingga 10 % setiap tahunnya, terlihat pada tabel tahun 2013-2016. Adapun hal-hal yang mempengaruhi, yaitu selain alat angkut yang semakin memadai juga akses jalan yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, sehingga

menimbulkan bangkitan pergerakan. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sejumlah 288.081 orang. Hal ini dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor : (1). Sebagian besar alat angkutan umum mulai beralih ke angkutan pribadi (plat hitam), sehingga penumpang tidak dapat dideteksi karena tidak melalui alur terminal. (2). Terminal tidak lagi merupakan simpul pergerakan karena penumpang rata-rata terjemput di rumah masing-masing. (3). Perusahaan mobil kebanyakan memiliki pool tersendiri. Begitupun dengan jumlah barang yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013-2016, dan namun mengalami penurunan di tahun 2017 hal ini mengikuti jumlah orang yang terangkut pada angkutan umum.

2.2.4.2.2. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Tabel 2.92
Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun
Kabupaten Sinjai tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015		2016		2017	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	Dermaga	169.185	2.537.776	187.983	2.819.751	170.894	2.563.410
2	Bandara	-	-	-	-	-	-
3	Terminal	285.200	2.852.002	316.889	3.168.891	288.081	2.880.810
	Jumlah	454.385	5.389.778	504.872	5.988.642	458.975	5.444.220

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Sinjai, jumlah orang yang terangkut melalui dermaga mengalami kenaikan mencapai rata-rata 10 % setiap tahunnya terlihat pada tahun 2013-2016, hal ini dipengaruhi karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dan banyaknya aparat pemerintah yang bertugas di Pulau Sembilan melakukan perjalanan setiap hari kerja, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah penumpang kapal laut, hal ini disebabkan karena aparat pemerintah yang melakukan tugas di Pulau Sembilan diupayakan untuk berdomisili tetap di Pulau Sembilan, sehingga penumpang kapal laut akan ramai hanya terjadi dihari libur, adapun jumlah barang yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013-2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017, hal ini mengikuti jumlah orang yang terangkut melalui dermaga.

Untuk jumlah orang/barang melalui bandara tidak ada, karena di Kabupaten Sinjai belum terdapat bandara. Sedangkan jumlah orang/barang yang terangkut melalui terminal mengalami secara signifikan, yaitu rata-rata hingga 10 % setiap tahunnya, terlihat pada tabel 2013-2016. Adapun hal-hal yang mempengaruhi, yaitu selain alat

angkutan yang semakin memadai juga akses jalan yang semakin baik dan pertumbuhan

ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, sehingga menimbulkan bangkitan pergerakan. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sejumlah 288.081 orang. Hal ini dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor : (1). Sebagian besar alat angkutan umum mulai beralih ke angkutan probadi (plat hitam), sehingga penumpang tidak dapat dideteksi karena tidak melalui alur terminal. (2). Terminal tidak lagi merupakan simpul pergerakan karena penumpang rata-rata terjemput dirumah masing-masing. (3). Perusahaan mobil kebanyakan memiliki pool tersendiri. Begitupun dengan jumlah barang yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013-2016, dan namun mengalami penurunan di tahun 2017 hal ini mengikuti jumlah orang yang terangkut melalui terminal.

2.2.4.2.3. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan kabupaten Sinjai merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai pusat dari semua kegiatan untuk mendukung pertumbuhan wilayah baik secara ekonomi maupun pemerintahan yang berskala makro seperti kabupaten atau penggabungan beberapa kecamatan

Tabel 2.93
Luas Kawasan Perkotaan Berdasarkan RTRW Tahun 2017 Kabupaten Sinjai

NO	PUSAT PUSAT KEGIATAN	DESKRIPSI	KAWASAN PERKOTAAN	2017 LUAS (Ha)
1	2	3	4	5
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan	Kawasan PKL terdiri atas :	
			Kec. Sinjai Utara dan sebagian Kecamatan Sinjai Timur (Desa Saukang dan Kelurahan Samataring)	4.105,02
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa	Kawasan PPK terdiri atas :	
			Kawasan Perkotaan Kecamatan Sinjai Utara	4.053,39
			Kawasan Perkotaan Manipi Kecamatan Sinjai Barat	9,14
			Kawasan Perkotaan Bikeru Kecamatan Sinjai Selatan	16,72
			Kawasan Perkotaan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe	9,27
			Kawasan Perkotaan Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah	1.074,96
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa	Kawasan PPL terdiri atas :	
			Kawasan Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo	99.47
			Kawasan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong	66.97
			Jumlah	9.268,50

Sumber : PUPR Kabupaten Sinjai

2.2.4.2.4. Jenis dan Jumlah Restoran

Tabel 2.94
Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Sinjai Tahun 2017

No	Uraian	Tahun 2017	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Usaha rumah makan kelas	-	-
2	Jenis Usaha restoran	-	-
3	Jenis Usaha rumah makan	44	1079

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai

2.2.4.2.5. Jenis dan Jumlah Hotel/Penginapan

Tabel 2.95
Jenis dan Jumlah Hotel/ Penginapan Di Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

NO	Tahun	Hotel & Akomodasi Lainnya	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	2013	25	296	499
2	2014	25	229	489
3	2015	25	296	490
4	2016	26	304	500
5	2017	30	297	515

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jenis dan jumlah hotel / penginapan di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 hotel dan akomodasi lainnya mengalami peningkatan di tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah kamar sebanyak 304 kamar dan mengalami penurunan pada tahun 2017 dimana jumlah kamar sebanyak 297 kamar sedangkan jumlah tempat tidur dari tahun 2016 sebanyak 500 tempat tidur mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 515 tempat tidur, hal ini disebabkan karena jumlah hotel bertambah sedangkan jumlah kamar berkurang disebabkan karena rata-rata kamar terdapat dua tempat tidur.

2.2.4.2.6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel.2.96
Persentase penduduk berakses air minum Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penduduk berakses air minum	49.164	56.364	58.720	59.520	164.809
2.	Jumlah penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3.	Persentase	20,93	23.83	24,66	24,83	65,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Persentase penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2016 sebanyak 24,83 persen meningkat sebesar 65,23 Persen pada tahun 2017. Begitupun jumlah penduduk sebanyak 239.689 orang pada tahun 2016 Meningkat dari tahun 2017 sebanyak 252.627 orang.

2.2.4.2.7. Persentase rumah tangga pengguna listrik

Tabel 2.97
Persentase rumah tangga pengguna listrik
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ rumah tangga pengguna listrik	-	36.080	39.196	44.332	46.605
2	Σ seluruh rumah tangga	-	-	-	56,995	-
3	Persentase	-	-	-	77,79	-

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

2.2.4.2.8. Rasio ketersediaan daya listrik

Tabel 2.98
Rasio ketersediaan daya listrik Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Daya listrik terpasang	-	28.895.400	31.737.950	36.338.800	39.852.850
2	Σ kebutuhan	-	-	-	48.325.109	-
3	Rasio	-	-	-	75,20	-

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

2.2.4.2.9. Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Tabel. 2.99
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Penduduk yg menggunakan HP/Telepon	-	2.164	2.665	3.812	5.290
2.	Σ Penduduk	234.886	234.886	238.099	239.689	252.627
3	Persentase	-	0,92	1,12	1,59	2,09

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 0,92 %dan tahun 2017 sebanyak 2,09 % sedangkan jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2013 sebanyak 2.164 orang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 5.290 orang, sedangkan jumlah penduduk lama waktu lima tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan dari tahun ke tahun ini terjadi karena tingkat keingintahuan masyarakat akan sarana

komunikasi yang sangat tinggi. Sehingga daya beli HP di masyarakat cenderung meningkat.

2.2.5. Fokus Iklim Berinvestasi

2.2.5.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Daya saing suatu daerah tidak terlepas dari kondisi keamanan. Di Kabupaten Sinjai, kondisi keamanan dapat dilihat dari semakin turun angka kriminalitas. Pada tahun 2016, jumlah tindak kejahatan atau pelanggaran yang terlapor adalah 297 dan turun tindak kejahatan/pelanggaran dibandingkan pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Kabupaten Sinjai Dalam Angka Tahun 2018, seluruh tindak kejahatan/pelanggaran dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Jumlah tindak kriminalitas di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel 2.100
Angka Kriminalitas yang tertangani
Tahun 2013-2017 Kab, Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ tindak Kriminal tertangani dalam 1 tahun	53	50	254	297	212
2	Jumlah Penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Rasio	2,26	2,11	10,67	12,39	8,39

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai

2.2.5.2. Jumlah Demo

Tabel 2.101
Jumlah Demo di Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Demo	3	4	-	-	-

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Sinjai

2.2.5.3. Lama Proses Perijinan

Investasi membutuhkan akses yang mudah, contohnya dalam hal proses perizinan. Di Kabupaten Sinjai, semua proses perizinan ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Dari 25 jenis perizinan yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan pada tahun 2014 hanya dapat tercapai 81.1 % atau sebanyak 4.871 izin dari .6.000 target yang ditetapkan pada tahun 2014. Kegiatan yang mendukung untuk peningkatan pelayanan publik antara lain dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, pembinaan pengelolaan layanan perizinan, fasilitasi teknis pengelolaan layanan perizinan, layanan pengaduan masyarakat, Survey IKM terhadap layanan perizinan, sosialisasi pelayanan Perizinan Satu Pintu, Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pengelola PTSP.

Tabel 2.102
Lama Perizinan Tahun 2017
Kabupaten Sinjai

NO	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata -rata maksimal Rupiah)
1.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap	10	Gratis
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap	5	Gratis
3.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap.	5	Gratis
4.	Tanda Daftar Industri (TDI)	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap	6	Gratis
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap	6	Gratis
6.	Izin Gangguan (HO)	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap	11	Tidak Gratis
7.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap	a. Baru/ Perpanjangan : 18 b. Pengesahan :17	Gratis
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap.	8	Gratis
9.	Izin Trayek / Kartu Pengawasan	2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap.	a. Syarat Administratif : 8 b. Syarat Teknis : 2 c. Kartu Pengawasan : 5	1. Izin Angkutan, biaya retribusi Rp. 250.000,- /5 Tahun 2. Izin Insidentil, biaya Rp. 30.000,-/maks 12 (dua belas) hari 3. Kartu Pengawasan Mobil

NO	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata -rata maksimal Rupiah)
				Penumpang, kapasitas tempat duduk 0 s/d 8 seat dengan biaya Rp. 70.000,- /tahun 4. Kartu Pengawasan Mobil Bus, kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang biaya Rp.80.000,- /Tahun kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang biaya Rp.90.000,- /Tahun.
10.	Izin Reklame	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas yang dinyatakan lengkap.	a. Izin Baru : 5 b. Perpanjangan : 5	Berdasarkan Jenis Reklame, Ukuran, Lokasi, Lama Pemasangan, Selebaran, Jenis Kendaraan
11.	Izin Mendirikan Bangunan	7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	1. Bangunan Gedung pada umumnya : 8 2. Bangunan Gedung tertentu untuk kepentingan umum : 5	a. Pembangunan bangunan gedung baru : $L \times l_t \times 1,00 \times HSR_{bg}$ b. Rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung : $L \times l_t \times T_k \times HSR_{bg}$ c. Pembangunan prasarana bangunan gedung baru : $V \times l \times 1,00 \times HSR_{pbg}$ d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times l \times$

NO	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata -rata maksimal Rupiah)
				<p>$T_k \times HSR_{pbg}$</p> <p>e. Prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan :Harga RAB x 1,75 %</p> <p>Keterangan : L : Luas lantai bangunan gedung V: Volume/ besaran dalam satuan meter persegi (m²), meter panjang (m¹) atau unit I : Indeks It: Indeks Terintegrasi T_k : Tingkat kerusakan, yaitu: 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HSR_{bg} : Harga satuan (tarif) retribusi IMB untuk bangunan gedung HSR_{bg} : Harga satuan (tarif) retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung 1,00 : Indeks pembangunan baru RAB : Rencana Anggaran Biaya</p>
12.	Izin Prinsip	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas.	8	Gratis/Free
13.	Izin Lokasi	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	11	Gratis/Free
14.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi)	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	2	Gratis / Free

NO	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata -rata maksimal Rupiah)
15	Izin UsahaToko Modern (IUTM)	5 (lima)hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	16	Gratis / Free
16	Izin Lingkungan	5 (lima)hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	7	Gratis / Free
17	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Andon	1 (satu) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	4	Gratis / Free
18	Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA)	1 (satu) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	4	Gratis / Free
19	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	Izin Baru : 11 Untuk Perpanjangan : 3	Gratis /Free
20	Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	Izin baru : 11 Untuk Perpanjangan : 3	Gratis /Free
21	Izin Penelitian	1 (satu) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkata	7	Gratis /Free
22	Izin Tenaga Kesehatan 1. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter 2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 3. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) 4. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 5. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 6. Surat Izin Praktek Giji 7. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Media / Analis Laboratorium 8. Surat Izin Praktek Elektromedis 9. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) 10. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) 11. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Otometris	3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	9	Gratis /Free

NO	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata -rata maksimal Rupiah)
	12. Surat Izin Kerja Tenaga Giji 13. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi 14. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi Sanitarian 15. Surat Izin Kerja Perekam Medis 16. Surat Izin Kerja Radiografer 17. Surat Izin Praktek Fisioterapis			
23	Izin Sarana Kesehatan 1. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D 2. Izin Klinik 3. Izin Praktek Bersama Dokter 4. Izin Praktek Perawat Berkelompok 5. Izin Apotek 6. Izin Optik 7. Izin Toko Alat Kesehatan	Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	8	Gratis /Free
24	Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan 1. Izin Damiu 2. Izin Industri dan Hasil Usaha Obat Tradisional 3. Izin Tukang Gigi 4. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	7	Gratis /Free
25	Izin Lembaga Pendidikan Formal Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP	Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	7	Gratis /Free

NO	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata -rata maksimal Rupiah)
26	Izin Lembaga Pendidikan Non Formal 1. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 2. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	6	Gratis /Free
27	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 1. Izin Penyimpanan Sementara dan / atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah 3. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas	13	Gratis /Free

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2.2.5.4. Jumlah dan Macam Retribusi

Tabel 2.103
Jumlah dan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
1	Pajak Daerah	9	9.318.073.340	9	9.318.073.340	9	10.812.469.620	9	11.895.082.359,07	9	14.319.154.565
2	Retribusi	19	7.124.640.828,52	20	5.289.487.807,52	20	8.046.757.867,95	19	6.697.349.090	18	6.170.756.698

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai

2.2.6. Fokus Sumber Daya Manusia

2.2.6.1. Jumlah Aparatur Lulusan S1/S2/S3

Jumlah aparatur dengan pendidikan S1 dan S2 mengalami peningkatan secara signifikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104
Jumlah Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2013-2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	S1	2.790	2.865	2.865	3.524	2.946
2	S2	144	167	167	238	197
3	S3	-	-	-	2	2

Sumber : Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kab. Sinjai

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan public atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa public yang menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah kabupaten. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal dokumen.

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah

Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan :

2.4.1.1. Pendidikan

2.4.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah siswa pada jenjang TK / RA/ penitipan anak pada tahun 2013 sebesar 12.638 siswa mengalami penurunan tahun 2017 sebesar 12.290 siswa dan jumlah anak usia 4-6 tahun dari tahun 2013 sebesar 9.129 orang mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 20.466 orang dan pada tahun 2015 sebesar 12.815 mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 12.755 sedangkan presentase pendidikan anak usia dini (PAUD) pada tahun 2013 sebesar 63,19 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 96,52 %. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Sinjai
Tahun 2013 - 2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah siswa pd jenjang TK / RA / Penitipan Anak	12.638	12.621	11.574	10.978	12.290
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun	9.129	20.466	12.815	11.933	12.755
3	Persentase (%)	63,19	61,67	91,51	92,79	96,52

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

2.4.1.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1000 penduduk usia pendidikan dasar. APS merupakan indicator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi pendiuduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partiipasi sekolah semakin besar jumkah penduduuk yang berkesempatan menraih pendidikan. Untuk lebih jelas dapat diliat pada table berikut.

Tabel 2.106
APS Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.5.1	SD/MI					
1.5.1.1	Σ Siswa Usia 7-12 thn	31.692	31.646	31.094	28.668	27.350
1.5.1.2	Σ Penduduk 7-12 Thn	32.183	32.381	32.467	32.517	31.155
1.5.1.3	APS SD/MI	984.74	977.30	957.71	820.12	1.139,90
1.5.2	SMP/MTs					
1.5.2.1	Σ Siswa Usia 13-15 thn	12.043	11.743	10.921	10.218	13.176
1.5.2.2	Σ Penduduk 13-15 Thn	14.050	14.132	14.753	17.116	17.673
1.5.2.3	APS SMP/MTs	857.15	830.95	740.26	5,954.55	1.341,30
1.5.3	SMA/MA/SMK					
1.5.3.1	Σ Siswa Usia 16-18 thn	11.400	10.059	9.301	9.519	-
1.5.3.2	Σ Penduduk 16-18 Thn	14.901	14.975	12.719	13.753	-
1.5.3.3	APS SMP/MTs	765.05	671.72	731.27	692.14	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu kelompok umut tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umut yang sesuai, APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Perkembangan APS di Kabupaten Sinjai cenderung meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh adanya respon positif dari masyarakat dalam menanggapi program-program pemerintah khususnya pada bidang pendidikan sehingga animo masyakat untuk bersekolah semakin meningkat dan kondisi ekonomi masyakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa.

2.4.1.1.3. Angka Putus Sekolah

Tabel. 2.107
Angka putus Sekolah Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.6.1	SD/MI					
1.6.1.1	Σ capaian kinerja APS SD/MI se kab.	34.106	34.077	32.787	32.258	31.176
1.6.1.2	Σ seluruh APS SD/MI se Kab.	316	7	5	6	4
1.6.1.3	APS SD/MI	1,06	0,02	0,02	0,02	0,02
1.6.2	SMP/MTs					
1.6.2.1	Σcapaian kinerja APS SMP/MTs se kab.	16.370	15.835	15.108	15.447	15.119
1.6.2.2	Σseluruh APS SMP/MTs se Kab.	109	85	31	31	11
1.6.2.3	APS SMP/MTs	0,67	0,54	0,21	0,20	0,07
1.6.3	SMA/MA/SMK					
1.6.3.1	Σcapaian kinerja APS SMA/SMK/MA se kab.	12.251	11.538	12.027	12.400	-
1.6.3.2	Σseluruh APS SMA/SMK/MA se Kab.	60	62	63	60	-
1.6.3.3	APS SMA/SMK/MA	0,49	0,54	0,52	0,48	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Angka putus sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah anak yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selama periode 2013-2017 angka putus sekolah cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013. jumlah anak putus sekolah tingkat SD sederajat 1,06 % menurun menjadi 0,02 % untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2013 sebnayak 0,67 % menurun menjadi 0,07 % pada tahun 2017 sedangkan tingkat SMA sederajat pada tahun 2013 mencapai 0,49 % menurun menjadi 0,48 % pada tahun 2016 dan di tahun 2017 sudah beralih ke provinsi. Penurunan angka putus sekolah disebabkan karena adanya program-program pemerintah yang memberikan banyak peluang kepada masyarakat utamanya masyarakat tidak mampu untuk tetap bersekolah, program-program tersebut diantaranya program pendidikan dasar, program pembebasan biaya pendidikan dan biaya operasional sekolah.

2.4.1.1.4. Angka Kelulusan

Tabel. 2.108
Angka Kelulusan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.7.1	SD/MI/Paket A					
1.7.1.1	Σ lulusan pd jenjang SD/MI	5.123	5.166	5.280	5.211	4.853

1.7.1.2	Σ siswa tingkat tertinggi pd jenjang SD/MI pd thn sebelumnya	5.157	5.199	5.293	5.221	4.929
1.7.1.3	AK SD/MI/Paket A	99,34	99,37	99,75	99,81	98,36
1.7.2	SMP/MTs/Paket B					
1.7.2.1	Σ lulusan pd jenjang SMP/MTs/paket B	4.069	4.167	4.360	4.333	4.627
1.7.2.2	Σ Siswa tingkat tertinggi pd jenjang SMP/Mts/ Paket C pd thn sebelumnya	4.438	4.261	4.405	4.361	4.704
1.7.2.3	AK SMP/MTs/PAket B	91,68	97,79	99,16	99,36	98,36
1.7.3	SMA/MA/SMK/Paket C					
1.7.3.1	Σ lulusan pd jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	3.211	3.218	3.298	3.255	-
1.7.3.2	Σ siswa tingkat tertinggi pd jenjang SMS/ SMK/ MA/Paket C pd thn sebelumnya	3.309	3.252	3.326	3.264	-
1.7.3.3.	AK SMA/SMK/MA/ PAKet C	97,04	98,95	99,16	99,72	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Tingkat kelulusan adalah jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Sinjai, angka kelulusan di tiap jenjang pendidikan mengalami perkembangan yang fluktuatif dan berbeda-beda.

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang menamatkan pendidikan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu. Angka kelulusan dari tahun ketahun cenderung berfluktuasi pada tahun 2013 jumlah lulusan tingkat SD sederajat 99,34 % dan pada tahun 2017 menjadi 98,36 % untuk tingkat SMP sederajat 91,68 % dan di tahun 2017 mencapai 98,36 % sedangkan untuk tingkat SMA sederajat di tahun 2013 mencapai 97,04 % dan tahun 2016 mencapai 99,72 % hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan siswa dalam menghadapi materi yang diujikan serta kurangnya kualitas profesi guru sebagai pengajar.

2.4.1.1.5. Angka Melanjutkan (AM)

Tabel.2.109
Angka Melanjutkan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	JUMLAH LULUSAN SD/MI	5.123	5.166	5.280	5.211	-
	JUMLAH SISWA BARU SMP/MTs	4.697	5.193	5.317	5.211	-
	PRESENTASE	91,68	100.52	100,70	100	-
2	JUMLAH LULUSAN SMP/MTs	4.069	4.167	4.360	4.333	-
	JUMLAH SISWA BARU SMA/SMK/MA	3.813	4.295	4.507	4.563	-

	PRESENTASE	93,71	103,07	103,37	105,31	-
3	JUMLAH LULUSAN SMA/SMK/MA	3.211	3.218			-
	JUMLAH SISWA BARU PT	DATA TIDAK DI KETAHUI				
	PRESENTASE	DATA TIDAK DI KETAHUI				

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Angka Melanjutkan adalah perbandingan anantara jumlah lulusan tingkat sebelumnya dengan jumlah siswa baru pada tingkat yang lebih tinggi untuk siswa SD sederajat pada tahun 2013 angka melanjutkan sebesar 91,68% dan pada tahun 2017 menjadi 100% sedangkan pada tingkat SMP ditahun 2013 mencapai 93,71% dan ditahun 2017 menjadi 105,31% peningkatan ini disebabkan karena tingginya animo masyarakat akan pentingnya pendidikan dan ditunjang oleh program pemerintah dibidang pendidikan utamanya program pembebasan biaya pendidikan dan dana BOS sehingga siswa bersemangat untuk melanjutkan pendidikan hingga ada beberapa siswa yang berasal dari daerah tetangga yang bersekolah di Kabupaten Sinjai.

2.4.1.1.6. Fasilitas Pendidikan

Kualitas pendidikan suatu daerah dapat dinilai dari fasilitas pendidikan yang ada. Proses belajar mengajar akan berlangsung maksimal dan member dampak yang lebih baik dengan jumlah sekolah yang cukup dan kondisi ruang belajar yang memadai. Untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.110
Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Bangunan Baik Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.9.1.	Sekolah Pendidikan SD/MI					
1,9.1.1	Σ Kondisi Bangunan Baik	219	229	219	216	203
1.9.1.2	Σ Seluruh Sekolah SD/MI	241	241	242	242	243
1.9.1.3	Peresentase	90,87	95,02	90,49	89,26	83,54
1.9.2.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik					
1.9.2.1	Σ Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik	47	62	51	42	35
1.9.2.2	Σ Seluruh Sekolah SMP/MTs & SMA/SMK/MA	68	68	68	42	42
1.9.2.3	PRESENTASE	69,18	91,18	75,00	100	83,33

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Salah satu bentuk dukungan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sinjai adalah pemenuhan fasilitas pendidikan terutama bangunan sekolah yang layak untuk tahun 2013 presentase gedung sekolah dalam kondisi baik untuk tingkat SD sederajat sebesar 90,87, untuk SMP sederajat sebesar 69,18 dan pada tahun 2017 tingkat SD sederajat mengalami penurunan menjadi 83,54% dan SMP sederajat meningkat menjadi 83,33%

keadaan ini disebabkan karena keterbatasan dana pemeliharaan fasilitas pendidikan utamanya sekolah yang berada didaerah terpencil, kondisi geografis yang tidak mendukung serta kurangnya data rill mengenai keadaan bangunan sekolah.

2.4.1.1.7. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakatnya.

Tabel 2.111
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Σ Sekolah SD/MI	271	272	273	274	272
1.2	Σ Penduduk Usia 7-12 Tahun	33.488	33.454	32.467	31.163	27.350
2	SMP/MTS					
2.1	Σ Sekolah SMP/MTs	84	85	86	87	86
2.2	Σ Penduduk Usia 13-15 Tahun	13.763	14.753	16.389	17.116	13.176
2.3	RASIO	75,13	74,06	73,48	74,77	88,34

Sumber : Dinas Pendidikan, Kab. Sinjai

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan antara ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah dari tabel diatas untuk tingkat Pendidikan Dasar ketersediaan sekolah sudah memenuhi kebutuhan dimana tiap satuan pendidikan jumlah siswa untuk setiap ruangan rata-rata sudah tidak lebih dari 32 siswa persekolah hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah SD sederajat dan SMP sederajat sudah menyeluruh di semua desa dan kelurahan dikabupaten Sinjai sehingga penduduk sudah tidak merasakan kesulitan untuk menempuh pendidikan dasar dikabupaten Sinjai.

2.4.1.1.8. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah.

Tabel 2.112
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Menengah Tahun 2013 –2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	SMA/MA/SMK					
1.1	Σ Sekolah	47	51	52	52	-
1.2	Σ Penduduk Usia 16-18 Tahun	12.649	12.770	12.719	14.975	-
1.3	Rasio	37.16	39.93	40.88	34.72	-

Sumber : Dinas Pendidikan, Kab. Sinjai

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat pendidikan menengah dari tabel diatas untuk tingkat Pendidikan Menengah ketersediaan sekolah belum memenuhi kebutuhan dimana tiap satuan pendidikan jumlah siswa untuk setiap ruangan rata-rata sudah lebih dari 32 siswa persekolah hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah Menengah sederajat belum menyeluruh di semua desa dan kelurahan dikabupaten Sinjai sehingga penduduk masih merasakan kesulitan untuk menempuh pendidikan menengah dikabupaten Sinjai

2.4.1.1.9. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid adalah indikator yang digunakan dalam mengukur capaian jumlah ideal murid untuk setiap guru guna mewujudkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkualitas. Dapat diliat pada table berikut :

Tabel. 2.113
Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.966	2.106	2.366	2.954	1804
1.2	Jumlah Murid	34.077	32.787	31.094	28.825	31.176
1.3	RASIO	1:17	1:16	1:13	1:9	1:17
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	645	881	961	998	679
2.2	Jumlah Murid	15.835	15.421	14.617	14.317	15.199
2.3	RASIO	1:24	1:18	1:15	1:14	1:24

Sumber : Dinas Pendidikan, Kab. Sinjai

Rasio Guru per siswa adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa perkembangan data yang berfluktuasi disebabkan ketidakadaan data yang memadai sehingga terjadi perkembangan rasio guru per murid yang tidak konsekuen dari tahun ketahun hal ini terlihat jelas pada tiap tabel yang berbeda dan tidak konsisten

baik perkembangan maupun penurunannya hal ini dipengaruhi oleh faktor pendataan yang mana adakalanya jumlah guru yang relatif tinggi karena masuknya data guru honorer serta adanya data guru yang ganda karena mengajar pada beberapa sekolah.

2.4.1.1.10. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru/murid adalah indikator yang digunakan dalam mengukur capaian jumlah ideal murid untuk setiap guru guna mewujudkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkualitas pada jenjang pendidikan menengah.

Tabel. 2.114
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SMA/MA/SMK					
1.1	Jumlah Guru	581	744	662	646	-
1.2	Jumlah Murid	12.251	12.569	12.602	12.846	-
1.3	RASIO	1:21	1:17	1:19	1:19	-

Sumber: Dinas Pendidikan, Kab. Sinjai

2.4.1.1.11. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki

Angka melek huruf berkisar antara 0-100 tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah system pendidikan dasar yang efektif atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Tabel 2.115
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 th perempuan & laki-laki
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 th	159.438	156.983	158.515	141.608	182.327
2	Σ Penduduk Ua 16-19 Tahun yg melek huruf	156.670	155.489	148.162	141.608	182.327
3	Rasio	98,26	99,04	93,46	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan telah melakukan program penuntasan terhadap data base Penduduk Buta Aksara (By Name By Address) hasil pendataan tenaga lapangan Dikmas Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sebanyak 11.787 Orang. Dari data tersebut semuanya telah dituntaskan melalui Program Penuntasan Buta Aksara sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 melalui Dana APBD II Kabupaten Sinjai, APBD I Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN hingga tuntas Melek Aksaran sebanyak 11.787 orang. Walau demikian data Buta Aksara Versi BPS sebagai data makro hasil sensus masih tersisa sebanyak 5.272 orang dan akan diadakan penelusuran / pendataan by name by address. Karena telah mencapai target yang ditetapkan maka untuk tahun 2017 sudah tidak ada lagi kegiatan untuk peningkatan Angka Melek Huruf dan yang dilaksanakan adalah kegiatan lanjutan untuk menghindari atau mencegah penduduk yang melek huruf kembali menjadi buta huruf.

2.4.1.1.12. Penduduk yang Berusia 15 Tahun Melek Huruf (Tiidak Buta Aksara)

Tabel 2.116
Penduduk yg berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ penduduk yg melek huruf usia 15 ke atas	159.438	156.983	158.515	141.608	182.327
2	Σ seluruh penduduk yg berusia > 15 thn	156.670	155.489	148.162	141.608	182.327
3	Rasio	98,26	99,04	93,46	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan telah melakukan program penuntasan terhadap data base Penduduk Buta Aksara (By Name By Address) hasil pendataan tenaga lapangan Diknas Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sebanyak 11.787 Orang. Dari data tersebut semuanya telah dituntaskan melalui Program Penuntasan Buta Aksara sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 melalui Dana APBD II Kabupaten Sinjai, APBD I Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN hingga tuntas Melek Aksara sebanyak 11.787 orang. Walau demikian data Buta Aksara Versi BPS sebagai data makro hasil sensus masih tersisa sebanyak 5.272 orang dan akan diadakan penelusuran / pendataan by name by address. Karena telah mencapai target yang ditetapkan maka untuk tahun 2017

sudah tidak ada lagi kegiatan untuk peningkatan Angka Melek Huruf dan yang dilaksanakan adalah kegiatan lanjutan untuk menghindari atau mencegah penduduk yang melek huruf kembali menjadi buta huruf

2.4.1.1.13. Guru yang Memenuhi Kualitasi SI / D-IV

Tabel 2.117
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Di Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	2.179	2.500	1.738	1.784	-
1.2	Jumlah Guru	3.485	3.300	1.796	1.808	-
1.3	RASIO	62,53	75,76	96,77	98,67	-
2	SMP/MTs					-
2.1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	1.527	1,550	706	759	-
2.2	Jumlah Guru	1.659	1,637	706	759	-
2.3	RASIO	92,04	94,69	100	100	-
3	SMA/SMK/MA					-
3.1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	1.378	1.460	646	697	-
3.2	Jumlah Guru	1.424	1.490	646	697	-
3.3	RASIO	96,77	97,99	100	100	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya.

Berdasarkan data pada tabel presentase guru yang memiliki kualifikasi pendidikan semakin meningkat hal ini karena adanya beberapa program pemerintah diantaranya pemberian bantuan kepada Mahasiswa Berprestasi, dan adanya sertifikasi pendidik yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan berdasarkan mata pelajaran yang ampuh sehingga mengharuskan pendidik untuk terus mengembangkan diri walau demikian standar mutu pendidikan masih tergolong rendah dengan belum tercapainya rerata ujian nasional yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam kenyataannya mutu guru di Indonesia sangat beragam dan rata-rata masih di bawah standar yang telah ditentukan. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kompetensi yang telah disyaratkan.

2.4.1.2 KESEHATAN

2.4.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Tabel. 2.118
Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKHB
1	2014	128	4.281	970
2	2015	73	4.326	983
3	2016	77	4.032	981
4	2017	71	4.047	982

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Jumlah kematian Bayi digambarkan dari jumlah seluruh kematian bayi termasuk neonatal. Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah kematian Bayi mengalami penurunan dari tahun 2014 sebanyak 128 bayi menjadi 71 Kematian Bayi Pada tahun 2018, sehingga angka kelangsungan hidup Bayi meningkat dari rasio 970 menjadi 982.

2.4.1.2.2. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Tabel. 2.119
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup
Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKHB
1	2014	202	4.281	953
2	2015	210	4.326	951
3	2016	231	4.092	944
4	2017	85	4.047	972

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Kasus kematian BALITA di kabupaten pada kurung waktu tahun 2014 -2017 mengalami penurunan dari 202 Balita menjadi 11 Balita, Jika Jumlah Kematian Balita tersebut dikonversi ke dalam Angka Kematian Balita (AKBA) maka didapatkan AKBA Kabupaten Sinjai pada tahun 2014 sebesar 47/1000 KH menjadi 21/1000 KH pada tahun 2017, sehingga Rasio Angka Kelangsungan Hidup Balita mengalami peningkatan dari Rasio 953 menjadi 979.

2.4.1.2.3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Tabel. 2.120
Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKHB
1	2014	60	4.281	986
2	2015	56	4.326	987
3	2016	61	4.092	985
4	2017	52	4.047	987

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah kematian Neonatal (Bayi berumur kurang dari 28 Hari) mengalami penurunan dari 60 Kasus pada tahun 2014 menjadi 52 Kasus pada tahun 2017, atau jika dikonversi dalam Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup diperoleh angka Kematian Neonatal sebesar 14/1000 KH pada tahun 2014 menjadi 13/1000 KH pada tahun 2017 sehingga angka kelangsungan hidup Neonatal mengalami sedikit peningkatan dari Rasio 986 menjadi 987.

2.4.1.2.4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Tabel. 2.121
Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup Tahun 2014-2017
Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Jumlah ibu hamil yg meninggal karn hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup diwilayah tersebut & pd kurun waktu yg sama	AKHB
1	2014	10	4.281	234
2	2015	6	4.326	139
3	2016	12	4.092	293
4	2017	6	4.047	148

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Jumlah Kematian Ibu karena hamil, bersalin dan nifas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah Kematian Ibu cenderung mengalami penurunan dari 10 Kasus pada tahun 2014 menjadi 6 Kasus pada tahun 2017 setelah sebelumnya mengalami peningkatan sampai 12 Kasus di tahun 2016. Jika dikonversi ke dalam Angka Kematian Ibu (AKI/100.000 KH) maka diperoleh nilai 234/100.000 KH 2014 menjadi 148/100.000 KH pada Tahun 2017. AKI di Kabupaten Sinjai tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan target Nasional maupun Target dalam RPJMD 2014-2018 masih berada di atas taget yaitu minimal 114/100.000 KH diakhir periode.Berdasarkan lokasi kejadian, maka dominasi kematian Ibu bersalin terjadi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD) sebanyak 9 kasus dengan peyebab kematian hipertensi dan perdarahan post partum.

2.4.1.2.5. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Tabel. 2.122
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	338	338	338	338	338
2	Jumlah Balita	17.622	40.700	30.453	18.779	18.176
3	Rasio	19,18	8,30	11,10	18,00	18,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Posyandu per 1000 satuan Balita pada Tahun 2013 sebesar 19,18 mengalami penurunan menjadi 18,60 pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh karena fluktuasi Pertumbuhan jumlah Balita dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan jumlah Pertumbuhan keaktifan posyandu.

2.4.1.2.6. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Tabel 2.123
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	16	16	16	16	16
	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	1:14.680	1:14.781	1:14.881	1:14.980	1:15,789
2	Jumlah Poliklinik	92	92	127	127	93
	Rasio Poliklinik per Satuan Penduduk	1:2.553	1:2.570	1:1776	1:1.887	1:2,716
3	Jumlah Pustu	62	62	62	62	62
	Rasio Pustu per Satuan Penduduk	1:3.788	1:3.814	1:3.840	1:3.866	1:4.076
4	Jumlah Penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Dari table di atas menunjukkan bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk mengalami peningkatan dari 1:14.680 penduduk pada tahun 2013 menjadi 1:15,789 pada tahun 2017, Jika berdasarkan pada Jumlah penduduk (Idealnya setiap 30.000 penduduk dilayani oleh 1 Puskesmas) maka rasio tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan puskesmas sudah cukup untuk melayani penduduk Sinjai. Rasio Puskesmas pembantu juga mengalami stagnan dari tahun ke tahun dimana terdapat 62 Pustu untuk melayani 252.627 Penduduk. Jika merujuk dari kebutuhan bahwa setiap desa/kelurahan terdapat 1 Puskesmas Pembantu maka masih dibutuhkan kurang lebih 18 unit Pustu untuk mendekatkan akses pelayanan ke pada seluruh masyarakat kabupaten Sinjai.

2.4.1.2.7. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Tabel. 2.124
Rasio Rumah Sakit Tahun 2017
Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Tahun 2017
1	Jumlah Rumah sakit Umum (Pemerintah)	1
2	Jumlah Rumah sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-
3	Jumlah Rumah sakit AD/AU/AL/POLRI	-
4	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	1

6	Jumlah Penduduk	252,627
7	Rasio	1 : 252,627

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Rumah sakit persatuan penduduk relatif masih rendah dan statnant dari tahun ke tahun. Jumlah Rumah sakit pemerintah di Kabupaten Sinjai selama kurung waktu 5 tahun terakhir hanya terdapat 1 RSUD, dengan 165 tempat tidur untuk melayani kurang lebih 252.627 Penduduk. Menurut standar who rasio ideal daya tampung Rumah Sakit adalah 1000 penduduk per 1 tempat tidur, maka berdasarkan hal tersebut perlu difikirkan penambahan rumah sakit sebagai pelaksana pelayanan kesehatan rujukan.

2.4.1.2.8. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Tabel. 2.125
Rasio Dokter Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter	42	50	38	38	60
2	Σ Penduduk	234,886	236.497	238,099	239.689	252,627
3	Rasio	18	21	16	16	24

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa Rasio Dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan dari 18/100.000 pddk pada tahun 2013 menjadi 24/100.000 pada tahun 2017, namun rasio tersebut menunjukkan bahwa Rasio tenaga dokter di Kabupaten Sinjai masih Rendah , dimana target nasional idelnya Rasio dokter adalah 42/100.000 Penduduk.

2.4.1.2.9. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Tabel. 2.126
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Tenaga Kesehatan	712	802	789	916	597
2	Σ Penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Rasio	303	339	331	382	395

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sinjai per 100.000 mengalami penurunan dari 303/100.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 395/100.000 penduduk pada Tahun 2017,

Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun telah dimbangi dengan penambahan Jumlah tenaga kesehatan secara signifikan, namun

demikian distribusi tenaga kesehatan belum merata ke seluruh wilayah Kecamatan, akan tetapi masih terpusat untuk wilayah daerah perkotaan.

2.4.1.2.10. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di tangani

Tabel 2.127
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
Kabupaten Sinjai

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difenitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	483	639	782	1.050	1.050
2	Σ ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama	873	947	947	900	900
3	Rasio	55,3	67,5	82,6	116,7	116,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif mengalami peningkatan dari 55,3% pada tahun 2013 menjadi 116,7% pada tahun 2017. Tingginya cakupan ini disebabkan oleh karena penentuan sasaran dari ibu dengan komplikasi dalam satu kurung waktu menggunakan angka proyeksi.

2.4.1.2.11. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tabel. 2.128
Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	43	65	80	79	80
2.	Σ Desa/Kelurahan	80	80	80	80	80
3.	Cakupan	53,75	81,25	100	98,75	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan cakupan Universal Child Imunization (UCI) di Kabupaten Sinjai dari tahun ke tahun, dimana untukTahun 2017 cakupan Desa UCI sudah mencapai 100%, yang artinya bahwa bayi dan balita diseluruh Desa di Kab.Sinjai telah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap.

2.4.1.2.12. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

Tabel 2.129
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	1	1	2	1	3
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dlm waktu yg sama	1	1	2	1	3
3.	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Sinjai selama lima tahun terakhir sudah memenuhi target 100%.yang artinya bahwa seluruh balita gizi buruk telah tertangani sesuai standar.

2.4.1.2.13. **Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori dibawah tingkat konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia 2.100 KKal/Kapita/hari**
Tabel. 2.130

Proporsi penduduk dgn asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yg digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari)
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Banyaknya penduduk yg tngkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari	-	-	-	-	-
2	Jumlah Balita	-	18.158	17.779	18,779	18.836
3	Rasio	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjikkan bahwa tidak tersedia cukup data untuk menggambarkan proporsi penduduk kabupaten Sinjai dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum.

2.4.1.2.15. **Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk**
Tabel. 2.131

Non polio AFP rate per 1000 penduduk Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kasus AFT non polio yg di laporkan	4	2	6	2	3
2	Σ penduduk < 15 Thn	75.629	76.373	76.854	72.062	185.469
3	Rasio	0,005	0,003	0,008	0,003	0,002

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk yang dilaporkan mulai dari tahun 2013 sampai derngan tahun 2017 Berfluktuasi . pada tahun 2014 dan 2016 Sudah Sesuai dengan Target (2/100.000 penduduk) yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan . Pencapaian Pada Tahun 2017

sebanyak 3 kasus per 100.000 penduduk Hal Ini menunjukkan Keaktifan Petugas Surveillance Dalam Penemuan Kasus Meningkat.

2.4.1.2.16. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Tabel. 2.132
Cakupan balita pnemonia yang ditangani Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ penderita pnemonia balita yg di tangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	10	9	4	9	384
2	Σ Perkiraan penderita pheumonia balita di suatu wilayah kerja kurun waktu yang sama	881	890	869	902	914
3	Cakupan	1,14	1,01	0,46	1,00	42,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan balita pneumonia yang ditangani di Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 adalah sebanyak 42,01% dari target 80%. Cakupan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1%. Cakupan penemuan pneumonia di Kabupaten Sinjai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu berada dibawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya yang maksimal khususnya yang terkait dengan upaya penemuan dini penderita pneumonia khususnya pada balita karena penyakit ini cenderung mengakibatkan kematian.

2.4.1.2.17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BT

Tabel. 2.133
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC dan BTA
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ penderita TBC BTA yg ditemukan dan diobati	146	186	178	228	280
2	Σ perkiraan penderita baru TBC BTA	481	488	497	347	408
3	Cakupan	30,04	38,10	35,80	65,70	68,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kabupaten Sinjai selama lima tahun terakhir belum mencapai target 70%, hal ini terkait dengan masih rendahnya suspek yang ditemukan baik oleh masyarakat maupun disarana pelayanan kesehatan pemerintah dan klinik swasta, dengan demikian maka upaya penemuan dan tata laksana penderita TB perlu ditingkatkan melalui pelibatan seluruh pihak (masyarakat dan klinik swasta).

2.4.1.2.18. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Pemduduk)

Tabel. 2.134
Tingkat prevalensi Tuberkulosis Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Banyaknya kasus penderita TBC (Baru atau Lama)	216	239	286	348	435
2	Σ penduduk pada kurun waktu yg sama	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Tingkat	91,96	101,06	120,12	145,19	172,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa menunjukkan Prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 yaitu 180 per 100.000 penduduk. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yaitu 81 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan kasus terus meningkat dari tahun ke tahun.

2.4.1.2.19. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tabel.2.135
Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ pasien TB yg meninggal	9	13	15	19	15
2	Σ penduduk pd kurun waktu yg sama	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Tingkat	3,83	5,50	6,30	7,93	5,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kematian karena tuberculosi terus meningkat. dan pada tahun 2016 jumlah kematian tertinggi yaitu 19 kematian dengan tingkat kematian 8 per 100.000 penduduk. Sehingga perlu untuk meningkatkan tatalaksana penanganan kasus TB dan penemuan kasus secara dini.

2.4.1.2.20. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

Tabel. 2.136
Proporsi kasus tuberculosi yg terdeteksi dl program DOTS
Tahun 2013-207 Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ pasien tuberkulosis BTA yg mendapat pengobatan melalui DOTS	146	186	178	228	280
2	Σ pasien baru TB paru BTA	146	186	178	228	280
3	Proporsi	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 proporsi kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam pengobatan melalui program DOTS mencapai 100 persen. Seluruh pasien tuberculosis BTA positif telah ditatalaksana dan mendapatkan pengobatan melalui *DOTS*.

2.4.1.2.21. **Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**

Tabel. 2.137
Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ pasien tuberkulosis paru BTA yg sembuh	134	96	6	158	196
2	Σ pasien TB dan BTA yg sembuh yg diobati	146	186	178	228	280
3	Proporsi	91,78	51,61	3,37	69,29	70,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kesembuhan penderita tuberculosis BTA positif dari tahun 2013-2017 berfluktuasi dan belum mencapai target 85%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masih ada penderita tuberculosis yang ditatalaksana tidak sesuai standar

2.4.1.2.22. **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

Tabel. 2.138
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ penderita DBD yg ditangani sesuai SOP	72	4.186	4.386	4.222	4.386
2	Jumlah penderita DBD	72	4.186	4.386	4.222	4.386
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan pengobatan penderita penyakit DBD pada tahun 2013 – 2017 telah mencapai 100% dari tahun ke tahun sesuai dengan target.

2.4.1.2.23. **Angka Kejadian Malaria**

Tabel. 2.139
Angka Kejadian Malaria Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ penduduk yg menderita malaria	36	17	37	30	32
2	Σ penduduk pd pertengahan tahun	232.612	234.886	236.497	238.099	241.208
3	Rasio	15,48	7,24	15,65	12,60	13,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa angka kejadian Malaria di Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 sebanyak 32 kasus, dan terdapat 2 kasus dari hasil penularan setempat yaitu di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. Hal ini menyebabkan Kabupaten Sinjai belum mendapatkan sertifikasi bebas malaria, karena salah satu persyaratan sertifikasi bebas malaria adalah pada daerah tersebut tidak terdapat kasus penularan setempat selama 3 tahun berturut-turut. Untuk itu system kewaspadaan dini terkait penyakit malaria perlu ditingkatkan, yaitu dengan melaksanakan surveilans migrasi pada seluruh penduduk yang datang dari daerah endemis malaria.

2.4.1.2.24. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tabel. 2.140
Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kematian tersangka malaria	-	-	-	-	-
2	Σ penduduk berisiko pd kurun waktu 1 tahun	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Tingkat	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kematian akibat Malaria di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan tidak ada kasus.

2.4.1.2.25. Proporsi Anak Balita yg Tidur dgn Kelambu Berinsektisida

Tabel. 2.141
Proporsi Anak Balita yg Tidur dgn Kelambu Berinsektisida
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Banyaknya balita yg pd malam sebelumnya survey tidur menggunakan kalambu yg sdh dipoteksi dgn insektisida	-	-	-	-	-
2	Jumlah balita	-	23.262	17.085	19.380	34.574
3	Proporsi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

2.4.1.2.26. Pravalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Tabel. 2.142
Pravlensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Σ pasien HIV & AIS+DS di suatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	7	18	19	26	28
2	Σ penduduk disatu wilayah kinerja pd kurun waktu yg sama	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Rasio	0,003	0,008	0,008	0,011	0,011

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi di Kabupaten Sinjai terus meningkat selama lima tahun terakhir. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2017 adalah sebanyak 28 kasus atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 26 kasus. Sehingga dari Tahun 2013-2017 telah ditemukan 98 kasus HIV. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kab.Sinjai yang memiliki akses yang cukup mudah ke Ibu kota provinsi memiliki risiko yang cukup besar untuk tertular HIV AIDS. Selain itu, meningkatnya jumlah puskesmas yang memiliki layanan testing HIV juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya penemuan kasus HIV.

2.4.1.2.27. **Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yg Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS**

Tabel. 2.143

Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yg Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ penduduk usia 15-24 tahun yg mempunyai pengetahuan komprehensif ttg bahaya penyakit HIV/AIDS	-	-	13.552	22.587	26.915
2	Σ penduduk usia HIV/AIDS	-	-	33.880	37.645	41.409
3	Rasio	-	-	40	60	65

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS terus meningkat dari tahun 2015 yang hanya 40% meningkat hingga 65% pada tahun 2017. Meskipun demikian belum mencapai target 80% sehingga upaya desiminasi informasi kepada remaja usia 15-24 tahun terus ditingkatkan.

2.4.1.2.28. **Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

Tabel. 2.144

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	-	-	-	-	4.288

2	Σ seluruh miskin di kab.	-	-	-	-	134.603
3	Cakupan (%)	-	-	-	-	3,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2017 masih rendah yaitu 3,18%.

2.4.1.2.29. Cakupan Kunjungan Bayi

Tabel. 2.145
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan	3.910	4.132	4.426	5.037	5.438
2	Σ seluruh bayi lahir hidup	4.110	4.270	4.326	4.092	4.047
3	Cakupan (%)	0,95	0,96	0,102	0,123	0,134

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari 95% pada Tahun 2013 menjadi 134% pada tahun 2017. Cakupan di atas angka 100% disebabkan oleh karena terdapat kunjungan ulangan bayi dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

2.4.1.2.30. Cakupan Puskesmas

Tabel. 2.146
Cakupan Puskesmas Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ puskesmas	16	16	16	16	16
2	Σ seluruh kecamatan	9	9	9	9	9
3	Cakupan (%)	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan puskesmas per seluruh kecamatan di kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2017 adalah 1,77%, yang artinya bahwa di Kabupaten Sinjai rata-rata perkecamatan terdapat lebih dari 1 Puskesmas, dimana secara nasional ditargetkan bahwa 1 Kecamatan minimal terdapat 1 Puskesmas.

2.4.1.2.31. Cakupan Pembantu Puskesmas

Tabel. 2.147
Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ pembantu puskesmas	62	62	62	62	62
2	Σ seluruh desa	80	80	80	80	80
3	Cakupan (%)	0,775	0,775	0,775	0,775	0,775

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan Puskesmas Pembantu (PUSTU) perdesa/Kelurahan adalah 0,775 % artinya bahwa belum semua desa/kelurahan terdapat 1 Puskesmas Pembantu. Desa/kelurahan yang tidak terdapat Puskesmas Pembantu oleh karena di desa/kelurahan tersebut terdapat bangunan Puskesmas Induk.

2.4.1.2.32. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Tabel 2.148

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ ibu hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4	3.912	4.217	4.419	4.153	4.087
2	Σ sasaran ibu hamil	4.555	4.733	4.733	4.734	4.500
3	Cakupan (%)	0,86	0,89	0,93	0,87	1,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Cakupan K4 pada tahun 2013 sebesar 86% meningkat menjadi 110 % pada Tahun 2017. Cakupan diatas 100% oleh karena untuk sasaran Ibu hamil menggunakan angka proyeksi.

2.4.1.2.33. Cakupan Pelayanan Nifas

Tabel. 2.149

Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ peserta ibu nifas yg tlt memperoleh 3 kali pelayanan nifas	4.087	4.087	4.273	4.060	4.062
2	Seluruh ibu nifas di satu wilayah	4.228	4.228	4.519	4.519	4.285
3	Cakupan (%)	0,96	0,96	0,94	0,89	0,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan nifas tahun 2013 sampai tahun 2017 rata-rata mencapai lebih dari 90 persen, hanya pada tahun 2016 capaian pelayanan hanya mencapai 89 persen atau 0,89 persen namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 95 persen atau 0,95 persen.

2.4.1.2.34. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yg Ditangan

Tabel. 2.150

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yg Ditangani Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ neonates dgn komplikasi yg tertangani	300	300	440	388	400

2	Σ seluruh neonates dgn komplikasi yg ada	641	641	649	614	607
3	Cakupan	0,46	0,46	0,67	0,63	0,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani dari tahun 2013 sampai 2017 berfluktuatif. Namun jika diperbandingkan data tahun 2017 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat dibandingkan tahun 2013.

2.4.1.2.35. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel. 2.151

Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	13.155	13.269	11.451	15.971	18,621
2	Σ seluruh anak balita	14.453	14.700	12.802	15.274	30,452
3	Cakupan (%)	0,91	0,90	0,89	0,104	0,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa data cakupan pelayanan Anak Balita yang memperoleh minimal 8 Kali adalah 91% pada tahun 2013 dan menurun menjadi 61% pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh karena sebagian Balita yang langsung mendapatkan pelayanan di klinik swasta tidak melaporkan dalam wilayah kerja puskesmas.

2.4.1.2.36. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pd Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Tabel. 2.152

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pd Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yg mendapat MP-ASI	-	-	-	-	280
2	Σ seluruh anak usia 6-24 bln keluarga miskin	-	-	-	-	280
3	Cakupan (%)	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

2.4.1.2.37. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Tabel. 2.153

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Murid setingkat yg mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	4.699	4.176	4.176

2	Σ murid SD dan setingkat	5.120	5.230	5.152	5.946	5.946
3	Cakupan (%)	-	-	0,91	0,70	0,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat belum mencakup seluruh murid SD di Kabupaten Sinjai. Sehingga masih ada murid yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

2.4.1.2.38. Cakupan Pelayanan Pasien Miskin di Sarkes Strata I

Tabel. 2.154

Cakupan Pelayanan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1 Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kunjungan pasien miskin	-	-	-	-	24.288
2	Σ seluruh masyarakat miskin	-	-	-	-	134.603
3	Cakupan	-	-	-	-	0,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

2.4.1.2.39. Cakupan Desa/Kel. Mengalami KLB yg dilakukan Penyelidika
Epidermiologi < 24 jam

Tabel. 2.155

Cakupan Desa/Kel. Mengalami KLB yg dilakukan Penyelidikan
Epidermiologi < 24 jam Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ KLB di Desa / Kel. Yg ditangani >24 jam	6	9	7	22	17
2	Σ KLB di Desa/Kel. Yg terjadi pada periode yg sama	6	9	7	22	17
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan Desa/Kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam selama 5 tahun terakhir sudah mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa seluruh Desa yang mengalami KLB telah ditangani sesuai standar dalam kurun waktu <24jam.

2.4.1.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.4.1.3.1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.156

Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	471,81	475.97	446.36	485,48	486,10
2	Panjang Jalan Seluruhnya	1.256,90	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
3	Persentase	37,54	37,87	35,51	38,63	38,67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sinjai, persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 38,67% dimana panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 486.10 km dari panjang seluruh jalan kabupaten adalah 1.256,91km. Jalan Nasional dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 antara Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai sepanjang 21.780 Km, sedangkan jalan provinsi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sepanjang 71.685 km dimanan dari Kabupaten Gowa - Kabupaten Sinjai sepanjang 49.820 Km dan Kabupaten Sinjai - Kabupaten Bulukumba (Kajang) sepanjang 21.865 Km.

2.4.1.3.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Tabel 2.157
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Seluruhnya	1.256,90	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
2	Σ Penduduk	234,886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Rasio	0,0053	0,0053	0,0053	0,0052	0,0049

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Dalam pembangunan transportasi jalan di Kabupaten Sinjai, Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017.

2.4.1.3.3. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik

Tabel 2. 158
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	471,81	475.97	446.36	485,48	486,10
2	Panjang seluruh Jalan Kabupaten	1.256,90	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
3	Persentase	37,54	37,87	35,51	38,63	38,67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa transportasi jalan di Kabupaten Sinjai, Kondisi jalan mengalami perubahan panjang Dalam pembangunan jalan, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2017 persentase jalan dengan tahun kemarin sedikit naik dari tahun sebelumnya yakni tahun 2016. Kondisi jalan baik pada tahun 2016 adalah 38,63 persen, meningkat pada tahun 2017 sebesar 38,67%.

2.4.1.3.4. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Tabel. 2.159
Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ rumah tinggal berakses sanitasi	51.651	53.510	52.833	54.705	61.650
2.	Σ rumah tinggal	33.780	35.760	44.410	44.810	70,626
3.	Persentase	65,40	66,83	82,00	82,00	87,29

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Dalam pengembangan infrastruktur permukiman di Kabupaten Sinjai pada tahun 2013 persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 65,40 sedangkan pada tahun tahun 2017 mengalami peningkatan yakni 87,29 persentase meningkat sebesar 21,89 % dari tahun 2013 sampai 2017. Hal ini menunjukkan rumah tangga terus mengalami peningkatan terhadap kualitas rumah tangga terhadap sanitasi.

2.4.1.3.5. Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar

Tabel 2.160
Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar	20 Km	20 Km	20 Km	20 Km	20 Km
2.	Panjang Seluruh Sempadan Sungai	306,8 Km	306,8 Km	306,8 Km	306,8 Km	306,8 Km
3.	Persentase	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinj

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dari panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan panjang seluruh sempadan sungai dan persentase dari tahun ke tahun tidak ada perubahan.

2.4.1.3.6. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tdk tersumbat

Tabel. 2.161
Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	-	-	-	-	5.612
2.	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (km)	-	-	-	-	65.574
3.	Persentase	-	-	-	-	8,56

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dalam pembangunan drainase di Kabupaten Sinjai, panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air tahun 2017 seluas 5.612 km dan panjang seluruh drainase di daerah kabupaten seluas 65.574 km dan persentase 8,56%.

2.4.1.3.7. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

Tabel. 2.162

Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luasan daerah yang tergenang	-	-	-	-	-
2.	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
3.	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang sebesar 2.936. Luasan daerah genangan yang berpotensi tergenang masih lebih besar pada daerah perkotaan, dimana daerah perkotaan merupakan dataran rendah. Selain itu daerah perkotaan merupakan kawasan yang berdekatan dengan daerah pesisir sehingga sering terjadi banjir ROB.

2.4.1.3.8. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Tabel. 2.163

Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas irigasi dalam kondisi baik	6.103	6.559	7.459	7.949	8.309
2.	Luas irigasi kabupaten	12.027	12.027	12.027	12.027	12.027
3.	Persentase	50,74	54,54	62,02	66,09	69.09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Kondisi prasarana irigasi di Kabupaten Sinjai luas irigasi dalam kondisi baik setiap tahun meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Sedangkan luas irigasi di Kabupaten Sinjai tidak berubah tiap tahunnya.

2.4.1.3.9. Rasio Jaringan Irigasi

Tabel 2.164

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jaringan	191,707	197,684	214,760	226.681	244.125
Luas Lahan Budi Daya Pertanian	13.593	13.593	13.593	13.593	13.593
Rasio	14,10	14,54	15,79	16,68	17,96

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kinerja jaringan irigasi di Kabupaten Sinjai memperlihatkan adanya peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase jaringan irigasi pada tahun 2013 sebesar 14,10 mengalami kenaikan sebesar 17,96 pada tahun 2017, sehingga dengan adanya peningkatan efesiensi dan efektifitas peningkatan pengelolaan jaringan irigasi melalui

penambahan luasan lahan budidaya yang terairi, maka pencapaian target Kabuapten Sinjai sebagai pendukung ketahanan pangan nasional dapat terwujud.

2.4.1.3.10. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel.2.165
Persentase penduduk berakses air minum Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penduduk berakses air minum	49.164	56.364	58.720	59.520	164.809
2.	Jumlah penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3.	Persentase	20,93	23.83	24,66	24,83	65,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Persentase penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2016 sebanyak 24,83 persen meningkat sebesar 65,23 Persen pada tahun 2017. Begitupun jumlah penduduk sebanyak 239.689 orang pada tahun 2016 Meningkat dari tahun 2017 sebanyak 252.627 orang.

2.4.1.3.11. Proporsi rumah tangga dgn akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaaan dan pedesaan

Tabel. 2.166
Proporsi rumah tangga dgn akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaaan dan pedesaan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ penduduk dgn akses terhadap sumber air minum yang terlindung dan berkelanjutan	-	-	-	-	46.064
2.	Σ penduduk seluruhnya	-	-	-	-	70.626
3.	Persentase	-	-	-	-	65,22

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

2.4.1.3.12. Persentase rumah areal kawasan kumuh

Tabel. 2.167
Persentase rumah areal kawasan kumuh Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas kawasan kumuh	-	67,08	60,68	60,19	43,96
2.	Luas wilayah	-	81.996	81.996	81.996	81.996

3.	Persentase	-	81,81	74,00	73,41	53,61
----	------------	---	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Persentase rumah areal kawasan kumuh pada tahun 2013 sebanyak 81,18 persen menurun sebesar 53,61 Persen pada tahun 2017.

2.4.1.3.13. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tabel 2.168
Rasio Tempat Pekuburan Umum Per Satuan Penduduk
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Daya Tampung TPU	30.486,65	35.417,5	24.727,5	24.743,5	5.324,5
2.	Σ Penduduk	234,886	234.886	238.099	239.689	252.627
3.	Rasio	12,98	15,08	10,39	10,32	2,10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Pekuburan Umum Pada Tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan karena lokasi yang dibebaskan untuk pemakaman umum sangat sedikit disebabkan oleh banyaknya lahan yang bermasalah dan masyarakat tidak ingin membebaskan lahannya untuk pemakaman.

2.4.1.3.14. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tabel 2.169
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinja

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Tempat Ibadah	655	673	754	-	-
2.	Σ Penduduk	234.886	236,497	238.099	239.689	252.627
3.	Rasio	1:359	1:351	1:351	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Jumlah tempat ibadah selama kurun tiga tahun berturut-turut mengalami penduduk dari tahun 2013 sebesar 234.886 mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 252peningkatan dari tahun 2013 sebesar 655 dan tahun 2015 sebesar 754, sedangkan jumlah,627.

2.4.1.3.15. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Tabel. 2.170
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN
-----	--------	-------

		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas ruang terbuka hijau	120	150	158	166	173
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	33,57	44,76	52,83	70,71	71,43
3.	Rasio	27,98	29,84	33,43	42,59	41,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2013 sebanyak 27,98 % meningkat sebesar 41,28 % pada tahun 2017. Begitupun luas ruang terbuka hijau dan luas wilayah ber HPL / HGB dari tahun ke tahun meningkat, karena kegiatan yang dilaksanakan hanya penataan ruang hijau dari lokasi yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

2.4.1.3.16. Luasan RTH Public Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota /Kawasan Perkotaan

Tabel. 2.171

Luasan RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luasan RTH public yg tersedia di akhir tahun pencapaian SPM (%)	0	0	26,78	33,65	33,65
2.	Luasan RTH public yg seharusnya tersedia di wilayah kawasan perkotaan (%)	0	0	20	20	20
3.	Rasio (%)	0	0	133,9	168,25	168,25

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan terdiri atas RTHKP Public dan RTHKP privat, dimana RTHKP Public dengan luas minimal 20 % dari luas kawasan perkotaan yang meliputi tanam kota, hutan kota, taman rekreasi, pemakaman umum, jalur dibawah SUTET sempadan sungai, jalur pengaman jalan, median jalan dan perindustrian serta sona dan jalur hijau. Sedangkan RTHKP Privat dengan luas minimal 10 % dari luas kawasan perkotaan yang meliputi taman pekarangan perumahan dan permukiman, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha.

2.4.1.3.17. Rasio Bangunan Ber IMB

Tabel.2.172

Rasio Bangunan ber IMB Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ bangunan ber IMB	33.780	39.431	39.754	40.626	41.457
2.	Σ bangunan	51.651	53.463	53.786	54.658	55.489

3.	Rasio	65,40	72,75	73,91	74,33	74,71
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio bangunan ber IMB ini pada tahun 2013 sebanyak 65,40 persen meningkat sebesar 74,71 Persen pada tahun 2017. Dengan jumlah bangunan ber IMB pada tahun 2013 sebesar 33.780 meningkat sebesar 41.457 pada tahun 2017 Begitupun jumlah bangunan sebanyak 51.651 pada tahun 2013 Meningkat pada tahun 2017 sebanyak 55.489.

2.4.1.3.18. Ketaatan terhadap RTRW

Tabel.2.173
Ketaatan terhadap RTRW
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi RTRW	3	3	1	1	1
2.	Rencana peruntukan	10	10	17	23	27
3.	Rasio	30	30	5,88	4,34	3,7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari setiap rencana peruntukan pada tahun 2013-2014 yang terealisasi sesuai arahan RTRW adalah perencanaan RDTR kawasan perkotaan sinjai, survey dan pemetaan, rencana strategis kawasan agropolitan mannaniti, rencana strategis kawasan agropolitan bikeru. Tahun 2015-2016 realisasi RTRW berupa dokumen rencana strategis kawasan agropolitan manipi dan pendataan pemanfaatan ruang dan pada tahun 2017 realisasi sesuai arahan RTRW adalah RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah.

2.4.1.4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.4.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Tabel. 2. 174
Rasio rumah layak huni Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ rumah layak huni	-	24.560	24.610	47.681	49.248
2	Σ penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Rasio (3:4)	-	0,10	0,10	0,19	0,19

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Rumah Layak Huni merupakan perbandingan rumah layak huni pada kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pertahunnya. Pada Tahun 2014 rasio rumah layak huni mengalami peningkatan 0,10% dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015,

0,19%. Rasio Rumah Layak huni sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak terlalu mengalami peningkatan dibanding dengan pertumbuhan penduduk 1.500 orang pertahun (akumulasi data pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 sampai tahun 2017).

2.4.1.4.2. Rasio Permukiman Layak Huni

Tabel. 2.175
Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Pemukiman Layak Huni	27.226	27.226	27.226	27.226	27.226
2	Luas Wilayah Permukiman	57.397	57.397	57.397	57.397	57.397
3	Rasio (3:4)	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana,sarana,utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Berdasarkan tabek diatas menunjukkan bahwa Luas Wilayah Permukiman Kabupaten Sinjai 57.397 Ha dengan Luas Wilayah Permukiman Layak Huni 27.226 Ha atau 47,43%. Luas Wilayah Permukiman Layak Huni tidak mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017, namun tetap dibarengi dengan peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni.

2.4.1.4.3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel. 2.176
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	-	46.391	47.681	49.248
2	Σ rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	-	53.833	54.705	55.536
3	Rasio (3:4)	-	-	86,18	87,16	88,68

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rumah bisa dikatakan layak huni apabila memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan

serta kesehatan para penghuninya. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Pada Tahun 2015 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak mengalami peningkatan yang signifikan 86,18%, peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni, dapat dikatakan mengalami keberhasilan dalam pencapaian target. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian target cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah Perbaikan rumah yang dilaksanakan masyarakat secara swadaya; Fasilitas

peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (Bantuan Stimulan Rumah Swadaya) rumah dengan Dana APBN; Adanya pembangunan rumah subsidi yang dilaksanakan oleh pengembang dan Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2.4.1.4.4. Persentase Pemukiman yang Tertata

Tabel. 2.177
Persentase Pemukiman yang Tertata
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas area permukiman tertata	8.716	8.716	8.716	8.716	8.716
2	Luas area permukiman keseluruhan	57.397	57.397	57.397	57.397	57.397
3	Persentase	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2017 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru seluas 8.716 ha atau mencapai 15,19% dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Sinjai, hal ini tidak mengalami perubahan walaupun tidak mengalami perubahan tetapi tetap dilakukan peningkatan kualitas permukiman.

2.4.1.4.5. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Tabel. 2.178
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	-	67,09	66,09	78,41	59,89
2	Luas wilayah	81.996	81.996	81.996	81.996	81.996

3	Persentase	-	0,08	0,08	0,10	0,07
---	------------	---	------	------	------	------

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dengan tujuh kriteria kekumuhan yaitu Kondisi Bangunan, Kondisi Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi Pengelolaan Persampahan dan Kondisi Proteksi Kebakaran ditambah dengan Ruang terbuka Hijau.

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 telah terbit SK Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luas 67,08 Ha (Keputusan Bupati Nomor 536 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sinjai (Lampiran I), dengan Luas Wilayah 81,996 Ha atau 0,08% dari luas wilayah.

Penanganan Kumuh dilakukan baru pada tahun 2015 dengan pengurangan 1 Ha atau Luas Kumuh berkurang menjadi 66,09 Ha, pada Tahun 2016 Luas Permukiman Kumuh mengalami peningkatan menjadi 77,35 Ha. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 dilaksanakan penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dimana kawasan kumuh teridentifikasi di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sinjai Barat 3,56 Ha, Kecamatan Sinjai Tengah 4,82 Ha, Kecamatan Sinjai Timur 7,188 Ha dan Kecamatan Sinjai Utara 68,15 Ha dengan total luasan 84,15 Ha, tetapi mengalami pengurangan mulai tahun 2015 sehingga pada tahun 2016 menjadi 78,41 Ha, dan pada tahun 2017 tersisa 59,89 Ha.

2.4.1.4.6. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Tabel. 2.179

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Tahun 2013-2107 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	-	-	1	5,66	23,13
2	Luas permukiman kumuh	-	67,09	66,09	78,41	59,89
3	Persentase	-	-	1,51	7,32	38,61

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pada tahun 2014 telah terbit SK Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luas 67,08 Ha (Keputusan Bupati Nomor 536 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sinjai (Lampiran I).

SK tersebut merupakan dasar penanganan kawasan kumuh perkotaan, pada tahun 2015, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menindak lanjuti SK Bupati dengan melakukan penanganan kawasan kumuh, pada tahun 2015 tertangani 1 Ha, tetapi pada tahun 2016 Kawasan Kumuh mengalami peningkatan menjadi 78,41 Ha ini diakibatkan oleh adanya penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dimana kawasan kumuh teridentifikasi di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sinjai Barat 3,56 Ha, Kecamatan Sinjai Tengah

4,82 Ha, Kecamatan Sinjai Timur 7,188 Ha dan Kecamatan Sinjai Utara 68,15 Ha dengan total luasan 84,15 Ha, walaupun mengalami peningkatan tetapi setiap tahunnya mengalami pengurangan sehingga pada tahun 2017 Luas Kawasan Kumuh Perkotaan telah tertangani 23,13 Ha, yang sumber dananya dari APBD maupun Dana APBN yang melalui Program “KOTAKU”.

2.4.1.4.7. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Tabel. 2.180
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	-	-	-	-	598
2	Σ Seluruh Rumah	-	-	-	-	55.356
3	Persentase	-	-	-	-	1,08

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 7 indikator pembentuk rumah tidak layak huni (RTLH) dan rumah kumuh (RK) yaitu jenis atap rumah terbuat dari jerami/ijuk/alang-alang/rumbia/daun, jenis dinding rumah terbuat dari bambu, jenis lantai tanah, luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, sumber penerangan bukan listrik, menggunakan air yang termasuk dalam kategori air tidak layak sebagai air minum, menggunakan fasilitas sanitasi yang termasuk dalam kategori sanitasi tidak layak. Pada tahun 2017 Rumah Tangga Kumuh Perkotaan 598 Unit dari total jumlah seluruh rumah 55.356 Unit atau 1,08%.

2.4.1.4.9 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Tabel . 2.181
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Σ Lingkungan yg didukung PSU pada Kurun waktu tertentu	-	-	-	2	8
2	Σ Lingkungan Perumahan pada kurun waktu tertentu	-	-	-	354	354
3	Cakupan	-	-	-	0,56	2,26

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik yang merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.

Enam kriteria penting yang harus kita penuhi jika ingin membangun lingkungan sehat dan aman dengan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yaitu jalan, sanitasi, drainase dan pengendalian banjir, persampahan, air minum, dan listrik.

Pada tahun 2016 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 0,56 % dan meningkat pada tahun 2017 yaitu 2,26%.

2.4.1.5. KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.4.1.5.1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tabel. 2.182
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelanggaran K3 yg disediakan	108	108	122	193	350
2.	Σ pelanggaran K3 yg di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	-	224	108	172	271
3.	Persentase	-	48,21	112,96	112,21	129,15

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta

stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

2.4.1.5.2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Tabel. 2.183

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²
2.	Luas wilayah Kabupaten	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²
3.	Persentase	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dan luas wilayah kecamatan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan.

2.4.1.5.3. Tingkat Waktu Tanggap (response Time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tabel. 2.184

Tingkat waktu tanggap (response Time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	-	16	17	9	15

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Tingkat waktu tangkap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran tahun 2014 mencapai 16 WMK meningkat pada tahun 2015 mencapai 17 WMK dan pada tahun 2016 menurun mencapai 9 WMK dan tahun 2017 meningkat mencapai 15 WMK.

2.4.1.5.4. Persentase Penegakan PERDA

Tabel. 2.185

Persentase Penegakan PERDA Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1.	Σ Penyelesaian penegakan PERDA	-	108	122	193	350
2.	Σ Pelanggaran PERDA	-	224	108	172	271
3.	Persentase	-	48,21	112,96	112,21	129,15

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sinjai tiap tahun terus mengalami peningkatan dalam pencapaian kinerja nya. Pada tahun 2014 penegakan perda yakni 48,21 persen, pada tahun 2017 mencapai 129,15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini terus berupaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang bertujuan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat.

2.4.1.6. SOSIAL

2.4.1.6.1. Persentase PMKS yg Memperoleh Bantuan Sosial

Tabel 2.186
Persentase PMKS yg Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ PMKS yg diberikan bantuan	110	113	429	515	575
2	Σ PMKS yg seharusnya menerima bantuan	93.147	93.147	93.147	93.147	93.147
3	Persentase	0,11	0,12	0,46	0,55	0,61

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami kenaikan hal ini dilihat pada tahun 2013 persentase PMKS memperoleh bantuan sosial adalah 0,11 persen, naik menjadi 0,12 persen pada tahun 2014 sampai tahun 2015 yakni 0,46 persen. Pada tahun 2016 PMKS memperoleh bantuan sosial naik menjadi 0,55 persen dan naik menjadi 0,61 persen di tahun 2017. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian kepada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk memberikan perhatian terhadap PMKS, tujuannya agar terciptanya kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.

2.4.1.6.2. Persentase PMKS yg Tertangani

Tabel. 2.187
Persentase PMKS yg Tertangani
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ PMKS yg ditangani	110	113	429	515	575
2	Σ PMKS yg ada	93.147	93.147	93.147	93.147	93.147
3	Persentase	0,11	0,12	0,46	0,55	0,61

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

2.4.1.6.3. Persentase PMKS Skala yg Memperoleh Bantuan Social untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel. 2.188
Persentase PMKS Skala yg memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ PMKS yg memperoleh bantuan social dlm 1 tahun	-	-	-	-	4,921
2	Σ PMKS dlm 1 thn yg seharusnya memperoleh bantuan social	-	-	-	-	5,122
3	Persentase	-	-	-	-	96,08

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2013 sampai dengan 2016 tidak ada datanya. Sedangkan pada tahun 2017 mencapai 96,08%.

2.4.1.6.4. Persentase Panti Sosial yg Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Social Ekonomi Sejenis lainnya

Tabel. 2.189
Persentase panti social yg menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ PMKS yg menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE	50	60	340	435	1.060
2	Σ PMKS yg seharusnya menjadi peserta KUBE	78.675	78.675	78.675	78.675	78.675
3	Persentase	0,06	0,07	0,43	0,55	1,34

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami kenaikan hal ini dilihat pada tahun 2013 persentase PMKS memperoleh bantuan sosial adalah 0,11 persen, naik menjadi 0,12 persen pada tahun 2014 sampai tahun 2015 yakni 0,46 persen. Pada tahun 2016 PMKS memperoleh bantuan sosial naik menjadi 0,55 persen dan naik menjadi 0,61 persen di tahun 2017. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian kepada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk memberikan perhatian terhadap PMKS, tujuannya agar terciptanya kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.

2.4.1.6.5. **Persentase Panti Social yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial**

Tabel. 2.190
Persentase Panti Social yg Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Social Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ panti social yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	10	10	10	13	13
2	Σ panti social yg seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	10	10	10	13	13
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase panti social yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terdapat 10 panti social sedangkan tahun 2016 sampai tahun 2017 mengakami kenaikan sebesar 13 panti social Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian kepada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk memberikan perhatian terhadap PMKS, tujuannya agar terciptanya kualitas hidup masyarakat yang sejahtera.

2.4.1.6.6. **Persentase Wahana Kesejahteraan Social Berbasis Masyarakat (WKBSM) yg Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Tabel. 2. 191
Persentase Wahana Kesejahteraan Social Berbasis Masyarakat (WKBSM)
yg Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ WKBSM yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5	5	5	5

2	Σ WKBSM yg seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala	5	5	5	5	5
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan saran parasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidk ada perubahan.

2.4.2. ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS PELAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.4.2.1. TENAGA KERJA

2.4.2.1.1. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang Ditempatkan

Tabel. 2.192

Besaran pencari kerja yg terdaftar yg ditempatkan Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ pencari kerja yg ditempatkan	-	285	259	283	564
2.	Σ pencari kerja yg didaftar	-	283	311	408	614
3.	Persentase	-	48,89	83,28	69,36	91,86

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 285 orang, lowongan yang terdaftar tahun ini sebanyak 283 lowongan dan penempatan pencari kerja/ pemenuhan lowongan 283lowongan sebanyak 99% dari jumlah Pencari kerja yang didaftar. Tahun 2015 Pencari kerja yang terdaftar sebanyak 311 orang mengalami peningkatan sebanyak 1,18% dari tahun sebelumnya sedangkan Pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 259 orang atau 81% dari jumlah Pencaker yang didaftar. Penurunan persentase Pencari kerja yang ditempatkan karena jumlah lowongan kerja yang menurun sedangkan Pencari kerja yang terdaftar mengalami peningkatan. Tahun 2016 Pencaker yang terdaftar sebanyak 408 orang mengalami peningkatan sebanyak 1,4% dari tahun sebelumnya sedangkan Pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 283 orang atau 69,4% dari jumlah Pencaker yang didaftar. Penurunan persentase Pencaker yang ditempatkan karena

jumlah lowongan kerja yang menurun sedangkan Pencari kerja yang terdaftar mengalami peningkatan.

Tahun 2017 Pencari kerja yang terdaftar sebanyak 619 orang mengalami peningkatan sebanyak 1,51% dari tahun sebelumnya sedangkan Pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 564 orang atau 91,86% dari jumlah Pencaker yang didaftar. Pencari kerja yang ditempatkan melebihi dari Pencari kerja yang terdaftar disebabkan ada beberapa penempatan tenaga kerja seperti tenaga kerja proyek dan tenaga kerja padat karya tidak melalui pendaftaran Pencari Kerja AK-1 yang ada di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja karena jumlah hari kerja yang singkat.

2.4.2.1.2. **Besaran Pekerjaan/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek**

Tabel. 2.193

Besaran pekerjaan / buruh yg menjadi peserta program Jamsostek
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Pekerja / Buruh JAMSOSTEK	-	3.988	1.135	1.250	1.657
2.	Σ Pekerja / Buruh	-	4.963	5.940	6.954	10.010
3.	Persentase	-	80,35	19,11	17,98	16,55

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel diatas pekerja/buruh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 buruh/pekerja yang menjadi peserta program jamsostek sebanyak 3.988 orang. Namun mengalami penurunan pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai pada tahun 2017 sebanyak 1.657 orang.

2.4.2.1.7. **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Tabel. 2.194

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Tenaga kerja yg dilatih	-	20	55	16	32
2.	Σ pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi	-	31	76	26	43
3.	Persentase	-	64,52	72,37	61,54	74,42

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlahnya

fluktuatif, karena pelaksanaan pelatihan, jumlah peserta dan jenis pelatihan keterampilan yang dilaksanakan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tahun 2013 dilaksanakan pelatihan sebanyak 1 paket dengan peserta 20 orang dan pendaftar pelatihan sebanyak 31 orang atau sebesar 64,52 persen, sementara tahun 2017 dilaksanakan pelatihan sebanyak 2 paket dengan peserta pelatihan sebanyak 32 orang dan pendaftar sebanyak 43 orang atau sebesar 74,42 persen.

2.4.2.1.9. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Tabel. 2.195

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ tenaga kerja yg dilatih	11	20	20	26	60
2.	Σ pendaftaran pelatihan berbasis masyarakat	20	28	30	21	98
3.	Persentase	55,00	71,43	66,67	76,19	61,22

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai

Pelatihan berbasis masyarakat merupakan pelatihan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan yang kreatif, berhasil guna dan bermanfaat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan pengalaman kerja bagi masyarakat yang menjadi peserta pelatihan. Pelatihan ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan membekali Pengetahuan yang bisa meningkatkan pendapatan .

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlahnya fluktuatif, karena pelaksanaan pelatihan, jumlah peserta dan jenis pelatihan keterampilan yang dilaksanakan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tahun 2013 dilaksanakan pelatihan sebanyak 1 paket dengan peserta 11 orang dan pendaftar pelatihan sebanyak 20 orang atau sebesar 55 persen, sementara tahun 2017 dilaksanakan pelatihan sebanyak 3 paket dengan peserta pelatihan sebanyak 60 orang dan pendaftar sebanyak 98 orang atau sebesar 61,22 persen.

2.4.2.1.10. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Tabel. 2.196

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ tenaga kerja yg dilatih	-	20	80	100	160
2.	Σ pelatihan kewirausahaan	-	29	114	138	210
3.	Persentase	-	68,97	70,18	72,46	76,19

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlahnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana tahun 2013 dilaksanakan pelatihan kewirausahaan sebanyak 1 paket dengan peserta 20 orang, tahun 2017 dilaksanakan 8 paket pelatihan kewirausahaan dengan peserta sebanyak 160 orang. Hal ini terjadi karena adanya bantuan program pelatihan kewirausahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

2.4.2.1.11. Rasio Lulusan S1 / S2 / S3

Tabel. 2.197
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Lulusan S1	2.790	2.865	2.865	3.524	2.931
2.	Σ Lulusan S2	144	167	167	238	296
3.	Σ Lulusan S3	-	-	-	2	3
4..	Σ Penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
5.	Rasio	1,25	1,28	1,27	1,57	1,28

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio lulusan S1 / S2 / S3 yang paling tinggi pada tahun 2016 mencapai 1,57. Jumlah lulusan S1 yang paling banyak pada tahun 2016 mencapai 3.524 orang sedangkan jumlah kelulusan S 2 yang banyak pada tahun 2017 mencapai 296 orang dan jumlah lulusan S3 yang banyak juga pada tahun 2017 mencapai 3 orang sedangkan jumlah penduduk tiap tahun nya semakin meningkat.

2.4.2.2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.4.2.2.1. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Tabel. 2.198
Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	-	3.189	3.299	3.229	2.867
2	Σ pekerja perempuan	-	6.977	7.619	7.619	15.635
3	Persentase	-	45,71	42,38	42,38	18,33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang berada pada lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Sinjai masih kurang peningkatan peran dan

partisipasi ditingkat dengan kegiatan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Peran serta organisasi perempuan. Temu organisasi perempuan pendampingan focal point SKPD updating data gender. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2017 di Kabupaten Sinjai sebanyak 18,33 persen dari total pekerja perempuan.

2.4.2.2.2. Proporsi kursi yg diduduki perempuan di DPR

Tabel. 2.199
Proporsi kursi yg diduduki perempuan di DPR Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kursi DPRD yg diduduki perempuan	8	8	8	8	8
2	Σ total kursi di keanggotaan DPRD	32	32	32	32	32
3	Persentase	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai sebesar 18,75 persen dari jumlah total kursi di keanggotaan DPRD. Namun masih belum memenuhi kuota sebanyak 30 % yang duduk pada DPRD Kabupaten Sinjai.

2.4.2.2.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel. 2.200
Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	-	-	-	-	12.768
2	Jumlah pekerja perempuan	-	-	-	-	15.635
3	Persentase	-	-	-	-	81,66

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa dta partisipasi perempuan di lembaga swasta baru terhimpun pada tahun 2017, dengan menghitung semua jumlah pekerja perempuan di sektor swasta, mulai dari sektor pertanian hingga sektor perdagangan. persentase pekerja perempuan di lembaga swasta sebesar 81,66 persen dari jumlah pekerja perempuan sejumlah 15.635 orang.

2.4.2.2.4. Rasio KDRT

Tabel. 2. 201
Rasio KDRT Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KDRT	5	4	-	12	3

2	Jumlah rumah tangga	55.343	58.415	61.441	64.760	67.688
3	Rasio	0,009	0,009	-	0,019	0,005

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Tabel di atas dapat dilihat bahwa data jumlah KDRT di Kabupaten Sinjai dari tahun 2014 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Data tahun 2016 jumlah KDRT sebanyak 21 kasus KDRT sementara pada tahun 2017 sebanyak 3 kasus.

2.4.2.2.5. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tabel. 2.202
Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	-	-	-	-	7.205
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	-	-	-	-	35.211
3	Persentase	-	-	-	-	20,46

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

2.4.2.2.6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel. 2.203
Partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	5.517	4.889	5.636
2	Σ angkatan kerja perempuan	-	-	47.802	42.857	50.420
3	Persentase	-	-	11,54	11,41	11,18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 5.517 orang dari total angkatan kerja sebanyak 47.802 orang dengan persentase sebesar 11,54 persen. Pada tahun 2017 persentase angkatan kerja perempuan turun menjadi 11,18 persen.

2.4.2.2.7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu

Tabel. 2.204
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Σ pengaduan /laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	8	76	33	42	27
2	Σ laporan /pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu	8	76	33	42	27
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Peran pelayanan perlindungan perempuan dan anak sudah dilaksanakan sesuai peran dan tupoksi dan dilaksanakan sistematis dengan koordinasi pihak kepolisian kejaksaan dan rehabilitasi sosial dan penanganan konseling. Mulai dari locus kejadian sampai ketingkat rehabilitasi.

Data cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu (Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kementrian Agama, RSUD, Dinas Sosial) tahun 2013 s.d 2017.

Berdasarkan tabel di atas, persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 di Kabupaten Sinjai seluruhnya sudah ditindaklanjuti persentase tindaklanjutnya mencapai 100 persen.

2.4.2.2.8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit

Tabel. 2.205

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit

Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ korban KtP/A yg memperoleh layanan kesehatan o/ tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurung waktu tertentu	2	4	5	8	8
2	Σ seluruh korban KtP/A yg terdata dating ke puskesmas mampu tatalaksana kamus KtP/A dan Ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurung waktu tertentu	2	4	5	8	8
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100 %, dimana pada tahun 2017

Tenaga kesehatan yang terlatih di puskesmas kecamatan saat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Sinjai Timur sejumlah 5 orang Dokter dan 2 orang Bidan dan pelayanan tenaga visum rumah sakit .

2.4.2.2.9. Cakupan layanan rehabilitasi social yg diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Tabel. 2.206

Cakupan layanan rehabilitasi social yg diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ korban kekerasan yg memperoleh pelayanan rehabilitasi social	1	3	3	2	3
2	Σ korban kekerasan yg membutuhkan rehabilitasi social	1	3	3	2	3
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 persentase layanan rehabilitasi social yg diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Mencapai 100 %, karena jumlah setiap korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial, semuanya terlayani dan dari jumlah kasus yang ada setiap tahunnya tidak banyak yang membutuhkan rehabilitasi sosial.

2.4.2.2.10. Cakupan penegakan hukum dr tingkat penyidikan sampai dg putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tabel. 2.207

Cakupan penegakan hukum dr tingkat penyidikan sampai dgn putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ perkara yg diptuskan pengadilan dgn dasar perundang-undangan yg berkaitan dgn kekerasan terhadap perempuan dan anak	2	12	20	18	10
2	Σ perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yg disidangkan	2	12	20	18	10
3	Cakupan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Cakupan penegakan hukum dr tingkat penyidikan sampai dgn putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 100 %

Kondisi saat ini penanganan perkara kekerasan perempuan dan anak sudah optimal dan terlaksana dengan baik. P2TP2A sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah berhasil menangani beberapa kasus dan Pemahaman masyarakat tentang undang-undang kekerasan sudah dimengerti hingga kasus kekerasan yang terjadi di kab. Sinjai mengalami penurunan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

2.4.2.2.11. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan bantuan hukum

Tabel. 2.208

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan bantuan hukum Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ korban mendapat layanan bantuan hukum	2	12	20	18	10
2	Σ korban yg membutuhkan bantuan hukum	2	12	20	18	10
3	Cakupan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan bantuan hukum mencapai 100 % Kondisi saat ini penanganan perkara kekerasan perempuan dan anak sudah optimal dan terlaksana dengan baik. P2TP2A, Unit PPA Polres Sinjai, Kejaksaan sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah berhasil menangani beberapa kasus dan Pemahaman masyarakat tentang undang-undang kekerasan sudah dimengerti hingga kasus kekerasan yang terjadi di kab. Sinjai mengalami penurunan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

2.4.2.2.12. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel. 2.209

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan pelayanan pemulangan	1	1	9	3	4
2	Σ perempuan dan anak korban kekerasan yg tercatat di UPT	8	76	33	42	27
3	Cakupan (%)	12,50	1,32	27,27	7,14	14,81

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban, Kekerasan dilaksanakan tapi belum optimal dikarenakan

tenaga teknis konseling belum tersedia. Dan telah di kembalikan kepada orang tuanya. Tahun 2013 terdapat 1 kasus yaitu kasus keekrasan fisik, tahun 2014 terdapat 1 kasus yaitu kasus membawa lari anak di bawah umur, tahun 2015 terdapat 9 kasus yaitu kasus Pelecehan seksual, tahun 2016 terdapat 3 kasus yaitu 1 kasus kekerasan fisik, penganiayaan 2 kasus , tahun 2017 terdapat 4 kasus yaitu Pemerkosaan anak dibawah umur 2 kasus, penculikan anak 1 kasus, pelecehan seksual 1 kasus.

2.4.2.2.13. Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban

Tabel. 2.210

Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ perempuan dan anak korban kekerasan yg disatukan kembali ke keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	-	-	-	-	4
2	Σ korban yg membutuhkan reintegrasi social	-	-	-	-	4
3	Cakupan	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tidak ada pendataan nanti di tahun 2017 baru diadakan pendataan, pada tahun 2017 Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak mencapai 100.

2.4.2.2.14. Rasio APM perempuan / laki-laki di SD

Tabel. 2.211

Rasio APM perempuan / laki-laki di SD Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APM	-	88,21	100,7	100,7	99,02
2	SD Perempuan	-	88,72	100,37	100,37	98,01
3	SD Laki-laki	-	86,69	101,01	101,01	100,00
4	Persentase	-	88,21	100,70	100,70	99,02

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rasio APM perempuan/ laki-laki di tingkat sekolah dasar (SD) pada tahun 2014 dan tahun 2017 dibawah 100 persen. Ini berarti bahwa jumlah murid laki-laki yang bersekolah pada tahun 2014 dan tahun 2017 lebih banyak dibanding murid perempuan. Namun pada tahun 2015 dan tahun 2016 rasio APM perempuan/laki-laki di atas 100 persen yang berarti bahwa pada tahun 2015 jumlah murid perempuan yang bersekolah lebih banyak dibanding murid laki-laki.

Pelayanan dasar pendidikan sudah terlaksana dengan baik dengan target bebas buta aksara sejak tahun 2015.

2.4.2.2.15. Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP

Tabel. 2.212
Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	APM	-	58,35	97,79	97,79	78,77
2	SMP Perempuan	-	60,55	102,55	102,55	74,45
3	SMP Laki-laki	-	56,15	93,18	93,18	82,38
4	Rasio	-	60,35	97,79	97,79	87,77

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio APM perempuan/ laki-laki di tingkat SMP pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dibawah 100 persen. Ini berarti bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 jumlah murid perempuan yang bersekolah pada jenjang sekolah SMP lebih banyak dibanding murid laki-laki. Dan tahun 2017 jumlah murid laki-laki yang bersekolah pada jenjang sekolah SMP lebih banyak dibanding murid perempuan.

2.4.2.2.16. Rasio APM perempuan / laki-laki di SMA

Tabel. 2.213
Rasio APM perempuan / laki-laki di SMA Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 Tahun	-	-	4.228	4.228	7.227
2	Banyaknya murid SLTA Laki-laki usia 16-18 Tahun	-	-	3.373	3.373	7.294
3	Rasio	-	-	1,25	1,25	0,99

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio APM perempuan/laki-laki ditingkat SMA pada tahun 2015 di atas 100 persen. Ini berarti bahwa jumlah murid perempuan yang bersekolah di jenjang SMA pada tahun 2015 lebih banyak dibanding murid laki-laki. Sedangkan pada tahun 2017 rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SMA di bawah 100 persen yang berarti bahwa pada tahun 2017 jumlah murid laki-laki yang bersekolah pada jenjang sekolah SMA lebih banyak dibanding murid perempuan.

2.4.2.2.17.Rasio APM Perempuan / Laki-laki di Perguruan Tinggi

Tabel. 2.214
Rasio APM Perempuan / Laki-laki di Perguruan Tinggi
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Anak Perempuan di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun	-	977	808	933	1.168
2	Σ anak laki-laki di tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun	-	342	342	478	568
3	Rasio	-	2,86	2,36	1,95	2,06

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2017 rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi di Kabupaten Sinjai mencapai lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan bahwa jumlah anak perempuan ditingkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun lebih banyak dibanding jumlah anak laki-laki di tingkat pendidikan tinggi.

2.4.2.2.19. Rasio Angka Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pd kelompok usia 15-24 tahunan

Tabel. 2.215
Rasio Angka Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pd kelompok usia 15-24 tahunan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf Perempuan	-	330	497	-	-
2	Angka Melek Huruf Laki-laki	-	270	403	-	-
3	Rasio	-	1,22	1,23	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio anak melek huruf perempuan terhadap laki-laki berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebesar 1,22 dan pada tahun 2015 sebesar 1,23. Data ini menunjukkan bahwa angka melek huruf perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Dan Rasio angka melek huruf telah tercapai 100 % di tahun 2017.

2.4.2.2.19. Prosentase Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian

Tabel. 2.216
Prosentase Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sector non pertanian	-	-	-	49	49
2	Banyaknya pekerjaan upahan di sekitar non pertanian	-	-	-	243	243
3	Presentase	-	-	-	20,16	20,16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, digambarkan bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian sebanyak 49 orang dari keseluruhan pekerja upahan disektor non pertanian sebanyak 243 orang dengan persentase 20,16 persen.

2.4.2.3. PANGAN

2.4.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Tabel. 2.217
Ketersediaan pangan utama
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	26.334	27.494	78.775	72.192	83.163
2.	Jumlah penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3.	Persentase	11,21	11,63	33,08	30,12	32,92

Sumber : Dinas Ketahanan & Pangan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase ketersediaan pangan utama selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 11,21 persen meningkat pada tahun 2017 sebesar 32,92 persen, pada tahun 2013 Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun sebanyak 26.334 kg meningkat mencapai 83.163 kg pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan produksi gabah yang dihasilkan meningkat dibandingkan laju jumlah penduduk.

2.4.2.3.2.Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita

Tabel. 2.218
Ketersediaan energi dan protein per kapita Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan pangan / kapita /hari	26,52	25,35	24,55	23,49	16,57
2.	Kandungan kalori	518,02	499.696	502.884	462.137	325.659
	Ketersediaan energy (kkal/kapita/hari)					
3.	BDD	5.020	5.072,34	5.077,34	5.082,34	5.087,34
	Ketersediaan protein (gram / kapita / hari)					

1	Ketersediaan protein/ kapita /hari	1,35	1,34	1,39	1,44	1,49
2	Kandungan protein	133,72	134,12	139,12	144,12	149,12
3	BDD	6,91	7,32	8,48	37,89	42,36

Sumber : Dinas Ketahanan & Pangan Kab. Sinjai

Tabel diatas menunjukkan ketersediaan energi dan protein perkapita untuk ketersediaan pangan tiap tahun mengalami penurunan pada tahun 2014 ketersediaan sebesar 25,35 % sedangkan pada tahun 2017 sebesar 16,57 % sedangkan ketersediaan proten untuk ketersediaan protein/kapita/hari tiap tahun mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 1,34 % pada tahun 2017 sebesar 1,49 %.

2.4.2.3.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Tabel. 2.219
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ sampel pangan yg aman di komsumsi	2	2	3	5	5
2.	Σ total sampel pangan yg diperdagangkan	2	3	7	7	8
3.	Persentase	100	66,67	42,86	71,43	62,00

Sumber : Dinas Ketahanan & Pangan Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel pangan yang aman di konsumsi dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 2 sampel mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 5 sampel pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sedangkan jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pada tahun 2013 sebanyak 2 sampel mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 8 sampel. Tingkat keamanan pangan ditahun 2017 sebanyak 62 %. Hal ini menunjukkan dari delapan sampel yang diuji ada 3 sampel pangan yang tidak aman.

2.4.2.4. PERTANAHAN

2.4.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel. 2.220
Persentase luas lahan bersertifikat Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ luas lahan bersertifikat	-	-	-	-	2.551.254
2.	Σ luas wilayah	-	-	-	-	3.243.009
3	Persentase	-	-	-	-	78,67

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Luas Lahan bersertifikat merupakan perbandingan dari luas lahan bersertifikat (Tanah Milik Pemda Kab.Sinjai) dengan Luas Wilayah (Luas Lahan Milik Pemda Kab.Sinjai). Pada tahun 2017 Luas Lahan bersertifikat milik pemerintah kab. Sinjai 78,67%. Dan setiap tahunnya mengalami peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah untuk mensertifikatkan tanah milik Pemda Kabupaten Sinjai.

2.4.2.4.2. Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel. 2.221
Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ ijin lokasi	-	-	-	-	5
2	Permohonan ijin lokasi	-	-	-	-	5
3	Persentase	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan perusahaan tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka kegiatan penanaman modal. Pada tahun 2017 Penyelesaian Izin Lokasi 100%.

2.4.2.5. LINGKUNGAN HIDUP

2.4.2.5.1. Tersusunnya RPPLH kabupaten

Tersusunnya RPPLH kabupaten Sinjai kurang waktu lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak mempunyai dokumen. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.222
Tersusunnya RPPLH kabupaten Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ada	-	-	-	-	-
2.	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Rencan Pengelolaan dan Perlindungan Lindungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Sinjai sampai dengan tahun 2017 belum tersusun karena petunjuk teknis penyusunan RPPLH belum ada dan dokumen penunjang yaitu data dukung dan daya tampung lingkungan belum tersusun.

2.4.2.5.2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Pembangunan Kabupaten

Tabel. 2.223

Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten
Tahun 2013-2017 Kabupaten Snjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ada	-	-	-	-	-
2.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa belum terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten karena RPPLH belum tersusun sampai dengan tahun 2017.

2.4.2.5.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Tabel. 2.224

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ada	-	-	-	-	Ada
2.	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa KLHS Kabupaten Sinjai Telah tersusun pada tahun 2017 untuk K/R/P RDTRK Kab. Sinjai dengan berpedoman kepada PP Nomor 46 tahun 2016.

2.4.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas air

Tabel. 2.225

Hasil pengukuran Indeks kualitas air
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Baik (memnuhi baku mutu)	-	-	11	11	17
2.	Cemar ringan	-	-	8	10	12
3.	Cemar sedang	-	-	0	1	3
4.	Cemar berat	-	-	0		1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pada tahun 2017 jumlah titik pantau meningkat menjadi 33 titik dibanding tahun 2016 sebanyak 22 titik pantau dan 2015 sebanyak 19 titik pantau. Lokasi pemantauan kualitas air pada Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Balangtieng, Sungai Lolisang, Sungai Kalamisu, Sungai Bua. Dari hasil pemantauan tersebut, kemudian dilakukan pengujian kualitas air pada

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dan pada Laboratorium Uji DPLH Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel tersebut diatas, jumlah titik pantau mengalami peningkatan yang tercemar, baik cemar ringan, cemar sedang maupun cemar berat. Pada Tahun 2017 dari 33 titik pantau, 17 titik memenuhi baku mutu (51.52 %), cemar ringan 12 titik (36.36 %), cemar sedang 3 titik (9.09%), dan cemar berat 1 titik (3.03%).

2.4.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara

Tabel. 2.226
Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	-	-	-	-	89,92

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengukuran kualitas udara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 belum dapat dilakukan, sedangkan pada tahun 2017 indeks kualitas udara (IKU) 89,92 (Baik), namun tantangan kedepan adalah meningkatkan nilai indeks kualitas udara atau menjaga indeks kualitas udara tersebut. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO).Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi,

membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

2.4.2.5.6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan

Tabel. 2.227

Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	-	38.56	38.68	38.79	41.51
2.	Tutupan hutan (TH)	-	0.175	0.177	0.178	0.20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa tutupan hutan mengalami peningkatan rata-rata ± 2 Ha sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, peningkatan tutupan hutan mempengaruhi indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Peningkatan tutupan hutan (TH) didukung oleh kegiatan reboisasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis.

2.4.2.5.7. Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha /atau kegiatan yg diawasi ketaatannya terhadap PPLH, PUU LH yg diterbitkan oelh pemerintah kabupaten

Tabel.2.228

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab
usaha /atau kegiatan yg diawasi ketaatannya terhadap PPLH,
PUU LH yg diterbitkan oelh pemerintah kabupaten
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yg diterbitkannya o/ pemerintah daerah	-	1	2	105	34
2.	Total penanggungjawab usaha a/ kegiatan yg dibina	-	10	10	120	36
3.	Persentase	-	10	20	87,50	94,44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah usaha atau kegiatan semakin meningkat setiap tahun. Sementara aparatur pembina atau pengawasan ketaatan pelaku usaha sangat kurang. Pengukuran indicator ini untuk tahun 2014-2017 diukur dari jumlah usaha atau kegiatan yang diawasi. Jika berdasarkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di Kabupaten Sinjai masih tendah

karena tidak dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tertuang dalam dokumen lingkungan yang telah dibuat, tidak adanya pelaporan tiap 6 bulan sekali terhadap upaya pengelolaan dan pemantauaan yang telah dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.4.2.5.8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel. 2.229
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ada	-	Ada	Ada	Ada	-
2.	Tidak Ada	Tdk Ada	-	-	-	Tdk Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pemberian penghargaan lingkungan hidup pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berupa penghargaan kepada sekolah yang menerapkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan sekolah atau sekolah hijau. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta siswa dan guru dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan sekolah sehingga pada akhirnya akan menjadi budaya. Penghargaan diberikan kepada sekolah yang

Memiliki kriteria sebagai sekolah Adiwiyata Kabupaten. Pada Tahun 2014 kegiatan pembinaan Sekolah Adiwiyata dimulai pada 3 sekolah, namun belum ada penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten. Pada Tahun 2015, diberikan penghargaan kepada 3 sekolah yang memenuhi syarat sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten, dan pada Tahun 2016 pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten meningkat menjadi 20 sekolah, Khusus untuk tahun 2015, selain penghargaan Sekolah Adiwiyata, penghargaan lain yang diberikan adalah penghargaan pada kawasan permukiman yang menerapkan pola pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kawasan permukiman atau kampung hijau. Dari sisi pengelolaan kebersihan, pada Tahun 2015 Kabupaten Sinjai menerima sertifikat Adipura. Pada tahun 2017, tidak ada pemberian penghargaan baik sebagai sekolah Adiwiyata Kabupaten maupun sebagai kampung hijau karena tidak ada yang memenuhi kriteria.

2.4.2.5.9. Timbulan sampah yg ditangani

Tabel. 2.230
Timbulan sampah yg ditangani Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani	-	-	-	19.245,60	19.512,90

2.	Total timbunan sampah	-	-	-	37.283,73	36.883,54
3.	Persentase	-	-	-	51.62	52.90

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Dari data diatas menunjukkan bahwa prosentase Penanganan timbunan sampah di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016 mencapai 51.62 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 52.90 %. Volume timbunan sampah yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 19.512,90 Ton meningkat dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 19.245,60 Ton. Penanganan sampah dilakukan melalui pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir timbunan sampah di TPA dengan cakupan area pelayanan pada area perkotaan.

2.4.2.5.10. Persentase Jumlah Sampah yg Berkurang Melalui 3R

Tabel. 2.231

Persentase jumlah sampah yg berkurang melalui 3R
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sampah yg berkurang melalui 3 R	-	-	-	-	-
2.	Jumlah sampah yg di kelola melalui aktifitas 3 seperti bank sampah, pusat daur ulang dll	-	-	-	-	6.289

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Sampah telah terkelola di Kabupaten Sinjai melalui aktivitas 3R pada Bank Sampah sejak tahun 2013, namun tidak memiliki data. Pada tahun 2017, sejak adanya TPS 3R telah tersedia jumlah sampah yang berkurang melalui prinsip 3R sebanyak 6.289

2.4.2.5.11. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Tabel. 2.232

Persentase cakupan area pelayanan
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (Km ² /ha)	-	10.73	10.73	11.73	19.45
2.	Luas area kabupaten (Km ² /ha)	-	819.96	819.96	819.96	819.96
3.	Persentase	-	1.31	1.31	1.43	2.37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014-2015 cakupan layanan pengelolaan sampah pada 4 kelurahan di area perkotaan yaitu Kelurahan Biringere,Balangnipa, Bongki dan sebagian wilayah Kelurahan Lappa atau 1,31 % dari luas wilayah Kabupaten Sinjai, pada tahun 2016 titik layanan pengelolaan sampah meningkat menjadi 1,43 % pada 4 kelurahan tersebut, namun titik pelayanan di Kelurahan Lappa diperluas. Pada

tahun 2017 cakupan pengelolaan sampah meningkat menjadi 2,37 % dengan cakupan layanan pada 4 kelurahan di area perkotaan ditambah dengan Kecamatan Pulau IX dan Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur.

2.4.2.5.12. Persentase Jumlah Sampah yg Tertangani

Tabel. 2.233
Persentase jumlah sampah yg tertangani
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ sampah yg tertangani (ton)	-	-	-	19.245,60	19.512,90
2.	Total Σ timbunan sampah di kabupaten (ton)	-	-	-	37.283,73	36.883,54
3.	Persentase	-	-	-	51.62	52.90

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase jumlah sampah yang tertangani pada Tahun 2017 meningkat mencapai 52.90 % dari Tahun 2016 sebesar 51.62 %. Peningkatan jumlah sampah yang tertangani dipengaruhi antara lain karena meningkatnya timbunan sampah dan meningkatnya pelayanan persampahan melalui pengumpulan, pengangkutan sampah ke TPA.

2.4.2.5.13. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten

Tabel. 2.234
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai TPA (Program adipura	-	74,06	74,06	71	71,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penurunan nilai operasionalisasi TPA di Kabupaten Sinjai. Hal ini dipengaruhi salah satunya karena kriteria penilaian program Adipura.

2.4.2.6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.4.2.6.1. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk.

Tabel. 2.235
Rasio penduduk ber KTP per Satuan Penduduk
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Penduduk usia > 17 yg ber KTP	73.758	73.758	75.848	77.900	79.022
2.	Σ Penduduk usia 17 atau yg telah menikah	98.528	98.528	162.517	166.435	171.990

3.	Rasio	0,75	0,75	0,47	0,47	0,46
----	-------	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Bagi setiap penduduk yang telah berumur 17 tahun terhitung sejak tanggal kelahirannya wajib memiliki KTP, disamping itu bagi penduduk yang sudah menikah meskipun belum berumur 17 tahun wajib memiliki KTP.

KTP dan dokumen kependudukan lainnya saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap penduduk, KTP harus dibawa dan melekat pada pemiliknya kemana dan dimana ia berada. KTP setiap penduduk menjadi syarat berhak mendapatkan pelayanan publik, seperti : pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan di perguruan tinggi, penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan surat-surat dan sertifikat tanah, asuransi, pelayanan jaminan sosial, dan lain-lain.

Olehnya itu bagi setiap penduduk untuk mendapatkan pelayanan publik dengan mulus dan legal, harus memiliki KTP yang sah dan benar. Apabila setiap penduduk memiliki KTP-El dengan ketunggalan NIK, maka kegunaan dan pemanfaatan data dapat efektif sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan. Hal ini sangat penting untuk diprioritaskan dalam pembangunan kependudukan agar berhasil guna dan berdaya guna untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rasio kepemilikan KTP-El pada penduduk usia 17 tahun ke atas dan juga jumlah penduduk di atas 17 tahun atau telah menikah. Terlihat ada pertambahan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-El. Hal ini terjadi karena Dinas Dukcapil Sinjai selalu melaksanakan kegiatan jemput bola atau *door to door* perekaman untuk semua warga terutama yang lansia dan pelajar yang akan memasuki umur 17 tahun.

2.4.2.6.2. Rasio bayi berakte kelahiran

Tabel. 2.236
Rasio bayi berakte kelahiran
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ bayi berakte kelahiran	17.806	19.806	82.531	89.268	89.268
2.	Jumlah Bayi	289.278	20.230	100.793	90.738	90.738
3.	Rasio	0,06	0,98	0,82	0,98	0,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terjadi peningkatan kepemilikan bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta untuk bayi ini mencapai 98%.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dimana orang tua anak tersebut terdaftar sebagai

penduduk paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Pada saat pelaporan berdasarkan persyaratan yang dipersyaratkan setelah terpenuhi, maka dicatat pada register Akta Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Apabila pelaporan melampaui batas 60 hari sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran setelah mendapat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Dinas Dukcapil Sinjai saat ini melakukan sebuah inovasi yaitu pelayanan langsung pada pusat layanan kesehatan pada setiap bayi yang lahir yang digabungkan dengan inovasi ON3 (satu kali pengurusan, 3 berkas yang dihasilkan – Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga).

2.4.2.6.3. Rasio pasangan berakte nikah

Tabel. 2.237
Rasio pasangan berakte nikah Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Pasangan nikah berakte nikah	4.558	4.558	4.590	4.590	4.713
2.	Σ keseluruhan pasangan nikah	56.518	56.518	56.645	56.645	56.775
3.	Rasio	0,08	0,08	0,081	0,081	0,083

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan rasio kepemilikan akta nikah. Ada peningkatan pasangan yang memiliki akta nikah seiring dengan bertambahnya pasangan yang punya status menikah.

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Perkawinan hanya diberikan kepada penduduk non muslim yang telah melakukan perkawinan.

Bagi penduduk muslim menggunakan buku nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 34 mengamanahkan data hasil pencatatan atas peristiwa pelaporan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 10 hari sejak tanggal perkawinan oleh penduduk yang beragama Islam melalui KUA Kecamatan, tetapi tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan hanya untuk direkam dalam database kependudukan.

Peningkatan versi SIAK tahun 2018 ini diharapkan akan memberikan penambahan pelaporan akta nikah karena format Kartu Keluarga telah berubah terutama pada status menikah yang punya akta atau tidak bisa memperlihatkan akta nikah. Jumlah di atas

diambil dari yang melaporkan akta nikah yaitu buku nikah untuk muslim dan bukan akta perkawinan yang untuk non muslim.

2.4.2.6.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Tabel. 2.238
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Data base kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Database kependudukan di Dinas Dukcapil Sinjai telah berskala provinsi. Semua data penduduk dari kabupaten lain ataupun provinsi lain bisa dicek. Semua data online sehingga menghindari adanya nomor NIK yang ganda.

2.4.2.6.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.239
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Penerapan Aplikasi SIAK yang sudah sampai ke versi 7 telah berbasis NIK. Semua penduduk punya NIK masing-masing sesuai dengan identitas dari daerah pertama membuat NIK.

2.4.2.6.6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel. 2.240
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ KTP ber-NIK yg diterbitkan	137.642	140.276	143.789	159.923	167.679
2.	Σ Penduduk wajib KTP	200.239	208.458	171.355	175.524	171.990
3.	Cakupan	68,73	67,29	83,91	91,11	97,49

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan Kepemilikan KTP-El Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk. Pada bagian ini kita bisa melihat rasio penerbitan antara KTP ber-NIK dan jumlah penduduk wajib KTP. Penerbitan KTP telah mencapai 97,49% dari keseluruhan penduduk wajib KTP.

2.4.2.6.7. Cakupan penerbitan akte kelahiran

Tabel. 2.241

Cakupan penerbitan akte kelahiran Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Penduduk lahir & memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan	17.806	19.806	82.531	89.268	89,268
2.	Σ Pkelahiran di tahun bersangkutan	289.278	20.230	100.793	90.738	90.738
3.	Cakupan (%)	6,15	97,90	81,88	98,38	98,38

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai

Penjelasan pada bagian ini sebelumnya telah dimulai pada bagian Rasio bayi berakte kelahiran. Pada tabel 2.250 kita melihat bahwa persentasi penerbitan akta kelahiran pada bayi itu mencapai 98,38%.

2.4.2.7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.4.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Tabel. 2.242
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa
yang Baik Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Kantor Pemerintahan Desa yang Baik	45	47	59	65	63
2	Σ Seluruh Pemerintahan Desa	67	67	67	67	67
3	Cakupan	67,16	70,15	88,06	97,01	94,03

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

Aktifitas pemerintahan Desa pada dasarnya berjalan dengan baik walaupun keterbatasan sarana dan prasarana kantor Desa. Pada tahun 2013 Kantor pemerintahan Desa yang dianggap representatif sejumlah 45 (empat puluh lima) kantor Desa dari 67 Seluruh Pemerintahan Desa atau 67,16 % dan pada akhir tahun 2016 meningkat secara signifikan menjadi 65 (enam puluh tiga) kantor Desa dari 67 seluruh Pemerintahan Desa atau 97,01%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 65 dari tahun 2016 menjadi 63 atau 94,03%, hal ini disebabkan karena Kantor Desa tersebut dalam perbaikan (rehabilitasi). Dengan demikian akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maksimal semakin baik.

2.4.2.7.2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel. 2.243
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Kelompok Binaan LPM	80	80	80	80	80
2	Σ LPM	80	80	80	80	80
3	Rata-Rata	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Sinjai yang ada sebanyak 80 kelompok. Ini berarti bahwa pada setiap Desa/Kelurahan memiliki 1 kelompok binaan LPM.

2.4.2.7.3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sinjai

Tabel 2.244
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ PKK	80	80	80	80	80
2	Σ Kelompok Binaan PKK	3.449	3.449	3.586	3.795	3.795
3	Rata-Rata	43,11	43,11	44,83	47,44	47,44

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PKK yang ada sebanyak 80 terdiri dari PKK Desa/Kelurahan. Dalam kurun waktu mulai tahun 2013 sampai tahun 2014 jumlah kelompok binaan tetap dengan jumlah 3.449 kelompok dengan rata-rata 43,11 dan pada tahun 2015 ada penambahan jumlah kelompok binaan sebanyak 3.586 dengan rata-rata 44,83 kelompok binaan. Pada tahun 2016 ada penambahan kelompok binaan dengan jumlah 3.795 dengan rata-rata kelompok binaan PKK sebanyak 47,44 dan pada tahun 2017 kelompok binaan PKK tetap sebanyak 3.795.

2.4.2.7.4. Persentase LSM aktif

Tabel 2.245
Persentase LSM aktif Tahun 2013-2017 Di Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ LSM Aktif	13	10	12	12	15

2.	Σ LPM	80	80	80	80	80
3.	Persentase	16,25	12,50	15,00	15,00	18,75

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

Berdasarkan Data tersebut diatas dapat dilihat jumlah LSM aktif dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai tahun 2017 tidak menetap, jumlah LSM pada tahun 2013 sebanyak 13 LSM Aktif dan pada tahun 2014 terjadi penurunan dengan jumlah LSM Aktif sebanyak 10 LSM sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan LSM Aktif menjadi 12 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 15 LSM Aktif. Demikian pula dengan Persentase Jumlah LSM Aktif pada kurun waktu 2013 sampai tahun 2017 tidak tetap namun terjadi peningkatan jumlah LSM Aktif pada Tahun 2017 sebanyak 18,75%.

2.4.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2.246
Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ LPM Berprestasi	3	3	3	3	3
2	Total LPM	80	80	80	80	80
3	Persentase LPM Berprestasi	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

Dari tabel di atas dapat dilihat LPM berprestasi pada tahun 2013 sampai tahun 2017 sebanyak 3 dari total 80 LPM di Kabupaten Sinjai dengan persentase 3,75 persen.

2.4.2.7.6. PKK Aktif

Tabel 2.247
PKK Aktif Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ PKK Aktif	80	80	80	80	80
2	Total PKK	80	80	80	80	80
3	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah PKK Aktif mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebanyak 89 Lembaga PKK setiap tahunnya yang terdiri dari PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Sinjai dengan persentase PKK aktif sebesar 100%.

2.4.2.7.7. Persentase Posyandu Aktif

Tabel 2.248
Persentase Posyandu Aktif
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

		2013	2014	2015	2016	2017
1	Total Posyandu	323	324	331	331	336
2	Σ Posyandu Aktif	322	324	331	331	336
3	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah posyandu tahun 2013 sebanyak 323 dengan jumlah posyandu aktif sebanyak 322 dengan persentase sebesar 99% dan pada tahun 2014 peningkatan jumlah posyandu yang ada sebanyak 324 dengan persentase sebesar 100%, pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah posyandu sebanyak 331 dan jumlah posyandu sampai tahun 2016 tetap sebanyak 331 dengan persentase 100%. Dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan dengan jumlah posyandu yang terbentuk sebanyak 336 dengan persentase 100%, peningkatan jumlah posyandu yang terbentuk seiring dengan adanya Dana Desa dan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan dan pelayanan dasar di Desa/Kelurahan.

2.4.2.7.8. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.249
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Program pemberdayaan masyarakat	Milyar	-	-	22.118,116.468	43.157.452.992,32	49.584.305,000
2	Swadaya masyarakat	(Rp)	-	-	395.747.800.000	888.896.078.000	1.281.478.000.000
3	Persentase		-	-	17,89	20,60	25,84

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai

Tabel diatas menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat tahun 2013 sampai tahun 2014 belum ada data, tapi setelah tahun 2014 jumlah dana programm pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp. 22.118.116.468,00 sedangkan jumlah swadaya yang diperoleh sebanyak Rp. 395.747.800.000 dengan persentase sebesar 17,89%. Pada tahun 2016 Jumlah Dana meningkat dengan jumlah dana sebanyak Rp. 43.157.452.992,32 dengan jumlah swadaya sebanyak Rp. 888.896.078.000 atau sebesar 20,60%. Pada tahun 2017, jumlah program meningkat menjadi Rp. 49.584.305.000 dengan jumlah swadaya masyarakat sebanyak Rp.1.281.478.000.000 atau sebesar 25,84%. Jumlah swadaya masyarakat meningkat

setiap tahun disebabkan oleh masih tingginya kesadaran masyarakat berpartisipasi terhadap pembangunan di Pedesaan.

2.4.2.8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.4.2.8.1. Total Fertility Rate (TFR)

Tabel 2.250
Total Fertility Rate (TFR)
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-rata TFR
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Angka TFR	-	-	2,36	-	-	2,36

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.2. Persentase Perangkat Daerah yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Tabel 2.251
Persentase Perangkat Daerah yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ perangkat daerah yg berperan aktif di kampung KB	-	-	-	-	20
2	Σ semua perangkat daerah	-	-	-	-	42
3	Persentase	-	-	-	-	47,62

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Intervensi kegiatan .perangkat daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan dari pembentukan kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang terintegrasi dengan sektor lain.

2.4.2.8.3. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tabel . 2.252
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Anak	-	-	-	-	-
2	Jumlah Keluarga	57.873	59.163	60.983	61.063	62.196
3	Rata-rata	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

2.4.2.8.4. Rasio Akseptor KB

Tabel. 2.253
Rasio Akseptor KB Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Akseptor KB	22.168	27.369	27.369	30.128	28.445
2	Σ Pasangan usia Subur	38.292	36.426	37.489	38.747	38.317
3	Rasio	57,89	75,14	73,01	77,76	74,24

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio akseptor KB di Kabupaten Sinjai berfluktuatif. Rasio akseptor KB terendah ada pada tahun 2013 dengan rasio 57,89 persen sementara yang tertinggi ada pada tahun 2016 dengan rasio 77,76 persen, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 74,24% mengingat pasang usia subur yang sudah monopous, meninggal dan peserta KB ada yang drop out.

2.4.2.8.5. Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 – 49 tahun

Tabel. 2.254
Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah
Usia 15 – 49 tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Peserta KB Aktif	22.168	27.369	27.369	30.128	28.148
2	Σ Pasangan Usia Subur	35.532	36.426	37.489	38.747	38.317
3	Persentase	62,95	75,74	73,00	77,76	73,46

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif tertinggi pada tahun 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 30.128 dengan persentase sebesar 77,76 persen, sementara jumlah peserta KB aktif terendah pada tahun 2013 dengan jumlah peserta sebanyak 22.168 peserta dengan persentase sebesar 62,95 %, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 73,46 % karena pasangan usia subur mengalami drop out dan peserta KB aktif kurang pembinaan.

2.4.2.8.6. Angka Kelahiran remaja (Perempuan usia 15 – 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Tabel. 2.255
Angka Kelahiran remaja (Perempuan usia 15 – 19) per 1.000
perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kelahiran dr perempuan pd klp umur 15-19	-	-	3.810	3.810	3.810
2	Σ penduduk perempuan klp umur 15-19 pd pertengahan tahun yg sama	-	-	11.029	4.382	12.260
3	Persentase	-	-	34,55	86,95	31,08

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

2.4.2.8.7. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yg istrinya di bawah 20 Tahun

Tabel. 2.256

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yg istrinya di bawah 20 Tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	-	-	934	950	303
2	Σ pasangan usia subur	35.532	36.426	37.489	38.747	38.317
3	Persentase	-	-	2,49	2,45	0,79

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun mengalami Penurunan angka PUS dengan istri di umur kurang 20 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata PUS telah memiliki umur diatas 20 tahun atau dengan kata lain jumlah pasangan usia subur yang melakukan pernikahan dini sudah berkurang.

2.4.2.8.8. Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Tabel. 2.257

Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ PUS yg ingin ber- KB tetapi tidak terlayani	8.388	8.838	10.120	8.617	2.061
2	Σ pasangan usia subur	38.292	36.426	37.489	38.745	38.317
3	Persentase	21,91	24,26	26,99	22,24	5,38

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun 2017 hal ini disebabkan karena tidak terpenuhi Peningkatan jumlah pelayanan di kecamatan dan desa agar target capaian tercapai *Data SUPAS periode 5 tahun*.

2.4.2.8.9. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama lebih dari 2 tahun. Akseptor KB yang menggunakan MJKP dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.258
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ akseptor KB yg menggunakan MKJP	3.209	3.209	3.898	5.855	5.021
2	Σ akseptor KB	27.588	27.588	27.369	30.128	28.148
3	Persentase	11,63	11,63	14,24	19,43	17,83

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP di Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung meningkat namun berdasarkan tabel di atas tertinggi ada pada tahun 2016 dengan persentase 19,43 persen.

2.4.2.8.10. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Tabel. 2.259
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ pasangan usia subur yg tidak lagi menggunakan kontrasepsi	8.388	8.838	10.120	8.617	10.169
2	Σ akseptor KB	29.924	27.588	27.369	30.128	28.148
3	Persentase	28,03	32,04	36,98	28,60	36,13

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi tiap tahun berubah-ubah, dari tahun 2013 mencapai 28,03 % dan tahun 2017 mencapai 36,13 % sedangkan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan jumlah akseptor KB pada tahun 2017 mengalami penurunan karen ajumlah drop out lebih besar akseptor aktif dalam setiap pelayanan, sehingga diperlukan pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan untuk peningkatan pemahaman.

2.4.2.8.11. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Tabel. 2.260
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ anggota kelompok BKB yang ber KB	-	-	1.684	1.865	1.770
2	Σ anggota kelompok BKB	3.035	2.681	2.617	3.238	3.150
3	Cakupan	-	-	64,35	57,60	56,19

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB tiap tahun berubah-ubah, dari tahun 2015 mencapai 64,35 % dan tahun 2017 mencapai 56,19 % sedangkan jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB yang mengalami penurunan pada tahun 2017 dan jumlah akseptor KB anggota kelompok BKB pada tahun 2017 mengalami penurunan.

2.4.2.8.12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)

Tabel. 2.261
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ anggota kelompok BKR yang ber - KB	-	-	583	1.223	1.044
2	Σ anggota kelompok BKR	1.133	1.044	1.055	2.222	2.017
3	Persentase	-	-	55,26	55,04	51,76

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) tiap tahun berubah-ubah, dari tahun 2015 mencapai 55,26 % dan tahun 2017 mencapai 51,76 % sedangkan jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB yang mengalami penurunan pada tahun 2017 dan jumlah anggota kelompok BKB pada tahun 2017 mengalami penurunan.

2.4.2.8.13. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB

Tabel. 2.262
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Anggota kelompok BKL yg ber-KB	-	-	558	984	809
2	Σ Anggota kelompok BKL	1.259	1.210	1.193	1.876	1.714
3	Persentase	-	-	46,77	52,45	47,20

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB tiap tahun berubah-ubah, dari tahun 2015 mencapai 64,77 % dan tahun 2017 mencapai 47,20 % sedangkan jumlah anggota kelompok BKL yang ber KB yang mengalami penurunan pada tahun 2017 dan jumlah anggota kelompok BKL pada tahun 2017 mengalami penurunan.

2.4.2.8.14. Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan

Tabel. 2.263

Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PPKS	-	-	-	-	3
2	Jumlah kecamatan	9	9	9	9	9
3	Persentase	-	-	-	-	22,22

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tidak ada datanya sedangkan pada tahun 2017 sebesar 22,22 %. Jumlah PPKS pada tahun 2017 sebesar 2 sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 9 kecamatan.

2.4.2.8.15. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kanseling remaja / mahasiswa

Tabel. 2.264
Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kanseling remaja
/mahasiswa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PIK R/M	23	26	40	65	60
2	Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
3	Persentase	2,56	2,89	4,44	7,22	6,67

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab, Sinjai

2.4.2.8.16. Cakupan PKB/PLKB yg di dayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Tabel. 2.265
Cakupan PKB/PLKB yg di dayagunakan perangkat Daerah KB
untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah
di bidang pengendalian penduduk
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PKB & PLKB yg di dayagunakan	106	106	106	99	91
2	Jumlah PKB / PLKB	106	106	106	99	91
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan Cakupan PKB/PLKB yg di dayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100 %.

2.4.2.8.17. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber –KB mandiri

Tabel. 2.266

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber –KB mandiri
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ anggota kelompok UPPKS yg ber-KB mandiri	73	76	90	71	76
2	Σ anggota kelompok UPPKS	294	296	293	290	258
3	Cakupan	24,83	25,68	30,72	24,48	29,46

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber –KB mandiri tiap tahun berubah-ubah, dari tahun 2013 mencapai 24,83 % dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 29,46 %.

2.4.2.8.18. Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / Kelurahan

Tabel. 2.267

Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Petugas pembantu Pembina KB Desa	-	-	80	80	80
2	Jumlah Desa / Kelurahan	80	80	80	80	80
3	Rasio	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100 persen. Ini berarti bahwa setiap desa / kelurahan memiliki 1 orang petugas PPKBD.

2.4.2.8.19. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Tabel. 2.268

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Σ alkon per mix kontrasepsi yg tersedia di faskes dan gudang Alkon Kab/kota	31.404	36.963	42.522	48.081	53.640
2	Perkiraan Permintaan masyarakat	22.711	23.256	19.863	21.968	27.405
3	Persentase	138,28	0,12	0,21	0,22	0,22

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Tabel di atas menunjukkan bahwa Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2017 mengalami peningkatan dimana jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon kabupaten pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 53.640 dengan perkiraan permintaan masyarakat mengalami peningkatan sebanyak 27.405 orang

2.4.2.8.20. **Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yg bekerjasama dgn BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dgn standarnisasi pelayanan**

Tabel. 2.269
Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah)
yg bekerjasama dgn BPJS dan memberikan pelayanan KBKR
Sesuai dgn standarnisasi pelayanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Faskes dn jejaringan yg bekerjasama dengan BPJS	-	-	-	21	21
2	Σ Faskes dan Jejaringan	-	-	-	21	21
3	Persentase	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yg bekerjasama dgn BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dgn standarnisasi pelayanan belum tersedianya data yang valid antar perangkat daerah dalam urusan kesehatan dan pelayanan KB. Perlunya diadakan singronisasi data antar perangkat daerah. Pemenuhan kapasitas SDM pengelola pendataan dan tupoksi yang menangani data. Perlunya diadakan peningkatan mekanisme kerja dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi yang memadai. Pelayanan KB telah terintegrasi dengan BPJS.

2.4.2.8.21. **Persentase remaja yg terkena inflesi menular seksual (IMS)**

Tabel . 2.270
Persentase remaja yg terkena inflesi menular seksual (IMS)
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Σremaja yg terkena infeksi menular seksual (IMS)	-	-	-	-	-
2	Jumlah Remaja	-	-	13.827	5.778	15.700
3	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase remaja yg terkena inflesi menular seksual (IMS) belum tersedia datanya di format MDK dan pendataan keluarga.

2.4.2.8.22. Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel. 2.271

Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	-	248	312	299
2	Σ kelompok kegiatan	-	-	248	312	299
3	Persentase	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

2.4.2.8.23. Cakupan keluarga yg mempunyai balita dan anak yg memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Tabel . 2.272

Cakupan keluarga yg mempunyai balita dan anak yg memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ keluarga yg mempunyai balita dan anak yg memahami & melaksanakan pengasuhan & pembinaan tumbuh kembang	-	-	672	509	378
2	Σ keluarga mempunyai balita & anak	-	-	5.498	4.986	4.378
3	Persentase	-	-	12,22	10,21	8,63

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

2.4.2.8.24. Rata-rata usia kawin pertama wanita

Tabel. 2.273

Rata-rata usia kawin pertama wanita
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ (Umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia pertama)	-	-	-	-	-

2	Σ wanita menurut usia kawin pertama	-	-	53.050	32.599	35.478
3	Rata-rata	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

2.4.2.8.25. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD & APBDesa

Tabel. 2.274

Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD & APBDesa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ anggaran untuk urusan PPKB (Rp)	4.987.365.871	5.580.389.184	6.124.771.356	7.971.517.131	6.908.732.251
2	Σ APBD dan APBDesa	-	-	-	-	-
3	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai

2.4.2.9. PERHUBUNGAN

2.4.2.9.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.275

Jumlah arus penumpang Angkutan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ penumpang bis	99.321	90.292	82.084	74.622	82.913
2	Σ penumpang kapal laut	137.040	152.267	169.185	187.983	170.894
3	Σ Total Penumpang	236.361	242.559	251.269	262.605	253.807

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah arus penumpang umum di Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2017 jumlah penumpang bis terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2013-2016 dengan rata-rata 10 % setiap tahunnya, hal ini terjadi karena fasilitas yang sudah ada mulai tidak layak digunakan dan semakin banyaknya kendaraan umum yang berganti menjadi kendaraan pribadi, sehingga penumpang bis banyak yang beralih ke kendaraan pribadi, namun terjadi peningkatan di tahun 2017, salah satu yang mempengaruhi adanya peningkatan yaitu adanya bantuan pemerintah berupa bis damri.

Untuk penumpang kapal laut mengalami kenaikan mencapai rata-rata 10% setiap tahunnya terlihat dari tahun 2013-2016, hal ini dipengaruhi karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dan banyaknya aparat pemerintah yang bertugas di pulau Sembilan melakukan perjalanan setiap hari kerja, namun pada tahun 2017 mengalami

penurunan jumlah penumpang kapal laut, hal ini karena aparat pemerintah yang melakukan tugas di Pulau Sembilan diupayakan untuk berdomisidi tetap di Pulau Sembilan sehingga penumpang kapal laut akan ramai hanya terjadi dihari libur.

2.4.2.9.2. Rasio Ijin Trayek

Tabel 2.276
Rasio Ijin Trayek
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ ijin trayek yg dikeluarkan	451	378	425	422	520
2	Jumlah penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3	Rasio Ijin Trayek	3	4	4	4	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rasio ijin trayek di Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2017, terlihat rasio ijin trayek dengan rata-rata dari tahun 2013-2016 dengan jumlah ijin trayek ditahun 2013 sebanyak 451, tahun 2014 sebanyak tahun 2015 sebanyak 415, tahun 2016 sebanyak 422, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah rasio ijin trayek sebanyak 3 rasio, dengan jumlah 510 hal ini disebabkan keran sebagaian besar angkutan umum tidak lagi melakukan perpanjangan ijin trayek melainkan mereka beralih ke plat hitam.

2.4.2.9.3. Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tabel 2.277
Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Kabupaten Sinjai Thaun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Mobil penumpang umum:					
	Jumlah	63	69	77	86	78
	Jumlah KIR	63	69	77	86	78
	Persentase	100	100	100	100	100
2	Mobil bus					
	Jumlah	653	594	540	491	545
	Jumlah KIR	653	594	540	491	545
	Jumlah Uji KIR	100	100	100	100	100
3	Mobil barang					
	Jumlah	1209	1344	1493	1659	1843
	Jumlah Uji KIR	1209	1344	1493	1659	1843
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah uji KIR angkutan umum dari tahun 2013 - 2017 jumlah uji KIR pada mobil penumpang umum telah mencapai target uji KIR dengan persentase 100 % dan selain itu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena sebagian mobil penumpang umum beralih menjadi plat hitam.

Uji KIR pada mobil bus juga telah mencapai target uji KIR dengan persentase 100 % namun hal ini berbeda dengan mobil penumpang umum, mobil bus mengalami penurunan yang signifikan yakni mencapai rata-rata 10 % setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari tahun 2013-2017, namun terjadi peningkatan di tahun 2017, salah satu dipengaruhi dengan adanya bantuan pemerintah yaitu bis damri.

Uji KIR pada mobil barang dari tahun 2013-2017 juga telah mencapai target uji KIR dengan persentase 100 % dan mengalami peningkatan yang signifikan yakni rata-rata 10 % setiap tahunnya, hal ini karena infrastruktur yang semakin memadai.

2.4.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal

Tabel 2.278
Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2
2	Σ Pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3	Jumlah Terminal Bis	13	13	13	13	13

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penumpang laut/udara/terminal di Kabupaten Sinjai tahun 2013-2017 jumlah pelabuhan laut sebanyak 2 pelabuhan, hal ini terlihat relatif tetap dikarenakan tidak adanya penambahan jumlah pelabuhan laut selama tahun 2013-2017, begitupun dengan jumlah terminal bis, terlihat relatif tetap dengan jumlah terminal sebanyak 13 terminal, hal inipun dikarenakan tidak adanya penambahan terminal dari tahun 2013-2017 dan untuk pelabuhan udara belum terdapat di Kabupaten Sinjai, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan baik pengurangan maupun penambahan jumlah pelabuhan laut/udara/terminal.

2.4.2.9.5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Tabel 2.279
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Σ Angkutan Darat	1.215	1.350	1.500	1.667	1.515
2	Σ Penumpang Angkutan Darat	66.488	73.875	82.084	91.204	82.913
3	Persentase	183	183	183	183	183

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan darat Kabupaten Sinjai dari tahun 2013-2017 pelayanan angkutan darat setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah penumpang sebanyak 82.913 penumpang dari 91.204 penumpang ditahun sebelumnya (2016) di sebabkan oelh menrunnya jumlah armada karena sebagian besar mobil angkutan umum beralih menjadi plat hitam, dapat dinilai sudah mampun melayani kebutuhan penumpang sudah baik dengan persentase 183 %.

2.4.2.9.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.279
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Angkutan umum yg tidak memiliki KIR	-	-	-	-	-
2	Σ Angkutan Umum	500	555	617	685	623
3	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase kepemilikan KIR pada angkutan umum di Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2017 yaitu terjadi kenaikan dari tahun 2013-2016, namun kepemilikan KIR pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 685 armada ditahun 2016 menjadi 623 armada angkutan umum yang memiliki KIR. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah armada karena sebagian besar angkutan umum beralih ke plat hitam. Namun dapat disimpulkan bahwa angkutan umum yang memiliki KIR di Kabupaten Sinjai.

2.4.2.9.7. Pemasangan Rambu-rambu

Tabel 2.280
Pemasangan Rambu-rambu
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Pemasangan rambu-rambu	80	-	75	-	86
2	Σ Rambu-rambu seharusnya tersedia	815	815	890	890	976

3	Persentase	9,82	-	8,43	-	8,81
---	------------	------	---	------	---	------

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Dari data yang ditunjukkan bahwa pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2017, pada tahun 2013 jumlah rambu yang terpasang sebanyak 80 rambu dari jumlah kebutuhan rambu sebanyak 815 rambu dengan persentase rambu terpasang yaitu 9,82 %, sedangkan di tahun 2014 dan tahun 2016 tidak terdapat pemasangan rambu, tahun 2015 terdapat pemasangan rambu 75 rambu sedangkan rambu yang seharusnya 890 rambu sehingga persentase hanya mencapai 8,43 %, dan tahun 2017 mengalami peningkatan dengan persentase 8,81 % jumlah rambu terpasang 86 rambu dari 976 rambu yang seharusnya.

2.4.2.9.8. Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan

Tabel. 2.281
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan	930,35	1.033,72	1.148,58	1.276,20	1.418,00
Jumlah kendaraan	48.692	54.103	60.114	66.794	74.215
Rasio	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2017 bahwa panjang jalan dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, hal ini diiringi dengan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya, sehingga dapat dilihat rasio rata-rata 0,19 %. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah kendaraan di Kabupaten Sinjai diiringi dengan penyediaan panjang jalan yang membuat rasio tiap tahunnya memiliki rata-rata yang sama.

2.4.2.9.9. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.282
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Orang	Orang	231.012	256.680	285.200	316.889	288.081
2	Σ Barang	Ton	2.310.122	2.566.802	2.852.002	3.168.891	2.880.810

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah orang/barang yang terangkat angkutan umum Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2017 yaitu menggmambarkan mengalami peningkatan secara signifikan , yaitu rata-rata hingga 10 % setiap tahunnya, terlihat pada tabel tahun 2013-2016. Adapun hal-hal yang mempengaruhi, yaitu selain alat angkut yang semakin memadai juga akses jalan yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, sehingga menimbulkan bangkitan pergerakan. Namun pada tauhn 2017 mengalami penurunan sejumlah 288.081 oang. Hal ini dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor : (1). Sebagian besar alat angkutan umum mulai beralih ke angkutan probadi (plat hitam), sehingga penumpang tidak adapat dideteksi karena tidak melalui alur terminal. (2). Terminal tidak lagi merupakan simpul pergerakan karena penumpang rata-rata terjemput dirumah masing-masing. (3). Perusahaan mobil kebanyakan memiliki pool tersendiri. Begitupun dengan jumlah barang yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013-2016, dan namun mengalami penurunan di tahun 2017 hal ini mengikuti jumlah orang yang terangkut pada angkutan umum.

2.4.2.9.10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Tabel 2.283

Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun
Kabupaten Sinjai tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015		2016		2017	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	Dermaga	169.185	2.537.776	187.983	2.819.751	170.894	2.563.410
2	Bandara	-	-	-	-	-	-
3	Terminal	285.200	2.852.002	316.889	3.168.891	288.081	2.880.810
	Jumlah	454.385	5.389.778	504.872	5.988.642	458.975	5.444.220

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Sinjai, jumlah orang yang terangkut melalui demaga mengalami kenaikan mencapai rata-rata 10 % setiap tahunnya terlihat pada tahun 2013-2016, hal ini dipengaruhi karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dan banyaknya aparat pemerintah yang bertugas di Pulau Sembilan melalukan perjalanan setiap hari kerja, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah penumpang kapal laut, hal ini disebabkan karena aparat pemerintah yang melakukan tugas di Pulau Sembilan diupayakan untuk berdomisidi tetap di Pulau Sembilan, sehingga penumpang kapal laut akan ramai hanya terjadi dihari libur, adapun jumlah barang yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013-2016 dan

mengalami penurunan ditahun 2017, hal ini mengikuti jumlah orang yang terangkut melalui dermaga.

Untuk jumlah orang/barang melalui bandara tidak ada, karena di Kabupaten Sinjai belum terdapat bandara. Sedangkan jumlah orang/barang yang terangkut melalui terminal mengalami secara signifikan, yaitu rata-rata hingga 10 % setiap tahunnya, terlihat pada tabel 2013-2016. Adapun hal-hal yang mempengaruhi, yaitu selain alat angkut yang semakin memadai juga akses jalan yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, sehingga menimbulkan bangkitan pergerakan. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sejumlah 288.081 orang. Hal ini dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor : (1). Sebagian besar alat angkutan umum mulai beralih ke angkutan probadi (plat hitam), sehingga penumpang tidak dapat dideteksi karena tidak melalui alur terminal. (2). Terminal tidak lagi merupakan simpul pergerakan karena penumpang rata-rata terjemput di rumah masing-masing. (3).

Perusahaan mobil kebanyakan memiliki pool tersendiri. Begitupun dengan jumlah barang yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013-2016, dan namun mengalami penurunan di tahun 2017 hal ini mengikuti jumlah orang yang terangkut melalui terminal.

2.4.2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.4.2.10.1. Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi di tingkat

Tabel 2.284
Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi
di tingkat kecamatan

NO	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KIM	59	59	59	59	79
2	Σ kecamatan yang ada dalam kab	9	9	9	9	9
3	Cakupan	65,55	65,55	65,55	65,55	87,78

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan cakupan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan dari tahun 2013 sebesar 65,55 mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 87,78 sedangkan jumlah KIM pada tahun 2013 sebesar 59 mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 79. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan untuk saling bertukar gagasan, solusi dan informasi, terutama untuk penyebaran berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah yang

bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga semakin diperbanyaklah jumlah KIM, terutama di pedesaan yang terpencil dan susah untuk terakses jaringan.

2.4.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel. 2.286
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Wilayah yg tercoverage	732	746	757	757	757
2.	Luas wilayah keseluruhan	819,96	819,96	819,96	819,96	819,96
3	Cakupan	89,27	90,98	92,32	92,32	92,32

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2014 sebesar mengalami kenaikan sebesar 1,71 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan 1.34 Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses informasi sangat tinggi, hal ini ditunjang dengan bertambahnya pembangunan perangkat telekomunikasi demi memenuhi permintaan layanan dari masyarakat.

2.4.2.10.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Tabel. 2.287
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Penduduk yg menggunakan HP/Telepon	-	2.164	2.665	3.812	5.290
2.	Σ Penduduk	234.886	234.886	238.099	239.689	252.627
3	Persentase	-	0,92	1,12	1,59	2,09

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 0,92 %dan tahun 2017 sebanyak 2,09 % sedangkan jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2013 sebanyak 2.164 orang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 5.290 orang, sedangkan jumlah penduduk lama waktu lima tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan dari tahun ke tahun ini terjadi karena tingkat keingintahuan masyarakat akan sarana komunikasi yang sangat tinggi. Sehingga daya beli HP di masyarakat cenderung meningkat.

2.4.2.10.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Tabel. 2.288
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Rumah Tangga yg memiliki akses internet	470	464	656	599	414
2.	Σ Rumah Tangga	71.904	75.063	68.876	71.239	68.015
3	Proporsi	0,65	0,62	0,97	0,84	0,61

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 dan 2014 dikarenakan kebutuhan jaringan internet masyarakat sangat tinggi, sehingga masyarakat mulai banyak yang melakukan pemasangan jaringan internet di rumah. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan karena masyarakat mulai banyak yang menggunakan HP untuk mengakses internet. Karena melalui HP, mengakses internet lebih mudah dan praktis.

2.4.2.10.5. Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi

Tabel. 2.289
Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ Rumah Tangga yg memiliki computer pribadi	9.443	10.297	12.105	15.342	16.565
2.	Σ Rumah Tangga	71.904	75.063	68.876	71.239	68.015
3	Proporsi	13,13	13,72	17,58	21,54	24,35

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dari tahun ketahun mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2016. Kenaikan signifikan ini disebabkan akan kebutuhan komputer masyarakat yang semakin tinggi, terutama pada kaum pelajar dan mahasiswa. Dimana komputer merupakan barang kebutuhan penting bagi pelajar dan mahasiswa.

2.4.2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.4.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Tabel 2.290
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1.	Σ Koperasi Aktif	101	107	110	115	112
2.	Σseluruh Koperasi	129	132	135	140	129
3.	Persentase	78,29	81,06	81,48	82,14	86,82

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut diatas maka dapat digambarkan bahwa jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yakni upaya pembinaan koperasi yang dilaksanakan secara intens dan berkelanjutan, pelaksanaan pendampingan koperasi secara menyeluruh khususnya koperasi tidak aktif baik secara kelembagaan, manajemen maupun usaha koperasi selanjutnya dilaksanakan bimbingan secara langsung terkait pengelolaan koperasi khususnya bimbingan pada penyusunan laporan keuangan koperasi yang bermuara pada peningkatan koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan sehingga terwujudnya koperasi sehat dan aktif dapat dicapai.

Disamping itu pelibatan para stakeholder terwujudnya koperasi terkait dengan pembinaan koperasi seperti kepala OPD, kepala desa sampai camat sebagai upaya sinergis pembinaan koperasi secara terpadu sehingga harapan terwujudnya koperasi sehat mandiri dan berdaya saing dapat tercapai dengan baik.

2.4.2.11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Tabel. 2. 291

Persentase UKM non BPR/LKM aktif Kabupaten Sinjai

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ UKM non BPR/LKM aktif					15.346
2.	Σ seluruh UKM non BPR/LKM	8.994	9.411	10.276	15.622	17.151
3.	Persentase	-	-	-	-	89,47

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Namun untuk data UKM non BPR/LKM aktif data yang diperoleh hanya pada tahun 2017 sebesar 15.346 unit.

2.4.2.11.3. Persentase BPR/LKM aktif

Tabel 2.292

Persentase BPR/LKM aktif
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah seluruh BPR/UKM	6	6	6	6	6
2.	Jumlah BPR/LKM aktif	8	8	8	8	8
3.	Persentase	75	75	75	75	75

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase BPR / LKM aktif dari tahun 2013 sampai tahun 2017 konstan. Jumlah seluruh BPR /UKM pada tahun 2013 sampai tahun 2017 sebanyak 6 unit. Sedangkan jumlah BPR /LKM aktif dari tahun ketahun sama jumlahnya yaitu 8 unit.

2.4.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan kecil

Tabel 2.293
Persentase Usaha Mikro dan kecil Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ usaha mikro dan kecil	8.010	8.210	9.024	13.782	15.200
2.	Jumlah seluruh UKM	8.944	9.411	10.278	15.622	17.151
3.	Persentase	89,56	87,24	87,81	88,22	88,89

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase jumlah usaha makro kecil dan menengah mengalami peningkatan setiap tahun. Jika pada tahun 2013 jumlah UMKM adalah 8.994 maka pada tahun 2017 jumlah UMKM meningkat menjadi 17.151 atau 88,89

%. Ini juga dapat dilihat dari adanya peningkatan kelas dari usaha berskala mikro menjadi usaha berskala kecil begitupun dari usaha kecil menjadi usaha berskala menengah. Peningkatan ini karena adanya kesadaran masyarakat untuk menjadi pelaku usaha.

2.4.2.12. PENANAMAN MODAL

2.2.5.4.1. Jumlah Investor berkala Nasional (PMDN / PMA)

Tabel 2.294
Jumlah Investor berkala nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Sinjai

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	TOTAL
2014	Jumlah Investor	331	1	332
2015	Jumlah Investor	579	1	580
2016	Jumlah Investor	909		909
2017	Jumlah Investor	383		383

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Sinjai

Data tersebut di atas menunjukkan perkembangan jumlah PMA/PMDN dari tahun 2014-2016. Untuk tahun 2017, jumlah PMDN mengalami penurunan karena tidak dilaksanakan pelayanan izin secara langsung di Desa / Kelurahan dan penerbitan izin, usaha mikro kecil menengah (UMK) dilakukan oleh kantor kecamatan.

2.2.5.4.2. Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (PMDN / PMA)

Tabel 2.295
Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (PMDN / PMA)
Kabupaten Sinjai

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2014		1.464.164.077.573		1.464.164.077.573
2015		1.828.240.263.163		2.157.734.936.430
2016		2.212.484.754.764		3.369.712.483.418
2017		2.628.749.620.665		4.631.668.282.906

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Sinjai

Data nilai investasi mengalami peningkatan. Data ini merupakan data akumulasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. untuk tahun 2017 jumlah nilai investasi sebesar Rp. 4.632.668.282.906,-.

2.2.5.4.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.296
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan	3.985	1.282	1.855	2.660	1.563
2	Jumlah Seluruh PMA/ PMDN	938	332	580	909	383
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1:4	1 : 4	1 : 4	1 ; 3	1: 4

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Sinjai

Dari data diatas menunjukkan rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 1 : 4 sedangkan pada tahun 2017 sama dengan tahun 2013 tidak ada perubahan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan selalu berubah kadang naik kadang turun dan pada tahun 2013 sebanyak 3.985 orang mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 1.563 orang sedangkan jumlah seluruh PMA/PMDN juga setiap tahun nya berubah-ubah pada tahun 2013 menunjukkan sebanyak 938 PMDN mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 383 PMDN.

2.2.5.4.4. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.297
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Kabupaten Sinjai

Uraian	2014	2015	2016	2017
Realisasi PMDN tahun evaluasi	1.464.164.077.573	2.157.734.936.430	3.369.712.483.418	3.369.712.483.418
Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi		1.464.164.077.573	2.157.734.936.430	3.369.712.483.418
Persentase		47	56	37

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Sinjai

Berdasarkan data tersebut di atas relisasi PMDN tahun 2014 adalah Rp.1.464.164.077.573 sedangkan untuk tahun 2017 realiasi PMDN adalah Rp. 4.631.668.282.906 dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu Rp. 3.369.712.483.418 mencapai persentase 37 %.

2.2.5.5. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.2.5.5.1. Persentase organisasi pemuda yg aktif

Tabel. 2.298
Persentase organisasi pemuda yg aktif
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ organisasi pemuda yg aktif	-	-	-	-	28
2	Σ seluruh organisasi pemuda	-	-	-	-	28
3.	Persentase	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan organisasi pemuda di Kabupaten Sinjai telah ada sejak lama tapi belum terdata, sehingga pendataan mulai dilakukan sejak berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai pada bulan Desember tahun 2016, hal ini mengakibatkan jumlah organisasi pemuda terdata mulai tahun 2017, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Sinjai 28 dan semuanya aktif.

2.2.5.5.2. Persentase wirausaha muda

Tabel 2.299
Persentase wirausaha muda
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ wirausaha muda	20	20	25	30	40
2	Σ seluruh wirausaha	-	-	-	-	-

3.	Persentase	-	-	-	-	-
----	------------	---	---	---	---	---

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan pada tahun 2013 – 2014 jumlah wirausaha muda sebanyak 20 orang, tahun 2015 sebanyak 25 orang, tahun 2016 sebanyak 30 orang dan tahun 2017 bertambah menjadi 40 orang, sementara jumlah seluruh wirausaha belum terdata dengan baik, sehingga belum bias menentukan persentasenya.

2.2.5.5.3. Cakupan pembinaan olahraga

Tabel 2.300
Cakupan pembinaan olahraga
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ cabang olahraga yg dibina	24	24	24	24	24
2	Σ seluruh cabang olahraga yg ada /terdaftar	24	24	24	24	24
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan jumlah cabang olahraga yang dibina dan terdaftar sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 24 cabang olahraga, persentase olahraga yang dibina dengan cabang olahraga yang ada/terdaftar adalah 100 %.

2.2.5.5.4. Cakupan pelatih yang bersertifikasi

Tabel. 2.301
Cakupan pelatih yang bersertifikasi
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ pelatih bersertifikat	15	20	29	33	35
2	Σ seluruh pelatih	30	32	40	47	55
3.	Cakupan	50	62,50	72,50	70,21	63,64

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan tahun 2013 jumlah pelatih bersertifikat sebanyak 15 orang dari jumlah keseluruhan pelatih 30 orang, Tahun 2014 jumlah pelatih bersertifikat 20 orang dari jumlah keseluruhan pelatih 32 orang persentase 62,50 %, tahun 2015 jumlah pelatih bersertifikat 29 orang dari jumlah keseluruhan 40 orang, persentase 72,50 %, tahun 2016 jumlah pelatih bersertifikat jumlah 33 orang dari jumlah keseluruhan 47 orang persentase 70,21 %, tahun 2017 jumlah bersertifikat 35 orang dari jumlah seluruh pelatih 55 orang persentase 63,64 %.

2.2.5.5.5. Cakupan pembinaan atlet muda

Tabel 2.302
Cakupan pembinaan atlet muda

Kabupaten Sinjai						
NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ atlet pelajar yg dibina	60	70	80	85	100
2	Σ seluruh atlet pelajar	100	100	130	170	210
3.	Persentase	60,00	70,00	61,54	50,00	47,62

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan jumlah atlet pelajar yang dibina pada tahun 2013 sebanyak 60 orang dari jumlah keseluruhan atlet pelajar 100 orang, setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah atlet pelajar meningkat menjadi 210 orang dan yang dibina berjumlah 100 orang.

2.2.5.5.6. Jumlah atlet berprestasi

Tabel 2.303
Jumlah atlet berprestasi Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ atlet yg meemnangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 belum ada atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.

2.2.5.5.7. Jumlah prestasi olahraga

Tabel. 2.304
Jumlah prestasi olahraga
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yg di menangkan dalam 1 Thn	9	6	-	-	9

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan pada tahun 2013 jumlah cabang olahraga yang berprestasi ada 9 cabang, tahun 2014 berjumlah 6 cabang sedangkan tahun 2017 berjumlah 9 cabang olahraga, prestasi dicapai pada PORDA di Pinrang.

2.2.5.6. STATISTIK

2.2.5.6.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Tabel 2.305
Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan tersedianya sistem data statistik yang terintegrasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu ada data statistik.

2.2.5.6.2. Buku “ Kabupaten Dalam Angka”

Tabel 2.306
Buku “ Kabupaten Dalam Angka:
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan tersedianya buku kabupaten dalam angka yang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu ada.

2.2.5.6.3. Buku “ PDRB”

Tabel 2.307
Buku PDRB Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan tersedianya buku PDRB yang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu ada.

2.2.5.7. PERSANDIAN

2.2.5.7.1. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi perangkat daerah

Tabel. 2.308
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Peangkat Daerah yg telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	-	-	-	31	42

2	Σ Total Perangkat Daerah	-	-	-	31	42
3	Persentase	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Kominfo, Persandian & Statistik Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100 % dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak ada datanya. Sedenagkan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dn jumlah total perangkat daerah dari tahun 2016 sebanyak 31 OPD mengalami peningkatan tahun 2017 sebanyak 42 OPD pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak ada datanya.

2.2.5.8. KEBUDAYAAN

2.2.5.8.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2.309
Jumlah Penyelenggaraan Fistival Seni dan Budaya
Kabupaten Sinjai

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

2.2.5.8.2. Benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan

Tabel 2.310
Benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan
Kabupaten Sinjai

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ benda, situs & kawasan cagar budaya yg dilestarikan	159	159	159	159	159
2	Total benda, situs & kawasan yg dimiliki daerah	159	159	159	159	159
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mencapai 100 % sedangkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 159 dan total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah dari tahun 203 sampai tahun 2017 sebanyak 159.

2.4.2.16.3. Jumlah karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi

Tabel 2.311
Jumlah karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi

Kabupaten Sinjai						
NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi	-	-	-	-	3

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

2.4.2.16.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Tabel 2.312
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
Kabupaten Sinjai

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ cagar budaya yg dikelola secara terpadu	159	159	159	159	159

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu kurun waktu lima tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebanyak 159 unit.

2.4.2.17. PERPUSTAKAAN

2.4.2.17.1. Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun

Tabel 2.313
Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun
Kabupaten Sinjai

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kunjungan ke perpustakaan Selama 1 tahun	31.136	29.110	29.647	30.585	31.369
2.	Σ orang dalam populasi yg harus di layani	161.951	163.025	165.615	166.689	167.676
3.	Persentase	19,23	17,86	17,90	18,35	18,72

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah kunjungan keperpustakaan hanya mencapai Persentase rata rata 19%, pada setiap tahunnya dari Populasi usia penduduk 10 – 59 tahun yang harus dilayani.

2.4.2.17.2. Koleksi buku yg tersedia di dalam perpustakaan daerah

Tabel 2.314
Koleksi buku yg tersedia di dalam perpustakaan daerah
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ koleksi judul buku	12.896	13.617	14.387	15,101	12.299

2.	Σ koleksi jumlah buku	65.126	68.068	72.388	76.151	57.357
3.	Persentase	19,80	20,00	19,87	19,83	21,44

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan persentase koleksi buku yang tersedia di dalam perpustakaan daerah persentase tiap tahun nya berfluktuasi kadang naik kadang turun pada tahun 2013 persentasenya 19,80 % mengalami peningkatan pada tahun 2014 sama dengan tahun 2015 sebesar 19,87 % dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 19,83 % dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 21,44 %. Jumlah koleksi judul buku pada tahun 2013 sebanyak 12.896 buku dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 12.299 buku sedangkan koleksi jumlah buku tahun 2013 sebanyak 65.126 buku dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 57.357 buku.

2.4.2.17.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Tabel 2.315
Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ perpustakaan	1	1	1	1	1
2.	Σ penduduk	234.886	236.497	238.099	239.689	252.627
3.	Rasio	23,49	23,65	23.81	23,97	25,26

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai

Dari data di atas menunjukkan rasio perpustakaan persatuan penduduk pada tahun 2013 sebesar 23,49 mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 25,26. Jumlah perpustakaan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sama jumlahnya sedangkan jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 234.886 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 252.627 jiwa. Dimana penduduk belum dapat memenuhi kebutuhan Bahan Bacaan berdasarkan data Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai pada Setiap Tahunnya yang hanya bisa memenuhi Persentase 23% hingga 25% dari Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai

2.4.2.17.4. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /Tahun

Tabel 2.316
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /Tahun
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata pengunjung perpustakaan	2.595	2.426	2.471	2.549	2.614
2.	Rata-rata pengunjung perpustakaan dalam 1 thn	-	-	-	-	-
3.	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai

Dari Tabel diatas Menunjukkan bahwa Rata rata Pengunjung Perpustakaan pada setiap tahunnya mengalami Kenaikan hingga pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan Peningkatan jumlah Pengunjung Perpustakaan yang sangat Tinggi dikarenakan Bertambahnya Beberapa Layanan Perpustakaan selain layanan Ruang Baca perpustakaan berupa Perpustakaan Internet untuk layanan internet, cafe baca sebagai tempat diskusi , dan Taman Baca

Dari Tabel diatas Menunjukkan bahwa Rata rata Pengunjung Perpustakaan pada setiap tahunnya mengalami Kenaikan hingga pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan Peningkatan jumlah Pengunjung Perpustakaan yang sangat Tinggi dikarenakan Bertambahnya Beberapa Layanan Perpustakaan selain layanan Ruang Baca perpustakaan berupa Perpustakaan Internet untuk layanan internet, cafe baca sebagai tempat diskusi , dan Taman Baca.

2.4.2.17.5. Jumlah koleksi judul buku peprpustakaan

Tabel 2.317
Jumlah koleksi judul buku peprpustakaan
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ koleksi judul buku perpustakaan	12.896	13.617	14.387	15.101	12.299

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya Jumlah koleksi buku yang disediakan mengalami penambahan pada setiap tahunnya.

2.4.2.18. KEARSIPAN

2.4.2.18.1. Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku

Tabel 2. 318
Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ perangkat daerah yg telah menerapkan arsip secara baku	42	42	42	22	39
2.	Σ perangkat daerah	42	42	42	39	39
3.	Persentase	100	100	100	56,41	100

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai

Dari Tabel diatas Memperlihatkan bahwa dari Tahun 2013 hingga tahun 2017 persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan Pengelolaan arsip baku mengalami kenaikan hingga 100%, namun Pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 56% karena adanya Penataan atas perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah.

2.4.2.18.2. Peningkatan SDM pegelola kearsipan

Tabel 2.319

Peningkatan SDM pegelola kearsipan
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai

Dari data diatas menunjukkan bahwa Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelolah Kearsipan hanya 1 kali kegiatan pada setiap tahunnya.

2.4.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indicator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu urusan

2.4.3.1. PARIWISATA

2.4.3.1.1. Kunjungan wisata

Tabel 2.320
Kunjungan wisata Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ capaian kinerja kunjungan wisata se kab.	27.412	27.347	32.073	37.678	39.324
2	Σ kunjungan wisata yg direncanakan se kab.	27.341	27.341	30.080	32.357	35.919
3	Persentase	74,95	74,95	93,79	85,88	91,34

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan persentase kunjungan wisata pada tahun 2013 mencapai 74,95 % dan pada tahun 2017 mencapai 91,34 % . Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se kabupaten pada tahun 2013 mencapai 27.412 orang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 39.324 orang, jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se kabupaten dalam kurun lima tahun selalu mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 27.341 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 35.919 orang.

2.4.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2.321
Lama kunjungan wisata Tahun 2013-2017
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata kunjungan wisata	27000	27.602	30.360	33.350	40.750

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Sinjai

Dari tabel di atas dapat dilihat kalau rata-rata lama kunjungan wisata dalam kurun lima tahun selalu mengalami peningkatan pada tahun 2013 mencapai 27.000 pengunjung dan pada tahun 2017 sebanyak 40.750 pengunjung.

2.4.3.2. PERTANIAN

2.4.3.2.1. Kontribusi sector pertanian / perkebunan terhadap PDRB

Tabel 2.322
Kontribusi sector pertanian / perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sector pertanian/perkebunan	2.535.503,24	2.999.105,52	3.497.982,06	3.842.133,83	4.247.419,14
2.	Jumlah PDRB	5.601.468,37	6.484.191,29	7.517.873,68	8.305.892,43	9.189.912,46
3.	Persentase	45,26	46,25	46,53	46,26	46,22

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan Jumlah Kontribusi PDRB dari sector pertanian/perkebunan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 2.535.503,24 meningkat menjadi 4.247.419,14 sedangkan jumlah PDRB juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 5.601.468,37 menjadi 9.189.912,46 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya turun naik dari tahun 2013 mencapai 45,26 % naik menjadi 46,25 % pada tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami penimngkatan mencapai 46,53 % dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 46,26 % sedang pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 46,22 %.

2.4.3.2.2. Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Tabel 2.323
Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sektor pertanian (Palawija)	2462.019,40	535.880,17	614.315,61	657.686,47	736.502,48
2.	Σ PDRB sector pertanian /perkebunan	2.535.503,24	2.999.105,52	3.497.982,06	3.842.133,83	4.247.429,24
3.	persentase	18,22	17,87	17,56	17,12	17,34

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan jumlah Kontribusi PDRB dari sector pertanian/perkebunan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 462.019,40 meningkat menjadi 4.247.49,14 sedangkan jumlah PDRB sector pertanian/perkebunan juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 2.535.503,24 meningkat menjadi 4.247.419,14 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya turun naik dari tahun 2013 mencapai 18,22 % turun menjadi 17,87 %

pada tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami peningkatan mencapai 17,56 % dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 17,12 % sedang pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 17,34 %.

2.4.3.2.3. Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Tabel 2. 324
Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kontribusi PDRB dari sektor perkebunan (tanaman keras)	308.012,93	357.253,45	409.543,74	438.464,31	491.001,65
2.	Σ PDRB sector pertanian /perkebunan	2.535.503,24	2.999.105,52	3.497.982,06	3.842.133,83	4.247.429,24
3.	persentase	12,15	11,91	11,71	11,41	11,56

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan jumlah kontribusi perkebunan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 308.012,93 mengalami peningkatan menjadi 491.001,65 tahun 2017 sedangkan jumlah PDRB sector pertanian/perkebunan juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 2.535.503,24 meningkat menjadi 4.247.419,14 pada tahun 2017 sedangkan prosentasenya tiap tahunnya mengalami penurunan tahun 2013 mencapai 12,15 % turun menjadi 11,56 % pada tahun 2017.

2.4.3.2.4. Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

Tabel 2.325
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ produksi padi/bahan pangan utama local hsl klpt tani (ton)	84.150	84.300	84.300	99.225	100.875
2.	Σ produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)	120.341	128.788	117.074	126.686	131.476
3.	Persentase	69,92	65,46	72,00	78,30	76,73

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB dari tahun 2013 mencapai 69,92 % mengalami kenaikan pad atahun 2017 sebesar 76,73 %. Jumlah Produksi padi /bahan pangan utama lokal hasil Kelompok tani (Ton) pada tahun 2013 sebesar 84,150 Ton pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 100.875 ton sedangkan jumlah produksi padi /bahan pangan

utama di daerah pada tahun 2013 sebesar 120.341 ton dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 31.476 ton.

2.4.3.2.5. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Tabel 2.326

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)	120.341	128.788	117.074	126,686	131.476
2.	Luas areal tanaman padi /bahan pangan utama local lainnya (Ha)	24.626	22.743	24.814	24.686	25.100
3.	Persentase	48,87	56,65	47,56	51,11	52,11

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase prosuktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar pada tahun 2013 mencapai 28,87 % dan padan taun 2017 mencapai 52,11 % . Produksi tanaman padi/bahan pangan utama local lainnya mengalami peningkatan selama lima tahun pada tahun 2013 sebanyak 120.341 Ton dn pada tahun 2017 sebanyak 131.476 ton sedangkan luas areal tanaman padi/bahan utama local lainnya selama lima tahun berturut-turut mengalami peningkatan pada tahun 2013 seluas 24.626 Ha dan pada tahun 2017 seluas 25.100 Ha.

2.4.3.2.6. Cakupan bina kelompok petani

Tabel 2.327

Cakupan bina kelompok petani
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Σ kelompo petani yg mendapatkan bantuan pemda	152	184	524	620	769
2.	Σ kelompok tani	1100	1.122	1.124	1.124	1.323
3.	Persentase	13,82	16,40	46,62	55,16	58,13

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase cakupan bina kelompok petani setiap tahunnya mengalami peningkatan di mana pada tahun 2013 sebesar 13,82 % dan padan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 58,13 % . Sedamgkan jumlah petani mendapat bantuan pemda setiap tahun mengalami peningkatan dan dimana pada tahun 2013 sebanyak 152 kelompok dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak

769 kelompok sedangkan Jumlah kelompok tani pada tahun 2013 sebanyak 152 kelompok dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1.323 kelompok tani.

2.4.3.3. KEHUTANAN

2.4.3.3.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Tabel 2.328
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas hutan & lahan kritis yg direhabilitasi (Ha)	493	350	5.445,64	300	-
2	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	11.512,36	11.019,36	10.669,36	10.370	10.370
3	Persentase	4,28	3,18	51,04	2,89	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

Dari data di atas menunjukkan persentase rehabilitasi hutan dna lahan kritis kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2013-2015 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 2,89 %. Pada tahun 2013 mencapai 4,28 % mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 2,89 %. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2014 mengalami penurunan dibanding pada tahun 2013 seluas 493 Ha dan pada tahun 2015 mengalami peningkatanmenjadi seluas 5.445,64 Ha. Untuk tahun 2016 luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 300 Ha atau 2,89 % dari luas total hutan dan lahan kritis, pada tahun 2016 sebesar 10.370 Ha. Sementara pada tahun 2017,tidak ada data atas luas lahan dan lahan kritis yang direhabilitasi karena adanya perubahan kewenangan pengelolaan hutan ke tingkat provinsi.

2.4.3.3.2. Kerusakan Kawasan Hutan

Tabel 2.329
Kerusakan Kawasan Hutan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Kerusakan kawasan Hutan	10 Ha	20 Ha	2 Ha	1 Ha	-
2	Luas total kawasan hutan	18,894 Ha	18,894 Ha	18.894 Ha	18.894 Ha	-
3	Persentase	0,053	0,15	0,01	0,005	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai

2.2.4.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.2.4.3.6. Persentase rumah tangga pengguna listrik

Tabel 2.330
Persentase rumah tangga pengguna listrik
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Σ rumah tangga pengguna listrik	-	36.080	39.196	44.332	46.605
2	Σ seluruh rumah tangga	-	-	-	56.995	-
3	Persentase	-	-	-	77,79	-

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

2.2.4.3.7. Rasio ketersediaan daya listrik

Tabel 2.331
Rasio ketersediaan daya listrik Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Daya listrik terpasang	-	28.895.400	31.737.950	36.338.800	39.852.850
2	Σ kebutuhan	-	-	-	48.325.109	-
3	Rasio	-	-	-	75,20	-

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

2.2.4.4. PERDAGANGAN

2.4.3.5.1. Cakupan Bina Usaha Informal / Pedagang

Tabel 2.332
Cakupan Bina Usaha Informal / Pedagang
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ kelompok pedagang informal	Unit	-	-	-	-	-
2	Σ kelompok pedagang informal yang dibina	Unit	17	17	17	17	17
3	Persentase	Unit	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kelompok pedagang informasi selama 5 tahun terakhir berjumlah 17 pelaku usaha. Para pelaku usaha tersebut merupakan pedagang kuliner yang berada di jalan tondong. Pembinaan ini terkait penataan dan penertiban lokasi tempat usaha sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang. Sementara kelompok pedagang informal secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Sinjai sementara proses pendataan.

2.4.3.6. PERINDUSTRIAN

2.4.3.6.1. Cakupan Bina kelompok pengrajin

Tabel 2.333
Cakupan Bina kelompok pengrajin
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017

1	Σ kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda	Unit	1	1	3	1	1
2	Σ kelompok pengrajin	Unit	5	5	7	9	10
3	Persentase	Unit	20,00	20,00	42,86	11,11	10,00

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kelompok pengrajin yang di bina tiap tahun berjumlah satu kelompok. Dari tahun 2013 mempunyai persentase sebesar 20,00 % dengan perbandingan kelompok pengrajin yang dibina sebanyak 5 kelompok. Tahun 2015 jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan sebanyak 3 sebanyak dengan persentase 42,86 % tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan sebanyak 1 kelompok dengan persentase masing-masing 11,11 % dan 10,00 %.

2.4.3.7. KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.4.3.8.1. Produksi Perikanan

Tabel 2.334
Produksi perikanan Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ Produksi ikan (Ton)	-	58.916,04	59.580,4	67.087,3	77.268,2
2	Target Daerah (Ton)	-	58.089	58.390	60.421	62.222
3	Persentase	-	1.01	1,02	1,11	1,24

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan Produksi Perikanan selama lima tahun meningkat, Sektor perikanan di Kabupaten Sinjai memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar di tiga wilayah meliputi laut, pesisir dan darat diharapkan mampu mewujudkan harkat dan tingkat kehidupan masyarakat nelayan/petani ikan yang maju dan berkembang secara mandiri. Kabupaten Sinjai merupakan pemasok ikan tuna segar ke sebagian besar daerah di Propinsi Sulawesi Selatan, serta ikan kerapu yang bernilai ekspor tinggi. Untuk perikanan budidaya peningkatan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain harga rumput laut kembali normal sehingga minat masyarakat pembudidaya cukup bagus, tingkat salinitas air ditambak dan dilaut serta pasokan air baik budidaya air payau maupun air tawar sudah bagus, meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan, didukung dengan adanya pendampingan penyuluh dan penyuluh bantu.

2.4.3.8.2. Komsumsi Ikan

Tabel 2.335
Komsumsi Ikan

Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ konsumsi ikan (Kg)	76	76	76	76	76
2	Target Daerah (Kg)	76	76	76	76	76
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase komsumsi ikan selama lima tahun berturut-turut persentasenya 100 %, jumlah komsumsi ikan selama lima tahun sebanyak 76 Kg sedangkan target daerah selama lima tahun berturut-turut sebanyak 76 kg. Kumsumsi ikan sesuai target setiap tahun dan mencapai 100 %, karna masyarakat sinjai sebagian besar mengkomsumsi ikan segar dan banyaknya produksi ikan olahan dalam bentuk bakso, nugget, sosis.

2.4.3.8.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Tabel 2.336
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Tahun 2013-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ klp nelayan yg mendapatkan bantuan pemda	-	-	-	-	3
2	Σ kelompok nelayan	-	-	-	86	90
3	Cakupan	-	-	-	-	3,33

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Berdasarkan tabek diatas menunjukkan bahwa untuk cakupan Bina Kelompok Nelayan, kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan baru ada tahun 2017 ada 3 kelompok nelayan, tahun sebelumnya kelompok nelayan lebih banyak mendapatkan bantuan dari Propinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui dana DAK dan APBN, untuk kelompok nelayan baru ada data ditahun 2016 dan 2017.

2.4.3.8.4. Produksi perikanan kelompok nelayan

Tabel 2.337
Produksi perikanan kelompok nelayan
Kab. Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Σ produksi ikan (Ton) kontribusi hasil klp nelayan	-	92,6	176,3	210,70	2.209,3
2	Σ produksi ikan di daerah	-	401.728.085	489.028.275	500.721.306	33.139.455.000
3	Persentase	-	2,31	2,61	4,21	6,67

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase produksi perikanan kelompok nelayan selama empat tahun berturut-turut mengalami peningkatan dari tahun 2014 mencapai 2,31 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai 6,67 % dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan selama empat tahun mengalami peningkatan dan begitu pun dengan jumlah produksi ikan di daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

2.4.4. PELAYANAN PENUNJANG URUSAN

2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

2.4.4.1.1. Tersediaanya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tabel 2.338
Tersediaanya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan selama kurun waktu lima tahun telah ada dokumen perencanaan RPJPD yang telah di tetapkan dengan PERDA .

2.4.4.1.2. Tersediaanya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Tabel. 2.339
Tersediaanya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan selama kurun waktu lima tahun telah ada dokumen perencanaan RPJMD yang telah di tetapkan dengan PERDA/PERKADA.

2.4.4.1.3. Tersediaanya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah di tetapkan dengan PERKADA

Tabel 2.340
Tersediaanya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kab. Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan selama kurun waktu lima tahun telah ada dokumen perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan PERKADA.

2.4.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW yang telah di tetapkan dengan PERDA

Tabel 2.341
Tersedianya Dokumen RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Kab. Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan selama kurun waktu lima tahun telah ada dokumen RTRW yang telah di tetapkan dengan PERDA.

2.4.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Tabel 2.342
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ Program RKPD tahun berkenan	219	211	186	214
2	Σ Program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenan	219	211	186	214
3	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dalam kurun waktu lima tahun sebesar 100 % dan Jumlah program RPJMD tahun berkenan dan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenan sama dengan tahun 2013 sebanyak 219 program dan pada tahun 2017 sebanyak 214 program.

2.4.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Tabel 2.343
Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

		TAHUN			
		2014	2015	2016	2017

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1	Σ Program RKPD tahun berkenan	219	211	186	214
2	Σ Program APBD yg harus dilaksanakan tahun berkenan	219	211	186	214
3	Persentase	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD dalam kurun waktu lima tahun sebesar 100 % dan Jumlah program RKPD tahun berkenan dan jumlah program APBD yang harus dilaksanakan tahun berkenan sama dengan tahun 2013 sebanyak 219 program dan pada tahun 2017 sebanyak 214 program.

2.4.4.1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Tabel 2.344
Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW
Kab. Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kesesuaian program/ kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	1	1	1	1	1
2	Dokumen RTRW	1	1	1	1	1
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukan persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW selama kurun waktu lima tahun tidak mengalami perubahan yaitu 100 % dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dan dokumen RTRW pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1 dokumen.

2.4.4.2. KEUANGAN

2.4.4.2.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Tabel 2.345
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kab. Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Hasil Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan selama empat tahun berturut-turut telah mendapatkan WDP sedangkan pada tahun 2017 kabupaten sinjai mendapatkan WTP.

2.4.4.2.2. Persentase SILPA

Pada perkembangannya SILPA APBD Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara persentase masih berfluktuatif dimana pada tahun 2013 mencapai 9,57 persen dan SILPA tertinggi tercatat 13,68 persen pada tahun 2015, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 4,14 %. Dari trend tersebut menunjukkan bahwa SILPA APBD Kabupaten Sinjai rata-rata masih dikategorikan sangat rendah.

Tabel 2.346
Persentase SILPA
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Total SILPA	80.346.043.206,67	146.849.318.286,45	90.611.040.515,05	47.100.024.263,81
2	Total APBD	839.667.520.269,65	1.073.450.554.896,46	1.270.956.299.690,98	1.138.712.309.454,04
3	Persentase	9,57	13,68	7,13	4,14

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah

4

2.4.4.2.3. Persentase SILPA terhadap APBD

Dapat di simpulkan bahwa peranan SILPA terhadap APBD dari tahun ke tahun mempunyai pergerakan yang berbeda-beda tiap tahunnya, dan ini terlihat pada tahun 2015 peranan SILPA terhadap APBD mencapai persentase yang tertinggi yaitu 13,68 persen namun angka tersebut angkanya menurun ditahun 2017 menjadi 4,14 persen dan masih dikategorikan sangat rendah.

Tabel 2.347
Persentase SILPA terhadap APBD
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Total SILPA	80.346.043.206,67	146.849.318.286,45	90.611.040.515,05	47.100.024.263,81
2	Total APBD	839.667.520.269,65	1.073.450.554.896,46	1.270.956.299.690,98	1.138.712.309.454,04
3	Persentase	9,57	13,68	7,13	4,14

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah

2.4.4.2.4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Perkembangan persentase belanja pendidikan sudah memenuhi amanat undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat dari tahun 2014 yang mencapai 43,00 persen menjadi 28,83 persen pada tahun 2017

Tabel 2.348
Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

		TAHUN
--	--	-------

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1	Σ Belanja Bidang Urutan Pendidikan	361.045.499. 292	406.843.378.492	409.625.577.29 4,84	328.285.092.68 1
2	Total APBD	839.667.520. 269,65	1.073.450.554.8 96,46	1.270.956.299. 690,98	1.138.712.309. 454,04
3	Persentase	43,00	37,90	32,23	28,83

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah

2.4.4.2.5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan pada APBD Kabupaten Sinjai mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 13,28 persen menjadi 18,48 persen pada tahun 2017 namun dari secara nominal mengalami kenaikan dalam alokasi anggaran APBD Tahun 2017.

Tabel 2.349
Persentase Belanja Kesehatan (10%)
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ Belanja Bidang Urutan Kesehatan	111.478.604.38 0	174.410.059.496	273.491.361.368 ,11	210.432.464.350
2	Total APBD	839.667.520.26 9,65	1.073.450.554.8 96,46	1.270.956.299.6 90,98	1.138.712.309.4 54,04
3	Persentase	13,28	16,25	21,52	18,48

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah

2.4.4.2.6. Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Tabel 2.350
Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ Belanja Langsung	321.494.166.51 9,00	351.968.573.504 ,00	534.296.025.291 ,00	490.562.341.831 ,30
2	Total APBD	839.667.520.26 9,65	1.073.450.554.8 96,46	1.270.956.299.6 90,98	1.138.712.309.4 54,04
3	Σ Belanja Tidak Langsung	463.195.216.23 8,00	520.492.883.073 ,00	616.952.425.218 ,40	570.183.014.297 ,70
4	Total APBD	839.667.520.26 9,65	1.073.450.554.8 96,46	1.270.956.299.6 90,98	1.138.712.309.4 54,04

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah

2.4.4.2.7. Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa

Tabel 2.351
Bagi hasil Kabupaten / Kota dan Desa
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ Belanja bagi hasil Kab / Kota /Desa	-	-0	1.493.325.400,0 0	1.709.170.382,0 0

2	Total APBD	839.667.520.26 9,65	1.073.450.554.8 96,46	1.270.956.299.6 90,98	1.138.712.309.4 54,04
3	Persentase	-	-	0,12	0,15

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah Kab. Sinjai

2.4.4.2.9. Bagi hasil Kabupaten dan Desa

Tabel 2.352
Bagi hasil Kabupaten & Desa
Kab. Sinjai Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ belanja bagi hasil kab.	-	-	-	-
2	Total APBD	839.667.520. 269,65	1.073.450.554.896 ,46	1.270.956.2 99.690,98	1.138.712.309. 454,04
3	Persentase	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah Kab. Sinjai

2.4.4.2.10. Penetapan APBD

Penetapan APBD di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu lima tahun selalu tepat waktu pelaksanaannya.

Tabel 2.353
Penetapan APBD
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Tidak Tepat Waktu	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keunagna dan Aset Daerah Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penetapan APBD Kab. Sinjai selama 4 tahun berturut-turut selalu tepat waktu.

2.4.4.2. KEPGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2.4.4.3.1. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tabel 2.354
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ ASN yang mengikuti pendidikan dan pendidikan formal	42	122	41	42
2	Jumlah ASN	5.642	5.681	5.648	4.906
3	Persentase	0,74	2,11	0,73	0,88

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2013 sebanyak 0,74 % dan pada tahun 2017 sebanyak 0,88 %. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pendidikan formal pada tahun 2014 sebanyak 42 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 42 orang sedangkan jumlah ASN pada tahun 2014 sebanyak 5.642 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 4.906 orang. Dan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pendidikan formal paling banyak pada tahun 2015 dengan jumkah ASN sebanyak 122 orang. Ini di sebabkan karena pada tahin 2014 dilaksanakan penerimaan CPNS dari honorer kategori II yang rata-rata tingkat pendidikannya setingkat SMU yang kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi pada tahun 2015.

2.4.4.3.2. **Persenatse Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

Tabel 2.355
Persenatse ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ ASN yang mengikuti pendidikan dan pendidikan Struktural	273	354	478	595
2	Jumlah Total Jabatan	716	716	716	754
3	Persentase	38,13	44,44	66,76	78,93

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural selama lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2014 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 38,13% atau 273 orang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 78,93 % dengan jumlah pejabat 754 orang dan pada akhir RPJMD atau pada tahun 2018 direncanakan semua pejabat struktural sudah mengikuti pendidikan dan pendidikan struktural.

2.4.4.3.3. **Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**

Tabel 2.356
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	33	33	33	37

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berjumlah 33 jabatan

sedangkan tahun 2017 mengalami penambahan 4 jabatan karena jumlah jabatan pimpinan tinggi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai tentang Susunan Organisasi, Keduudkan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

2.4.4.3.4. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.357
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jabatan Administrasi	1.652	1.652	1.652	1.763

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan adminitrasi pada instansi pemerintah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.652 jabatan sedangkan tahun 2017 mengalami penambahan karena jumlah jabatan administrasi disesuaikan dengan berlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

2.4.4.3.5. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.358
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu	3.856	3.925	3.712	3.106

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah pada tahun 2014 sebanyak 3.856 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 3.925 orang, mengalami penambahan pemangku jabatan fungsional tertentu karena adanya penerimaan CPNS pada tahun 2015. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun sebelumnya karena adanya peralihan personil tenaga kependidikan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan karena adanya pegawai pension.

2.4.4.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.4.4.4.1. Persentase Implementaasi Rencana Kelitbangan

Tabel 2.359

Persentase Implementaasi Rencana Kelitbangan
Tahun 2014-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ kelitbangan dalam RKPD	1	1	2	4
2	Σ kelitbangan dalam RPJMD	4	4	4	10
3	Persentase	25	25	50	40

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel tersebut diatas jumlah kelitbangan kurun watu tiga tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sinjai kelitbangan yang dilaksanakan masing-masing satu, dengan persentase masing-

masing sebesar 25 % dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 2 kelitbangan dengan persentase sebesar 50 %. Pada tahun 2017 kelitbangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai meningkat menjadi 4 kelitbangan dengan persentase sebesar 40 % dari total kelitbangan yang diakomodir dalam RPJMD

2.4.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.360
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Tahun 2104-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ kelitbangan yg ditindaklanjuti	1	1	2	4
2	Σ kelitbangan dlm renja perangkat daerah	1	1	2	4
3	Persentase	100	100	100	100

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kurun waktu empat tahun 2014 sampai dengan tahun 20167 dapat dilihat bahwa persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100 % yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.

2.4.4.4.3. Persentase perangkat daerah yg di fasilitasi dalam penrapan inovasi daerah

Tabel 2.361
Persentase perangkat daerah yg di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
Tahun 2104-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ perangkat daerah yg difasilitasi	-	-	-	1

2	Σ total perangkat daerah	-	-	-	42
3	Persentase	-	-	-	2,38

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah kurun waktu tiga tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sinjai sebesar 0 % dan untuk tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembanagn Daerah Kabupaten Sinjai sebesar 2,38 %. Hal ini disebabkan karena pemahaman, kreatifitas dan budaya inovasi dilingkup pemerintah daerah masih terbatas dan belum merata serta masih perlu ditingkatkan.

2.4.4.4.3. Persentase Kebijakan Inovasi yg Diterapkan di Daerah

Tabel 2.362
Persentase Kebijakan Inovasi yg Diterapkan di Daerah
Tahun 2014-2017 Kab. Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ perangkat daerah yg difasilitasi	-	-	-	1
2	Σ total perangkat daerah	-	-	-	1
3	Persentase	-	-	-	100

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase daerah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah kurun waktu tiga tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sinjai sebesar 0 % dan untuk tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembanagn Daerah Kabupaten Sinjai sebesar 1 kebijakan inovasi yang diterapkan atau sebesar 100 %.

2.4.4.5. PENGAWASAN

1.4.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tabel 2.363
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Σ temuan yg ditindak lanjuti	149	135	143	158
2	Σ total temuan	164	160	180	202
3	Persentase	91	84	79	78

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase tindak lanjut temuan di kabupaten Sinjai mengalami penurunan angka sejak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017,

namun temuan yang ditindak lanjuti dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, walau total temuan di tiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Adapun yang factor pendukung peningkatan temuan yang ditindaklanjuti sebagai berikut :

- Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indicator kinerja antara lain :
1. Adanya pemantauan tindak lanjut yang dilakukan persentase dan penyelesaian tindak lanjut setiap ada temuan tidak lewat 60 hari
 2. Adanya kerjasama yang baik oleh para stakeholder dalam mendukung tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi yang disampaikan
 3. Perhatian SKPD menindaklanjuti temuan, baik adminitrasi maupun tuntunan ganti rugi (TGR)

2.4.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2.364
Persentase Pelanggaran Pegawai
Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN yg di kenai sanksi	-	-	4	4
2	Jumlah total ASN	5.642	5.781	5.648	4.906
3	Persentase	-	-	1,41	1,23

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan persentase pelanggaran pegawai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2014 tidak ada pelanggaran pegawai dan jumlah persentase pada tahun 2016 mencapai 1,41 % mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai 1,23 %. Jumlah ASN yang di kenal sanksi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tidak ada ASN yang dikenai sanksi dan pada tahun 2016 ssampai dengan tahun 2017 sebanyak 4 orang dan jumlah total ASN di kabupaten sinjai pada tahun 2013 sebanyak 5.642 orang sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 4.906 orang.

2.4.4.5.3. Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.365
Jumlah Temuan BPK
Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Temuan BPK	38	13	10	9

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kab. Sinjai

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mulai dari tahun 2014 sampai

dengan tahun 2017 yang terdiri Laporan hasil pemeriksaan atas peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut telah di tindaklanjuti dan bukti tindak lanjutnya telah disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.4.4.6. SEKRETARIAT DEWAN

2.4.4.6.1. Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Tabel 2.366
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Sinjai

Penyusunan rencana kerja tahunan DPRD dimaksudkan untuk menyediakan instrumen bagi DPRD didalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajiban secara terarah, efesien dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan. Untuk melihat ada atau tidak ada rencana kerja tahunan pada DPRD Kabupaten Sinjai dari tahun 2014 – 2017.

2.4.4.6.2. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi RPJM dan RKPD

Tabel 2.367
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi RPJM dan RKPD Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Sinjai

Untuk mendapatkan gambaran kualitatif tentang kondisi dan kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas DPRD, sehingga perlu perumusan arah, tujuan, sasaran dan program kerja DPRD yang terintegrasi ke RPJMD dan RKPD dalam melaksanakan fungsi fungsi anggaran, fungsi pembentukan Perda dan fungsi pengawasan. Untuk melihat secara detail data tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dari tahun 2014 – 2017.

2.4.4.6.3 Terintegritas program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Setwan DPRD

Tabel 2.368

Terintegritas program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Setwan DPRD
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Sinjai

Tercapainya program-program DPRD didukung oleh kegiatan dan anggaran kedalam dokumen Sekretariat DPRD itu sendiri, sehingga fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran akan terlaksana secara maksimal. Untuk melihat terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsinya ke dalam dokumen Setwan dari tahun 2014 – 2017.

2.4.4.7. SEKRETARIAT DAERAH

2.4.4.7.1. Cakupan Koordinasi Penyusunan Pelaksanaa & Evaluasi

Tabel 2. 369

Cakupan Koordinasi Penyusunan Pelaksanaan & Evaluasi
Tahun 2014-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah dokumen teknis kecamatan dan kelurahan yang tersusun	-	2 Dokumen	-	2 Perbup
2	Jumlah laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	-	1 Dok.	1 Dok.
3	Jumlah laporan hasil rakor desa/kecamatan	-	12 Kali	12 Kali	4 Kali
4	Jumlah Dok penyelenggaran fungsi pemerintahan umum lainnya (pemerkaran desa/kelurahan, dll)	-	-	-	-
5	Jumlah Peraturan Daerah, dan Produk Hukum Lainnya yang terbentuk	17 Perda, 60 Perbup.	10 Perda, 65 Perbup.	11 Perda, 94 Perbup.	18 Perda, 78 Perbup.
6	Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan	3	3	4	3
7	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi	-	-	-	2
8	Jumlah rumusan kebijakan Perekonomian yang dikoordinasikan	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Ranperda, 2 MOU, 1 Perbup
9	Jumlah Rumusan Kebijakan	6 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku

	Pembangunan Daerah yang tersusun dan dikoordinasikan				
10	Jumlah Rumusan Kebijakan Kerjasama Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Jumlah Kerjasama Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.
12	Jumlah kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dan dikoordinasikan	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.
13	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Tugas – tugas Pemerintahan Daerah	98 %	98 %	98 %	98 %
14	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	6 Peraturan Bupati	2 Peraturan Bupati	1 Peraturan Daerah, 39 Peraturan Bupati	30 Peraturan Bupati
15	Persentase Keterpenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan sarana prasarana Aparatur Lingkup Setda	100 %	100%	100 %	100 %
16	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Persentase Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan lingkup Setda	100 %	100 %	100 %	100

1. Jumlah dokumen teknis kecamatan dan kelurahan yang tersusun

Dokumen tekhnis kecamatan dan kelurahan yang tersusun dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat dan Lurah tahun 2015 dan Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2017, untuk tahun 2014 dan tahun 2016 tidak dilaksanakan.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi Peraturan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat tahun 2015 dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dapat melaksanakan sebagian kewenangan bupati dalam urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah 2 dokumen yaitu :

1. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat.

2. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Lurah.

Pelaksanaan dari Monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2017 adalah telah dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi antara Kepala Perangkat daerah, para Camat dan Lurah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kecamatan dan kelurahan serta mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi peraturan bupati dan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Adapun Peraturan Bupati yang dihasilkan yaitu :

- 1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang menjelaskan 28 standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- 2) Peraturan Bupati Sinjai nomor 30 tahun 2017 tentang uraian tugas pelaksana pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Pada tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak dilaksanakan kegiatan terkait evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Sinjai. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dalam bentuk kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dan Lurah Serta Pelaksanaan Paten tahun 2016 dan ditindak lanjuti dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2017. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Adapun Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dan lurah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan serta karakteristik kecamatan dan kelurahan itu sendiri.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan kunjungan ke kecamatan dan kelurahan serta rapat koordinasi antara Kepala Perangkat daerah dalam hal ini sebagai pelaksana tekhnis urusan pemerintahan dengan para Camat dan Lurah. Hasil dari rapat tersebut dilakukan evaluasi dan monitoring sebagai dasar pembentukan

peraturan bupati tentang standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2017. Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur dan acuan pelaksanaan Paten untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaporkan ke pimpinan setiap akhir tahun dalam bentuk dokumen Monitoring Dan Evaluasi Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dan Lurah Serta Pelaksanaan Paten tahun 2016 dan dokumen laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2017.

3. Jumlah Laporan Hasil Rakor Desa/Kecamatan

Untuk pencapaian tujuan pemerintahan yang baik diperlukan adanya koordinasi dengan stakeholder sebagai pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan baik itu di Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Keberadaan kegiatan rapat koordinasi terpadu bidang pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulannya (12 Bulan) pada tahun 2015 sampai dengan 2016 sedangkan tahun 2017 dilaksanakan 4 kali dalam setahun dengan tujuan memberikan pengaruh positif terhadap penyelenggaraan informasi dari masing-masing stakeholder dan segala aspek pemerintahan, keamanan dan ketertiban, hukum dan aspek lainnya. Rapat koordinasi tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sinjai. Berbagai informasi, masukan dan kritikan yang direkomendasikan oleh pimpinan dapat menjadi rujukan dan acuan dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

4. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Umum Lainnya (Pemekaran Desa/Kelurahan Dll)

5. Jumlah Peraturan Daerah, dan Produk Hukum Lainnya yang Terbentuk

Pada tahun 2014 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD Kab. Sinjai untuk dilakukan pembahasan adalah sejumlah 17 buah rancangan, dari 17 buah rancangan tersebut seluruhnya mendapat persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. sedangkan Produk Hukum Daerah lainnya yang terdiri dari 60 Peraturan Bupati yang telah diundangkan dan 1266 Keputusan Bupati Sinjai yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2015 Jumlah rancangan Peraturan Daerah yang mendapat persetujuan bersama DPRD setelah melalui pembahasan adalah 10 Rancangan Perda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang selanjutnya diundangkan. sedangkan untuk Peraturan Bupati dengan keluarnya Permendagri Nomor 80 tahun 2015 prosedur penyusunan Peraturan Bupati diwajibkan untuk mendapatkan fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. namun ini tidak menjadi halangan bagi para perangkat daerah untuk menyusun Peraturan Bupati dalam rangka mendukung tercapainya pemerintah yang baik. Untuk tahun 2015 jumlah peraturan bupati yang diundangkan adalah 65 buah sedangkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan adalah sejumlah 1683.

Jumlah produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah yang telah diundangkan pada tahun 2016 adalah 11 buah. sedangkan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan bupati sejumlah 94 buah dan keputusan bupati sejumlah 1075 buah.

Untuk tahun 2017 jumlah peraturan daerah yang diundangkan adalah sejumlah 18 buah, jumlah peraturan bupati yang diundangkan sejumlah 78 buah dan jumlah keputusan bupati yang ditetapkan adalah 1117 buah

Dokumen teknis kecamatan dan kelurahan yang tersusun dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat dan Lurah tahun 2015 dan Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2017, untuk tahun 2014 dan tahun 2016 tidak dilaksanakan.

6. Jumlah Produk Hukum yang Disosialisasikan

7. Jumlah Kasus Hukum yang difasiltasi

- Pada tahun 2014 tidak ada kasus hukum pemerintah daerah yang difasilitasi karena pada tahun 2014 tidak gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- Pada tahun 2015 ada 5 perkara yang ditangani dan difasiltasi yaitu :
 1. Gugatan Saudara Syhrir Bin Tjaudu di Pengadilan Negeri Sinjai dengan nomor Perkara: 1/PDT.G/2015/PN Snj terhadap: Bupati Sinjai, Badan Pertanahan Nasional, Kadis Pendidikan Cq. Kepala SDN 124 Lura. Putusan pengadilan menolak gugatan saudara penggugat.
 2. Gugatan Saudara Syamsul Bahri di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar dengan Nomor Perkara : 33/G/2015/PTUN.MKS terhadap: Bupati Sinjai, Tim Penguji Seleksi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasimarannu. Putusan pengadilan menolak gugatan saudara penggugat.

3. Gugatan Saudara Baharuddin di Pengadilan Negeri Sinjai Nomor Perkara 10/PDT.G/2015/PN.Snj, terhadap: Bupati Sinjai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Era, Plt Kepala Desa Era Baru dan Muh. Amir (Calon Kepala Desa Urut 3). Namun dalam perjalanan sidang di Pengadilan Negeri Sinjai Pengugat (Saudara Baharuddin) mencabut gugatannya.
 4. Gugatan saudara Baharuddin di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 51/G.2015/PTUN.Mks terhadap Bupati Sinjai. Namun dalam proses persidangan saudara penggugat mencabut gugatannya.
 5. Permohonan BPD Desa Era Baru di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Bupati Sinjai dengan Nomor Perkara 59/P/2015/PTUN.Mks. Putusan Majelis Hakim menerima permohonan BPD desa Era Batu.
 6. Gugatan saudara Muh. Amir di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 69/G/2015/PTUN.Mks terhadap Bupati Sinjai.
- Pada tahun 2016
1. Gugatan saudara Muh. Amir di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 69/G/2015/PTUN.Mks terhadap Bupati Sinjai. Gugatan Saudara Muh. Amir proses persidangan dimulai pada tahun 2015, namun proses persidangan tersebut berlanjut sampai tahun 2016. Putusan majelis hakim menolak gugatan penggugat.
 2. Gugatan Saudara Syhrir Bin Tjaudu di Pengadilan Negeri Sinjai dengan nomor Perkara: 13/PDT.G/2016/PN.Snj terhadap: Bupati Sinjai, Badan Pertanahan Nasional, Kadis Pendidikan Cq. Kepala SDN 124 Lura. Putusan pengadilan menolak gugatan saudara penggugat.
 3. Gugatan Saudari Isya Binti Dola di Pengadilan Negeri Sinjai dengan nomor perkara: 16/PDT.G/2016/PN Snj terhadap: Bupati Sinjai, Bure dkk, sebanyak 38 person tergugat.
 4. Gugatan saudara Marzuki, S.Sos di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor 114/G/2016/PTUN.Mks terhadap Bupati Sinjai Putusan Ketua Pengadilan Menolak Gugatan Pengugat.
- Pada tahun 2017
1. Perlawanan Saudara Marsuki terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan nomor perkara 114/PLW/2016/PTUN.Mks dengan terlawan Bupati Sinjai. Putusan Majelis Hakim menolak perlawanan saudara pelawan.

2. Gugatan Saudari Isya Binti Dola di Pengadilan Negeri Sinjai dengan nomor perkara: 16/PDT.G/2016/PN Snj terhadap: Bupati Sinjai, Bure dkk, sebanyak 38 person tergugat. Proses persidangan berlanjut pada tahun 2017. Putusan Pengadilan Menolak gugatan Penggugat.
 3. Gugatan Saudara Thamrin D, S.Sos di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan nomor 10/G/2017/PTUN.Mks terhadap Bupati Sinjai. Putusan Pengadilan Menolak Gugatan Penggugat.
8. Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian yang Dikoordinasikan

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa rumusan kebijakan Perekonomian yang dihasilkan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak 8 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2014

1 (satu) Peraturan Bupati terdiri dari:

- a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Alokasi Anggaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

4. Tahun 2015

1 (satu) Peraturan Bupati terdiri dari:

- a. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sinjai.

5. Tahun 2016

Tidak ada Rumusan Kebijakan yang dihasilkan.

6. Tahun 2017

2 (Dua) Peraturan Daerah yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Sinjai.
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar.

2 (dua) Peraturan Bupati yaitu :

- a. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang tata cara pencairan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

2 (dua) MOU (Memorandum of Understanding)/Nota Kesepahaman Bersama yaitu :

- a. MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan Pihak Perbankan tentang Percepatan Akses Kredit di Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Sinjai.

MOU antara Bupati Sinjai dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Sukarela/Non ASN di Kabupaten Sinjai. Dari tabel diatas dijelaskan bahwa rumusan kebijakan Perekonomian yang dihasilkan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak 8 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

7. Tahun 2014

1 (satu) Peraturan Bupati terdiri dari:

- b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Alokasi Anggaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

8. Tahun 2015

1 (satu) Peraturan Bupati terdiri dari:

- b. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sinjai.

9. Tahun 2016

Tidak ada Rumusan Kebijakan yang dihasilkan.

10. Tahun 2017

2 (Dua) Peraturan Daerah yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Sinjai.
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar.

2 (dua) Peraturan Bupati yaitu :

1. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang tata cara pencairan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

2 (dua) MOU (Memorandum of Understanding)/Nota Kesepahaman Bersama yaitu :

- b. MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan Pihak Perbankan tentang Percepatan Akses Kredit di Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Sinjai.

MOU antara Bupati Sinjai dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Sukarela/Non ASN di Kabupaten Sinjai. Dari tabel diatas dijelaskan bahwa rumusan kebijakan Perekonomian yang dihasilkan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak 8 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

11. Tahun 2014

1 (satu) Peraturan Bupati terdiri dari:

1. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Alokasi Anggaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

12. Tahun 2015

1 (satu) Peraturan Bupati terdiri dari:

1. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sinjai.

13. Tahun 2016

Tidak ada Rumusan Kebijakan yang dihasilkan.

14. Tahun 2017

2 (Dua) Peraturan Daerah yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Sinjai.
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar.

2 (dua) Peraturan Bupati yaitu :

1. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang tata cara pencairan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

2 (dua) MOU (Memorandum of Understanding)/Nota Kesepahaman Bersama yaitu :

1. MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan Pihak Perbankan tentang Percepatan Akses Kredit di Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Sinjai.

MOU antara Bupati Sinjai dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Sukarela/Non ASN di Kabupaten Sinjai. Dari tabel diatas dijelaskan bahwa rumusan kebijakan Perekonomian yang

dihasilkan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak 8 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

15. Tahun 2014

1 (satu) Peraturan Bupati terdiri dari:

1. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Alokasi Anggaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

16. Tahun 2015

1 (satu) Peraturan Bupati terdiri dari:

1. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sinjai.

17. Tahun 2016

Tidak ada Rumusan Kebijakan yang dihasilkan.

18. Tahun 2017

2 (Dua) Peraturan Daerah yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Sinjai.
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar.

2 (dua) Peraturan Bupati yaitu :

1. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang tata cara pencairan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.

2 (dua) MOU (Memorandum of Understanding)/Nota Kesepahaman Bersama yaitu :

1. MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan Pihak Perbankan tentang Percepatan Akses Kredit di Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Sinjai.
2. MOU antara Bupati Sinjai dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Sukarela/Non ASN di Kabupaten Sinjai.

9. Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah yang tersusun dan Dikoordinasikan

Dari indikator di atas menjelaskan bahwa jumlah rumusan kebijakan pembangunan daerah yang tersusun dan dikoordinasikan pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 menghasilkan buku kebijakan sebanyak 11 buku yang terdiri dari

6 Buku di Tahun 2014, 3 Buku di tahun 2015, 1 Buku di Tahun 2016 dan 1 Buku di tahun 2017. Dari 11 Buku tersebut di antaranya adalah:

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Lainnya, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Konstruksi, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang.

Pada Tahun 2015 menghasilkan 3 Buku kebijakan yaitu Peraturan Bupati Sinjai Nomo 62 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 33 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Sinjai, dan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1228 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pada Tahun 2016 dan 2017 menghasilkan masing-masing 1 buku yaitu Peraturan Bupati Sinjai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi Tenaga Kerja Sektor Usaha dan Jasa Konstruksi Kabupaten Sinjai serta Keputusan Bupati Sinjai Nomor 789 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sinjai

10. Jumlah Rumusan Kebijakan Kerjasama Pembangunan Daerah

11. Jumlah Kerjasama Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa kerjasama pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Sekretariat daerah khususnya di Bagian Humas adalah kerjasama dengan media dan diatur oleh rumusan kebijakan kontrak kerjasama media. Kerjasama ini dituangkan dalam kontrak kerjasama dengan media cetak harian, media cetak mingguan, media cetak bulanan, dan media cetak online (4 dokumen). Realisasi kerjasama dapat dilihat dari publikasi atau pemuatan berita-berita program dan kegiatan pembangunan, advertorial program dan kegiatan pembangunan serta banner visi dan misi pemerintah daerah.

12. Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dan dikoordinasikan

Dari indikator Jumlah Kegiatan Pembinaan kesejahteraan Rakyat yang di Laksanakan dan di Koordinasikan sebagai berikut :

1. Tahun 2014 .

- 4 (empat) Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - a. Dokumen Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan kependudukan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai.
 - b. Dokumen Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Bidang Pertanian dan Perikanan, Kecamatan, Desa dan kelurahan serta Bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pertanian dan Peternakan, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Bidang kecamatan dan desa/Kelurahan, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang BPJS Kesehatan.
 - d. Dokumen Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan kependudukan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai.

2. Tahun 2015.

- 4 (empat) Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - a. Dokumen Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan kependudukan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai.
 - b. Dokumen Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Bidang Pertanian dan Perikanan, Kecamatan, Desa dan kelurahan serta Bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pertanian dan Peternakan, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Bidang kecamatan dan desa/Kelurahan, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang BPJS Kesehatan.

- d. Dokumen Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan kependudukan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai.

3. Tahun 2016.

4 (empat) Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- a. Dokumen Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan kependudukan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai.
- b. Dokumen Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Bidang Pertanian dan Perikanan, Kecamatan, Desa dan kelurahan serta Bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pertanian dan Peternakan, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Bidang kecamatan dan desa/Kelurahan, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang BPJS Kesehatan.
- d. Dokumen Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan kependudukan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai.

4. Tahun 2017.

4 (empat) Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- a. Dokumen Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan kependudukan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai.
- b. Dokumen Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Bidang Pertanian dan Perikanan, Kecamatan, Desa dan kelurahan serta Bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pertanian dan Peternakan, Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Bidang kecamatan dan

desa/Kelurahan, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang BPJS Kesehatan.

- d. Dokumen Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Bidang kesejahteraan Rakyat Meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan kependudukan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai.

13. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Tugas-tugas Pemerintahan Daerah

Dari indikator jumlah kegiatan penyelenggaraan fasilitasi tugas-tugas Pemerintahan Daerah bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, Protokol sebagai pengatur acara kenegaraan dan acara resmi lainnya, terkhusus kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai utamanya dalam hal pelayanan keprotokoleran antara lain pelaksanaan persiapan, koordinasi kegiatan keprotokoleran serta kegiatan perjalanan dinas Pimpinan yang merupakan kegiatan rutin dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, inventarisasi penjadwalan rencana kegiatan Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar daerah agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan teratur.

Pengkoordinasian keprotokoleran, pembinaan dan bantuan tenaga keprotokoleran serta pelayanan keprotokoleran untuk semua kegiatan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pelayanan kepada tamu-tamu Pemerintah Daerah, pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi serta pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga non departemen/luar negeri yang terpenuhi.

14. Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah

Rumusan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang di hasil pada Bagian Organisasi dan Tata laksana dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak 78 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2014

6 (enam) Peraturan Bupati terdiri dari:

- c. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- d. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

- e. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
- f. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

2. Tahun 2015

2 (dua) Peraturan Bupati terdiri dari:

- a. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
- b. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

3. Tahun 2016

1 (satu) Peraturan Daerah:

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

39 (tiga puluh sembilan) Peraturan Bupati :

- 1. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- 2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 49 tahun 2013 tentang penetapan indikator kinerja utama pemerintah kabupaten sinjai tahun 2013-2018
- 3. Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 42 tahun 2014 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten sinjai
- 4. Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah
- 5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja Sekretariat DPRD
- 6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja Inspektorat daerah
- 7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas pendidikan

8. Peraturan Bupati Nomor 58 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas kesehatan
9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan piñata ruang
10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dians perumahan ,kawasan permukiman dan pertanahan
11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja satuan polisi pamong peraja dan pemadam kebakaran
12. Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas social
13. Peraturan Bupati Nomor 63 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dianas pemberdayaan perempuan ,perlindungan anak,pengendalian penduduk dan keluarga berencana
14. Peraturan Bupati Nomor 64 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas ketahanan pangan
15. Peraturan Bupati Nomor 65 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dianas lingkungan hidup dan kehutanan
16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Peraturan Bupati Nomor 67 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
18. Peraturan Bupati Nomor 68 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas perhubungan
19. Peraturan Bupati Nomor 69 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas komunikasi ,informatika dan persandian
20. Peraturan Bupati Nomor 70 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas koperasi ,usaha mikro kecil,menengah dan tenaga kerja
21. Peraturan Bupati Nomor 71 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
22. Peraturan Bupati Nomor 72 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga.
23. Peraturan Bupati Nomor 73 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungs Serta tata kerja dinas pariwisata dan kebudayaan

24. Peraturan Bupati Nomor 74 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas perpustakaan dan kearsipan
25. Peraturan Bupati Nomor 75 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas perikanan
26. Peraturan Bupati Nomor 76 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas tanaman pangan ,hortikultura
27. Peraturan Bupati Nomor 77 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas peternakan dan kesehatan hewan
28. Peraturan Bupati Nomor 78 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja dinas perdagangan,perindustrian dan energy sumber daya mineral
29. Peraturan Bupati Nomor 79 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah
30. Peraturan Bupati Nomor 80 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan pengelola keuangan dan asset daerah
31. Peraturan Bupati Nomor 81 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan pendapatan daerah
32. Peraturan Bupati Nomor 82 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
33. Peraturan Bupati Nomor 83 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan penelitian dan pengembangan daerah
34. Peraturan Bupati Nomor 84 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja badan penanggulangan bencana daerah
35. Peraturan Bupati Nomor 85 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja kecamatan tipe A
36. Peraturan Bupati Nomor 86 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja Kecamatan tipe B
37. Peraturan Bupati Nomor 87 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja kelurahan
38. Peraturan Bupati Nomor 88 Tentang susunan organisasi, kedudukan ,tugas pokok dan fungsi Serta tata kerja staf ahli bupati
39. Peraturan Bupati Nomor 94 Tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 49 tahun 2013 tentang penetapan indicator kinerja utama pemerintah kab.sinjai tahun 2013-2018.

1. Tahun 2017

30 (tiga puluh) Peraturan Bupati:

1. Peraturan Bupati Nomor 16 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan
2. Peraturan Bupati Nomor 17 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis pengelolaan taman hutan raya abdul latif pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan
3. Peraturan Bupati Nomor 18 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis radio dan televisi pada dinas komunikasi,informatika dan persandian
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis pengelolaan tempat pelelangan ikan pada dinas perikanan
5. Peraturan Bupati Nomor 20 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis kecamatan pada dinas pendidikan
6. Peraturan Bupati Nomor 21 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis terminal dan perparkiran pada dinas perhubungan
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis pengelolaan pasar pada dinas perdagangan perindustrian energi dan sumber daya mineral
8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis laboratorium kesehatan pada dinas kesehatan
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tentang organisasi dan tata kerja unik pelaksanaan teknis instansi formasi pada dinas kesehatan
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tentang organisasi dan tata kerja UPT Pusat kesehatan hewan pada dinas peternakan dan kesehatan hewan
11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis radio dan televisi pada dinas komunikasi ,informatika persandian
12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pusat kesehatan hewan pada dinas peternakan dan kesehata hewan
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis balai pembibitan ternak pada dinas peternakan dan kesehatan hewan
14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis balai benih ikan pada dinas perikanan
15. Peraturan Bupati Nomor 50 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan tempat pelelangan ikan pada dinas perikanan
16. Peraturan Bupati Nomor 51 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan
17. Peraturan Bupati Nomor 52 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan pasar pada dinas perdagangan ,perindustrian,energy sumber daya mineral

18. Peraturan Bupati Nomor 53 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelola kendaraan bermotor pada dinas perhubungan
 19. Peraturan Bupati Nomor 54 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis terminal dan perparkiran pada dinas perhubungan
 20. Peraturan Bupati Nomor 55 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan pada dinas kesehatan
 21. Peraturan Bupati Nomor 56 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri pada dinas pendidikan
 22. Peraturan Bupati Nomor 57 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pengelolaan hasil perikanan pada dinas perdagangan perindustrian ,energy dan sumber daya mineral
 23. Peraturan Bupati Nomor 58 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah satuan , pendidikan Non formal sanggar kegiatan belajar pada dinas pendidikan
 24. Peraturan Bupati Nomor 59 Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan
 25. Peraturan Bupati Nomor 60 Tentang organisasi dan tata kerja UPTD Satuan pendidikan sekolah SDN Pada dinas pendidikan
 26. Peraturan Bupati Nomor 61 Tentang pencabutan peraturan bupati nomor 24 tahun 2017 tentang organisasidan tata kerja unit pelaksanaan teknis instansi farmasi pada dinas kesehatan
 27. Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang pencabutan peraturan bupati nomor 17 tahun 2017 tentang organisasidan tata kerja unit pelaksanaan teknis pengelolaan taman hutan raya abdul latif pada dinas lingkungan hidup
 28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tentang pencabutan peraturan bupati no 20 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pendidikan kecamatan pada dinas pendidiakan
 29. Peraturan Bupati Nomor 65 Tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 42 tahun 2014 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten sinjai
 30. Peraturan Bupati Nomor 70 Tentang susunan organisasi ,kedudukan ,tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan
15. Persentase Ketrepenuhihan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah

Dari indikator persentase keterpenuhan, pelayanan administrasi perkantoran, dan sarana prasarana aparatur lingkup Sekretariat Daerah Prosentase Kegiatan Penyediaan Tahun 2014 :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Tahun 2014 (sewa peralatan, AC, Sewa Tenda, panggung)
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksananya pengesahan STNK kendaraan dinas roda empat dan roda dua sebanyak 90 lembar.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Rujab dinas.
- Penyediaan peralatan rumah tangga Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rujab setda (1 paket)
- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah berupa asuransi barang milik daerah, premi asuransi kendaraan dinas dan premi asuransi pasar.

Pengadaan Tahun 2014 :

- Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 3 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) untuk Wakil bupati, Asisten II dan Kepala Bagian Humas.
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional yaitu kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 15 unit.
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor terdiri dari Almari 7 unit, brankas 2 unit, televisi 3 unit, dispenser 1 unit, kulkas 2 unit dan gorden 1 paket.
- Pengadaan peralatan gedung kantor terdiri dari mesin ketik listrik 2 unit, mesin ketik manual 1 unit, mesin rupa 2 unit, mesin absensi sidik jari 1 unit, komputer PC 32 unit, note book 19 unit, printer 14 unit, scanner 1 unit, kamera 3 unit, handycam 2 unit, LCD proyektor 3 unit.

Prosentase Kegiatan Penyediaan Tahun 2015 :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Tahun 2015 (sewa peralatan, AC, Sewa Tenda, panggung)
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksananya pengesahan STNK kendaraan dinas roda empat dan roda dua sebanyak 102 lembar.

Pengadaan Tahun 2015 :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor terdiri dari lemari arsip 7 unit, lemari gantung 3 unit, lemari perpustakaan 1 unit, lemari filing kabinet 2 unit, brankas 1 unit, televisi 1 unit.

Prosentase Kegiatan Penyediaan tahun 2017:

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahun 2017 terdapat 3 Jenis penyediaan yaitu peralatan berupa tenda, panggung acara dan perlengkapan lainnya.
- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah tahun 2017 terdiri dari 6 unit diantaranya Kantor Bupati Baru, Kantor Bupati Lama, kantor/Gedung DPRD lama, Rujab Bupati, rujab Wakil Bupati, dan rujab Sekretaris Daerah sedangkan premi asuransi kendaraan dinas sebanyak 21 unit terdiri dari Toyota Fortuner 2 unit, Toyota Innova 6 unit, Toyota New Avanza 12 unit, dan Toyota Rush 1 unit.
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, telepon, Indovision dan TV kabel.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksananya pengesahan STNK kendaraan dinas roda empat sebanyak 64 lembar dan kendaraan roda dua 41 lebar.

Pengadaan Tahun 2017 terdiri dari:

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tahun 2017 sebanyak 4 unit kendaraan roda 4 (empat)
- Pengadaan perlengkapan Rujab Dinas yaitu 35 unit (AC standing floor, meja makan, meja kerja pimpinan, peralatan dapur, kompor duduk+penghisap asap, kitchen set, penghisap asap kompor).
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 68 buah (Almari arsip, Brankas, televisi, genset, podium, kulkas, gorden, CCTV).
- Pengadaan peralatan gedung kantor 111 buah (Komputer/PC, Laptop, Printer, UPS, In focus, Kabel roll Strom, sound wireless, mic podium, stand mic, mixer sound, speaker koridor/ruangan).
- Pengadaan Mebeleur 21 unit (meja biro, kursi kerja, meja tamu).

16. Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

Berdasarkan tabel 2.369 dapat dijelaskan bahwa persentase peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pengembangan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai khususnya dalam lingkup Sekretariat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan dan keahlian Aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi administratif bagi Perangkat Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2014

sampai dengan tahun 2017 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengikuti beberapa pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi/workshop yang dilaksanakan di luar daerah dari penyelenggara yang berbeda seperti Kementerian atau lembaga. Kegiatan ini untuk memenuhi keikutsertaan pejabat dan staf Sekretariat Daerah untuk pengembangan Sumber Daya Manusia seperti pendidikan dan pelatihan teknis, sosialisasi peraturan perundang-undangan, lokakarya, ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan bimbingan teknis sesuai bidang tugasnya. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang difasilitasi untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Adapun hasil (outcome) yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya SDM Aparatur Sekretariat Daerah untuk lebih meningkatkan keterampilan, keahlian dan wawasan bagi Aparatur Pemerintah Daerah sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

17. Persentase Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah

Berdasarkan tabel 2.369 dapat dijelaskan bahwa Persentase Peningkatan perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat daerah sebanyak 660 dokumen diantaranya adalah dokumen perencanaan sebanyak 41 dokumen, dokumen laporan keuangan sebanyak 19 dokumen dan Pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 600 dokumen, sedangkan laporan yang dihasilkan sebanyak 158 laporan yaitu laporan hasil monitoring dan evaluasi anggaran program dan kegiatan lingkup Sekretariat Daerah sebanyak 50 laporan realisasi anggaran dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, penatausahaan administrasi gaji lingkup Sekretariat Daerah sebanyak 48 laporan, serta penatausahaan pengelolaan keuangan sebanyak 60 laporan. Indikator di atas menunjukkan bahwa persentase peningkatan perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah sebanyak 660 dokumen diantaranya adalah dokumen perencanaan sebanyak 41 dokumen, dokumen laporan keuangan sebanyak 19 dokumen dan Pelaporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 600 dokumen, sedangkan laporan yang dihasilkan sebanyak 158 laporan yaitu laporan hasil monitoring dan evaluasi anggaran program dan kegiatan lingkup Sekretariat Daerah sebanyak 50 laporan realisasi anggaran dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017,

penatausahaan administrasi gaji lingkup Seakretariat Daerah sebanyak 48 laporan, serta penatausahaan pengelolaan keuangan sebanyak 60 laporan.

2.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.5.1. SPM Dinas Pendidikan

2.5.1.1. Pendidikan Dasar

Tabel 2.370
Pendidikan Dasar Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	39.891	44.356	43.006	40.526

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Kabupaten Sinjai tidak signifikan setiap tahunnya di mana pada tahun 2014 dengan jumlah usia 7-15 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan dasar sejumlah 39.891 orang sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkat sejumlah 40.526 orang.

2.5.1.2. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2.371
Pendidikan Kesetaraan Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	157	442	751	600

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami perubahan di mana pada tahun 2014 dengan jumlah usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sejumlah 157 orang sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkat sejumlah 600 orang.

2.5.1.3. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.372
Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Megara usia 5-6	12.621	11.574	10.978	12.290

	tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD				
--	---	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami perubahan di mana pada tahun 2014 dengan jumlah usia 5-6 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan PAUD sejumlah 12.621 orang sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sejumlah 12.290 orang dibanding dengan tahun 2016.

2.5.2. SPM Dinas Kesehatan

2.5.2.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 2.373
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan -kesehatan	-	-	4.153	4.084

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan ibu hamil pada tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun 2017 disebabkan karena tingginya angka abortus pada ibu hamil.

2.5.2.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel 2.374
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	4.060	4.056

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun 2017 di sebabkan karena kurangnya sasaran rill ibu bersalin.

2.5.2.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 2.375
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	5.037	4.249

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami penurunan pada tahun 2017 di sebabkan karena masih ada bayi baru lahir yang tidak sempat mendapatkan pelayanan.

2.5.2.4. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 2.376
Pelayanan Kesehatan Balita
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	16.014	15.396

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan balita mengalami penurunan pada tahun 2017 karena kurang maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas

2.5.2.5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel 2.377
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara usia pendiidkan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	4.176	4.448

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa beberapa siswa terjaring karena pada saat jadwal kunjungan sekolah siswa tidak masuk sekolah.

2.5.2.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Tabel 2.378
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Warna Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan				56.259

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada usia produktif program PIS-PK belum maksimal pelaksanaannya, keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya.

2.5.2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Tabel 2.379
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara uisa lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	4.658	8.145

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada usia lanjut mengalami peningkatan pada tahun 2017 disebabkan karena keperdulian pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

2.5.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel 2.380
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara penderita hepertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	-	8.168

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi masih kurang pencapaian masih dibawah target karena hanya penderita hipertensi yang memiliki komplikasi saja yang ditangani.

2.5.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel 2.381
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	-	1.136

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pelayanan kesehatan diabetes melitus masih kurang pencapaian masih dibawah target karena belum ada intervensi yang spesifik untuk penderita baru.

2.5.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel 2.382
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	-	-	-	203

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

2.5.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel 2.383
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	-	-	-	270

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis integrasi program dan unit di puskesmas belum berjalan maksimal

2.5.2.12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Tabel 2.384
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapat kan layanan kesehatan	-	-	-	7065

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

2.5.3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.5.3.1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel 2.385
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	-	-	86,80

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sinjai

2.5.3.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel 2.386
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara yang memeproleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sinjai

2.5.4. SPM Perumahan

2.5.4.1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten

Tabel 2.387
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi
Korban Bencana Kab/Kota
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100 %.

2.5.4.2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten

Tabel 2.388
Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100 %.

2.5.5. SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

2.5.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel. 2.389
Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum

Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelanggaran K3 yg disediakan	108	108	122	193	350
2.	Σ pelanggaran K3 yg di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	-	224	108	172	271
3.	Persentase	-	48,21	112,96	112,21	129,15

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk

menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

2.5.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Tabel 2.390
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sinjai

2.5.5.3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Tabel 2.391
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

		TAHUN
--	--	-------

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sinjai

2.5.5.4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 2.392
Pelayanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	-	-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sinjai

2.5.5.5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel. 2.393
Pelayanan Penyelamatan dan evaluasi Bencana Kebakaran
Kabupaten Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²	29,57 km ²
2.	Luas wilayah Kabupaten	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²	819,96 km ²
3.	Persentase	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dan luas wilayah kecamatan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan.

2.5.6. SPM Dinas Sosial

2.5.6.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Tabel 2.394
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	-	-	-	149
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar	650	1.046	1.046	1.046
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	-	-	-	14,24

2.5.6.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Tabel 2.395
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah anak terlantar yang tertangani	-	-	-	815
2	Jumlah anak terlantar	-	-	-	17.624
3	Persentase anak terlantar yang tertangani	-	-	-	4,62

2.5.6.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Tabel 2.396
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani	-	-	-	90
2	Jumlah lanjut usia terlantar	-	-	-	4.981
3	Persentase lanjut usia terlantar yang tertangani	-	-	-	1,8

2.5.6.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Tabel 2.397
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah gelandangan dan pengemis yang tertangani	-	-	-	-
2	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia	-	-	-	10
3	Persentase gelandangan dan pengemis yang tertangani	--	-	-	-

2.5.6.5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten

Tabel 2.398
Perlindungan & Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017

1	Jumlah korbna bencana alam dan sosial yang tertangani	-	-	-	75
2	Jumlah laporan kejadian bencana yang diterima	-	-	-	75
3	Persentase Korban alam dan sosial yang tertangani	-	-	-	100

2.6 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 2.297 berikut :

Tabel 2.402
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
2	Pertumbuhan PDRB	%	7,31	7,33	7,34	7,35	7,35	7,79	6,98	7,55	7,09	7,23	=
3	Laju inflasi	%	5,38	5,39	5,41	5,5	5,61	6,86	5,38	0,97	1,50	5,10	<
4	PDRB per kapita	%	24.000	31.000	35.000	41.560	47.000	23.847.604	27.420.093	31.546.544	34.680,56	38.10 juta	<
5	Indeks Gini	%	0,352	0,376	0,396	0,428	0,376	0,352	0,376	0,396	0,428	0,376	=
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	90,25	90,98	90,74	90,59	90,76	90,25	90,98	90,74	90,59	90,76	=
7	Rasio kesenjangan kemiskinan	%	8,557	8,557	9,673	41,222	6,675	8,557	8,557	9,673	41,222	6,675	=
8	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	%	10,33	9,56	9,26	9,41	9,24	10,33	9,56	9,26	9,41	9,24	=
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	63,47	63,83	64,48	65,36	65,80	63,47	63,83	64,48	65,36	65,80	=
10	Angka melek huruf	%	99,44	100,00	100,00	100,00	100,00	90,16	94,49	89,12	89,19	90,70	<
13	Angka rata-rata lama	%	8,12	8,47	8,79	9,11	9,39	7,76	7,03	7,05	7,06	7,28	<

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sekolah												
14	Hrapan lama sekolah	%	11,79	11,97	12,34	12,83	12,84	11,79	11,97	12,34	12,83	12,84	=
15	Angka usia harapan hidup	%	72,4	72,6	72,79	72,81	72,83	66,33	66,36	66,46	66,54	66,61	<
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	98,48	98,52	98,61	-	98,01	98,48	98,52	98,61	-	98,01	=
17	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	59,99	70,44	69,69	-	72,56	59,99	70,44	69,69	-	72,56	=
18	Persentase balita gizi buruk	%	0,56	0,83	0,57	0,50	0,16	0,56	0,83	0,57	0,50	0,16	=
19	Prevalensi balita gizi kurang	%	-	0,83	0,97	0,88	0,81	-	0,83	0,97	0,88	0,81	=
20	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	83,33	83,33	93,33	83,33	103,33	83,33	83,33	93,33	83,33	103,33	=
21	Angka partisipasi angkatan kerja (usia 15 tahun keatas)	%	70,21	68,78	65,28	-	69,61	70,21	68,78	65,28	-	69,61	=
22	Tingkat partisipasi angkatan kerja (usia 15-65 tahun)	%	78,12	76,59	72,86	-	7794	78,12	76,59	72,86	-	7794	=
23	Tingkat pengangguran terbuka	%	0,42	0,88	1,55	-	4,53	0,42	0,88	1,55	-	4,53	=
24	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,42	0,45	0,47	0,48	0,49	99,58	99,12	98,45	-	95,47	<
25	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	-	101,45	91,14	83,43	62,14	-	101,45	91,14	83,43	62,14	=
29	Indeks Kepuasan Masyarakat - Data IKM	%											
	Capil - Data IKM RSUD	%	65,24	-	76,91	84,3	76,14	65,24	-	76,91	84,3	76,14	=
	Data IKM PTSP	%	68,48	-	78,03	88,4	73,09	68,48	-	78,03	88,4	73,09	=
40	Persentase PAD terhadap	%	-	5,93	7,67	7,08	10,59	-	5,93	7,67	7,08	10,59	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pendapatan												
41	Indeks Reformasi Birokrat	%	-	43,97	67,2	71,85	75,13	-	43,97	67,2	71,85	75,13	=
42	Capaian Nilai Akubtabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)	%	C	C	CC	CC	B	C	C	CC	CC	B	=
43	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	%	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	=
44	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	83,20	85,20	81,50	83,80	87,00	83,20	85,20	81,50	83,80	87,00	=
45	Penguatan cadangan pangan	%	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	=
46	Penanganan daerah rawan pangan	%	2.104,40	2.189,62	3.474,84	4.201,70	5.087,34	2.104,40	2.189,62	3.474,84	4.201,70	5.087,34	=
47	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	45,26	46,25	46,53	46,26	46,22	45,26	46,25	46,53	46,26	46,22	=
48	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	18,22	17,87	17,56	17,12	17,34	18,22	17,87	17,56	17,12	17,34	=
49	Produksi sektor pertanian	Ton	129,48	134,344	142,128	141,552	153,222	129,48	134,344	142,128	141,552	153,222	=
50	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	12,,15	11,91	11,71	11,41	11,56	12,,15	11,91	11,71	11,41	11,56	=
51	Produksi sektor perkebunan	Ton	10.335	18.790	19.014	18.692	19.300	10.335	18.790	19.014	18.692	19.300	=
52	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	69,92	65,46	72,00	78,30	76,73	69,92	65,46	72,00	78,30	76,73	=
53	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2,10	2,46	2,62	2,77	2,60	2,10	2,46	2,62	2,77	2,60	=
56	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	14,81	16,31	17,22	17,22	18,46	14,81	16,31	17,22	17,22	18,46	=
57	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,99	11,44	11,28	11,58	11,90	11,99	11,44	11,28	11,58	11,90	=
58	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,73	2,74	2,73	2,74	2,76	2,73	2,74	2,73	2,74	2,76	=
	Asepk Daya Saing												
61	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	0,48	0,48	4,02	-	737,954	0,48	0,48	4,02	-	-	<
61	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	%	-	-	-	-	100,85	-	-	-	-	737,954	>
62	Nilai tukar petani	%	51,00	52,07	52,94	50,52	50,64	-	-	-	-	100,85	>
64	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	3,75	6,25	8,75	23,75	45,00	51,00	52,07	52,94	50,52	50,64	>
65	Produktivitas total daerah	%	3,75	6,25	8,75	23,75	45,00	3,75	6,25	8,75	23,75	45,00	=
66	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	-	-	-	-	-	3,75	6,25	8,75	23,75	45,00	>
70	Angka kriminalitas yang tertangani	%	2,03	1,93	1,83	1,73	1,63	2,26	2,11	10,67	12,,39	8,39	>
71	Rasio ketergantungan	Jiwa	-	--	-	--	-	-	-	-	-	238.099 Jiwa	

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4	ASPEK PELAYANAN UMUM												
2.4.1.1	URUSAN PENDIDIKAN												
2.4.1.1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	63,19	61,19	91,51	92,79	96,52	63,19	61,19	91,51	92,79	96,52	=
2.4.1.1.2.	Angka partisipasi kasar												
	Angka partisipasi kasar SD/MI/Sederajat	%	105,98	101,25	105,63	108,89	113,98	105,98	101,25	105,63	108,89	113,98	>
	Angka partisipasi kasar SMP/MTS/ Sederajat	%	116,51	109,12	109,04	89,46	82,08	116,51	109,12	109,04	89,46	82,08	=
	Angka partisipasi kasar SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	%	82,22	83,93	83,31	85,53	-	82,22	83,93	83,31	85,53	-	=
2.4.1.1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan												
	Penduduk yang Tamat pada usia 12 tahun SD/MI /Sederajat	%	5.123	5.166	5.280	5.211	4.853	5.123	5.166	5.280	5.211	4.853	=
	Penduduk yang Tamat pada usia 15 tahun SMP/MTs /Sederajat	%	4.069	4.167	4.360	4.333	4.627	4.069	4.167	4.360	4.333	4.627	=
	Penduduk yang Tamat pada usia 18 tahun SMA/MA/Sederajat	%	3.211	3.218	3.298	3.255	-	3.211	3.218	3.298	3.255	-	=
2.4.1.1.4	Angka Partisipasi Murni						-						
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,47	88,38	87,99	99,50	100	98,47	88,38	87,99	99,50	100	=
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs/Paket B	%	85,72	79,78	79,84	78,27	100	85,72	79,78	79,84	78,27	100	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	74,81	61,42	57,96	68,37	-	74,81	61,42	57,96	68,37	-	=
2.4.1.1.5.	Angka partisipasi sekolah (APS)												
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	984,74	977,30	957,71	820,12	1.139.90	984,74	977,30	957,71	820,12	1.139.90	=
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs/Paket B	%	857,15	830,95	740,26	5.954.55	1.341.30	857,15	830,95	740,26	5.954.55	1.341.30	=
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	765,05	671,72	731,27	692,14	-	765,05	671,72	731,27	692,14	-	=
2.4.1.1.6.	Angka Putus Sekolah:												
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	1,06	0,02	0,02	0,02	0,02	1,06	0,02	0,02	0,02	0,02	=
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs/Paket B	%	0,67	0,54	0,21	0,20	0,07	0,67	0,54	0,21	0,20	0,07	=
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	0,49	0,54	0,52	0,48	-	0,49	0,54	0,52	0,48	-	=
2.4.1.1.7.	Angka Kelulusan:												
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,34	99,37	99,75	99,81	98,36	99,34	99,37	99,75	99,81	98,36	=
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	91,68	97,79	99,16	99,36	98,36	91,68	97,79	99,16	99,36	98,36	=
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	97,04	98,95	99,16	99,72	-	97,04	98,95	99,16	99,72	-	=
2.4.1.1.8.	Angka Melanjutkan (AM):												
	Angka Melanjutkan (AM)	%	91,68	100,52	100,7	100	-	91,68	100,52	100,7	100	-	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dari SD/MI ke SMP/MTs												
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	93,71	93,71	103,07	103,37	105,31	93,71	93,71	103,07	103,37	105,31	=
2.4.1.1.9.	Fasilitas Pendidikan:												
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	90,87	95,02	90,49	89,26	83,54	90,87	95,02	90,49	89,26	83,54	=
2.4.1.1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	75,13	74,06	73,48	74,77	88,34	75,13	74,06	73,48	74,77	88,34	=
2.4.1.1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	37,16	39,93	40.88	34,72	-	37,16	39,93	40.88	34,72	-	=
2.4.1.1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:7	1:16	1:13	1:9	1:17	1:7	1:16	1:13	1:9	1:17	=
2.4.1.1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	1:21	1:17	1:19	1:19	-	1:21	1:17	1:19	1:19	-	=
2.4.1.1.17	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun, perempuan dan laki laki	%	98,26	99,04	93,46	100	100	98,26	99,04	93,46	100	100	=
2.4.1.1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,26	99,04	93,46	100	100	98,26	99,04	93,46	100	100	=
2.4.1.1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV												
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	62,53	75,76	96,77	98,67	-	62,53	75,76	96,77	98,67	-	=

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SMP/MTs												
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMA/SMK/MA	%	92,04	94,69	100	100	-	92,04	94,69	100	100	-	=
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	%	96,77	97,99	100	100	-	96,77	97,99	100	100	-	=
2.4.1.2. URUSAN KESEHATAN													
2.4.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	AKHB	-	970	983	981	982	-	970	983	981	982	=
2.4.1.2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	AKHB	-	970	983	981	982	-	970	983	981	982	=
2.4.1.2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	AKHB	-	953	951	944	972	-	953	951	944	972	=
2.4.1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	AKHB	-	986	987	985	987	-	986	987	985	987	=
2.4.1.2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	AKHB	-	234	139	293	148	-	234	139	293	148	=
2.4.1.2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	%	1:56	1:55	1:54	1:53	1:53	19,18	8,30	11,10	18,00	18,60	=
2.4.1.2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk												
	Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	%	1:14.680	1:14.781	1:14.881	1:14.980	1:15.789	1:14.680	1:14.781	1:14.881	1:14.980	1:15.789	=
	Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk	%	1:2.553	1:2.570	1:1.776	1:1.887	1:2.716	1:2.553	1:2.570	1:1.776	1:1.887	1:2.716	=
	Rasio Pustus Persatuan Penduduk	%	15:50.4	236,479	238,099	239,689	252,675	15:50.4	236,479	238,099	239,689	252,675	=
2.4.1.2.8	Rasio Rumah Sakit per		1	1	1	1	1					1:252.627	<

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	satuan penduduk												
2.4.1.2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	%	4.606	3.802	2.998	2.194	1.390	18	21	16	16	24	<
2.4.1.2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	330	313	296	279	262	303	339	331	382	395	>
2.4.1.2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	67,4	75	82,6	90,2	97,8	55,3	67,5	82,6	116,7	116,7	>
2.4.1.2.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	80	81,25	82,5	83,75	85	53,75	81,25	100	98,75	100	>
2.4.1.2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.1.2.15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	89,39	87,01	97,43	95,65	95,05	89,39	87,01	97,43	95,65	95,05	
2.4.1.2.16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0,005	0,003	0,008	0,003	0,004	0,005	0,003	0,008	0,003	0,004	=
2.4.1.2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	1,14	1,01	0,46	1,00	42,01	1,14	1,01	0,46	1,00	42,01	=
2.4.1.2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	20,29	20,29	20,29	20,29	20,29	30,04	38,10	35,80	65,70	68,60	>
2.4.1.2.19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	93	102	121	146	180	93	102	121	146	180	=
2.4.1.2.20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,004	0,006	0,006	0,008	0,006	0,004	0,006	0,006	0,008	0,006	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.2.21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.1.2.22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	91,78	51,61	3,37	69,29	70,00	91,78	51,61	3,37	69,29	70,00	=
2.4.1.2.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.1.2.24	Penderita diare yang ditangani												
2.4.1.2.25	Angka kejadian Malaria	%	15,48	7,24	15,65	12,60	13,27	15,48	7,24	15,65	12,60	13,27	=
2.4.1.2.29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,003	0,008	0,008	0,011	0,011	0,003	0,008	0,008	0,011	0,011	=
2.4.1.2.31	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	-	-	40	60	65	-	-	40	60	65	=
2.4.1.2.32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	40,52	46,82	53,12	59,42	65,72	-	-	-	-	0,318	<
2.4.1.2.33	Cakupan kunjungan bayi	%	0,95	0,96	0,102	0,123	0,134	0,95	0,96	0,102	0,123	0,134	=
2.4.1.2.34	Cakupan puskesmas	%	177,78	177,78	177,78	177,78	177,78	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	=
2.4.1.2.35	Cakupan pembantu	%	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	0,775	0,775	0,775	0,775	0,775	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	puskesmas												
2.4.1.2.36	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%						0,86	0,89	0,93	0,87	1,10	>
2.4.1.2.37	Cakupan pelayanan nifas	%						0,96	0,96	0,94	0,89	0,95	>
2.4.1.2.38	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	0,46	0,46	0,67	0,63	0,65	0,46	0,46	0,67	0,63	0,65	=
2.4.1.2.23 9	Cakupan pelayanan anak balita		0,91	0,90	0,89	0,104	0,61	0,91	0,90	0,89	0,104	0,61	=
2.4.1.2.40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	=
2.4.1.2.41	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	-	-	0,91	0,70	0,70	-	-	0,91	0,70	0,70	=
2.4.1.2.43	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.1.3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG												
	Pekerjaan Umum												
2.4.1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	37,87	590,53(46,98)	655,53(52,15%)	719,53(57,25%)	782,53(62,26%)	37,54	37,87	35,51	38,63	38,67	<
2.4.1.3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,0053	0,0053	0,0053	0,0052	0,0049	0,0053	0,0053	0,0053	0,0052	0,0049	=
2.4.1.3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	37,87	38,83	39,79	40,75	41,71	37,54	37,87	35,51	38,63	38,67	<

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.1.3.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	20 km	20 km	20 km	20 km	20 km	-	-	-	-	-	<
2.4.1.3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	65,40	66,83	82,00	82,00	87,29	65,40	66,83	82,00	82,00	87,29	=
2.4.1.3.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	=
2.4.1.3.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	-	-	-	-	8,56	-	-	-	-	8,56	=
2.4.1.3.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,74	54,54	62,02	66,09	69,09	50,74	54,54	62,02	66,09	69,09	=
2.4.1.3.13	Rasio Jaringan Irigasi	%	20,16	20,56	20,96	21,36	21,76	19,55	20,16	21,14	22,32	24,04	>
2.4.1.3.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	20,93	23,83	24,66	24,83	65,23	20,93	23,83	24,66	24,83	65,23	=
2.4.1.3.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	-	-	-	-	65,22	-	-	-	-	65,22	=
2.4.1.3.16	Persentase areal kawasan kumuh	%	-	81,18	74,00	73,41	53,61	-	81,18	74,00	73,41	53,61	=
2.4.1.3.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	129,80	129,80	129,80	129,80	129,80	12,98	1508	10,39	10,32	2,10	>
2.4.1.3.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	1;359	1;351	1;351	-	-	<

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penataan Ruang												
2.4.1.3.20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	16,60	16,85	16,85	16,85	16,85	27,98	29,84	33,43	42,59	41,28	>
2.4.1.3.21	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	79,5	91,3	133,9	168,25	168,25	79,5	91,3	133,9	168,25	168,25	=
2.4.1.3.22	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	1,12	1,31	1,50	1,68	1,87	65,40	72,75	73,91	74,33	74,71	>
2.4.1.3.25	Ketaatan terhadap RTRW		30	30	5,88	4,34	3,7	30	30	5,88	4,34	3,7	=
2.4.1.4.	URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN												
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman												
2.4.1.4.1.	Rasio rumah layak huni	%	68,16	68,25	68,25	68,25	68,25	-	0,10	0,1	0,19	0,19	<
2.4.1.4.2	Rasio permukiman layak huni	%	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	=
2.4.1.4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	-	-	86,18	87,16	88,68	-	-	86,18	87,16	88,68	=
2.4.1.4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
2.4.1.4.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	-	-	-	-	-	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	<
2.4.1.4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	67,09ha	57,09ha	47,09ha	37,09 ha	27,09 ha	-	0,08	0,08	0,10	0,07	<
2.4.1.4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	-	-	1,51	7,32	38,61	-	-	1,51	7,32	38,61	=
2.4.1.4.8.	Proporsi rumah tangga	%	-	-	-	-	1,08	-	-	-	-	1,08	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kumuh perkotaan												
2.4.1.4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	-	-	-	0,56	2,26	-	-	-	0,56	2,26	=
2.4.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
2.4.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	1218	1218	1218	1218	1218	-	-	-	-	-	<
2.4.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan	%	65	65	65	65	65	-	48,21	112,96	112,21	129,15	>
2.4.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	=
2.4.1.5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	-	16	17	9	15	-	16	17	9	15	=
2.4.1.5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	-	48,21	112,96	112,21	129,15	-	48,21	112,96	112,21	129,15	=
2.4.1.6.	URUSAN SOSIAL												
2.4.1.6.1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	0,11	0,12	0,46	0,55	0,61	=
2.4.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	0,11	0,12	0,46	0,55	0,61	0,11	0,12	0,46	0,55	0,61	=
2.4.1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan	%	-	-	-	-	96,08	-	-	-	-	96,08	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kebutuhan dasar												
2.4.1.6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,06	0,07	0,43	0,55	1,34	0,06	0,07	0,43	0,55	1,34	=
2.4.1.6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	10	15	20	20	20	100	100	100	100	100	>
2.4.1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2. ASPEK PELAYANAN UMUM PELAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
2.4.2.1.	URUSAN TENAGA KERJA												
2.4.2.1.3	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	-	48,89	83,28	69,36	105,98	-	48,89	83,28	69,36	105,98	=
2.4.2.1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	-	80,35	19,11	17,98	16,55	-	80,35	19,11	17,98	16,55	=
2.4.2.1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	64,52	72,37	61,54	74,42	-	64,52	72,37	61,54	74,42	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.2.1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	55,00	71,43	66,67	76,19	74,42	55,00	71,43	66,67	76,19	74,42	=
2.4.2.1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	68,97	70,18	72,46	76,19	-	68,97	70,18	72,46	76,19	=
2.4.2.1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	1,25	1,28	1,27	1,57	1,28	1,25	1,28	1,27	1,57	1,28	=
2.4.2.2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK												
2.4.2.2.1	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	-	45,71	42,38	42,38	18,33	-	45,71	42,38	42,38	18,33	=
2.4.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	=
2.4.2.2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	-	-	-	-	81,66	-	-	-	-	81,66	=
2.4.2.2.4	Rasio KDRT	%	0,009	0,009	-	0,019	0,005	0,009	0,009	-	0,019	0,005	=
2.4.2.2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umu	%	-	-	-	-	20,46	-	-	-	-	20,46	=
2.4.2.2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	-	-	11,54	11,41	11,18	-	-	11,54	11,41	11,18	=
2.4.2.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	terpadu												
2.4.2.2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak	%	12,50	1,32	27,27	7,14	14,81	12,50	1,32	27,27	7,14	14,81	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	korban kekerasan												
2.4.2.2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	=
2.4.2.2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	-	88,21	100,70	100,70	99,02	-	88,21	100,70	100,70	99,02	=
2.4.2.2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	-	60,35	97,79	97,79	87,77	-	60,35	97,79	97,79	87,77	=
2.4.2.2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	-	-	1,25	1,25	0,99	-	-	1,25	1,25	0,99	=
2.4.2.2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	-	2,86	2,36	1,95	2,06	-	2,86	2,36	1,95	2,06	=
2.4.2.2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	-	1,22	1,23	-	-	-	1,22	1,23	-	-	=
2.4.2.2.19	\Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	-	-	-	20,16	20,16	-	-	-	20,16	20,16	=
2.4.2.3	URUSAN PANGAN												
2.4.2.3.1	Ketersediaan pangan utama	%	11,21	11,63	33,08	30,12	32,92	11,21	11,63	33,08	30,12	32,92	=
2.4.2.3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita												
	Ketersediaan energi	%	5.020	5.072,34	5.077,34	5.082,34	5.087,34	5.020	5.072,34	5.077,34	5.082,34	5.087,34	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(kkal/kapita/hari)												
	Ketersediaan Protein(garam/kapita/ hari	%	6,91	7,32	8,48	37,89	42,36	6,91	7,32	8,48	37,89	42,36	=
2.4.2.3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	66,67	42,86	71,43	62,00	100	66,67	42,86	71,43	62,00	=
2.4.2.4	URUSAN PERTAHANAN												
2.4.2.4.1	Presentase luas lahan bersertifikat	%	-	-	-	-	78,67	-	-	-	-	78,67	=
1.4.2.4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	=
2.4.2.5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.4.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	=
2.4.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	=
2.4.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	=
2.4.2.5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	%	-	-	0	-	1	-	-	0	-	1	=
2.4.2.5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	%	-	-	-	-	89,92	-	-	-	-	89,92	=
2.4.2.5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	%	-	0,175	0,177	0,178	0,20	-	0,175	0,177	0,178	0,20	=
2.4.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait	%	-	10	20	87,50	94,44	-	10	20	87,50	94,44	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota												
2.4.2.5.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Tidak Ada	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	Tidak Ada	=
2.4.2.5.18	Timbulan sampah yang ditangani	%	-	-	-	54,36	65,87	-	-	-	54,36	65,87	=
2.4.2.5.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	-	-	-	-	6,289	-	-	-	-	6,289	=
2.4.2.5.20	Persentase cakupan area pelayanan	%	-	1,31	1,31	1,43	2,37	-	1,31	1,31	1,43	2,37	=
2.4.2.5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	-	-	-	54,36	65,86	-	-	-	54,36	65,86	=
2.4.2.5.22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	-	74,06	74,06	71	71,43	-	74,06	74,06	71	71,43	=
2.4.2.6	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL												
2.4.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	0,75	0,75	0,47	0,47	0,46	0,75	0,75	0,47	0,47	0,46	=
2.4.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,06	0,98	0,82	0,98	0,98	0,06	0,98	0,82	0,98	0,98	=
2.4.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,08	0,08	0,81	0,81	0,83	0,08	0,08	0,81	0,81	0,83	=

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.2.6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.2.6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
2.4.2.6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	68,73	67,29	828,52	91,11	97,49	68,73	67,29	828,52	91,11	97,49	=
2.4.2.6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	6,15	97,90	81,88	98,38	98,38	6,15	97,90	81,88	98,38	98,38	=
2.4.2.7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2.4.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	67,16	70,15	88,06	97,01	94,00	67,16	70,15	88,06	97,01	94,00	=
2.4.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=
2.4.2.7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	67,56	69,1	70,64	72,18	73,72	43,11	43,11	44,83	47,44	47,44	=
2.4.2.7.4	Persentase LSM aktif	%	13	15	15	17	17	16,25	12,50	15,00	15,00	18,75	>
2.4.2.7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	3,75	3,75	5	5	6,25	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	<
2.4.2.7.6	Persentase PKK aktif	%	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	>
2.4.2.7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
2.4.2.7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	-	-	17,89	20,60	25,84	-	-	17,89	20,60	25,84	=
2.4.2.8 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2.4.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	-	-	2,36	-	-	-	-	2,36	-	-	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	-	-	-	-	47,62	-	-	-	-	47,62	=
2.4.2.8.9	Ratio Akseptor KB		57,89	75,14	73,01	77,76	74,24	57,89	75,14	73,01	77,76	74,24	=
2.4.2.8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	62,95	75,74	73,00	77,76	73,46	62,95	75,74	73,00	77,76	73,46	=
2.4.2.8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	-	-	34,55	86,95	31,08	-	-	34,55	86,95	31,08	=
2.4.2.8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	-	-	2,49	2,45	0,79	-	-	2,49	2,45	0,79	=
2.4.2.8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	21,91	24,26	26,99	22,24	5,38	21,91	24,26	26,99	22,24	5,38	=
2.4.2.8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	11,63	11,63	14,24	19,43	17,83	11,63	11,63	14,24	19,43	17,83	=
2.4.2.8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	28,03	32,04	36,98	28,60	36,13	28,03	32,04	36,98	28,60	36,13	=
2.4.2.8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-	%	-	-	64,35	57,60	56,19	-	-	64,35	57,60	56,19	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KB												
2.4.2.8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	-	-	55,26	55,04	51,76	-	-	55,26	55,04	51,76	=
2.4.2.8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	-	-	46,77	52,45	47,20	-	-	46,77	52,45	47,20	=
2.4.2.8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	-	-	-	-	22,22	-	-	-	-	22,22	=
2.4.2.8.20	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kanseling Remaja/Mahasiswa	%	2,56	2,89	4,44	7,22	6,67	2,56	2,89	4,44	7,22	6,67	=
2.4.2.8.21	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan melaksanakan pembangunan daerah di bidang pengendalian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.8.22	Cakupan PUS persentase KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber - KB Mandiri	%	24,83	25,68	30,72	24,48	29,46	24,83	25,68	30,72	24,48	29,46	=
2.4.2.8.23	Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/ Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.2.8.24	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi pemerintaan masyarakat	%	138,28	0,12	0,21	0,22	0,22	138,28	0,12	0,21	0,22	0,22	=
2.4.2.8.25	Persentase Faskes dan Jejaringannya ((diseluruh tingkat wilayah) yang berkerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarnisasi pelayan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	=
2.4.2.8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	=
2.4.2.8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai belita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	-	-	12,22	10,21	8,63	-	-	12,22	10,21	8,63	=
2.4.2.9	URUSAN PERHUBUNGAN												
2.4.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	%	127.678	128.343	129.008	129.673	130.338	236.361	242.559	251.269	262.605	253.807	>
2.4.2.9.2	Rasio ijin trayek	%	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	=
2.4.2.9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	%											

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Mobil Penumpang Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	Mobil Bus	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	Mobil Barang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	=
2.4.2.9.5	Persentase layanan angkutan darat	%	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	=
2.4.2.9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	=
2.4.2.9.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	9,82	-	8,43	-	8,81	9,82	-	8,43	-	8,81	=
2.4.2.9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	=
2.4.2.9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	%	- 231.021	- 256.680	- 285.220	- 316.889	- 288.081	- 231.021	- 256.680	- 285.220	- 316.889	- 288.081	=
	- Jumlah Orang		- 2.310.122	- 2.566.802	- 2.852.002	- 3.168.891	- 2.880.810	- 2.310.122	- 2.566.802	- 2.852.002	- 3.168.891	- 2.880.810	
	- Jumlah Barang												
2.4.2.9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	%	-	-	- 454.385	- 504.872	- 458.975	-	-	- 454.385	- 504.872	- 458.975	=
	- Jumlah Orang				- 5.389.778	-	- 5.444.220			- 5.389.778	- 5.988.642	- 5.444.220	
	- Jumlah Barang					5.988.642							
2.4.2.9	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2.4.2.9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan	%	65,55	65,55	65,55	65,55	87,78	65,55	65,55	65,55	65,55	87,78	=

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan												
2.4.2.9.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	89,27	90,98	92,32	92,32	92,32	89,27	90,98	92,32	92,32	92,32	=
2.4.2.9.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	-	0,92	1,12	1,59	2,09	-	0,92	1,12	1,59	2,09	=
2.4.2.9.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	0,65	0,62	0,97	0,84	0,61	0,65	0,62	0,97	0,84	0,61	=
2.4.2.9.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	13,13	13,72	17,58	21,54	24,35	13,13	13,72	17,58	21,54	24,35	=
2.4.2.11 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2.4.2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	81,06	92	98	100	100	78,29	81,06	81,48	82,14	86,82	<
2.4.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	9.481	9.960	10.439	10.918	11.397	-	-	-	-	89,47	>
2.4.2.11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	8	8	8	8	8	75	75	75	75	75	>
2.4.2.11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	87,24	87,60	88,02	88,89	90	89,56	87,24	87,81	88,22	88,89	<
2.4.2.12 URUSAN PENANAMAN MODAL													
2.4.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	937	1.279	1.651	2.038	2.538	-	353	581	909	383	<
2.4.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	1.464.164.077.573	1.828.240.263.163	2.212.484.754.764	2.628.749.620.665	3.079.703.225.39	-	1.464.164.077.537	2.157.734.936.430	3.369.712.483.418	4.631.668.282.906	>
2.4.2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	1:4	1:4	1:4	1:3	1:4	1:4	1:4	1:4	1:3	1:4	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.2.12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-	-	47	56	37	-	-	47	56	37	=
2.4.2.13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA													
2.4.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif		-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	=
2.4.2.13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.2.13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	50	62,50	72,50	70,21	63,64	50	62,50	72,50	70,21	63,64	=
2.4.2.13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	60,00	70,00	61,54	50,00	47,62	60,00	70,00	61,54	50,00	47,62	=
2.4.2.13.7	Jumlah prestasi olahraga	%	9	6	-	-	9	9	6	-	-	9	=
2.4.2.14 URUSAN STATISTIK													
2.4.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.2.14.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.2.15 URUSAN PERSANDIAN													
2.4.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	=
2.4.2.16 URUSAN KEBUDAYAAN													
2.4.2.16.1	Penyelenggaraan festival		3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	<

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	seni dan budaya												
2.4.2.16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	153	153	153	153	153	100	100	100	100	100	<
2.4.2.16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi							-	-	-	-	3	>
2.4.2.16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	=
2.4.2.17 URUSAN PERPUSTAKAAN													
2.4.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	19,23	17,86	17,90	18,35	18,72	19,23	17,86	17,90	18,35	18,72	=
2.4.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	19,80	20,00	19,87	19,83	21,44	19,80	20,00	19,87	19,83	21,44	=
2.4.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	23,49	23,65	23,81	23,97	25,26	23,49	23,65	23,81	23,97	25,26	=
2.4.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	%	12.896	13.617	14.387	15.101	12.299	12.896	13.617	14.387	15.101	12.299	=
2.4.2.18 URUSAN KEARSIPAN													
2.4.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	75	85	100	100	100	100	100	56,41	100	=
2.4.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	
2.4.3. URUSAN PARIWISATA													
2.4.3.1 URUSAN PARIWISATA													
2.4.3.1.1.	Kunjungan wisata	%	27.602	30.360	333.500	36.410	39.500	74,95	74,95	93,79	85,88	91,34	>

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.3.1.2.	Lama kunjungan Wisata	%	27000	27.602	30.360	33.350	40.750	27000	27.602	30.360	33.350	40.750	=
2.4.3.2 URUSAN PERTANIAN													
2.4.3.2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	45,26	46,25	46,53	46,26	46,22	45,26	46,25	46,53	46,26	46,22	=
2.4.3.2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	18,22	17,87	17,56	17,12	17,34	18,22	17,87	17,56	17,12	17,34	=
2.4.3.2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	12,15	11,91	11,71	11,41	11,56	12,15	11,91	11,71	11,41	11,56	=
2.4.3.2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	69,92	65,46	72,00	78,30	76,73	69,92	65,46	72,00	78,30	76,73	=
2.4.3.2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	4.887	4.937	4.987	5.037	5.087	48,87	56,65	47,56	51,11	52,11	>
2.6..3.2.6	Cakupan bina kelompok petani	%	13,82	16,40	46,62	55,16	58,13	13,82	16,40	46,62	55,16	58,13	=
2.4.3.3 URUSAN KEHUTANAN													
3	Kehutanan												
2.4.3.3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	3,2	1,4	1,2	1,2	1,2	4,28	3,18	51,04	2,89	-	<
2.4.3.3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,10	0,047	-	-	-	0,053	0,15	0,01	0,005	-	=
2.4.3.4 URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL													
2.4.3.4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	-	-	-	77,79	-	-	-	-	77,79	-	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.3.4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	%	-	-	-	75,20	-	-	-	-	75,20	-	=
2.4.3.5	URUSAN PERDAGANGAN												
2.4.3.5	Perdagangan												
2.4.3.5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	26,80	-	-	-	-	26,80	-	-	-	=
2.4.3.6	URUSAN PERINDUSTRIAN												
2.4.3.6.	Perindustrian												
2.4.3.6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20,00	20,00	42,86	11,11	10,00	20,00	20,00	42,86	11,11	10,00	=
2.4.3.7	URUSAN TRANSMIGRASI												
7	Transmigrasi												
2.4.3.8	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN												
2.4.3.8.1.	Produksi perikanan	%	-	1.01	1,02	1,11	1,24	-	1.01	1,02	1,11	1,24	=
2.4.3.8.2.	Konsumsi ikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.3.8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	-	-	-	-	3,33	-	-	-	-	3,33	=
2.4.4.	PELAYAAN PENUNJANH URUSAN												
2.4.4.1	URUSAN PERENCANAAN												
2.4.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.4.1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.4.1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	=
2.4.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	=
2.4.4.1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.4.2 URUSAN KEUANGAN													
2.4.4.2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	=
2.4.4.2.2.	Persentase SILPA		-	9,57	13,68	7,13	4,14	-	9,57	13,68	7,13	4,14	=
2.4.4.2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD		-	9,57	13,68	7,13	4,14	-	9,57	13,68	7,13	4,14	
2.4.4.2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)		-	43,00	37,90	32,23	28,83	-	43,00	37,90	32,23	28,83	=
2.4.4.2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)		-	13,28	16,25	21,52	18,48	-	13,28	16,25	21,52	18,48	=
2.4.4.2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan		-	839.667.520 296,65	1.073.450.554 896,46	1.270.956.299 690,9	1.138.712.309 454,04	-	839.667.520 296,65	1.073.450.554 896,46	1.270.956.299 690,98	1.138.712.309 454,04	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	belanja tidak langsung					8							
2.4.4.2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		-	-	-	0,12	0,15	-	-	-	0,12	0,15	=
2.4.4.2.9.	Penetapan APBD		-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
2.4.4.3	URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN												
2.4.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		-	0,74	2,11	0,73	0,88	-	0,74	2,11	0,73	0,88	=
2.4.4.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		-	38,13	44,60	59,92	70,82	-	38,13	44,60	59,92	70,82	=
2.4.4.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	-	33	33	33	37	-	33	33	33	37	=
2.4.4.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	%	-	1.652	1.652	1.652	1.763	-	1.652	1.652	1.652	1.763	=
2.4.4.3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	-	3.856	3.925	3.715	3.106	-	3.856	3.925	3.715	3.106	=
2.4.4.4	PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN												
2.4.4.4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%		25	25	25	50	40	25	25	50	40	=
2.4.4.4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.4.4.4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	%		-	-	-	-	2,38	-	-	-	2,38	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dalam penerapan inovasi daerah												
2.4.4.4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%		-	-	-	-	100	-	-	-	100	=
2.4.4.5 URUSAN PENGAWASAN													
2.4.4.5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	-	91	84	79	78	-	91	84	79	78	=
2.4.4.5.2..	Persentase pelanggaran pegawai	%	-	-	-	1,14	1,23	-	-	-	1,14	1,23	=
2.4.4.5.3.	Jumlah temuan BPK			38	13	26	9		38	13	26	9	=
2.4.4.6 URUSAN SEKRETARIAT DEWAN													
6	Sekretariat Dewan												
2.4.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.4..6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.4.8	URUSAN SEKRETARIAT												
	Jumlah dokumen teknis kecamatan dan kelurahan yang tersusun	%	100	-	2 Dokumen	-	2 Perbup	100	-	2 Dokumen	-	2 Perbup	=
	Jumlah laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		-	-	-	1 Dok.	1 Dok.	-	-	-	1 Dok.	1 Dok.	=
	Jumlah laporan hasil rakor desa/kecamatan		-	-	12 Kali	12 Kali	4 Kali	-	-	12 Kali	12 Kali	4 Kali	=
	Jumlah Peraturan Daerah, dan Produk Hukum Lainnya yang terbentuk		-	17 Perda, 60 Perbup.	10 Perda, 65 Perbup.	11 Perda, 94 Perbup.	18 Perda, 78 Perbup.	-	17 Perda, 60 Perbup.	10 Perda, 65 Perbup.	11 Perda, 94 Perbup.	18 Perda, 78 Perbup.	=
	Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan		-	3	3	4	3	-	3	3	4	3	=
	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi		-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	=
	Jumlah rumusan kebijakan Perekonomian yang dikoordinasikan		-	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Ranperda, 2 MOU, 1 Perbup	-	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Ranperda, 2 MOU, 1 Perbup	=
	Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah yang tersusun dan dikoordinasikan		-	6 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku	-	6 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku	=
	Jumlah Rumusan Kebijakan		-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kerjasama Pembangunan Daerah												
	Jumlah Kerjasama Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan		-	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	-	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	=
	Jumlah kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dan dikoordinasikan		-	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	-	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	=
	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Tugas – tugas Pemerintahan Daerah		-	98 %	98 %	98 %	98 %	-	98 %	98 %	98 %	98 %	=
	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah		-	6 Peraturan Bupati	2 Peraturan Bupati	1 Peraturan Daerah, 39 Peraturan Bupati	30 Peraturan Bupati	-	6 Peraturan Bupati	2 Peraturan Bupati	1 Peraturan Daerah, 39 Peraturan Bupati	30 Peraturan Bupati	=
	Persentase Keterpenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan sarana prasarana Aparatur Lingkup Setda			100 %	100%	100 %	100 %		100 %	100%	100 %	100 %	=
	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur			100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	=
	Persentase Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan lingkup Setda			100 %	100 %	100 %	100		100 %	100 %	100 %	101	=
2.5.	PENERAPAN STANDAR PELAYNANAN UMUM												
2.5.1.	SPM DINAS PENDIDIKAN												

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.1.1	Pendidikan Dasar												
2.5.1.2	PendidikKesetaraan												
2.5.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini												
2.5.2.	SPM DINAS KESEHATAN												
2.5.2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		-	-	-	4.153	4.084	-	-	-	4.153	4.084	=
2.5.2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		-	-	-	4.060	4.056	-	-	-	4.060	4.056	=
2.5.2.3	JPelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		-	-	-	5.037	4.249	-	-	-	5.037	4.249	=
2.5.2.4	Pelayanan Kesehatan Balita		-	-	-	16.014	15.396	-	-	-	16.014	15.396	=
2.5.2.5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar		-	-	-	4.176	4.448	-	-	-	4.176	4.448	=
2.5.2.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		-	-	-	-	56.259	-	-	-	-	56.259	=
2.5.2.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		-	-	-	4.658	8.145	-	-	-	4.658	8.145	=
2.5.2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		-	-	-	-	8.168	-	-	-	-	8.168	=
2.5.2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		-	-	-	-	1.136	-	-	-	-	1.136	=
2.5.2.10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		-	-	-	-	203	-	-	-	-	203	=
2.5.2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		-	-	-	-	270	-	-	-	-	270	=

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia		-	-	-	-	7065	-	-	-	-	7065	=
2.5.3. SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
2.5.3.1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		-	-	-	-	86,80	-	-	-	-	86,80	=
2.5.3.2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
2.5.4. SPM PERUMAHAN													
2.5.4.1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota							100	100	100	100	100	=
2.5.4.2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten							100	100	100	100	100	=
2.5.5. SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR													
2.5.5.1.	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum							-	48,21	112,96	112,21	129,15	=
2.5.5.2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana							-	-	-	-	-	
2.5.5.3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap							-	-	-	-	-	

NO	Aspek fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bencana												
2.5.5.4.	Pelayanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana							-	-	-	-	-	
2.5.5.5.	Pelayanan Penyelamatan dan evaluasi Bencana Kebakaran							27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	
2.5.6. SPM DINAS SOSIAL													
2.5.6.1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti							-	-	-	-	14,42	
2.5.6.2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti							-	-	-	-	4,62	
2.5.6.3.	Rehabilitasi Sosial Dasar LAnjut Usia Terlantar di Luar Panti							-	-	-	-	1,8	
2.5.6.4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis luar Panti							-	-	-	-	-	
2.5.6.5.	Perlindungan & Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten							-	-	-	-	100	

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD dan perkembangan neraca daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD meliputi semua komponen struktur APBD, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja struktur APBD tersebut dianalisis dalam lima tahun terakhir, satu periode pemerintahan terakhir, dari 2014 hingga 2018 yang sedang berjalan. Selama tahun 2014-2017 menggambarkan realisasi APBD, sedangkan APBD tahun 2018 merupakan APBD pokok yang sedang berjalan dan sementara dalam proses APBD perubahan tahun berkenaan.

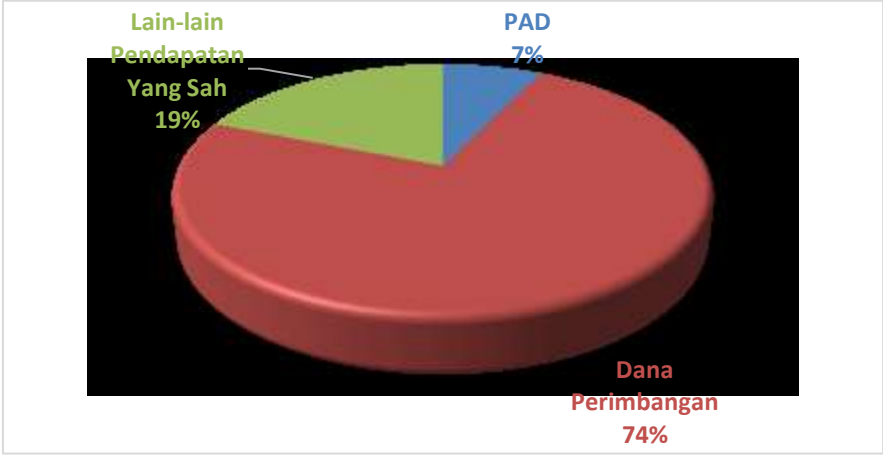
3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Realisasi APBD merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kinerja keuangan daerah untuk periode yang telah berjalan, menggambarkan hasil evaluasi keuangan daerah selama satu periode untuk kepentingan perumusan perencanaan satu periode yang akan datang. Hasil evaluasi realisasi APBD Kabupaten Sinjai selama periode 2014-2018 untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah masa lalu, melalui penggambaran kinerja pelaksanaan APBD setiap tahunnya. Kinerja pelaksanaan APBD ini mencakup semua komponen-komponennya, meliputi kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah beserta dengan unsur-unsurnya.

Secara keseluruhan APBD Kabupaten Sinjai selama periode 2014-2018 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah. Selama periode tersebut, pendapatan daerah hanya bertumbuh rata-rata sebesar 8,06 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah mencapai 9,19 persen. Pendapatan daerah ini menunjukkan kinerja peningkatan yang signifikan selama satu periode pemerintahan, meningkat dari Rp 782,99 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp 1,12 trilyun pada tahun 2018. Dalam lima tahun pendapatan daerah

meningkat sebesar Rp 335,59 milyar, meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun.

Gambar 3.1
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2014-2018



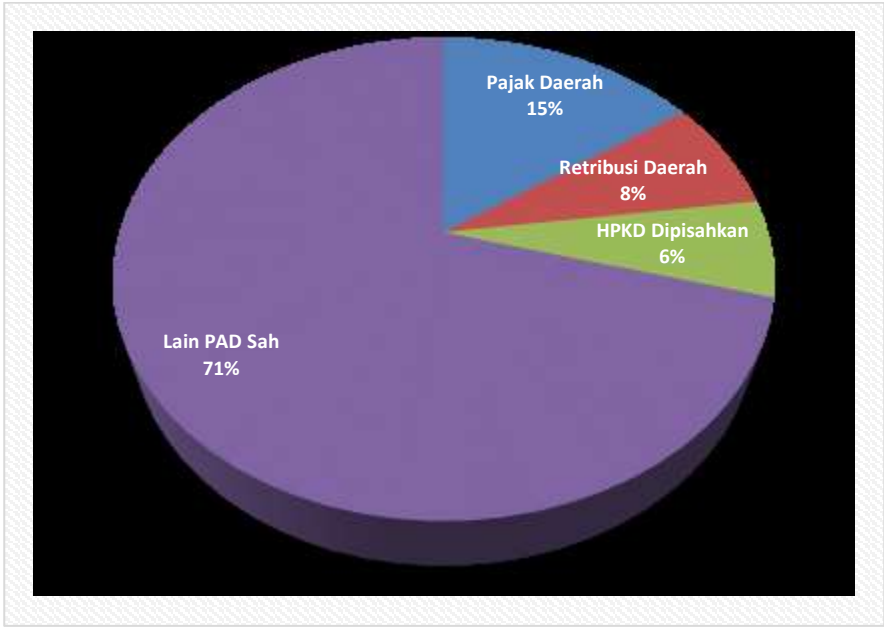
Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Komponen pendorong pertumbuhan pendapatan daerah lebih besar ditunjukkan oleh komponen pendapatan dari dana perimbangan daripada komponen pendapatan asli daerah (PAD). Selama periode tersebut dana perimbangan rata-rata bertumbuh 8,22 persen, jauh lebih besar dari pertumbuhan PAD yang hanya rata-rata bertumbuh 5,43 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah bertumbuh rata-rata 5,19 persen setiap tahun pada periode yang sama. Peran dana perimbangan semakin besar dalam meningkatkan pendapatan daerah ditunjukkan dari dominannya kontribusi dana perimbangan daripada PAD terhadap pendapatan daerah. Selama periode ini, total kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah mencapai 74 persen. Kemampuan PAD masih sangat terbatas, kontribusinya pada pendapatan daerah, hanya menyumbang 7 persen dari Rp 5,09 trilyun pendapatan daerah selama lima tahun realisasi APBD Kabupaten Sinjai. Selebihnya, 19 persen merupakan share dari komponen lain-lain pendapatan yang sah.

Ketergantungan pendapatan daerah pada dana perimbangan yang tetap besar selama periode ini, terutama ditunjukkan dengan pertumbuhan PAD yang memang selalu lebih kecil dari pertumbuhan dana perimbangan. Dalam lima tahun, PAD hanya bertumbuh rata-rata 5,43 persen, jauh di bawah pertumbuhan rata-rata dana perimbangan yang mencapai 8,22 persen setiap tahun selama periode 2014-2018. Rendahnya pertumbuhan PAD ini terutama karena rendahnya pertumbuhan retribusi daerah. Bahkan selama periode ini, retribusi daerah mengalami penurunan tajam hingga mencapai -197,16 persen.

Komponen PAD yang lain menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan bertumbuh rata-rata 13,81 persen, pajak daerah bertumbuh 6,25 persen dan komponen lain-lain PAD yang sah hanya bertumbuh rata-rata 3,53 persen setiap tahunnya.

Gambar 3.2
Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Sinjai, Periode 2014-2018

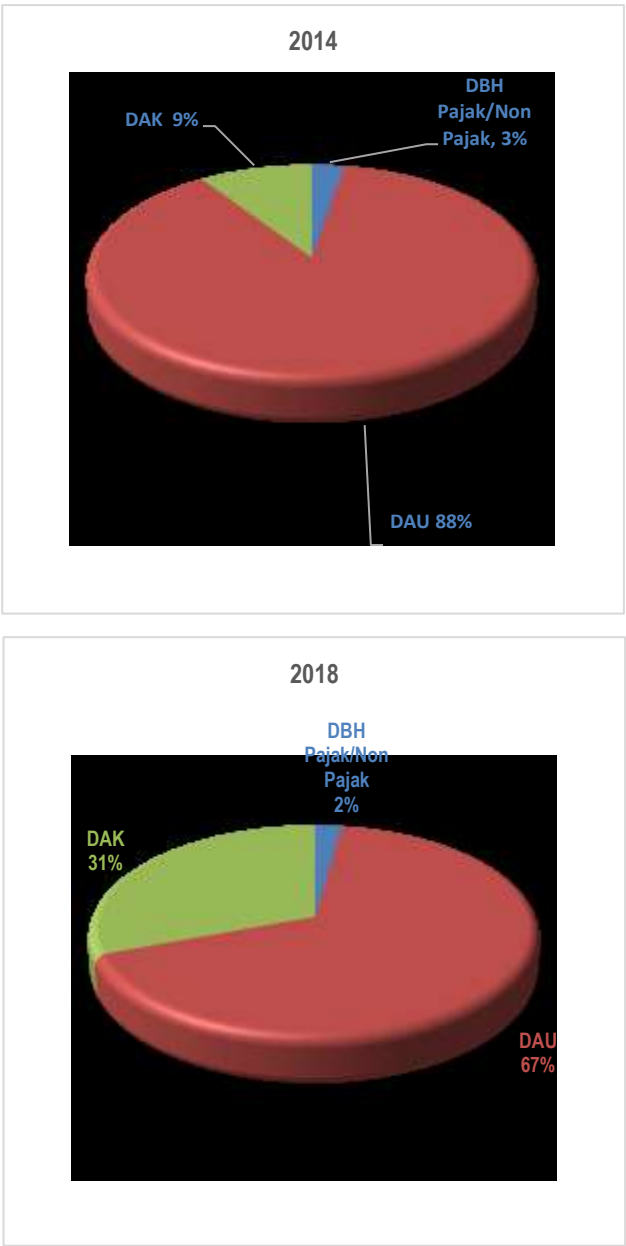


Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Dalam lima tahun PAD masih sangat tergantung pada sumber lain-lain PAD yang sah. Komponen ini berkontribusi hingga 71 persen terhadap PAD selama lima tahun, selebihnya dikontribusi oleh pajak daerah sebesar 15 persen serta sisahnya 8 persen oleh retribusi daerah dan hanya 6 persen oleh hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Fakta ini mengindikasikan komposisi PAD Kabupaten Sinjai yang cenderung tidak stabil karena besarnya unsur ketidakpastian dari sumber-sumber pendapatan yang bersifat insidental dari komponen lain-lain PAD yang sah. Sementara dua komponen yang memberikan tingkat kepastian yang tinggi masih memberi kontribusi yang tergolong kecil. Pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis Peraturan Daerah, selama ini hanya berkontribusi sekitar 20 persen. Pajak daerah selama lima tahun berkontribusi hingga 15 persen, sedangkan retribusi daerah hanya berkontribusi 8 persen dalam lima tahun. Fakta ini mengindikasikan pentingnya dihadirkan kebijakan daerah, baik kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari PAD dan sumber-sumber pendapatan daerah yang mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sinjai ke depan.

Pertumbuhan dana perimbangan yang lebih besar dari PAD ini, terutama dikontribusi oleh rata-rata pertumbuhan DAK yang mencapai 23,75 persen. Dua komponen dana perimbangan yang lain mencatat pertumbuhan rata-rata yang lebih rendah, yakni 4,65 persen dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan hanya 2,77 persen rata-rata pertumbuhan yang dicapai komponen DAU selama periode 2014-2018. Komponen dana perimbangan dikontribusi oleh DAU, disusul DAK dan hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh komponen bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, sebagaimana nampak pada *piechart* berikut ini.

Gambar 3.3
Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Sinjai, 2014 dan 2018



Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Kontribusi komponen dana perimbangan mengalami perubahan dalam lima tahun berjalan 2014-2018. Komponen DAU sebagai penyumbang terbesar mencatat kontribusi 88 persen pada tahun 2014, mengalami penurunan hingga hanya berkontribusi 67 persen terhadap total dana perimbangan pada tahun 2018. Sebaliknya komponen DAK mengalami peningkatan peran yang cukup tajam pada periode yang sama, meningkat dari hanya 9 persen pada tahun 2014 menjadi 31 persen pada tahun 2018. DBH pajak/non pajak sebagai komponen dana perimbangan terkecil, menunjukkan penurunan tipis, dari 3 persen pada tahun 2014 menjadi 2 persen pada tahun 2018. Fakta ini mengindikasikan tingkat ketergantungan fiskal daerah yang semakin besar dengan kecenderungan peningkatan kontribusi dan pertumbuhan dari DAU dan DAK dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan
Kabupaten Sinjai tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018*) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN	782,995,287,787.62	985,110,700,579.91	1,122,559,586,106.60	1,076,481,144,522.76	1.118.578.083.740,00	8,06
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	46,404,259,984.00	75,599,713,319.86	79,491,453,854.80	113,973,757,128.76	74.960.143.940,00	5,43
1.1.1.	Pajak Daerah	9,318,073,340.00	10,812,469,620.00	11,895,081,350.07	14,326,759,765.00	12.470.941.820,00	6,25
1.1.2.	Retribusi Daerah	7,124,640,828.52	8,046,757,867.95	6,757,038,051.00	6,180,733,098.00	709.052.000,00	-197,16
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3,108,716,331.00	4,442,531,837.68	5,532,994,995.00	5,855,148,706.70	5.855.148.706,00	13,81
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	26,852,829,484.48	52,297,953,994.23	55,306,339,458.73	87,611,115,559.06	49.542.001.414,00	3,53
1.2.	Dana Perimbangan	595,871,036,697.00	721,962,706,908.00	942,186,494,783.00	864,137,112,789.00	873.666.453.000,00	8,22
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	15,675,956,342.00	14,273,865,274.00	16,209,991,329.00	16,739,843,903.00	19.313.874.000,00	4,65
1.2.3.	Dana alokasi Umum	521,628,340,000.00	541,097,983,000.00	596,296,644,000.00	585,821,629,000.00	585.911.082.000,00	2,77
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus	55,315,050,000.00	163,890,690,000.00	321,155,310,120.00	261,575,639,886.00	268.441.497.000,00	23,75
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah					169.951.486.800,00	
1.3.1.	Hibah	0	19,228,881,000.00	15,156,110,000.00	0	31.885.880.000,00	
1.3.2.	Dana Darurat	0	0	0	0		
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**)	24,797,703,626.62	30,089,780,552.05	32,794,490,588.80	36,556,929,005.00	32.000.000.000,00	5,47
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***)	101,036,151,000.00	128,010,583,000.00	43,157,455,000.00	55,525,848,000.00	59.319.066.000,00	-36,72
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		10,219,035,800.00	0	6,287,497,600.00	5.746.540.800,00	
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	14,886,136,480.00	0	9,773,581,880.00	0	41.000.000.000,00	

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

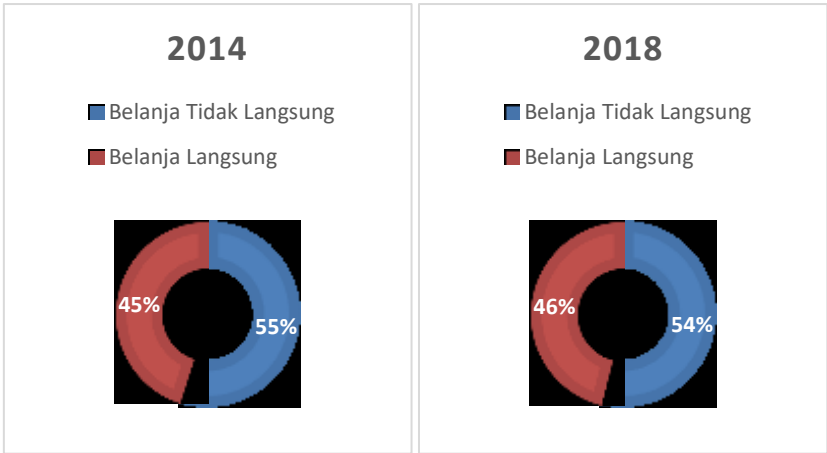
3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah satu periode yang telah berjalan. Meliputi kinerja alokasi belanja tidak langsung beserta dengan seluruh komponennya dan alokasi belanja langsung beserta komponen-komponennya. Analisis difokuskan pada kinerja pertumbuhan dan kinerja share setiap komponen belanja pada total belanja daerah.

Secara keseluruhan kinerja pertumbuhan belanja daerah selama lima tahun rata-rata mencapai 9,19 persen, meningkat dari Rp 0,768 trilyun pada tahun 2014 menjadi Rp 1,164 trilyun pada tahun 2018. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih banyak dikontribusi oleh rata-rata pertumbuhan belanja langsung yang mencapai 9,41 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung yang hanya mencapai 8,81 persen setiap tahunnya selama periode 2014-2018. Alokasi belanja tidak langsung menunjukkan peningkatan tajam dalam lima tahun, meningkat dari Rp 422,4 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp 627,9 milyar pada tahun 2018. Sedangkan alokasi belanja langsung meningkat dari Rp 346,2 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp 535,6 milyar pada tahun 2018. Alokasi belanja langsung meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun implementasi pembangunan daerah Kabupaten Sinjai.

Pertumbuhan alokasi belanja langsung yang lebih besar dari alokasi belanja tidak langsung tersebut, memberi gambaran potensi belanja daerah yang diharapkan seimbang antara alokasi belanja tidak langsung dengan alokasi belanja langsung ke depan. Menggambarkan keinginan kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja daerahnya secara langsung untuk tujuan kemajuan daerah dan pemenuhan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut perbandingan alokasi belanja daerah untuk alokasi belanja tidak langsung dan alokasi belanja langsung selama periode 2014-2018, nampak pada *piechart* berikut ini.

Gambar 3.4
Perkembangan Alokasi Balanja Daerah Kabupaten Sinjai,
Tahun 2014 dan 2018 (persen)



Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Dalam lima tahun implementasi pembangunan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sinjai selama periode 2014-2018 berusaha mendorong peningkatan alokasi belanja langsung untuk kepentingan masyarakat. Dengan pertumbuhan alokasi belanja langsung yang lebih besar dari alokasi belanja tidak langsung, nampak alokasi belanja langsung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi belanja langsung meningkat dari 45 persen dari alokasi belanja daerah pada tahun 2014 meningkat menjadi 46 persen dari alokasi belanja daerah pada tahun 2018. Kecenderungan ini diharapkan akan tetap berlanjut ke depan, pemerintah daerah diharapkan secara konsisten tetap berusaha mendorong alokasi belanja langsung untuk kepentingan masyarakat. Diharapkan dalam satu periode pemerintahan ke depan, alokasi belanja tidak langsung dan alokasi belanja langsung akan semakin berimbang, bahkan diharapkan alokasi belanja langsung akan lebih besar daripada alokasi belanja tidak langsung dari total alokasi belanja daerah Kabupaten Sinjai.

Kinerja alokasi belanja tidak langsung, lebih didominasi oleh alokasi belanja pegawai. Meskipun alokasi belanja pegawai masih sangat mendominasi, tetapi kinerja pertumbuhannya merupakan yang terendah dalam alokasi belanja tidak langsung. Hanya bertumbuh rata-rata 1,58 persen setiap tahunnya selama periode 2014-2018. Berbanding terbalik dengan alokasi belanja hibah dan alokasi belanja bantuan keuangan yang rata-rata pertumbuhannya hingga mencapai masing-masing 35,65 persen untuk belanja hibah dan 26,80 persen untuk belanja bantuan keuangan selama periode 2014-2018 ini. Bila kondisi ini terus berlanjut ke depan, maka diperkirakan *share* alokasi belanja pegawai akan terus menurun dalam alokasi belanja tidak langsung yang selama periode ini menyedot hingga 81,01 persen dari total

Rp 2,7 triliun alokasi belanja tidak langsung selama lima tahun. Sebaliknya, share alokasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan akan terus meningkat yang lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan peran yang sangat tajam.

Pada saat yang sama kinerja alokasi belanja langsung yang bertumbuh hingga mencapai rata-rata 9,41 persen setiap tahunnya, terutama didorong oleh pertumbuhan alokasi belanja barang dan jasa dan alokasi belanja modal yang masing-masing bertumbuh 10,56 persen dan 6,40 persen setiap tahunnya. Secara keseluruhan share alokasi belanja modal merupakan yang terbesar dari total alokasi belanja langsung. Selama lima tahun alokasi belanja modal mencapai 50,09 persen dari total Rp 2,44 triliun alokasi belanja langsung selama periode 2014-2018. Pada saat yang sama, share alokasi belanja barang dan jasa mencapai 44,68 persen dari total alokasi belanja langsung dalam lima tahun. Selebihnya, hanya 5,23 persen alokasi belanja langsung untuk alokasi belanja pegawai. Postur alokasi belanja modal yang seperti ini masih menggambarkan postur belanja yang kurang ideal, karena bila dibandingkan dengan total belanja daerah, alokasi belanja modal masih tergolong minim. Dalam lima tahun, alokasi belanja modal hanya mencapai 28,1 persen dari total Rp 4,4 triliun alokasi belanja daerah selama lima tahun. Tantangan pemerintah daerah yang akan datang adalah memastikan alokasi belanja modal meningkat signifikan untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat secara langsung sehingga dapat mengakselerasi kemajuan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dari capaian dewasa ini.

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018*) (Rp)	
2.	Belanja	768,607,526,883.6	892,228,071,891.30	1,173,641,753,778.00	1,118,057,638,912.00	1.163.578.083.740,00	9,19
2.1.	Belanja tidak Langsung	422,365,518,326	453,718,832,315.00	600,695,574,463.00	571,443,786,342.00	627.936.136.394,00	8,81
2.1.1.	Belanja Pegawai	416,273,513,826	441,779,744,435.00	459,693,281,130.00	395,946,630,440.00	453.838.075.962,00	1,58
2.1.2.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	
2.1.3.	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	
2.1.4.	Belanja Hibah	4,757,829,500.00	6,624,219,800.00	32,378,879,083.00	49,714,265,890.00	49.714.063.900,00	35,65
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	439,255,000.00	0	524,719,650.00	5,563,955,550.00	0	
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	0	0	1,609,212,000.00	1,709,170,382.00	1.956.299.382.00	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	0	34,460,014,549,94	104,777,456,239.00	117,264,332,700.00	120.427.697.150,00	26,80
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	894,920,000.00	5,314,868,080.00	1,712,026,361.00	1,245,431,380.00	2.000.000.000,00	-31,75
2.2.	Belanja Langsung	346,242,008,557.6 0	438,509,239,576.30	572,946,179,315.00	546,613,852,570.00	535.641.947.346,00	9,41
2.2.1.	Belanja Pegawai	17,371,910,000.00	32,504,985,050.00	31,096,690,550.00	31,336,956,600.00	15.513.904.600,00	-14,80
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171,381,663,721.60	210,881,888,039.30	197,255,088,994.00	236,144,975,454.00	274.470.948.244,00	10,56
2.2.3.	Belanja Modal	157,488,434,836.00	195,122,366,487.00	344,594,399,771.00	279,131,920,516.00	245.657.094.502,00	6,40
3.	Pembiayaan	59,022,195,295.65	88,426,704,147.78	141,693,208,186.45	88,675,518,653.05	45.000.000.000,00	-21,50
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	60,923,729,852.65	88,426,704,147.78	146,849,318,186.45	90,675,518,653.05	48.000.000.000,00	-19,99
3.2.	Pegeluaran Pembiayaan	1,901,534,557.00	0	5,156,110,000.00	2,000,000,000.00	3.000.000.000,00	-62,24

Sumber Buku: APBD Kabupaten Sinjai Berbagai Seri

3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah Kabupaten Sinjai selama periode 2014-2018 menggambarkan kebijakan anggaran defisit. Terlihat pada alokasi belanja daerah yang lebih besar daripada pendapatan daerah. Hal ini berimplikasi pada penerimaan pembiayaan lebih besar daripada alokasi pengeluaran pembiayaan. Selama lima tahun penerimaan pembiayaan mencapai Rp 410,7 milyar dari total Rp 422,8 milyar pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan selama periode ini mencapai rata-rata Rp 82,14 milyar setiap tahun. Berbanding terbalik dengan kinerja pengeluaran pembiayaan, selain dengan pertumbuhan rata-rata yang semakin menurun, juga dengan jumlah anggaran yang tidak signifikan. Dalam lima tahun pengeluaran pembiayaan hanya mencapai Rp 12,1 milyar atau rata-rata hanya Rp 2,42 milyar per tahun. Artinya, selama periode ini kebijakan surplus anggaran tidak dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, mengingat terbatasnya pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yang semakin besar dari peningkatan kebutuhan fiskal setiap tahunnya. Dalam lima tahun pemerintah daerah menempuh kebijakan penganggaran defisit untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang kian besar, tergambar pada kebutuhan fiskal yang semakin besar. Kebutuhan fiskal untuk implementasi program pembangunan daerah dan pelayanan publik ini, akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat jika dapat dialokasikan secara tepat untuk kepentingan sasaran strategis daerah, dan defisit tersebut tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

3.1.2 Neraca Daerah

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Tujuan dari analisis kinerja neraca daerah adalah untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan pemerintah daerah. Analisis neraca daerah meliputi: besarnya

aset yang dimiliki daerah, kewajiban yang harus dibayarkan atau ditunaikan, serta ekuitas daerah. Ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah fokus pada analisis rata-rata pertumbuhan neraca daerah dalam tiga tahun terakhir yang telah melalui proses audit setiap tahunnya. Hasil perhitungan neraca daerah Kabupaten Sinjai yang tersedia dalam tiga terakhir, selama tahun 2015 hingga 2017.

Selama periode tersebut, aset daerah meningkat dari Rp 1,68 trilyun pada tahun 2015 menjadi Rp 1,78 trilyun pada tahun 2017. Komponen terbesar aset daerah ini dikontribusi oleh aset tetap yang mencapai Rp 1,43 trilyun pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp 1,57 trilyun pada tahun 2017. Artinya, aset daerah lebih dari 86,96 persen dikontribusi oleh aset tetap, selebihnya 13,04 persen dikontribusi oleh aset lancar dan komponen-komponen aset lainnya. Kontribusi 13,04 persen kontribusi aset lancar dan aset lainnya tersebut masing-masing sebesar Rp 185,6 milyar dan Rp 47,4 milyar pada tahun 2015. Bahkan aset lancar mengalami penurunan menjadi hanya Rp 85 milyar pada tahun 2017, sedangkan aset lainnya meningkat menjadi Rp 98,2 milyar pada tahun 2017.

Pada saat yang sama kewajiban pemerintah daerah juga meningkat dari hanya Rp 7,8 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp 12,6 milyar pada tahun 2017. Begitupun ekuitas dana meningkat dari hanya Rp 1,67 trilyun pada tahun 2015 menjadi Rp 1,76 trilyun pada tahun 2017. Selengkapnya pada table 3.2. berikut ini.

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Sinjai, Periode 2015-2017

NO	URAIAN	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumb uhan (%)
1	ASET	1,680,648,927,011.31	1,588,977,121,987.12	1,776,206,196,232.55	2,39
1.1	ASET LANCAR	185,598,950,188.49	127,592,624,012.58	85,950,668,304.00	-69.69
1.1.1	Kas di Kas Daerah	124,430,113,543.34	73,910,216,537.94	31,696,214,490.81	-100.77
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	12,940,468.00	108,933,320.00	10,900,000.00	-405.63
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	5,091,992.00	20,465,663.00	52,975,453.00	68.24
1.1.4	Kas di Bendahara JKN FKTP	2,756,908,961.00	4,774,475,187.00	2,796,937,058.00	-14.22
1.1.5	Kas di Bendahara BOS	496,568,522.00	384,785,366.00	1,017,501,068.00	16.57
1.1.6	Kas di Kas BLUD	10,149,391,088.11	6,296,949,907.11	2,051,036,045.00	-134.10
1.1.7	Setara Kas	9,500,000,000.00	-	-	
1.1.8	Investasi Jangka Pendek	-	5,500,000,000.00	9,500,000,000.00	

NO	URAIAN	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumb uhan (%)
1.1. 9	Piutang Pajak Netto	7,927,403,865.48	4,827,392,069.13	3,257,002,070.33	-56.22
1.1. 10	Piutang Retribusi Netto	881,828,972.60	232,740,015.40	200,648,959.10	-147.44
1.1. 11	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	40,663,501.27	19,093,500.00	1,333,113,632.10	-7.20
1.1. 12	Piutang Lainnya Netto	16,389,145,672.35	14,955,571,030.42	14,883,964,236.00	-5.03
	JUMLAH ASET LANCAR	185,598,950,188.49	127,592,624,012.58	85,950,668,304.00	-46.96
1.2	ASET TETAP	1,434,807,986,567.15	1,366,645,024,804.93	1,572,782,359,759.00	4.06
1.2. 1	Tanah	162,500,222,022.00	168,027,913,775.00	300,465,248,570.00	23.68
1.2. 2	Peralatan dan Mesin	315,618,031,513.00	387,492,462,961.00	397,390,554,724.00	10.52
1.2. 3	Gedung dan Bangunan	532,912,667,186.00	603,227,010,745.00	610,639,106,410.00	6.44
1.2. 4	Jalan, Irigasi,dan Jaringan	1,125,520,050,313.00	1,280,453,510,797.00	1,503,942,146,155.00	13.48
1.2. 5	Aset Tetap Lainnya	20,739,494,107.00	23,979,892,459.00	20,833,311,780.00	-0.8
1.2. 6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	66,456,723,898.15	100,185,878,011.93	18,207,856,994.00	-208.28
1.2. 7	Akumulasi Penyusutan	-788,939,202,472.00	-1,196,721,643,944.00	-1,278,695,864,874.00	20.24
	JUMLAH ASET TETAP	1,434,807,986,567.15	1,366,645,024,804.93	1,572,782,359,759.00	4.06
1.3	ASET LAINNYA	47,403,375,270.00	79,798,994,499.75	98,158,118,891.00	29.65
1.3. 1	Tuntutan Ganti Rugi Netto	1,667,391,559.00	1,667,391,559.00	199,399,159.00	-368.1
1.3. 2	Aset Tak Berwujud Netto	3,716,890,863.00	866,577,840.75	1,121,330,125.00	-153.1
1.3. 3	Aset Lain-lain	42,019,092,848.00	77,265,025,100.00	96,837,389,607.00	32.91
	JUMLAH ASET LAINNYA	47,403,375,270.00	79,798,994,499.75	98,158,118,891.00	29.65
	JUMLAH ASET	1,680,648,927,011.31	1,588,977,121,987.12	1,776,206,196,232.55	2.39
2	KEWAJIBAN	7,808,441,425.84	25,276,815,454.15	12,552,114,311.65	-16.13
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,808,441,425.84	25,276,815,454.15	12,552,114,311.65	-16.13
2.1. 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35,774.00	-	25,539,851.00	
2.1. 2	Pendapatan Diterima Dimuka	193,738,645.84	606,276,849.07	577,786,613.17	31.56
2.1. 3	Utang Belanja	5,315,830,980.00	23,386,411,787.08	10,664,661,029.48	-21.01
2.1. 4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2,298,836,026.00	1,284,126,818.00	1,284,126,818.00	-39.51
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,808,441,425.84	25,276,815,454.15	12,552,114,311.65	-16.13
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	

NO	URAIAN	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumb uhan (%)
	JUMLAH KEWAJIBAN	7,808,441,425.84	25,276,815,454.15	12,552,114,311.65	-16.13
3	EKUITAS DANA	1,672,840,485,585.47	1,563,700,306,532.97	1,763,654,081,920.90	2.18
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,680,648,927,011.31	1,588,977,121,987.12	1,776,206,196,232.55	2.39

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Secara keseluruhan perbandingan antara asset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana menunjukkan posisi kesimbangan, meningkat dari Rp 1,68 trilyun pada tahun 2015 menjadi Rp 1,78 trilyun pada tahun 2017. Lebih banyak dikontribusi oleh ekuitas dana, selama tiga tahun ini ekuitas dana berkontribusi sebesar 99 persen dari total kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Sinjai periode tahun 2015-2017.

Analisis selanjutnya terkait neraca daerah ini mencakup rasa keuangan daerah, meliputi analissi rasio lancar (*current ratio*), rasio quick (*quick ratio*), rasio hutang modal, dan rasio aktivitas. Disajikan berturut-turut pada tabel 3.3 hingga table 3.5. Kinerja rasio likuiditas Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.4
Perkembangan Rasio Likuiditas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015-2017

No	Tahun	Rasio Lancar (Current Ratio)			Rasio Quick (Quick Ratio)			
		Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Quick
a	b	C	d	e = c/d	f	G	H	i = (f- g)/h
1	2015	185.598.950.188,49	7.808.441.425,84	23,77	185.598.950.188,49	12.653.805.439,82	7.808.441.425,84	22,15
2	2016	1.588.977.121.987,12	25.276.815.454,15	62,86	1.588.977.121.987,12	16.262.723.224,49	25.276.815.454,15	62,22
3	2017	1.776.206.196.232,55	12.552.114.311,65	141,51	1.776.206.196.232,55	18.853.061.352,47	12.552.114.311,65	140,00

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Rasio likuiditas diperlukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memperhitungkan seluruh aktiva lancar. Rasio ini menghubungkan antara nilai aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilai rasionya, semakin menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin baik, meskipun pada sisi lainnya berarti juga banyak aset lancar pemerintah yang

kurang produktif. Rasio likuiditas yang dipergunakan mencakup minimal current ratio (CR) dan quick ratio (QR).

Perkembangan rasio likuiditas Kabupaten Sinjai selama periode 2015-2017 seperti nampak pada tabel 3.3. di atas, menunjukkan pola yang hampir seragam pada kedua angka rasionya. Current rasio pada tahun 2015 cukup tinggi, dan menggambarkan kondisi keuangan daerah yang cukup ideal. Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun tersebut memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pemerintah daerah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Selama periode tersebut current ratio menunjukkan peningkatan tajam setiap tahunnya, dari hanya 23,77 poin pada tahun 2015 meningkat menjadi 141,51 poin pada tahun 2017. Ini mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin meningkat pada periode tersebut. Kinerja yang hamper serupa ditunjukkan pada quick rasionya. Selama periode ini, rasionya mengalami peningkatan tajam. Meningkat dari hanya 22,15 poin pada tahun 2015 menjadi 140,0 poin pada tahun 2017. Fakta ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin meningkat, dengan tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Selanjutnya analisis rasio solvabilitas, rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin kecil nilai rasionya, mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya semakin membaik, demikian pula sebaliknya. Dua jenis rasio yang dipergunakan dalam analisis ini, yakni rasio hutang terhadap total aset, dan rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio hutang terhadap aset menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aset yang dimiliki. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan seberapa jauh aset pemerintah daerah dibalantai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin kecil rasio hutang terhadap ekuitas ini menunjukkan semakin kecil dana yang diambil dari luar (pinjaman), demikian pula sebaliknya. Kinerja rasio solvabilitas Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.5
Perkembangan Rasio Solvabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015-2017

No	Uraian	Rasio Hutang-Asset			Rasio Hutang-Modal		
		Total Hutang	Total Asset	Rasio Hutang terhadap ap Total Asset	Total Hutang	Total Ekuitas	RasioH utang Terhadap ap Modal
a	b	c	d	e = c/d	f	G	h= f/g
1	2015	7,808,441,425.84	1,680,648,927,011.31	0,0046	7,808,441,425.84	1,672,840,485,585.47	0,0047
2	2016	25,276,815,454.15	1,588,977,121,987.12	0,0159	25,276,815,454.15	1,563,700,306,532.97	0,0162
3	2017	12,552,114,311.65	1,776,206,196,232.55	0,0071	12,552,114,311.65	1,763,654,081,920.90	0,0071

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Selama periode 2015-2017 rasio solvabilitas Kabupaten Sinjai menunjukkan kinerja keuangan daerah yang sangat baik. Baik rasio hutang terhadap aset maupun rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan nilai yang sangat kecil. Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam melunasi seluruh hutangnya tergolong sangat tinggi. Meskipun masih tergolong rendah, perlu tetap menjadi perhatian pada kinerja tahun 2016, dimana rasio solvabilitas mengalami peningkatan, baik pada rasio hutang terhadap aset maupun rasio hutang terhadap ekuitas. Sebuah keadaan yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam melunasi hutangnya mengalami sedikit penurunan. Kondisi yang sedikit mengkhawatirkan ini tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Pada tahun 2017, rasio solvabilitas Kabupaten Sinjai kembali membaik, meskipun belum sebaik kondisi keuangan daerah pada tahun 2015. Kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi total kewajibannya kembali meningkat tajam pada tahun 2017, ditandai dengan semakin mengecilnya rasio hutang-aset dan rasio hutang-modal. Kondisi ini menggambarkan semakin sehatnya kondisi keuangan daerah Kabupaten Sinjai pada periode tersebut.

Kinerja rasio aktivitas, analisis rasio ini diperlukan untuk mengukur tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio ini mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam penggunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengalokasian sumber-sumber dananya. Mengukur dua hal, yakni rata-rata umur piutang, dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang diukur dari jumlah hari dalam setahun, yakni 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. Sedangkan rata-rata umur persediaan diukur dari jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran persediaan, dimana perputaran persediaan diperoleh dari

persediaan dibagi dengan rata-rata persediaan per tahun. Kinerja rasio aktivitas Kabupaten Sinjai selama periode 2015-2017, disajikan pada tabel 3.5. berikut ini.

Tabel 3.6
Perkembangan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015-2017

No	Tahun	Rasio Aktivitas						
		Saldo awal piutang	Saldo akhir piutang	Total Piutang	Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Perputaran Piutang	Rata-rata Umur Piutang
a	b	c	d	e = c+d	f = e/2	G	h = g/f	i = 365/h
1	2015	8.809.232.838,08	8.809.232.838,08	17.618.465.676	8.809.232.838,08	985.110.700.579,91	111,83	3,26
2	2016	5.060.132.084,53	5.060.132.084,53	10.120.264.169	5.060.132.084,53	1.122.559.586.106,60	221,84	1,65
3	2017	3.457.651.029,43	3.457.651.029,43	6.915.302.059	3.457.651.029,43	1.076.481.144.522,76	311,33	1,17

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Kinerja rasio aktivitas keuangan daerah Kabupaten Sinjai selama periode 2015-2017 menggambarkan kinerja yang semakin membaik. Berdasarkan perputaran piutang, nampak nilai rata-rata umur piutang bukan hanya rendah, tetapi menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Rata-rata umur piutang menurun dari 3,26 hari pada tahun 2015 menjadi hanya 1,17 hari pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan berkurangnya waktu yang dibutuhkan oleh pihak ketiga untuk melunasi hutangnya pada pemerintah daerah, sehingga menunjukkan semakin menurunnya risiko pemberian piutang kepada pihak ketiga.

Kinerja rasio keuangan daerah Kabupaten Sinjai selama periode 2015-2017 yang sangat baik ini, diharapkan bukan hanya dapat dipertahankan, tetapi akan semakin baik pada periode pengelolaan keuangan daerah yang akan datang. Pemerintah daerah berkewajiban untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangannya, sehingga kondisi fiskal daerah yang sehat dapat terus terjaga dengan baik untuk memastikan pelayanan umum masyarakat dapat dilaksanakan serta keberlangsungan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik mencakup sisi pendapatan daerah maupun yang berkaitan dengan sisi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pada sisi pendapatan daerah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dari yang secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan kebijakan pada sisi belanja daerah, terutama yang terkait

dengan postur anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan kepentingan masyarakat secara luas.

3.2.1. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Kebijakan keuangan daerah pada sisi pendapatan daerah, lebih banyak didorong dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, terutama yang terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditempuh pemerintah daerah. Selain PAD, peningkatan kapasitas fiskal juga dapat didorong melalui peningkatan dana bagi hasil daerah (DBH), baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumberdaya daerah, khususnya pengelolaan sumberdaya alam daerah. Artinya, kebijakan dari sisi pendapatan daerah dapat diupayakan baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. Fokusnya pada dua aspek, yakni aspek yang terkait upaya mengintensifkan pengelolaan pendapatan daerah pada yang sudah berjalan selama ini melalui kebijakan intensifikasi, dan pada saat yang sama melakukan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah baru melalui kebijakan ekstensifikasi.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah, sedang dan akan dijalankan, antara lain: (1) Penguatan *local taxing power*, memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi daerah, menaikkan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah melalui menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah. (2) Optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak dan retribusi daerah, salah satunya melalui perbaikan sistem pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperbaiki porsi dan mengatur kembali pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. (3) optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD dan pengelolaan daerah lainnya. (4) Perluasan akses pemerintah daerah untuk sharing pembiayaan program-program pembangunan daerah yang bersifat strategis, misalnya melalui skim kerjasama pemerintah-swasta (PKS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang.

3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu kebijakan pokok dari sisi pengeluaran dan belanja pemerintah daerah adalah kebijakan alokasi belanja daerah. Kebijakan yang berkaitan dengan konsen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik guna memastikan semua masyarakat memperoleh layanan dasar dan non dasar. Proporsi pembelanjaan pemerintah Kabupaten Sinjai dibandingkan anggaran dari tahun 2016

(n-3) sampai tahun 2018 (n-1) digunakan untuk menentukan rencana belanja daerah dimasa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan. Proporsi realisasi belanja dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Sinjai

No	Uraian	(n-2) 2016	(n-1) 2017	(n-1)**) 2018
		(%)	(%)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	49,83%	48,65%	52,44%
1	Belanja Pegawai	38,13%	33,71%	37,97%
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	2,69%	4,23%	3,98%
5	Belanja Bantuan Sosial	0,04%	0,47%	0,00%
6	Belanja Bagi Hasil	0,13%	0,15%	0,17%
7	Belanja Bantuan Keuangan	8,69%	9,98%	10,17%
8	Belanja Tidak Terduga	0,14%	0,11%	0,15%
B	Belanja Langsung	47,53%	46,53%	47,56%
1	Belanja Pegawai	2,58%	2,67%	0,32%
2	Belanja Barang dan Jasa	16,36%	20,10%	26,14%
3	Belanja Modal	28,59%	23,76%	21,10%

Proporsi belanja daerah terbesar terdapat pada belanja tidak langsung, yaitu pada tahun 2016 proporsi belanja tidak langsung tercatat sebesar 49,83 persen kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 48,65 persen namun pada tahun 2018 melonjak tajam yaitu sebesar 52,44 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Sinjai ke depannya agar mengalokasikan anggaran untuk secara langsung ditujukan untuk meningkatkan layanan publik.

Pada saat yang sama untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dalam jangka panjang. Untuk itu, penting untuk memastikan berapa besar alokasi anggaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Alokasi belanja daerah yang tersisa dari alokasi belanja pemerintah daerah untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur. Semakin besar alokasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, maka semakin kecil alokasi belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik dan kegiatan pembangunan daerah.

Gambaran kinerja kebijakan alokasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sinjai selama periode 2016-2018, disajikan pada tabel 3.7. berikut ini.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2018

No	Uraian	(n-3) 2016	(n-2)**) 2017	(n-1)**) 2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	459,693,281,130	395,945,630,440	627.936.136.394
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	345,573,204,729	303,228,628,159	314.596.157.993
2	Belanja Tambahan Penghasilan **)	111,728,810,779	88,821,016,995	132.093.709.302
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,801,489,642	3,324,453,920	6.170.058.576
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah **)	589,775,980	571,531,366	978.149.691
B	Belanja Langsung	403,776,632,079	344,254,256,619	535.641.947.346
1	Belanja Honorarium PNS**)	23,921,768,800	23,847,132,000	4.958.275.000
2	Belanja Uang Lembur**)			
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	4,280,034,000	4,770,329,053	
5	Belanja premi asuransi kesehatan	10,616,570,000	14,834,954,000	14.927.536.000
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	18,492,644,508	19,904,893,050	19.529.696.000
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	1,100,385,000	993,440,500	361.810.000
8	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu*)	770,830,000	771,587,500	642.945.000
9	Belanja pakaian dinas*)			888.304.000
10	Belanja perjalanan pindah tugas			
11	Belanja pemulangan pegawai			
12	Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	344,594,399,771	279,131,920,516	245.657.094.502
	Total	863,469,913,209	740,199,887,059	1.163.578.083.740

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Postur anggaran untuk belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2016 kebutuhan pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp 863,5 milyar dari Rp 1,21 trilyun total pengeluaran daerah (belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah). Alokasi tersebut melonjak drastis menjadi Rp 1.163 trilyun pada tahun 2018. Kinerja tersebut direncanakan akan membaik pada tahun 2019 yang ditujukan untuk pelayanan umum yang secara langsung diterima oleh masyarakat, baik melalui urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar maupun melalui urusan pilihan. Melalui kebijakan ini diharapkan akan terwujud indikator-indikator capaian pembangunan daerah Kabupaten Sinjai yang semakin baik ke depan.

3.2.3. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Adapun gambaran analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2018 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2018

No	Uraian	(n-3) 2016	(n-2) 2017	(n-1) 2018	Rata-rata Pertum buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	459.693.281.130,00	395.945.630.440,00	627.936.136.394,00	2,37
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	345.573.204.729,00	303.228.628.159,00	314.596.157.993,00	-12,16
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.801.489.642,00	3.324.453.920,00	6.170.058.576,00	68,87
3	Belanja Bunga	0,00		0,00	
4	Belanja Bagi Hasil	1.609.212.000,00	1.709.170.382,00	1.932.781.061,00	11,63
B	Pembiayaan Pengeluaran	5.156.110.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	- 141,14
1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	
2	Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.156.110.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	- 141,14
	TOTAL (A+B)	464.849.391.130,00	397.945.630.440,00	630.936.136.394,00	1,65

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran pembiayaan yang mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi dengan persentase sebesar 141,14 persen sementara Belanja Gaji dan Tunjangan yang cenderung menurun dengan persentase rata-rata pertumbuhan -12,16 persen. Namun jika melihat trend pengalokasian belanja selama 3 (tiga) tahun terakhir atau dalam kurun waktu 2016-2018 alokasi Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH yang melonjak drastis, dimana pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.324 Milyar namun melonjak drastis menjadi Rp. 6.170 Milyar pada tahun 2018 dengan pertumbuhan 68,87 persen. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

3.2.4. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis Pembiayaan Daerah tahun anggaran berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel yang ditampilkan berikut ini.

Tabel 3.10
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2018

No	Uraian	(-3) 2016	(n-2) 2017	(n-1) 2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	90.611.040.515,05	47.100.024.263,81	49.352.260.678,43
	Dikurangi			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	90.611.040.515,05	47.100.024.263,81	49.352.260.678,43

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Kinerja kebijakan pembiayaan daerah yang berpihak pada masyarakat dapat dicermati pada kebijakan keuangan daerah yang bersifat ekspansif. Kebijakan pembiayaan yang bersifat ekspansif, cenderung untuk mengalokasikan belanja daerahnya yang lebih besar dari kemampuan pendapatannya, dengan harapan untuk memenuhi ekspektasi kebutuhan pelayanan umum dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat luas. Perspektif ini akan menempatkan pembiayaan daerah selalu dalam posisi defisit, sehingga pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.

Tabel 3.11
Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,122,559,586,106.60	1,076,481,144,522.76	1,118,578,083,740.00
	Dikurangi realisasi			
2	Belanja Daerah	1,067,255,085,539.00	1,118,056,638,912.00	1,163,578,083,740.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,156,110,000	0	3,000,000,000.00
	Defisit rill	50.148.390.567.60	-41.575.494.389,24	-48.000.000.000,00

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Setelah mencapai surplus pada tahun 2016, keuangan daerah Kabupaten Sinjai mengalami pada tahun berikutnya dan direncanakan akan defisit lagi pada tahun 2018. Defisit riil anggaran ini pada tahun 2017 meningkat tajam hingga mencapai Rp 41,6 milyar, setelah sebelumnya pada tahun 2016 mencapai surplus sebesar Rp 50,2 milyar. Defisit ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 48,0 milyar pada akhir periode 2018 yang akan datang. Fakta ini mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah daerah dalam upaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, baik target yang bersifat makro daerah maupun yang bersifat mikro sektoral dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Defisit anggaran ini pada dasarnya tidak akan mengkhawatirkan bagi pemerintah daerah, dan tidak membebani masyarakat karena sepenuhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), bukan berasal dari sumber-sumber penerimaan yang membebani keuangan daerah dan masyarakat, seperti yang berupa hutang. Seperti digambarkan pada komposisi penutup defisit riil anggaran berikut ini.

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisi Riil Anggaran Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2018

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
	Defisit Riil	50.148.390.567,60	-41.575.494.389,24	-48.000.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	293%	218%	98%
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
7	Silpa tahun anggaran berkenaan	181%	113%	103%

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Selama periode 2016-2018, komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Sinjai sepenuhnya berasal dari SiLPA. Tidak ada penerimaan pembiayaan yang bersifat membebani keuangan daerah dan masyarakat, seperti penerimaan pinjaman daerah, sehingga tidak akan mengkhawatirkan adanya risiko keuangan daerah yang kurang sehat. Penting untuk dioptimalkan peluang untuk penerimaan pembiayaan yang berasal sumber-sumber lainnya, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana tidak membebani keuangan daerah, tapi justru karena tidak membebani keuangan daerah dan masyarakat sehingga berpotensi menciptakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan secara berkesinambungan.

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sinjai
Tahun 2015-2017

No	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**)		Rata-rata pertumbuhan*)
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
	Jumlah SILPA	146,849,318,286.45		90,611,040,515.05		47,100,024,263.81		
1	Pelampauan penerimaan PAD	981,624,602	0.67	12,031,490,294.18	13.28	6,336,122,845.80	13.45	18.43
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan							
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	315,435,056.62	0.21	10,961,188,629.50	12.10	16,136,901,086.80	34.26	23.73
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	60,017,187,937.16	40.87	32,555,010,985.22	35.93	51,390,999,165.45	109.11	113.17

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri
Keterangan*) Pelampauan Penerimaan dana perimbangan, Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, Kegiatan lanjutan

Optimisme tersebut semakin dipertegas dengan mencermati komponen-komponen pembentuk SiLPA yang pada dasarnya merupakan langkah-langkah konkrit penyehatan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan/pendapatan maupun dari sisi pengeluaran/belanja daerah. Kinerja kebijakan keuangan daerah yang mendorong perolehan SiLPA Kabupaten Sinjai dalam dua terakhir, ditunjukkan pada tabel 3.9. Pada tahun 2016, pembentukan SiLPA lebih dominan didorong oleh langkah-langkah penghematan yang dilakukan pemerintah daerah, dan capaian-capaian lainnya, seperti adanya pelampauan penerimaan dana perimbangan dan adanya kegiatan lanjutan. Selebihnya berupa pelampauan penerimaan PAD dan pelampauan lain-lain pendapatan daerah. Kinerja tersebut berlanjut pada tahun berikutnya, bahkan SiLPA hamper sepenuhnya diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sebagian yang lain diperoleh dari pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan daerah. Diharapkan untuk 2018 hingga akhir tahun anggaran, kinerja pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Sinjai ini tetap menunjukkan kondisi keuangan daerah yang sehat, tidak membebani keuangan daerah dan masyarakat, sehingga dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkesinambungan.

Berikut ini ditampilkan table analisis realisasi Sisa Lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan.

Tabel 3.11
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Sinjai

No	Uraian	(-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	146,849,318,286.45	90,611,040,515.05	47,100,024,263.81
	Dikurangi			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	90.611.040.515,05	47.100.024.263,81	49.352.260.678,43

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan

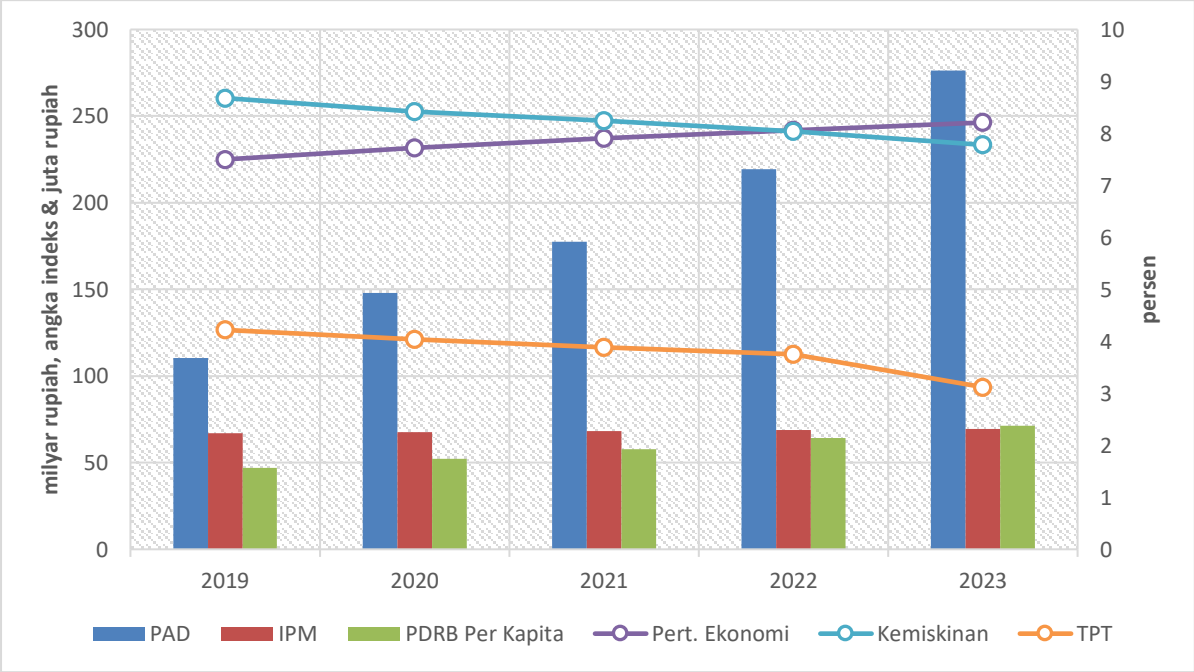
Asumsi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuka peluang sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang secara konsisten, akan mendorong kemampuan daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi bagi masyarakat. Sehingga melalui capaian-capaian indikator-indikator makro ekonomi daerah tersebut, mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Sinjai untuk periode 2019-2023 ke depan.

Pendapatan daerah untuk tiga tahun yang akan datang, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tercipta dari kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai yang semakin membaik. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproyeksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain menciptakan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang ditetapkan merupakan basis utama pendapatan daerah, khususnya bersumber dari PAD. Proyeksi pendapatan daerah yang bertumbuh lebih cepat dari pertumbuhan belanja daerah merupakan optimisme dalam capaian makro ekonomi dan sosial daerah yang berpotensi dalam meningkatkan PAD untuk lima tahun ke depan.

Gambaran hubungan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan asumsi makro ekonomi dan sosial daerah untuk lima tahun yang akan datang diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.5.
Hasil Proyeksi Korelasi Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023



Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Gambar 3.5. menunjukkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam lima tahun ke depan akan memberi gambaran aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sinjai diharapkan terus bergairah, baik dari sisi *supply* maupun dari sisi *demand*. Peningkatan produksi daerah bukan hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga diharapkan meningkatkan PDRB per kapita secara signifikan, dari hanya sebesar Rp 46,94 juta pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 71,26 juta pada tahun 2023 yang akan datang. Pada saat yang sama dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana yang diharapkan tersebut, akan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga akan mendorong peningkatan nilai IPM yang signifikan dalam lima tahun ke depan. Diperkirakan meningkat dari hanya 67,0 poin pada tahun 2019 menjadi 69,46 pada tahun 2023. Dengan kualitas yang semakin baik tersebut, maka diharapkan tingkat pengangguran terbuka akan secara konsisten mengalami penurunan, sehingga tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan dari 8,68 persen pada tahun 2019 menjadi hanya 7,78 persen pada tahun 2023.

Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, PDRB per kapita yang meningkat tajam, IPM yang konsisten mengalami peningkatan, tingkat pengangguran yang terus menurun, serta semakin berkurangnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan gambaran yang dikehendaki semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Sinjai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya meningkatnya kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, tetapi juga kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang akan mendorong peningkatan bagi hasil pajak dan non pajak di Kabupaten Sinjai untuk lima tahun yang akan datang.

Tantangan bagi pemerintah daerah dan pelaku ekonomi daerah di Kabupaten Sinjai adalah bagaimana mempertahankan dan mewujudkan asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut tidak cukup kuat dalam mendorong peningkatan PAD dan pendapatan daerah secara umum jika tidak disertai dengan kebijakan keuangan daerah yang tepat dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban fiskalnya. Pemerintah daerah harus berupaya untuk menghadirkan kebijakan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Diperlukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang baik, mampu mengelola segenap potensi PAD yang berkembang dalam kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut hendaknya disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah beserta dengan sumber-sumber pendapatan PAD lainnya.

Selengkapnya hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023, dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12.
 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai
 Tahun 2019-2023 (Rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	1.224.843.001.695	1.344.877.615.861	1.479.365.377.448	1.686.476.530.290	1.973.177.540.440
1.1	Pendapatan Asli Daerah	110.235.870.153	147.936.537.745	177.523.845.294	219.241.948.938	276.244.855.662
1.1.1	Pajak Daerah	16.884.526.783	22.659.034.942	27.190.841.931	33.580.689.784	42.311.669.128
1.1.2	Retribusi Daerah	8.271.923.275	11.100.921.035	13.321.105.242	16.451.564.974	20.728.971.867
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.116.974.069	9.550.979.200	11.461.175.040	14.154.551.175	17.834.734.480
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	77.962.446.026	104.625.602.567	125.550.723.081	155.055.143.005	195.369.480.186
1.2	Dana Perimbangan	992.122.831.373	1.102.799.645.006	1.198.285.955.733	1.349.181.224.232	1.558.810.256.947
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	20.402.580.253	22.678.601.428	24.642.236.430	27.745.332.869	32.056.263.963
1.2.2	Dana Alokasi Umum	695.796.052.550	773.415.967.745	840.382.472.270	946.208.413.222	1.093.225.545.427
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	265.631.175.747	295.263.809.130	320.829.334.067	361.230.065.024	417.356.186.377
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	122.484.300.170	94.141.433.110	103.555.576.421	118.053.357.120	138.122.427.831
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.637.951.190	8.944.929.285	9.839.422.214	11.216.941.323	13.123.821.348
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.437.405.133	21.088.389.585	23.197.228.544	26.444.840.540	30.940.463.432

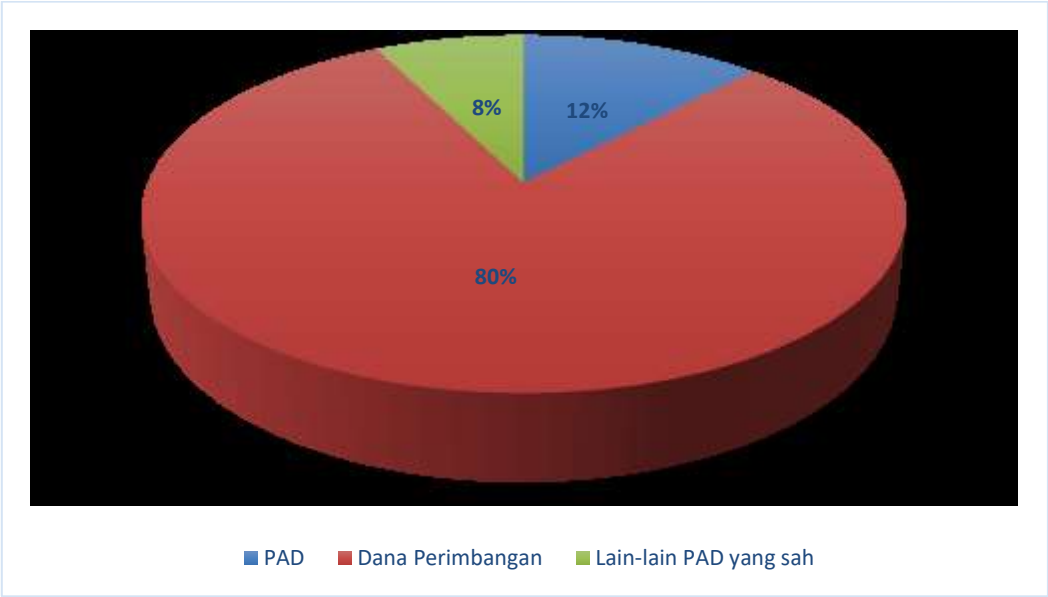
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	67.970.414.468	52.242.060.560	57.466.266.616	65.511.543.942	76.648.506.413
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.907.903.842	3.003.614.893	3.303.976.382	3.766.533.076	4.406.843.698
1.3.5	Pendapatan Lainnya	11.530.625.536	8.862.438.787	9.748.682.666	11.113.498.239	13.002.792.940
2	BELANJA DAERAH	1.292.735.251.035	1.438.814.334.402	1.604.277.982.858	1.791.978.506.853	2.005.223.949.168
2.1	Belanja Tidak Langsung	672.222.330.538	733.795.310.545	802.138.991.429	878.069.468.358	962.507.495.601
2.1.1	Belanja Pegawai	537.538.636.794	586.775.108.468	641.425.731.316	702.143.091.042	769.663.463.389
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	35.510.334.052	38.762.944.073	42.373.218.276	46.384.267.118	50.844.729.703
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.618.899.246	1.767.184.190	1.931.774.875	2.114.636.684	2.317.987.053
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	1.308.098.902	1.427.915.731	1.560.907.882	1.708.663.422	1.872.974.076
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	93.476.931.528	102.039.058.929	111.542.696.771	122.101.328.447	133.842.990.889
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.768.430.016	3.023.099.154	3.304.662.310	3.617.481.645	3.965.350.492
2.2	Belanja Langsung	620.512.920.497	705.019.023.857	802.138.991.429	913.909.038.495	1.042.716.453.568
2.2.1	Belanja Pegawai	32.507.475.924	36.934.587.802	42.022.515.713	47.877.933.053	54.625.905.264

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	277.235.880.892	314.991.942.421	358.383.689.591	408.320.872.899	465.870.097.102
2.2.3	Belanja Modal	310.769.563.681	353.092.493.635	401.732.786.125	457.710.232.544	522.220.451.201
3	PEMBIAYAAN	(67.892.249.340)	(93.936.718.541)	(124.912.605.411)	(105.501.976.563)	(32.046.408.729)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	86.975.000.000	250.000.000.000	149.000.000.000	133.000.000.000	46.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	19.082.750.660	156.063.281.459	24.087.394.589	27.498.023.437	13.953.591.271

Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Secara struktural, postur pendapatan daerah selama lima tahun ke depan, nampaknya masih didominasi sumber pendapatan dari dana perimbangan, tetapi secara bertahap diharapkan kontribusi PAD juga akan semakin meningkat, seperti nampak pada gambar berikut ini.

Gambar 3.6.
Hasil Proyeksi Postur Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, Selama Periode 2019-2023 (persen)

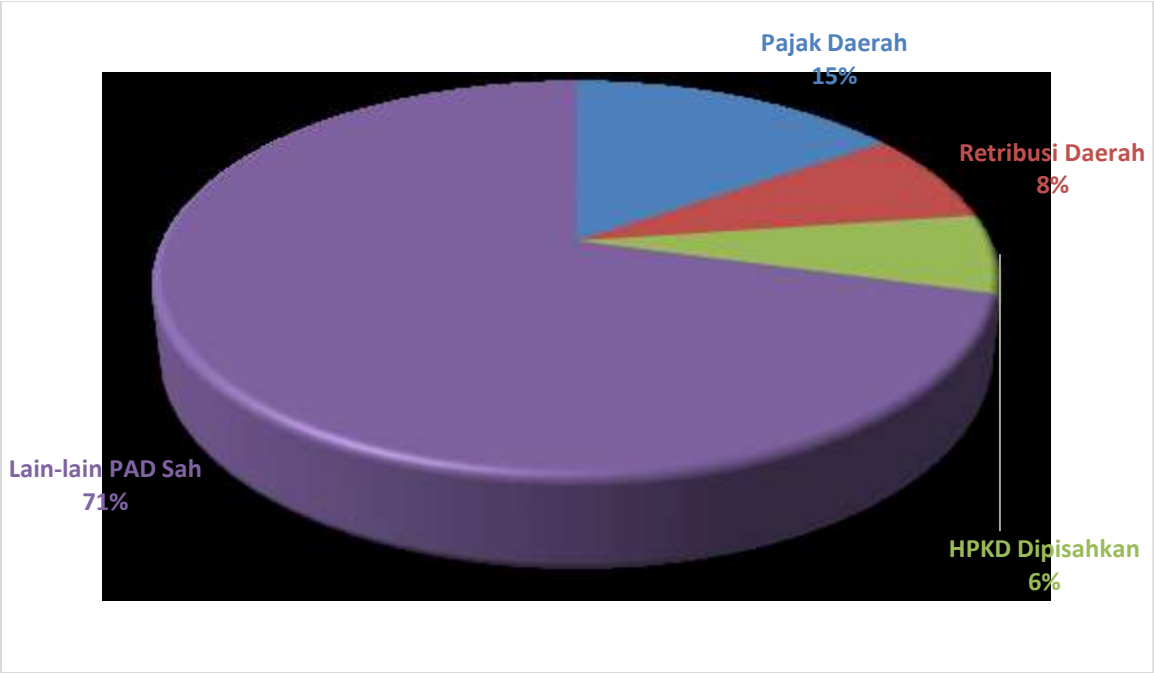


Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Hingga tahun 2023 yang akan datang, tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Sinjai masih akan tinggi. Ditandai dengan tetap tingginya pendapatan daerah yang bersumber dari luar daerah. Selama periode 2019-2023, dana perimbangan diperkirakan tetap menyumbang hingga 80,0 persen terhadap total pendapatan daerah, dengan harapan kebijakan keuangan negara juga tetap konsisten dalam mendorong peningkatan pendapatan negara, sehingga bagi hasil ke daerah juga tetap memadai untuk mendukung operasional pemerintahan daerah. Sedangkan pendapatan dari PAD mencapai 12,0 persen dari total pendapatan daerah selama periode ini. Kontribusi PAD ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Mengingat kontribusi PAD diperkirakan akan meningkat dari hanya sekitar 7,0 persen selama periode sebelumnya dan diharapkan meningkat hingga 12,0 persen selama periode pembangunan 2019-2023 yang akan datang.

Harapan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah secara bertahap ini, terutama dibebankan pada sumber PAD dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan berkontribusi minimal 23,0 persen hingga tahun 2023 yang akan datang. Pada saat yang sama kinerja sumber PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah (HPKD) yang dipisahkan diharapkan juga akan semakin baik, terutama inovasi dalam pengelolaan BUMD, membentuk BUMD baru dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah (Perumda) serta penyertaan modal pada BUMD/BUMN/BUMS yang mampu menghasilkan deviden dan menjadi sumber PAD yang berkesinambungan bagi Kabupaten Sinjai ke depan. Perkiraan postur PAD Kabupaten Sinjai untuk periode 2019-2023 yang akan datang, diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.7.
Hasil Proyeksi Postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai,
Selama Periode 2019-2023 (persen)

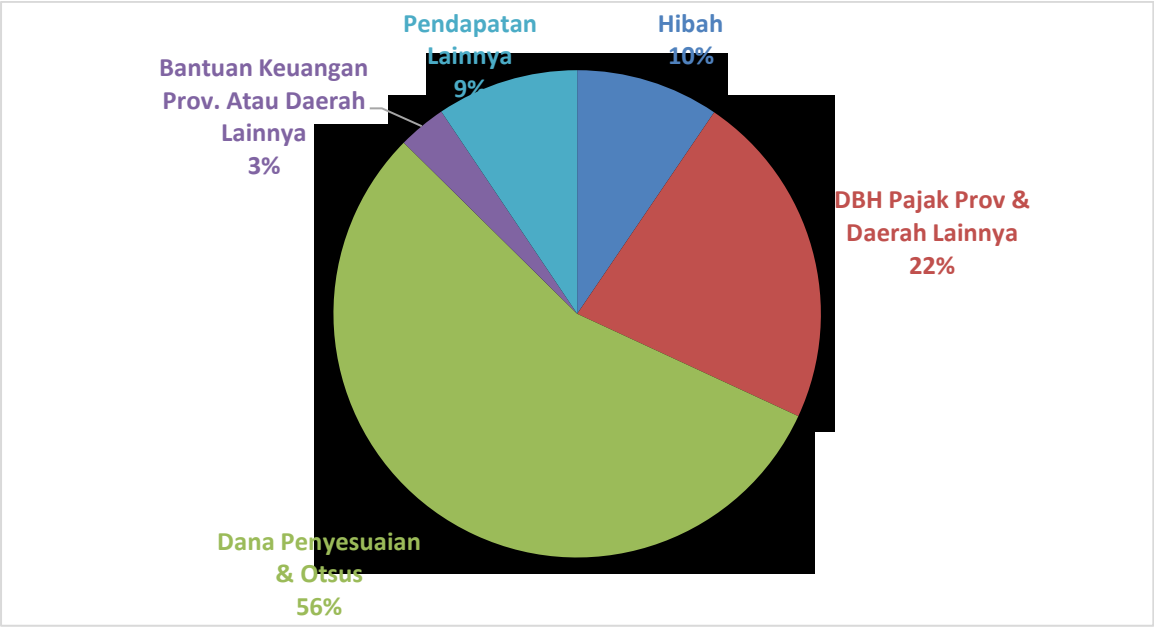


Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Selain itu, sumber PAD dari lain-lain PAD yang sah juga diharapkan tetap berkinerja baik untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel. Diharapkan dari sumber PAD ini akan semakin memperbaiki keleluasaan fiskal daerah Kabupaten Sinjai untuk periode pembangunan yang akan datang. Dengan demikian diharapkan sumber pendapatan dari DBH pajak provinsi dan daerah lainnya, serta hibah dan pendapatan lainnya akan lebih mendominasi. Ketiga komponen ini diharapkan tetap berkontribusi hingga mencapai 41,0 persen dari total lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gambaran postur lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Sinjai untuk lima tahun yang akan datang, diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8.
Proyeksi Postur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sinjai
Periode 2019-2023 (Persen)



Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Sumber pendapatan daerah dari bantuan keuangan provinsi atau daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan otsus juga tetap tinggi. Pada dua sumber ini, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan pada pengelolaannya karena sebetulnya sudah dialokasi pada peruntukan yang jelas, sehingga hanya masuk dalam APBD sebagai pendapatan daerah dan sudah teralokasikan pada peruntukan program pembangunan daerah yang sudah pasti. Meskipun demikian, sumber ini tetap diharapkan memberi kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah agar tidak mengganggu sumber-sumber pendapatan daerah lainnya untuk alokasi belanja dan pengeluaran pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk periode 2019-2023 yang akan datang.

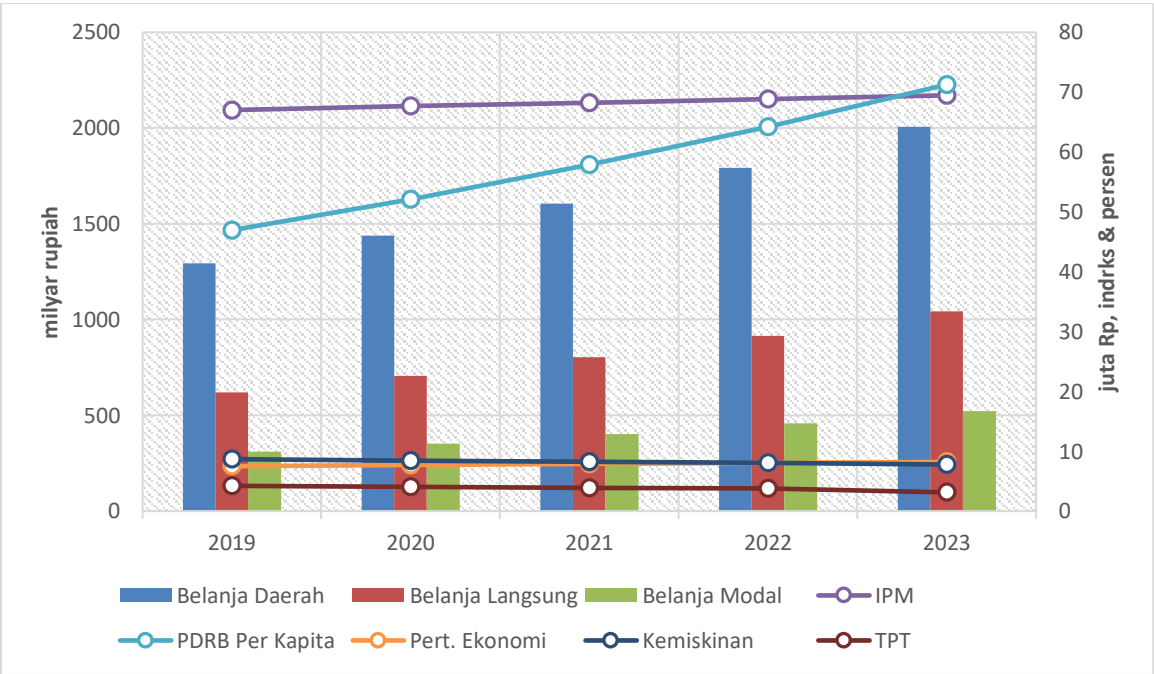
3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi kebutuhan belanja daerah untuk lima tahun yang akan datang, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan. Target tren pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

peningkatan PDRB per kapita yang cukup besar, peningkatan IPM yang konsisten hingga setara dengan provinsi, serta penurunan tingkat kemiskinan yang tajam dan tingkat pengangguran yang kembali pada posisi terendah selama periode pembangunan sebelumnya, akan mendorong kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang juga meningkat secara konsisten selama periode yang sama.

Gambaran hubungan kebutuhan alokasi belanja daerah untuk pencapaian target-target makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Sinjai untuk periode 2019-2023 yang akan datang, diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.9.
Gambaran Korelasi Target Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah dengan Kebutuhan Alokasi Total Belanja Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Modal Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023



Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Target-target tersebut berimplikasi pada alokasi belanja langsung semakin besar, bukan hanya ditujukan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk menjamin dukungan terhadap akselerasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan. Implikasinya, proyeksi alokasi kebutuhan belanja langsung secara bertahap akan lebih besar daripada alokasi belanja tidak langsung. Hal ini mengindikasikan dukungan untuk pelayanan publik serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.

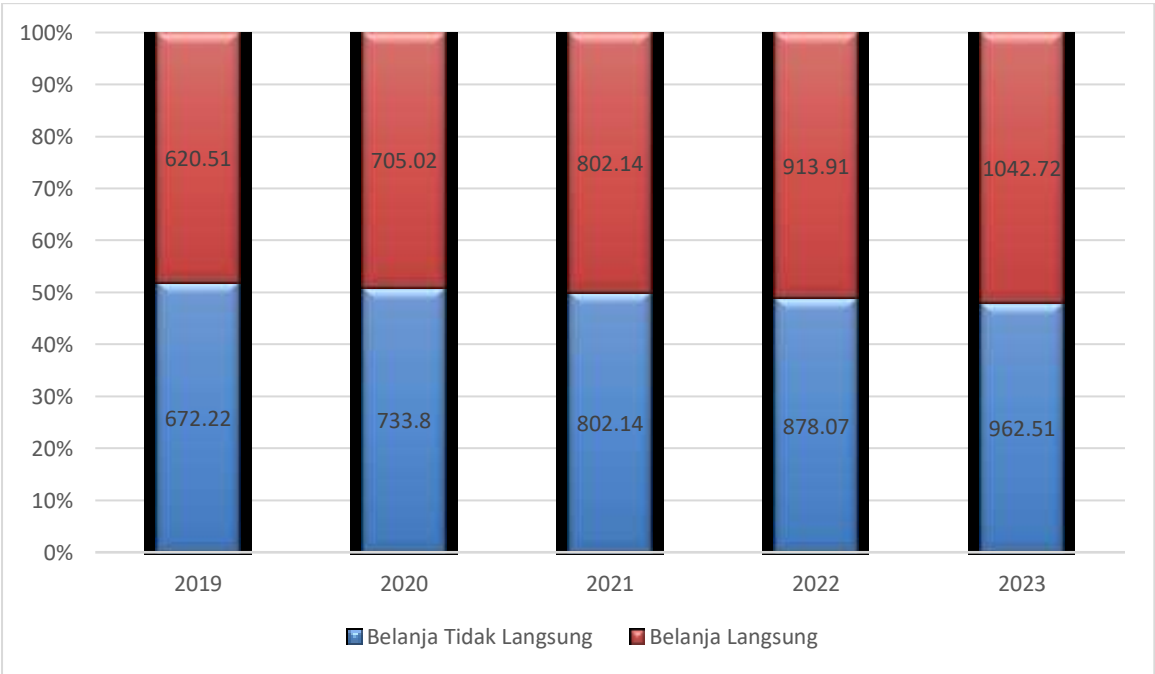
Pada gambar 3.9. tersebut, nampak bahwa proyeksi alokasi belanja daerah, alokasi belanja langsung, dan alokasi belanja modal daerah yang meningkat pesat diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja indikator makro ekonomi dan sosial daerah yang semakin baik. Hanya saja, perlu dipahami bahwa kontribusi sektor keuangan publik daerah ini bukan sepenuhnya sebagai penentu dalam pencapaian kinerja makro ekonomi dan sosial tersebut. Banyak faktor penentu lainnya yang bersinergi dalam pencapaian kinerja makro dan sosial daerah ini. Dalam sektor pemerintah, selain APBD Kabupaten Sinjai, juga diharapkan kontribusi yang tidak sedikit dari APBD Provinsi Sulsel dan APBN melalui implementasi program dan kegiatan pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten Sinjai, setidaknya untuk periode pembangunan 2019-2023 yang akan datang. Selain itu, kontribusi sektor swasta dan masyarakat tidak kalah pentingnya. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, investasi sektor swasta yang tetap kondusif, bahkan permintaan ekspor yang juga diharapkan semakin membaik akan menjadi faktor utama dalam peningkatan pencapaian makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Sinjai ke depan. Artinya, keuangan sektor publik, khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai diharapkan hanya sebagai pemicu dalam menggerakkan dan menciptakan iklim kegiatan ekonomi dan sosial yang semakin baik menuju pertumbuhan daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Secara keseluruhan alokasi belanja daerah bertumbuh dari hanya Rp 1.292,74 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 2.005,22 pada tahun 2023. Alokasi belanja langsung meningkat dari hanya Rp 620,51 pada tahun 2019 menjadi Rp 1.042,72 milyar pada tahun 2023. Secara bertahap akan menggeser alokasi belanja tidak langsung yang meskipun meningkat tetapi akan mengalami penurunan peran secara bertahap. Meningkat dari Rp 672,22 pada tahun 2019 menjadi Rp 962,51 pada tahun 2023. Proporsi belanja ini tergolong cukup ideal bagi target tingkat kemajuan daerah dan perwujudan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik ke depan.

Kebutuhan alokasi belanja daerah yang semakin besar tersebut mendorong pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, alokasi belanja daerah bukan hanya dituntut untuk bertumbuh secara konsisten, tetapi juga penting untuk diperhatikan proporsinya antara alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang semakin berimbang, atau bahkan diharapkan menunjukkan orientasi alokasi belanja langsung yang lebih besar secara bertahap ke depan.

Gambaran pengelolaan alokasi belanja daerah yang diharapkan semakin berimbang untuk lima tahun yang akan datang, merupakan upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran pentingnya mengedepankan orientasi pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Membangun kesadaran bahwa alokasi belanja daerah harus menjamin nilai kemamfaatan dari program pembangunan daerah diterima langsung oleh masyarakat, sehingga alokasi belanja daerah harus lebih diorientasikan pada alokasi belanja langsung, khususnya untuk alokasi belanja modal serta belanja barang dan jasa, sebagaimana diilustrasikan pada dua gambar berikut ini.

Gambar 3.10.
Proyeksi Postur Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023



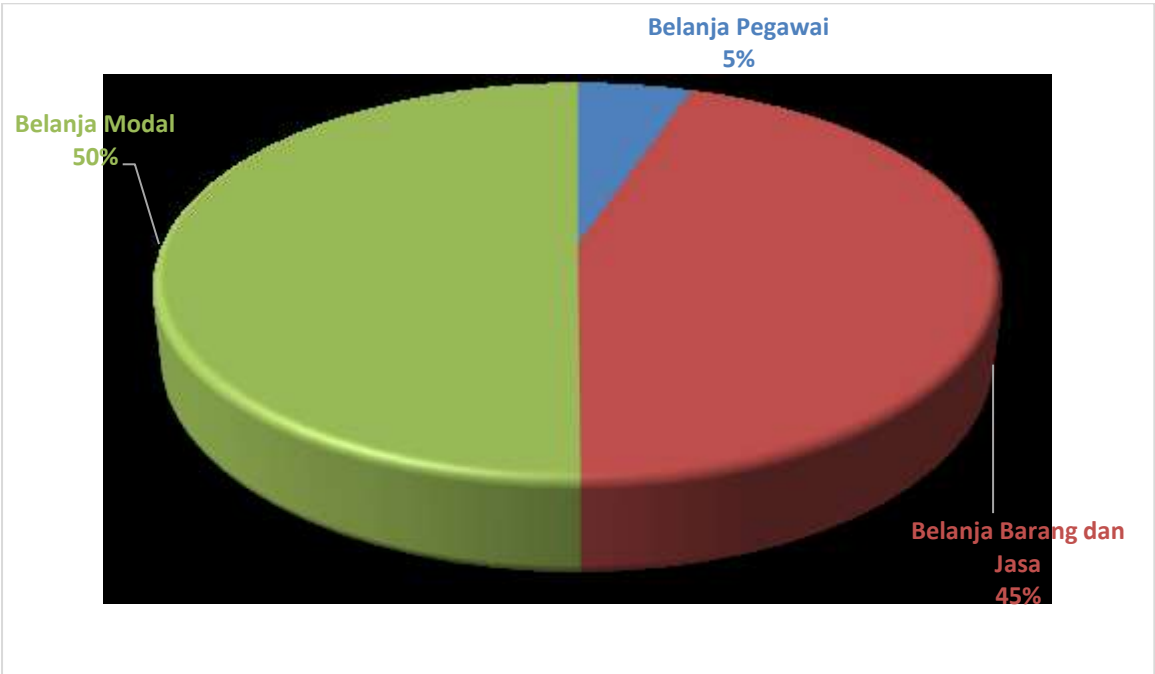
Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Alokasi belanja daerah diproyeksikan akan berimbang antara alokasi belanja tidak langsung dengan alokasi belanja langsung pada tahun 2021 yang akan datang. Meskipun alokasi keduanya nampak meningkat, tetapi seiring dengan kebutuhan alokasi belanja untuk memenuhi target-target makro ekonomi dan sosial daerah yang juga semakin meningkat, maka secara bertahap alokasi belanja langsung akan lebih besar daripada alokasi belanja tidak langsung hingga akhir periode 2019-2023. Nampak pada tahun 2019-2020 alokasi belanja tidak langsung masih lebih besar, sedangkan pada periode 2022-2023 alokasi belanja langsung akan lebih besar dari alokasi belanja tidak langsung.

Alokasi belanja langsung tersebut, bukan hanya dituntut untuk sekedar meningkat tajam dan lebih besar dari alokasi belanja tidak langsung, tetapi juga diharapkan mampu menunjukkan proporsi alokasi yang berorientasi pada alokasi belanja modal serta alokasi belanja barang dan untuk menjamin terciptanya dukungan pada tumbuhnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Sinjai. Melalui alokasi belanja barang dan jasa, diharapkan akan mendorong permintaan barang dan jasa publik yang berpotensi dalam mendorong aktivitas ekonomi dan social masyarakat. Terpenting, melalui alokasi belanja modal, bukan hanya sekedar mendorong permintaan akan barang-barang modal publik, tetapi juga akan berdampak sebagai pemicu pada tumbuhnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Bukan hanya pada keterlibatan masyarakat secara langsung pada penyerapan tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong tumbuhnya investasi industri rumah tangga dan perusahaan yang akan berdampak besar pada pencapaian target-target makro ekonomi dan sosial yang semakin baik.

Gambaran proyeksi postur alokasi belanja langsung daerah Kabupaten Sinjai untuk periode pembangunan 2019-2023, diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.11.
Proyeksi Postur Alokasi Belanja Langsung Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023



Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

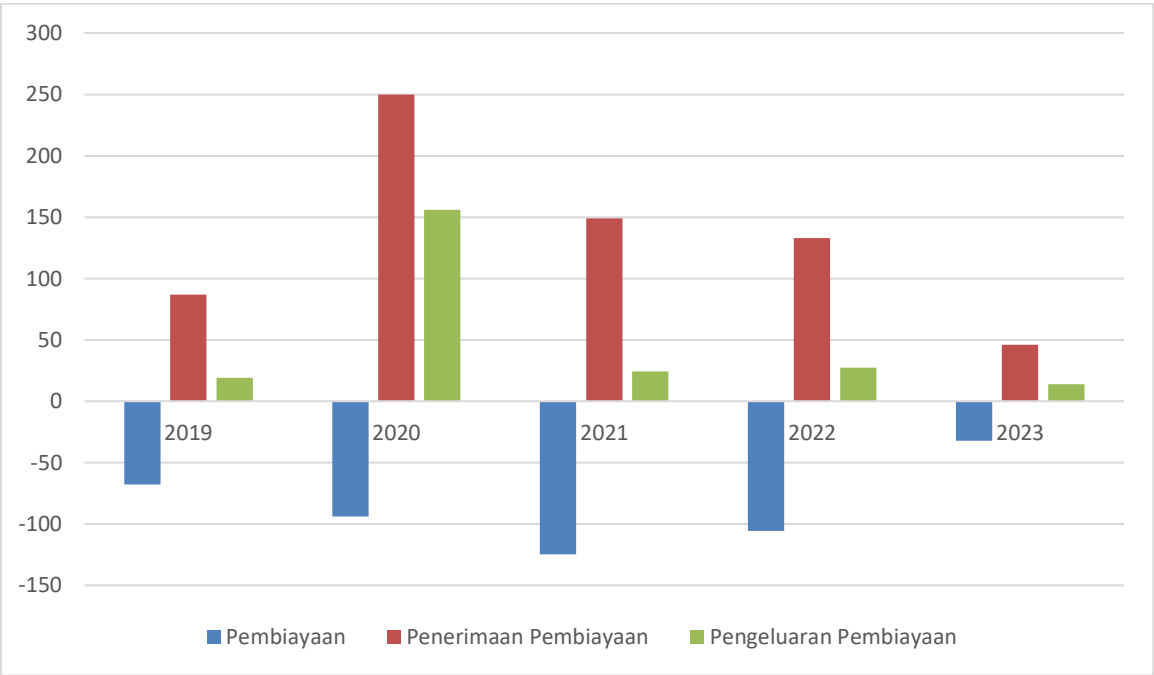
Selama lima tahun, hingga akhir periode pada tahun 2023, postur alokasi belanja langsung daerah akan menunjukkan proporsi yang cukup ideal.

Dialokasikan minimal 50,0 persen untuk belanja modal dari total lebih dari Rp 4,08 triliun alokasi belanja langsung selama periode 2019-2023. Proyeksi alokasi belanja modal ini adalah hasil estimasi minimum, sehingga diharapkan bisa lebih besar dari nilai tersebut untuk menjamin pencapaian target-target makro ekonomi dan sosial daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai yang semakin baik dan setara dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Untuk itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih akseleratif dan ekspansif yang bukan hanya akan memperbesar alokasi belanja modal, tetapi juga mendorong alokasi pengeluaran pembiayaan yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat yang potensial mewujudkan pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

3.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Hasil proyeksi pembiayaan daerah, menunjukkan upaya yang semakin ekspansif dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai hingga akhir periode RPJMD tahun 2023 yang akan datang. Hal ini terlihat pada kebijakan pembiayaan defisit hingga periode pembangunan tahun 2023. Defisit ini, bukan hanya tetap aman sebagaimana yang dipersyaratkan perundangan di bawah 3 persen dari PDRB, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang menurun hingga akhir periode 2023. Menurun sebesar Rp 124,9 milyar pada tahun 2021 menjadi hanya Rp 32,1 milyar pada tahun 2023. Menggambarkan kinerja keuangan daerah yang diproyeksikan semakin, alokasi pengeluaran dan belanja daerah bukan hanya untuk sekedar implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah, tetapi juga mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selengkapnya postur pembiayaan defisit Kabupaten Sinjai selama periode 2019-2023 diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.12.
Proyeksi Postur Pembiayaan Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023



Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Defisit pembiayaan ini diperlukan guna memastikan semua target-target capaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan tercapai pada akhir periode pemerintahan dan pembangunan 2023. Upaya untuk menjamin capaian kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan hingga akhir periode dan memasuki periode berikutnya. Sumber penerimaan defisit, bukan hanya diharapkan dari dalam daerah, tetapi tidak tertutup kemungkinan diperoleh dari luar daerah, misalnya melalui mekanisme hutang daerah. Syaratnya, harus mampu dikelola dengan baik, agar tidak membebani masyarakat. Untuk itu harus dapat dialokasikan pada program-program pembangunan yang bersifat produktif. Bukan hanya yang bersifat *cost recovery*, tetapi juga program-program pembangunan daerah yang berpola *income generation*. Sehingga kebijakan defisit hingga akhir periode pemerintahan daerah 2023 ini, menunjukkan langkah nyata pemerintah daerah untuk memperbesar belanja daerah yang ditujukan untuk pelayanan publik dan kesinambungan kegiatan ekonomi masyarakat pada periode pembangunan berikutnya. Adapun proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019 hingga tahun 2023 yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.13
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	47.100.024.263,81		86.975.000.000	250.000.000.000	149.000.000.000	133.000.000.000	46.000.000.000
	Dikurangi							
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		19.082.750.660	156.063.281.459	24.087.394.589	27.498.023.437	13.953.591.271
3	Kegiatan lanjutan							
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	47.100.024.263,81		67.892.249.340	93.936.718.541	124.912.605.411	105.501.976.563	32.046.408.729

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah, baik berupa program pembangunan daerah maupun berupa program perangkat daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan daerah dan kewajiban daerah untuk belanja tidak langsung dan pengeluaran wajib daerah. Peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih besar dari pertumbuhan belanja daerah, terutama untuk alokasi belanja tidak langsung yang meskipun diproyeksikan meningkat, tetapi cenderung melambat dengan proporsi yang semakin menurun untuk lima tahun yang akan datang.

Untuk lima tahun, selama periode 2019-2023, kapasitas riil kemampuan daerah Kabupaten Sinjai diproyeksikan meningkat tajam. Meningkat dari hanya Rp 620,51 milyar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 1,04 trilyun pada tahun 2023. Inilah gambaran kemampuan keuangan daerah untuk dalam mendanai kebutuhan alokasi belanja langsung, terutama untuk alokasi belanja modal serta alokasi belanja barang dan jasa publik yang berpotensi nilai kemanfaatannya diterima langsung oleh masyarakat Kabupaten Sinjai.

Selengkapnya mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan komponen-komponen pembentukannya untuk Kabupaten Sinjai selama periode 2019-2023 yang akan datang, disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019-2023 (Rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	1.224.843.001.695	1.344.877.615.861	1.479.365.377.448	1.686.476.530.290	1.973.177.540.440
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan atau Penerimaan Hutang	86.975.000.000	250.000.000.000	149.000.000.000	133.000.000.000	46.000.000.000
Total Penerimaan		1.311.818.001.695	1.594.877.615.861	1.628.365.377.448	1.819.476.530.290	2.019.177.540.440
	Dikurangi					
4	Belanja Tidak Langsung	672.222.330.538	733.795.310.545	802.138.991.429	878.069.468.358	962.507.495.601
5	Pengeluaran Pembiayaan	19.082.750.660	156.063.281.459	24.087.394.589	27.498.023.437	13.953.591.271
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah		620.512.920.497	705.019.023.857	802.138.991.429	913.909.038.495	1.042.716.453.568

Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Diperkirakan dengan kebijakan pembiayaan defisit yang akan ditempuh akan mendorong upaya nyata pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang bersumber dari dalam daerah maupun yang bersumber dari luar daerah. Kebijakan tersebut diharapkan akan mendatangkan penerimaan daerah untuk alokasi pengeluaran pembiayaan daerah setiap tahunnya. Artinya, selain berupa pendapatan daerah, pemerintah daerah juga akan memperoleh sumber penerimaan dari penerimaan pembiayaan, sehingga diharapkan total penerimaan daerah akan meningkat dari hanya Rp 1,31 trilyun pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 2,02 trilyun pada tahun 2023. Melalui alokasi belanja tidak langsung yang cenderung melambat dibandingkan alokasi belanja langsung, maka diharapkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung akan meningkat dari hanya sebesar Rp 620,51 milyar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 1,04 trilyun pada tahun 2023.

Selanjutnya, berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut, dialokasikan penggunaannya untuk belanja langsung daerah, baik berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun untuk alokasi belanja modal daerah selama periode 2019-2023, seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	620.512.920.497	705.019.023.857	802.138.991.429	913.909.038.495	1.042.716.453.568
Prioritas I	248.205.168.199	282.007.609.543	320.855.596.572	365.563.615.398	417.086.581.427
Prioritas II	279.230.814.224	317.258.560.736	360.962.546.143	411.259.067.323	469.222.404.105
Prioritas III	93.076.938.075	105.752.853.579	120.320.848.714	137.086.355.774	156.407.468.035

Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan perundangan yang berlaku, selanjutnya didistribusikan dalam tiga prioritas. Prioritas pertama, untuk pemenuhan kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Prioritas kedua, ditujukan untuk mendanai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam urusan pemenuhan visi dan misi kepala daerah ini, termasuk

dalam urusan pelayanan dasar maka juga dikategorikan dalam prioritas pertama. Prioritas ketiga, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum termuat dalam prioritas pertama dan kedua, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

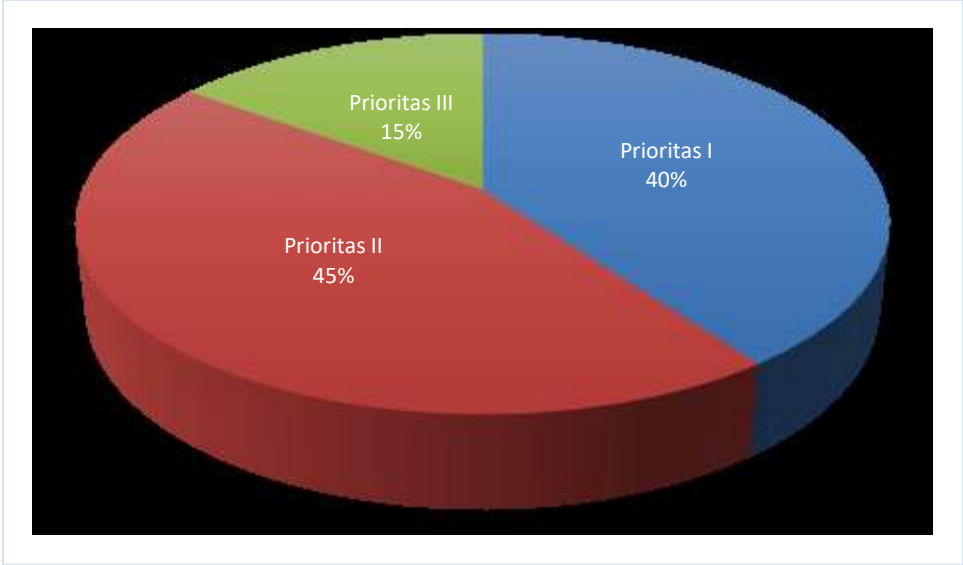
Prioritas pertama, menyangkut enam urusan wajib pelayanan dasar, oleh PP No. 2 Tahun 2018 ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimum (SPM), yakni pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan bidang sosial. Untuk menjalankannya, diserahkan kepada perangkat daerah yang relevan untuk menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Sinjai. *Prioritas kedua*, sebagaimana naskah visi dan misi kepala daerah terpilih Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023, fokus pada empat belas program bidang, yakni bidang: (1) ekonomi, (2) pertanian, (3) peternakan, (4) perikanan, (5) kesehatan, (6) pendidikan, (7) infrastruktur, (8) sosial, keagamaan dan kemasyarakatan, (9) penegakan supremasi hukum dan HAM, (10) lingkungan hidup, (11) pemerintahan, (12) pariwisata, (13) pemuda dan olahraga, serta (14) pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk menjalankannya terkait dengan perangkat daerah yang relevan, baik pada perangkat daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan. Sedangkan *prioritas ketiga*, fokus pada urusan pemerintahan daerah lainnya, berupa penyelenggaraan urusan penunjang dan urusan lainnya yang belum tercover dalam prioritas pertama dan kedua. Penyelenggaraannya sebagian besar oleh perangkat daerah berkaitan dengan urusan penunjang urusan, dan perangkat daerah lainnya yang tidak tergolong dalam prioritas pertama dan kedua.

Khusus untuk penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, dan urusan bidang sosial, selain merupakan urusan wajib pada prioritas pertama, juga menjadi konsen pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sehingga penyelenggaraan urusan keempat bidang tersebut yang digolongkan dalam prioritas kedua adalah yang belum tercantum dalam urusan wajib pelayanan dasar. Sedangkan untuk layanan urusan bidang keagamaan hendaknya disertai dengan pencermatan lebih lanjut, harus dialokasikan secara hati-hati karena penyelenggaraan urusan bidang bukan merupakan urusan yang didesentralisasikan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat diestimasikan kebutuhan untuk alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kedalam tiga prioritas selama periode 2019-2023, yakni 40 persen untuk prioritas pertama, 45 persen untuk

prioritas kedua, serta 15 persen untuk prioritas ketiga. Diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.13.
Proporsi Alokasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2019-2023 (persen)



Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Hingga akhir tahun 2023, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 4,08 trilyun. Lebih dari Rp 1,63 trilyun ditujukan untuk implementasi program pembangunan prioritas pertama, lebih dari Rp 1,84 trilyun untuk alokasi prioritas kedua, dan selebihnya sebesar Rp 612,64 milyar untuk alokasi prioritas ketiga. Selama periode tersebut, alokasi untuk penyelenggaraan urusan prioritas pertama meningkat dari hanya Rp 248,2 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 417,1 milyar pada tahun 2023. Untuk alokasi penyelenggaraan urusan prioritas meningkat dari hanya Rp 279,2 milyar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 469,2 milyar pada tahun 2023. Sedangkan alokasi belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan prioritas ketiga, meningkat dari hanya Rp 93,1 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 156,4 milyar pada tahun 2023. Berdasarkan alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah inilah selanjutnya didistribusikan berdasarkan perangkat daerah penyelenggara urusan per kategori prioritas urusan bersangkutan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan periode RPJMD lalu dan analisis lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan analisis kesenjangan antara standar kinerja dengan capaian kinerja pada berbagai indikator pembangunan. Isu strategis diidentifikasi dengan menganalisis isu-isu internasional, nasional, regional dan provinsi.

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Bagian kedua adalah permasalahan untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan. Isu strategis diuraikan dalam format identifikasi isu, penilaian isu dan prioritas isu.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1. Permasalahan untuk Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan untuk perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dimaksudkan sebagai permasalahan yang bersifat makro yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Analisis permasalahan ini dilakukan pada tiga level. Pertama, masalah pokok, yakni permasalahan yang melibatkan indikator level impact yang sifatnya makro dan akan dipecahkan melalui misi, tujuan dan sasaran. Kedua, masalah, yakni menyebabkan dari masalah pokok, kompleksitasnya lebih terjabarkan dari masalah pokok, dan akan dipecahkan melalui rumusan strategi. Ketiga, akar masalah, yakni penyebab dari masalah dan akan dipecahkan melalui rumusan arah kebijakan. Berdasarkan pemahaman itu maka pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Indeks reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan core business dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintahan dan masyarakat. Sekurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai good governance, yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e – government merupakan salah satu penilaian reformasi birokrasi. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Dari sisi akuntabilitas, ukuran kinerja pegawai kurang jelas, baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran. Paradigma bahwa berkinerja adalah kalau sudah menghabiskan uang, sudah melaksanakan kegiatan, sudah menghasilkan produk masih melekat. Hal ini terlihat dari penggunaan indikator “terlaksananya”, masih banyak digunakan sebagai keluaran (output) suatu kegiatan. Salah satu penrapan e – government telah melakukan sinkronisasi perencanaan melalui aplikasi “SIPPADAI” yang mengakomodir dan menyatukan beberapa program dan kegiatan dalam satu aplikasi. Pada tahun 2019 telah dilakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada APBD pokok tahun 2019.

b) Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP) (Nilai Huruf)

Penilaian atas pengelolaan kinerja pemerintah daerah tercermin dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kabupaten Sinjai selama periode RPJMD 2014 – 2018 hanya memperoleh nilai SAKIP “B”. Penilaian tersebut diperoleh dari unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2017 perencanaan kinerja pada perangkat daerah sudah memenuhi unsur penilaian. Sementara kriteria yang lain masih perlu ditingkatkan.

c) Opini Laporan Keuangan

Kabupaten Sinjai selama dua tahun terakhir dalam hal penatausahaan keuangan telah mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kondisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan yang diharapkan (mencapai target). Namun oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai predikat tersebut menjadi tantangan pada tahun- tahun berikutnya dalam upaya untuk mempertahankan predikat.

d) Cakupan pemenuhan SPM pelayanan dasar (%)

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar merupakan kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk urusan pendidikan, pelayanan pendidikan dasar belum sepenuhnya memenuhi standar minimal. Cakupan 100% terhadap penerima layanan untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pemukiman dan perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dan sosial sesuai PP 02/2018 belum terpenuhi semua. Untuk urusan pendidikan ini mencakup layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk urusan kesehatan ini mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita DM, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini mencakup layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Untuk urusan perumahan dan permukiman ini mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat ini mencakup pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Untuk urusan sosial ini mencakup layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, anak telantar di luar panti, lanjut usia telantar di luar panti, layanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

bagi korban bencana kabupaten/kota. Masalah utama dalam pemenuhan SPM untuk layanan-layanan tersebut adalah kelengkapan data penerima layanan dan kecukupan SDM, sarana/prasarana dan fasilitas dalam penyelenggaraan layanan.

e) Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dasar (Nilai)

Trend indeks kepuasan atas pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih rendah. Masih terdapat beberapa pelayanan yang tidak sesuai standar.

f) Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan umum yang strategis (Nilai)

Trend Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan umum yang strategis pada catatan sipil, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas PTSP dan Penanaman Modal cenderung mengalami kenaikan periode tahun 2013 sampai 2016 dan kenaikan paling signifikan pada tahun 2016, namun tahun 2017 menurun namun masih di atas 50% atau nilai Bagus (B). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan umum yang strategis sudah memenuhi standar operasional dan prosedur.

g) PDRB/kapita (Rp. Juta/tahun)

Salah satu faktor kesenjangan sosial dan tingginya angka kemiskinan adalah masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan perkapita masyarakat pada 2017 sebesar Rp. 38.10 juta/tahun masih lebih rendah dibandingkan rencana target PDRB Kabupaten Sinjai Tahun 2017 sebesar 41,56 juta/tahun.

h) Angka kemiskinan

Kesenjangan sosial dalam masyarakat sangat terlihat pada masyarakat yang berada pada kategori miskin maupun keluarga pra sejahtera. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari sisi ekonomi dengan rata-rata per kapita per bulan sebesar Rp. 737.954 lebih rendah dibandingkan capaian provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 1.266.918. Pada tahun 2017 persentase kemiskinan Kabupaten Sinjai sebesar 9,24% masih lebih tinggi dibandingkan dengan rencana capaian pada RPJMD periode lalu sebesar 7,38%.

Hal tersebut terlihat pada tahun 2017 dimana tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan (9,48%). Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 10,32%, namun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 9,24%.

Angka ini juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 9,82%. fenomena kenaikan angka kemiskinan ini harus selalu dipantau dan diminimalisir kembali guna menjalankan salah satu amanat pembangunan nasional untuk menyejahterakan kehidupan rakyat

Masalah ketiga adalah *terjadinya perlambatan ekonomi*. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai dalam empat tahun terakhir sampai tahun 2017 terus melambat dari 8% menjadi 6% dibandingkan dengan rencan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 7,35%.

i) Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sinjai tahun 2017 sebesar 4,53%, Jika dibandingkan terhadap target persentase tingkat pengangguran terbuka pada periode RPJMD sebelumnya hanya sebesar 0,95%.

j) Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (%)

Secara umum kontribusi sektor pertanian / perkebunan di Kabupaten Sinjai selama ini cenderung meningkat dimana pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 48,61% dan realisasi sebesar 46,22 %. Jika diperhatikan dari sisi pertumbuhan terkesan cukup bagus oleh karena produksi mengalami peningkatan, namun seharusnya peningkatan produksi tersebut selayaknya mengalami penurunan dan penurunannya tersebut tentunya diirngi dengan peertumbuhan kontribusi oleh sektor lain (jasa dan industry)

k) Kontribusi sektor industri dalam PDRB (%)

Selama ini kontribusi industri di Kabupaten Sinjai cenderung meningkat dimana pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 2,74 % pada periode RPJMD sebelumnya. Pada kenyataannya di tahun yang sama realisasi sebesar 2,76% atau telah melampaui target yang ditetapkan. Namun pelampauan capaian tersebut hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sinjai akan diharapkan dari pengembangan sektor industri ini.

l) Kontribusi sektor jasa dalam PDRB (%)

Selama ini sektor jasa pariwisata di Kabupaten Sinjai cenderung tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini terlihat pada kontribusi sektor jasa tahun 2017 sebesar 0,35%.

m) Kontribusi PAD terhadap Pendapatan (%)

Persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,59 %. Meskipun demikian pemerintah daerah kabupaten sinjai tetap melakukan berbagai usaha dalam hal mengoptimalkan Pendapatan daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan fiskal daerah.

n) IPM

IPM Kabupaten Sinjai pada tahun 2017=65,80, meningkat dari tahun 2016 (65,36). IPM ini lebih rendah dari IPM Provinsi (70,34) dimana Kabupaten Sinjai menempati peringkat 17 se Sulawesi Selatan. Masalah pokok ini disebabkan oleh *Rendahnya derajat pendidikan masyarakat*. Rata-rata lama sekolah (RLS) telah meningkat dari 7,06 pada tahun 2016 menjadi 7,28 pada tahun 2017. Angka ini lebih rendah dari capaian Provinsi pada tahun 2017 yakni 7,95. Harapan lama sekolah (HLS) juga masih dibawah capaian propinsi. Pada tahun 2016 capaiannya 12,83 dan tahun 2017 sebesar 12,84, lebih rendah dibanding propinsi yang mencapai angka sebesar 13,28 pada tahun 2017. Disisi lain derajat kesehatan masyarakat relatif lebih baik dibandingkan provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 929, sedangkan capaian provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1.059.

o) IPG dan IDG

Secara umum IPG dan IDG di Kabupaten Sinjai cukup mengalami peningkatan yaitu sebesar 98,01 dan 72,56 lebih tinggi dari angka IPG dan IDG provinsi yaitu 92,84 dan 70,57. Namun dalam legislatif peranan perempuan belum memenuhi 30 % kuota keterwakilan perempuan.

p) Cakupan aktivitas keagamaan (Jenis Aktivitas)

Pemenuhan sarana prasarana yang representatif misalnya islamic centre, lembaga hafidz Qur'an, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan

q) Persentase kecamatan dengan sarana/ prasarana publik yang mencukupi

Sarana / prasarana dan sarana publik di kecamatan belum termanfaatkan secara optimal dan banyak mengalami kerusakan. Meskipun keberadaan sarana / prasana dan sarana publik tersebut sudah tersedia di seluruh kecamatan meliputi PRC, sport center dan pasar.

r) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

Salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Sinjai adalah aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah sehingga menyebabkan kesulitan baik distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Kualitas infrastruktur aksesibilitas wilayah yang belum memadai dan tidak merata ditandai dengan masih rendahnya jaringan jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 38,67%. Capaian tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan target perencanaan pada periode RPJMD sebelumnya sebesar 62,26%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat penggunaan jalan di wilayah Kabupaten Sinjai masih membutuhkan peningkatan guna meningkatkan akses pelayanan masyarakat, khususnya pada wilayah dengan kondisi jalan yang rusak.

s) Jumlah pengguna pelabuhan dan terminal

Infrastruktur perhubungan juga belum memadai. Jumlah pengguna pelabuhan dan terminal selama ini cenderung meningkat, namun jika dilihat dari potensi jumlah pengguna, maka sesungguhnya pengguna fasilitas lebih banyak. Penyebab utama dari hal ini adalah ketersediaan sarana prasarana yang tersedia pada fasilitas tersebut perlu ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Keberadaan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan salah satu yang paling penting bagi pengembangan wilayah Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Pelabuhan laut di Kabupaten Sinjai sejumlah 3, sebagian besar merupakan pelabuhan rakyat, dengan kondisi belum seluruhnya memenuhi standar. Sedangkan terdapat 12 terminal, yang mengindikasikan belum seluruh kecamatan/desa yang berjumlah 9 kecamatan memiliki terminal.

t) Penduduk yang mengakses sumber air minum (%)

Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk baik diperkotaan maupun diperdesaan belum memenuhi target pelayanan minimal (100%), hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2017 sebesar 65,23%.

u) Rumah layak huni (%)

Perkembangan rumah layak huni sejak tahun 2013 hanya mengalami pertumbuhan 0.19 (2013-2017)

v) Pemukiman kumuh (%)

Perkembangan penurunan luas Permukiman kumuh selama ini, menunjukkan hasil yang baik, dimana luas pada tahun 2013 sebesar 67,08 Ha kedian pada tahun 2017 tersisa sebesar 43,96 Ha. Kinerja penurunan ini dari sisi kinerja masih sangat rendah yang seharusnya pada tahun 2019 seharusnya luassan permukiman kumuh menjadi 0%

w) Angka kriminalitas tertangani

Secara umum penciptaan lingkungan strategis mengalami perkembangan yang cukup baik, tertuama dari aspek penanganan kasus. Kasus yang paling sering terjadi adalah kenakalan remaja, dan beberapa kasus keluarga. Penanganan kasus tersebut selama ini dilaksanakan atas kerjasama dan kesigapan aparat dengan tokoh masyarakat. Kondisi ini perlu semakin ditingkatkan kedepan terutama dalam upaya deteksi dini dan pencegahan serta penindakan apabila dipandang perlu.

x) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Poin)

Secara umum indeks kualitas lingkungan hidup daerah di Kabupaten Sinjai yang diukur berdasarkan kualitas air dan kualitas udara pada tahun 2017 meningkat dibandingkan terget yang ditetapkan dan lebih tinggi dari realisasi provinsi Sulawesi Selatan.

y) Penghargaan Lingkungan (Adipura)

Penghargaan adipura merupakan wujud keberhasilan dalam penanganan sampah dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Penanganan sampah di Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 sebesar 65,87% dari target 60%. Namun hal ini perlu penanganan yang lebih optimal dalam rangka penciptaan kebersihan dan keindahan

z) Jumlah desa Tangguh bencana

Trend kejadian bencana alam yang tidak tertangani secepatnya di Kabupaten Sinjai karena penempatan posko bencana alam masih terdapat di Kabupaten.

Masih perlunya penempatan sarana dan prasana kebencanaan dan kebakaran pada setiap level yang dapat menjangkau wilayah bencana dengan jarak maksimal 10 km.

4.2. Permasalahan untuk Penyelenggaraan Urusan

4.2.1 Permasalahan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a) Urusan Pendidikan

1. Dalam hal pendidikan anak usia dini (PAUD), partisipasi PAUD telah mengalami peningkatan sejak 2013 hingga 2017. Pada 2013 cakupan PAUD sebesar 63% dan pada tahun 2017 menjadi 96,52%. Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan PAUD adalah kecenderungan tidak berimbang pertambahan jumlah penyelenggara PAUD dengan jumlah anak usia dini yang membutuhkan PAUD.
2. Dalam hal pendidikan dasar, APM SD Kabupaten Sinjai telah mengalami peningkatan dari 98,47% pada 2013 menjadi 100% pada tahun 2018. APM SMP juga telah mencapai peningkatan dari 98,47% pada 2013 menjadi 100%. Dalam hal putus sekolah, telah dicapai perbaikan dari jumlah putus sekolah SD sebanyak 316 orang pada 2013 menjadi 4 orang pada 2017, pada SMP putus sekolah pada 2013 sebanyak 109 dan pada tahun 2017 sebanyak 11 orang. Kelulusan SD belum mencapai 100%, untuk SD sebesar 98,36% pada 2017 dan kelulusan SMP juga 98,36%. Akar masalah yang dihadapi adalah belum meratanya ketercukupan dan kualitas sarana/prasarana serta tenaga kependidikan SD dan SMP, khususnya pada wilayah pegunungan/dataran tinggi dan kepulauan/pesisir.
3. Masih kurangnya kualifikasi pendidikan D4, S1 dan S2 pengajar SD dan SMP yang ditempatkan pada beberapa sekolah khususnya sekolah yang berada di daerah jauh dari ibukota kabupaten. Tahun 2016 jumlah guru berkualifikasi S1/D4 pada level SD belum mencapai 100% (1.784 orang dari total 1.808 orang atau 98,6%). Pada level SMP jumlah guru berkualifikasi S1/D4 sebanyak 706 orang dari total 759 orang atau 93,38%.

b) Urusan Kesehatan

1. Cakupan pemakaian kontrasepsi pada perempuan yang telah menikah usia 15 – 49 tahun sebesar 65%. Hal ini menyebabkan jaminan hak universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi tidak dapat

terwujud khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

2. Cakupan pelayanan Standar Pelayanan Minimal belum memenuhi standar.
3. Standar pelayanan pada kesehatan belum sesuai standar nasional dan internasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan.

c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya jalan dan jembatan yang belum dalam kondisi baik dan memenuhi standar
2. Masih terdapat kondisi rusak pada jaringan irigasi kewenangan provinsi
3. Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku
4. Tingginya tingkat banjir dan longsor yang dapat menurunkan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air
5. Penataan ruang. Dalam hal penataan ruang, bangunan berIMB belum mencakup semua bangunan (74%), meskipun ini telah meningkat dari 65,40% pada 2013. 74,71%. Dalam ketersediaan ruang terbuka hijau, perbandingan ruang terbuka hijau dan lahan berHGB/HGU mencapai 41,28%, meningkat dari tahun 2013 sebesar 27,98%. Ketaatan terhadap penggunaan ruang masih belum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari penggunaan ruang yang masih berdasarkan pada ketersediaan lahan dan bukan pada penggunaan zona ruang yang telah diatur. Masih banyaknya izin yang keluar belum berpedoman pada RTRW Kab. Sinjai dan RDTR Perkotaan, Masih sedikitnya kawasan strategis yang memiliki rencana rinci tata ruang. Belum optimalnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang
6. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi
7. Belum adanya informasi kondisi kelayakan bangunan gedung milik daerah
8. Belum optimalnya akses pelayanan Akses Air Minum dan Sanitasi
Dihubungkan dengan TPB dan SPM, masalah yang dihadapi adalah belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman. Pada tahun 2017, penduduk berakses air minum baru mencapai 65%,

meskipun ini sudah meningkat dari capaian 2013 yang hanya 21%. Dihubungkan dengan TPB, masalah pokok yang dihadapi adalah belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai. Belum tercapai 100% akses terhadap sanitasi yang layak secara merata bagi semua, dan masih terjadinya praktik buang air besar di tempat terbuka khususnya pada kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Adanya ketimpangan/backlog rumah yang disebabkan terbatasnya masyarakat mengakses rumah layak huni karena rendahnya tingkat kesejahteraan khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Buruh/ Pekerja/Nelayan) serta masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah
2. Masih banyaknya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015
3. Belum mantapnya sistem pendataan perumahan dan kawasan permukiman
4. Rumah layak Huni
Cakupan rumah layak huni baru mencapai 88,86%, masih terdapat 6.288 unit yang masih perlu dilakukan perbaikan.
5. Luas area permukiman yang tertata
Periode tahun 2013 sampai tahun 2017 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru seluas 8.716 ha atau mencapai 15,19% dari total luas permukiman 57.397 ha.
6. Lingkungan yang didukung oleh PSU pada kurun waktu tertentu
Periode 2013 sampai 2017 lingkungan yang didukung oleh PSU sebesar 2,26%

e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. K3 yang tertangani
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan diidentifikasi cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 pelanggaran K3 yang tertangani adalah 108 kasus dan pada tahun 2018 jumlah yang tertangani adalah 350 kasus. Target pelaporan pelanggaran K3 yang tertangani dari 65 %

baru tercapai sebesar 48%.

2. Luas Jangkauan Wilayah WMK

Dalam fungsi perlindungan masyarakat, pelayanan informasi rawan bencana belum optimal, begitu pula pelayanan pemadaman kebakaran masih berhadapan keterbatasan sarana/prasarana satgas pemadam kebakaran termasuk di kecamatan. Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) baru mencapai 29,57 km² dari total wilayah 819,96 km². Belum adanya satgas TRC pada tiap kecamatan yang mampu melakukan tindakan penanganan terhadap laporan kejadian kebakaran.

3. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum

4. Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada masih dibawah nasional

5. Meningkatnya ancaman terorisme dan intoleransi, serta ancaman terhadap kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional yang membutuhkan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu

f) Urusan Sosial

1. Belum terpadunya penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sector,

2. PMKS yang tertangani, apa masalahnya
Belum optimalnya penanganan PMKS

3. Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya

4.2.2. Permasalahan pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a) Urusan Tenaga Kerja

1. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja yang rendah

2. Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.

3. Jumlah peserta Jamsostek
Jumlah peserta jamsostek yang telah mendaftar cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah peserta jamsostek sebesar 80,35% dan pada tahun 2017 sebesar 16,55% Kurangnya perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta jamsostek disebabkan pemahaman keselamatan kerja masih kurang.

4. Penyelesaian perselisihan buruh-perusahaan
Belum adanya media pengaduan dan penyelesaian perselisihan buruh perusahaan.
5. Masalah lain adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Selain itu, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan belum memadai.

b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Perempuan dilembaga pemerintah
Masih tertinggalnya kompetensi dan kemampuan perempuan untuk terlibat bekerja pada lembaga pemerintah/birokrasi, Lembaga legislatif dan Lembaga swasta
2. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada seluruh perangkat daerah termasuk penggunaan data terpilah gender dalam penentuan isu strategis dan penerima manfaat kegiatan.
3. Jumlah KDRT
Belum efektifnya pelaporan kejadian kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak, serta belum tercakupinya semua korban kekerasan dengan pelayanan pada unit penanganan terpadu serta layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum

c) Urusan Pangan

1. Sinergi dan koordinasi antar stakeholder dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di pasaran belum efektif menekan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar.
2. Belum optimalnya jaminan terhadap pasokan dan harga komoditas pangan yang terintegrasi dan informatif.
3. Konsumsi pangan yang belum beragam bergizi seimbang dan aman

d) Urusan Lingkungan Hidup

1. Cakupan pelayanan persampahan masih terbatas pada area perkotaan
2. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan
3. Belum adanya pengakuan terhadap masyarakat yang memiliki potensi

sebagai masyarakat hukum adat serta belum teridentifikasi dan termemanfaatkannya pengetahuan lokal yang mereka miliki dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif berbasis RPPLH.
5. Masih rendahnya kualitas air akibat polusi, pembuangan, dan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, dan masih rendahnya proporsi air limbah yang dapat diolah, dan rendahnya jumlah sampah yang di daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
6. Kualitas tutupan lahan terus menurun seiring dengan bertambahnya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan seiring dengan semakin menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan, khususnya pada daerah dataran tinggi/pegunungan serta dampaknya pada daerah di bawahnya.
7. Belum terpenuhinya arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Taman Hutan Raya.

e) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilikan dokumen kependudukan (KTP Elektronik, KK dan Kartu Identitas Anak) dan catatan sipil (Akta Kelahiran dan Akta Kematian) serta Akte Nikah masih rendah.
2. Terbatasnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada wilayah terpencil pegunungan dan pulau-pulau.
3. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pembangunan

f) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih rendahnya desa mandiri
2. Kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), PKK, LSM level desa belum efektif dalam mendorong keberdayaan masyarakat.

g) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum adanya arahan kebijakan pengendalian kependudukan level daerah yang dijadikan dasar bagi perangkat daerah untuk

mengintegrasikan pertimbangan kependudukan dalam penyelenggaraan program/kegiatan.

2. Masih tingginya angka drop out akseptor KB dan ,masih rendahnya pengguna KB metode kontrasepsi jangka Panjang.

h) Urusan Perhubungan

1. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan perhubungan laut dan darat.

i) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Belum efektifnya fungsi kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kecamatan sebagai wadah penyebaran informasi public dari pemerintah kepada masyarakat dan wadah pertukaran informasi di antara masyarakat.
2. Belum tercakupinya seluruh wilayah dalam layanan informasi melalui akses poin.
3. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah.

j) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Rendahnya tingkat produktifitas koperasi dan UMKM
2. Masih kurangnya kepedulian anggota koperasi terhadap keaktifan koperasi .
3. Kurangnya akses permodalan terhadap pengembangan UKM.

k) Urusan Penanaman Modal

1. Kurang tersedianya data potensi ekonomi dan unggulan daerah yang akurat dan detail serta terintegrasi antar stakeholder pemerintah dengan dunia usaha untuk mendukung promosi investasi daerah.
2. Belum optimalnya realisasi penanaman modal.
3. Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata

l) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional.
2. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar
3. Kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK rendah
4. Kurangnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta kemitraan dengan stakeholder

m) Urusan Statistik

1. Masih diperlukan peningkatan penyediaan data/informasi yang reliable, up to date dan relevan guna menunjang pembangunan daerah secara terintegrasi.

n) Urusan Persandian

1. Masih perlunya peningkatan sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

o) Urusan Kebudayaan

1. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.

p) Urusan Perpustakaan

Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat

q) Urusan Kearsipan

1. Belum efektifnya pengolahan, penyelamatan/pelestarian arsip daerah guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.2.3 Urusan Pilihan

a) Urusan Pariwisata

1. Adanya destinasi wisata yang terbengkalai pengelolaannya sehingga pengunjungnya semakin berkurang.
2. Kurang terpromosikannya sejumlah destinasi wisata budaya dan ekologi pada tingkat nasional dan global sehingga jumlah pengunjungnya tidak berkembang pesat.
3. Belum diketahuinya nilai jual objek pariwisata
4. Pengelolaan sektor kepariwisataan belum terintegrasi optimal dengan pengelolaan fasilitas ekonomi wilayah seperti hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB.
5. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif
6. Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata

b) Urusan Pertanian

1. Adanya stagnasi pada usaha peternakan, khususnya ternak ayam kampung dan produksi susu, serta kurang optimalnya peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan.
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, dan peternakan.
3. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientasi pada on-farm.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap komoditas pertanian dan peternakan.

c) Urusan Perdagangan

1. Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan info pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing

d) Urusan Perindustrian

1. Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi.
2. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya.

e) Energi Sumberdaya Mineral

1. Masih maraknya penambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (good mining practice).
2. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak
3. Masih tingginya investasi energi baru terbarukan (EBT) dan harganya belum mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan EBT karena energi fosil harganya lebih murah
4. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah

f) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Belum optimalnya produksi dan produksi perikanan.

2. Tingginya kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, estuarin sebagai habitat vital.
3. Belum efektifnya kelompok nelayan dan pembudidaya sebagai wahana kerjasama dan wadah belajar dalam peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan maupun budidaya yang produktif dan ramah lingkungan.
4. Belum optimalnya perkembangan kawasan tempat pelelangan ikan di Lappa sebagai kawasan wisata kuliner yang bersih dan estetik.

4.2.4. Penunjang Urusan

a) Perencanaan

1. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan daerah
2. Belum optimalnya proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feed back dalam proses pembangunan daerah.

b) Keuangan

1. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

c) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kecilnya porsi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2. Kecilnya porsi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
3. Belum proporsionalnya perbandingan pemangku jabatan struktural/pimpinan, jabatan fungsional dan jabatan adminsitratif.

d) Penelitian dan Pengembangan

1. Kurangnya implementasi dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence*).
2. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pengembangan ekonomi daerah.

e) Pengawasan

1. Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
2. Belum optimalnya peningkatan level SPIP dan kapabilitas APIP serta pendampingan/fasilitasinya sampai ke Perangkat Daerah

3. Belum optimalnya dampak perubahan dari tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran administrasi dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan di setiap perangkat daerah.

f) Sekretariat Dewan

1. Belum efektifnya dukungan dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting yang dijalankan oleh legislatif daerah.
2. Belum kuatnya integrasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD.

g) Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan oleh sekretariat daerah dalam penyelenggaraan tugas perangkat daerah.
2. Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

h) Pemerintah Kecamatan

1. Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan.
2. Belum optimalnya fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda.
3. Belum efektifnya fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di desa dan kelurahan.

4.3 Analisa Isu Strategis

4.3.1 Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang perlu diperhatikan atau dalam penyelenggaraan pembangunan kedepan. Isu strategis pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan diidentifikasi pada level internasional, nasional dan daerah. Hasil identifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Identifikasi Isu Strategis

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
Tingkat Internasional:		
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Kemiskinan (T1)	Penanggulangan Kemiskinan melalui koordinasi bidang terkait
	2. Gizi, pangan dan pertanian berkelanjutan (T2)	Penanganan Gizi dan Peningkatan ketersediaan paangan utama dan pertanian yang berkelanjutan
	3. Kehidupan sehat pada semua usia (T3)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehat-an serta pengembangan pola hidup sehat dalam masyarakat
	4. Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan (T4)	Pemenuhan standar pe-layanan minimal kesehatan dan peningatan dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan
	5. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (T5)	Penetapan regulasi tentang kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	6. Air bersih dan sanitasi (T6)	Peningkatan cakupan penggunaan air bersih khususnya pada masyarakat pedesaan
	7. Kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak (T8)	Peningkatan kesempatan kerja dan perbekalan dan pelatihan tenaga kerja
	8. Infrastruktur, industri dan inovasi (T9)	Peningkatan infrastuktur wilayah, penungktan industri dan Inovasi.
	9. Kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan (T10)	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa tertinggal
	10. Pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (T11)	Bedah rumah dan pembangunan PSU pada pemukiman kumuh
	11. Limbah B3 dan timbulan sampah (T12)	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengeloan persampahan dan optimalisasi

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		kinerja pengelolaan layanan persampahan
	12. Perubahan iklim (T13)	Penurunan emisi gas rumah kaca
	13. Penangkapan ikan dalam batasan biologis aman (T14)	Perda penangkapan ikan dalam batasan bioglas aman
	14. Pemeliharaan tutupan lahan (T15)	Pemantauan dan pengendalian tutupan lahan
	15. Konflik dan Tatakelola Pemerintahan (T16)	Penanganan konflik dan Reformasi Birokrasi
	16. Pendapatan Pemerintah Daerah	Percepatan dan peningkatan PAD
Masyarakat Ekonomi Asean	1. Daya saing produk dalam masyarakat ekonomi Asean	Peningkatan daya saing produk
	2. Daya saing tenaga kerja dalam masyarakat ekonomi Asean	Peningkatan daya saing tenaga kerja
Tingkat Nasional:		
Prioritas pembangunan nasional	1. Revolusi mental	Peningkatan pembangunan mental spritual
	2. Pendidikan	Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan tenaga kependidikan
	3. Kesehatan	Peningkatan pola hidup sehat dan pencapaian SPM
	4. Infrastruktur	Peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman
	5. Kemandirian pangan	Peningkatan kemandirian pangan
	6. Kemandirian energi dan ketenagalistrikan	Pengembangan kemandirian energi dan tenaga listrik
	7. Kemaritiman dan kelautan	Pemanfaatan kelautan
	8. Industri dan pariwisata	Pengembangan kawasan industri dan pariwisata
	9. Pemerataan antar kelompok pendapatan	Pemerataan pendapatan kelompok marginal
	10. Pembangunan desa	Pengawasan pemanfaatan dana desa
	11. Pembangunan perbatasan	Penegasan pembangunan batas wilayah

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
	12. Pembangunan perkotaan	Pembangunan pemukiman kumuh perkotaan
	13. Kepatuhan dan penengakan hukum	Penegakan perda
	14. Keamanan dan ketertiban	Pengaktifan Kantibmas dan peningkatan keamanan danketertiban masyarakat
	15. Politik dan demokrasi	Pendidikan politik dan demokrasi
	16. Tata kelola	Penataan dan reformasi birokrasi
Tingkat Daerah:		
Permasalahan Pembangunan Daerah	1. Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidik-an.
	2. Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
	3. Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
	4. Infrastruktur wilayah	Pembangunan infrastruktur wilayah khususnya pada daerah pegunungan dan dataran tinggi
	5. Lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
	6. Tatakelola pemerintahan	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	7. Pelayanan publik	Pemenuhan standar pelayanan minimal
	8. Ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Pengendalian gangguan ketertiban dan ketenteram-an serta penanganan bencana

4.3.2 Prioritisasi Isu Strategis

Untuk menemukan isu strategis secara terprioritaskan maka diperlukan kriteria prioritisasi dan proses menilai isu berdasarkan kriteria tersebut. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas untuk dijadikan dasar perumusan visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Adapun kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis RPJM Teknokratis Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.2.
Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab/kewenangan pemerintah kota	30
3.	Memiliki dampak terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5.	Memungkinkan untuk ditangani	15

Berdasarkan kriteria tersebut maka dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria berdasarkan bobot masing-masing kriteria. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut.

- a) Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik
Belum terintegrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi hal ini ditandai dengan nilai SAKIP dengan perolehan CC, meskipun pada tahun 2017 nilai tersebut telah meningkat menjadi B. Sistem monitoring belum berbasis elektronik sehingga sangat menyulitkan untuk mengintegrasikan pada perencanaan dan penganggaran.
- b) SPM dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar
Pelayanan penyelenggaraan urusan baik wajib dasar maupun wajib bukan dasar, termasuk pilihan, belum memenuhi standar. Hal ini ditunjukkan dengan capaian standar pelayanan minimal (SPM) belum mencapai target.
- c) Pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan
Berkembangnya pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan pada destinasi wisata Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
- d) Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu
Trend penurunan angka kemiskinan mengalami fluktuasi selama periode 2013-2018. Pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 10,31%, tahun 2014 sebesar 9,56%, dan tahun 2016 naik menjadi 9,41%, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 9,24%. Melihat angka terakhir jika dibandingkan dengan capaian Sulawesi Selatan sebesar % dan nasional sebesar%
- e) Berkembangnya iklim usaha dan investasi
Perkembangan investasi mengalami fluktuasi selama periode 2013-2018. Pada tahun 2014 jumlah investor sebanyak 333, tahun 2015 naik sebanyak 581, begitupun tahun 2016 naik sebanyak 909, sedangkan tahun 2017 turun menjadi

383. Berkembangnya iklim usaha dan investasi (jumlah investor dan nilai investasi)

f) Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat

Perkembangan produktifitas pada sektor pertanian selama periode 2013-2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi pertanian di Kabupaten Sinjai masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat khususnya pelaku tani karena memiliki potensi yang besar dalam nilai produksi. Produksi pertanian/perkebunan tahun 2013 sebesar 2,535 juta ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 4,247 juta ton. Kontribusi kategori Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB. Pada tahun 2017 mencapai 9.189 triliun rupiah atau sebesar 46,22%.

g) Meningkatnya produktivitas sumber-sumber pendapatan daerah

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah PAD sebesar Rp. 46.404.259.984 atau sebesar 5,93%. Pada tahun 2015 jumlah PAD sebesar Rp. 75.599.713.319,86,- atau sebesar 7,67%. Pada tahun 2016 Jumlah PAD sebesar Rp. 74.491.453.854,80,- atau sebesar 7,08%. Dan untuk tahun 2017 jumlah PAD sebesar Rp. 113.973.757.128,76 atau sebesar 10,59%. Meskipun demikian, masih banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara maksimal dalam upaya menuju kemandirian fiskal daerah.

h) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Salah satu hal yang dapat meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat adalah Guru yang memenuhi kualifikasi Sarjana dan atau diploma. Berdasarkan jenjang Pendidikan SD/MI dapat dilihat untuk jumlah Guru kualifikasi Sarjana/diploma jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 rasio jenjang Pendidikan sebesar 62,53 % dan pada tahun 2016 dengan rasio 98,67 %.

i) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka harapan hidup rata-rata cenderung naik perlahan. Pada tahun 2013 sebesar 66,33, tahun 2014 naik menjadi 66,36, sedangkan tahun 2017 sebesar 66,61. Meskipun demikian rata-rata angka harapan hidup ini masih lebih rendah dibandingkan provinsi, Angka kematian ibu cenderung fluktuatif pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 10, tahun 2014 Peningkatan jumlah ibu kelahiran hidup pada periode 2013 – 2017 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (gambarkan perkembangan AKI, AKB, AHH)

- j) Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan
IPG mengalami kenaikan yang fluktuatif selama periode 2013 – 2017. IPG mengalami penurunan tahun 2017 sebesar 0,6 persen. IPG Kabupaten Sinjai dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Selatan masih diatas. Peranan perempuan dalam pembangunan khususnya di legislatife masih belum memenuhi 30% keterpenuhan kuota dalam parlemen.
- k) aktivitas keagamaan
Meningkatnya aktivitas keagamaan karena ketersediaan sarana dan prasarna keagamaan yang lebih baik. Namun ada beberapa sarana dan prasarana keagamaan yaitu Gedung Islamic Centre yang belum berfungsi karena pembangunannya belum selesai. Diharapkan Gedung Islamic Centre ini akan menjadi pusat aktivitas keagamaan di Kabupaten Sinjai khususnya aktivitas keagamaan hari-hari besar dan aktivitas keagamaan rutin lainnya.
- l) Aktivitas pada sarana/ prasarana public kecamatan
Kecamatan belum memiliki sarana prasarana umum yang memadai, disamping itu rendahnya kualitas sarana publik pada 9 (Sembilan) kecamatan khususnya prasarana public yang berada di ibukota kecamatan yang diperlukan sebagai sarana tempat bermain dan berkumpulnya warga.
- m) Meningkatnya aksesibilitas wilayah
Penjang jalan dalam kondisi baik dengan persentase sebesar 38,67 pada tahun 2017 Kondisi ini tergambar sejak tahun 2013 – 2018. Pada tahun 2013 panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 37,54 persen. Dibandingkan dengan target pada periode yang sama sebesar 62,26 persen.
- n) Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari
Salah satu pencapaian pelayanan standar minimal adalah akses air minum sebesar seratus persen. Akses air minum penduduk di perkotaan dan perdesaan pada tahun 2017 sebesar 67,39 persen. Dibandingkan dengan capaian yang ada akses air minum masih mengalami kekurangan pencapaian sebesar 33,71 persen.
- o) Terpenuhinya sarana/pra-sarana perumahan dan pemukiman
Jumlah unit rumah pada tahun 2017 sebanyak 55.536 dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 49.248 (sebesar 88,68 persen). Luas permukiman layak huni sejak tahun 2013 – 2018 tidak mengalami peningkatan (sebesar 27.226 Ha). Dari total luas wilayah permukiman sebesar 57,397 Ha. Dengan demikian selama periode tersebut rasui luas permukiman layak huni terhdapa luas wilayah permukiman sebesar 47,43 persen.

- p) Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- Dalam upaya meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan ketentraman yang menjadi indikatornya adalah penangangan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah kasus yang ditangani tahun 2014 sebanyak 224 dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 108 (sebesa 48%). Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat yang tertangani mengalami peningkatan selama 2013 – 2017. Tahun 2017 jumlah pelanggaran yang tertangani sebanyak 350 (sebesar 77%). Namun peningkatan ini ditinjau dari sisi penangangan maka seharusnya kasus tersebut dapat ditangani sampai serratus persen
- q) Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan serta sumberdaya alam
- Luas wilayah Ruang Terbuka Hijau sudah memenuhi standar nasional sebesar 30 %. Luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 173 Ha pada tahun 2017. Hal ini membutuhkan peningkatan pengelolaan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut guna memberi kenyamanan, ketentraman dan keindahan bagi masyarakat.
- r) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana
- Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beberapa kecamatan yang rawan bencana. Untuk itu Penanganan bencana menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian. Keterlibatan masyarakat dalam hal penanganan menjadi salah satu upaya dalam hal tanggap bencana.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan selama periode 2018-2023. Rumusan visi ini dijabarkan dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Penjelasan dari rumusan visi ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berdaya Saing	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut;

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
- (2) Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
- (3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- (6) Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
- (7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

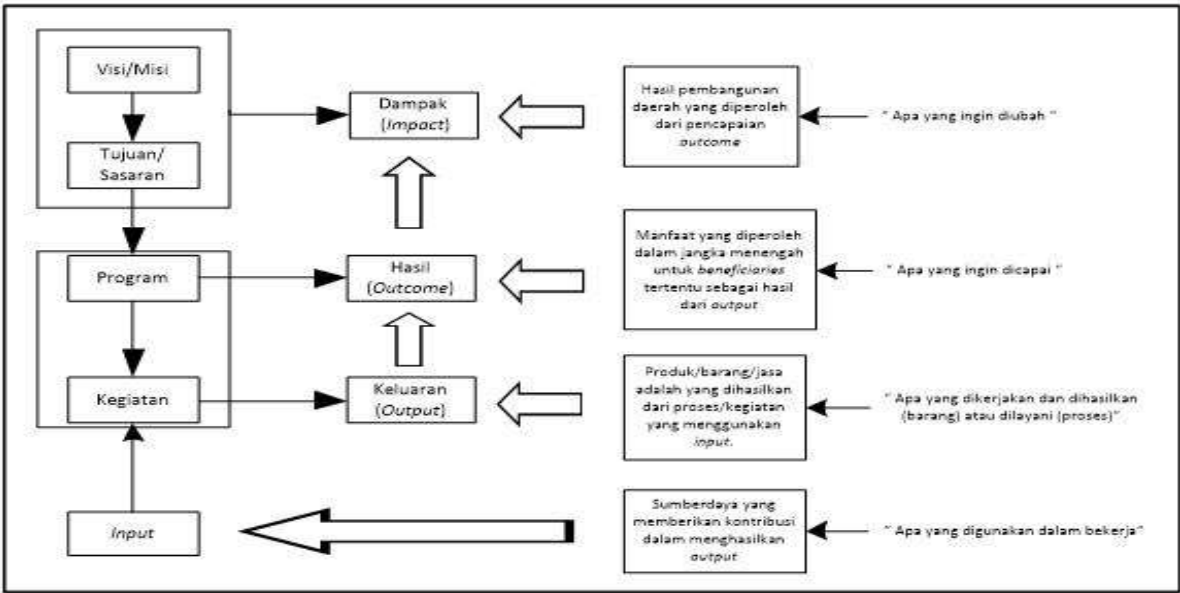
Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyeleng-garaan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	Berkeadilan
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kola-borasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pen-dapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan keter-tiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam men-dukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan ling-kungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

5.3. Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPd. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran: (1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; (2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (3) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; (4) merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan (5) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dirumuskan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Visi Misi Tujuan dan Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

No.	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal: 2017	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2023)
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Visi :									
1.	Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif								
		Tujuan-1: Mewujudkan birokrasi yang baik	Indeks reformasi birokrasi	75,5	76,39	77	77,5	78,5	79	80
		Sasaran-1: Terwujudnya management pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan yang akuntabel integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	1. Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP) (Nilai Huruf)	B	B	B	B	B	BB	A
			2. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Misi 2	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis								
		Tujuan-2: Memenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis	Cakupan pemenuhan SPM pelayanan dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal: 2017	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2023)
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Sasaran-2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Rata – rata Nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan Publik (Nilai)	-	-	75	77	80	82	85
3.	Misi 3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat								
		Tujuan-3: Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB/kapita (Rp. Juta/tahun)	38,10	38-42	38-42	38-42	38-42	38-42	38-42
		Sasaran-3: Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu	4. Angka Kemiskinan	9,24	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9
		Sasaran-4: Berkembangnya iklim usaha dan investasi	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,53	4,33	4,12	3,92	3,72	3,52	3,33
		Sasaran-5: Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat	6. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (%)	46,22	45,99	45,75	45,52	45,30	45,07	44,84
			7. Kontribusi sektor industri dalam PDRB (%)	2,76	2,78	3,00	4,12	5,37	6,00	7,00
			8. Kontribusi sektor jasa dalam PDRB (%)	14,00	14,45-16,00	14,45-16,00	16,00-17,80	16,00-17,80	16,00-17,80	16,00-17,80

No.	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal: 2017	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2023)
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Sasaran-6: Meningkatnya produktivitas sumber- sumber pendapatan daerah	9. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan (%)	8.17 %	8,17%	8,05%	8,70%	8.84%	8,64%	8,55%
4.	Misi 4	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa								
		Tujuan-4: Meningkatkan kualitas manusia	IPM	65,80	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70	65-70
		Sasaran-7: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	10. Angka rata-rata lama sekolah	7,28	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10
			11. Angka harapan lama sekolah	12,84	12-14	12-14	12-14	12-14	12-14	12-14
		Sasaran-8: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12. Angka harapan hidup	66,70	66-70	66-70	66-70	66-70	66-70	66-70
		Sasaran-9: Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	13. IPG dan IDG	IPG 98.01 IDG 72.56	IPG 98.07 IDG 72.6	IPG 98.1 IDG 72.64	IPG 98.22 IDG 72.68	IPG 98.28 IDG 72.7	IPG 98.28 IDG 72.74	IPG 98.3 IDG 73.8
		Sasaran-10: Meningkatnya aktivitas keagamaan	14. persentase Peningkatan Jumlah penghafal Al Qur'an di kabupaten Sinjai							
	Misi 5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah								

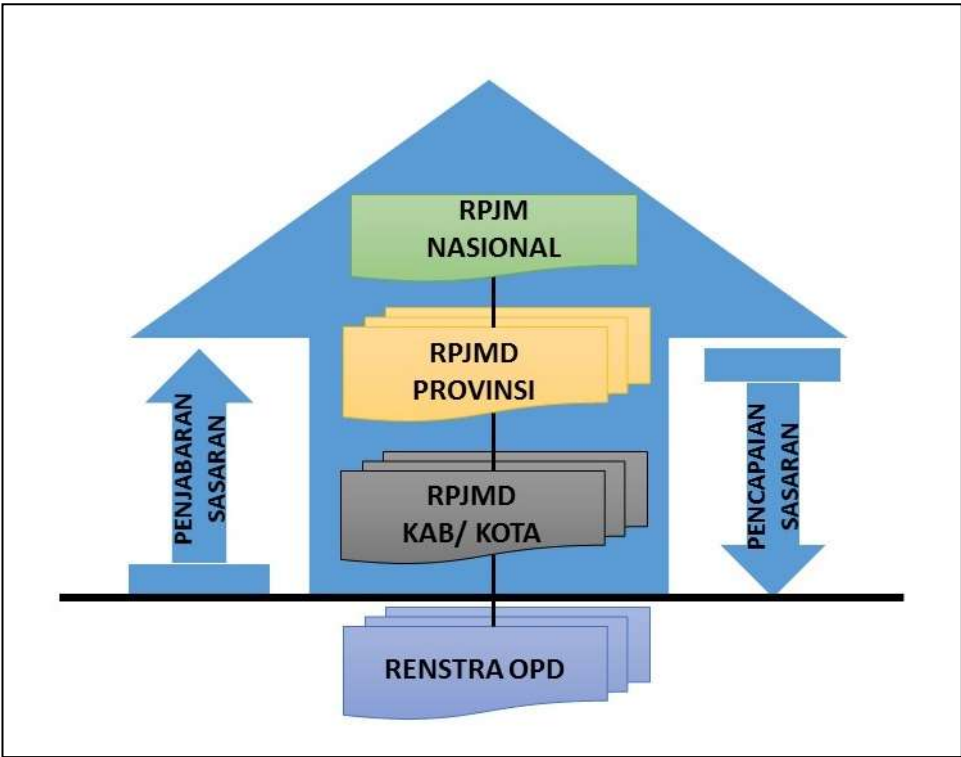
No.	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal: 2017	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2023)
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Tujuan-5: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan sarana/prasarana publik	Indeks daya saing infrastruktur Daerah							
		Sasaran-11: Berkembangnya aktivitas pada sarana/prasarana public kecamatan	15. Cakupan keter-sediaan sarana/ prasarana publik kecamatan (PRC, sport center dan pasar)	-	PRC (1) Sport Center	PRC (1) Sport Center (1) Pasar (2)	PRC (1) Sport Center (6) Pasar (2)	PRC (1) Sport Center (4) Pasar (2)	PRC (1) Sport Center (4) Pasar (2)	PRC (1) Sport Center (2) Pasar (2)
		Sasaran-12: Meningkatnya aksesibilitas wilayah	16. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	38,67 %	44,92 %	45,52%	50,30%	51,49%	52,68 %	53,88%
			17. Jumlah pengguna pelabuhan dan terminal	458.975	483.838,03	513.470,54	515.019,91	587.616,81	614.401,22	652.523,15
		Sasaran-13: Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari	18. Persentase Penduduk yang mengakses sumber air minum	70,83 %	71,79%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran-14 Terpenuhiny sarana/prasarana perumahan dan pemukiman	19. Persentase penduduk yang memiliki perumahan layak huni	88,68	88,84	88,87	88,89	88,90	88,92	88,93
			20. Presentase Lingkungan Pemukiman kumuh	0,07	0,139	0,133	0,127	0,121	0,115	0,109

No.	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal: 2017	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2023)
					2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Misi 6	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.								
		Tujuan-6: Meningkatkan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Porsentase Penurunan Angka kriminalitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sasaran-15: Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	21. Porsentase Gangguan K3 yang tertangani	72 %	75 %	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
	Misi 7	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.								
		Tujuan-7: Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Poin)	-	68,29	67	68	69	70	71
		Sasaran-15: Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan serta sumber daya alam	22. Penghargaan Lingkungan (Adipura)	-	-	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura
		Sasaran-16: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	23. Jumlah desa tangguh bencana	1 Desa	1 Kelurahan	1 Desa	1 Kelurahan	1 Desa	1 Desa	4 Desa, 2 Kelurahan

5.4. Keterkaitan RPJPN, RPJPD dan RPJMD

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk :

- 1. Menjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
- 2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 3. Optimalisasi tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- 4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil
- 5. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah;
- 6. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.

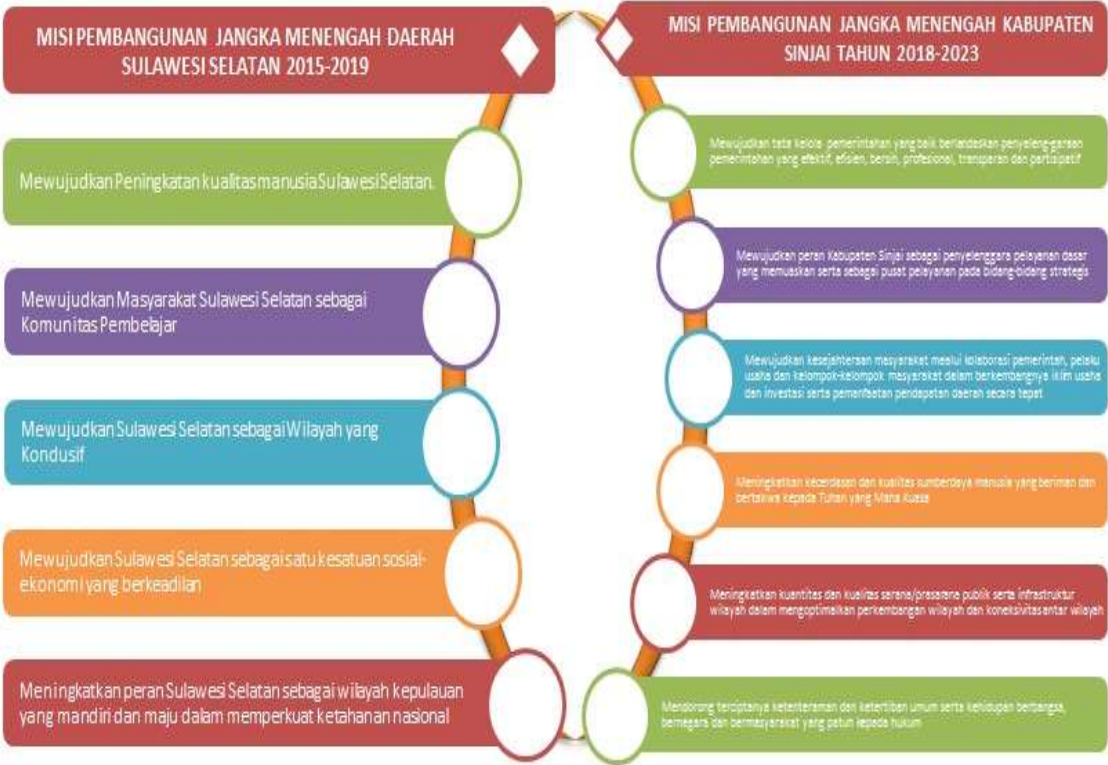


Visi RPJPD (2000-2025) adalah: “Wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan Kemandirian Lokal yang bernafaskan keagamaan”: Dalam visi ini kata “Wilayah Terkemuka di Indonesia” merepresentasikan Sulawesi Selatan sebagai suatu propinsi yang dapat menjadi 10 besar di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan indeks pembangunan manusianya. Wilayah terkemuka tersebut akan direalisasi dengan menggunakan pendekatan pembangunan yakni “Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan”. Pendekatan kemandirian lokal yang diakomodasi dari variabel Fisika (Variabel lokal). Intinya adalah pembangunan suatu “tatanan” harus menjadi bagian dari “tatanan” lainnya. Dengan kata lain output suatu tatanan bisa berguna atau dibutuhkan oleh tatanan lainnya, dengan demikian akan tercipta koneksitas antar tatanan baik dalam maupun dengan luar negeri. Sedangkan kata

“bernafaskan keagamaan” ditambahkan pada pendekatan ini dimaksudkan untuk mempertegas sikap kita bahwa pembangunan yang akan dilakukan di Sulawesi Selatan selalu sesuai dengan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan yang religius.



Visi RPJMD 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan Berkarakter” yang merupakan penjabaran dari visi RPJPD, sehingga target yang dituju adalah menjadikan Sulawesi Selatan sebagai “wilayah terkemuka di Indonesia”. Sedangkan visi Kabupaten Sinjai adalah “ Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”. Keterkaitan Visi RPJPD (2000-2025) dengan visi RPJMD Propinsi (2019-2023) dan visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :



BAB VI

STRATEGI, ARAH

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi dalam RPJMD ini merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan. Langkah yang ditempuh dalam perumusan strategi ini adalah: 1.Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang;2.Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3.Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah; 4.Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan pengertian dan langkah-langkah penyusunan strategi tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Strategi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyeleng-garaan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif		
Tujuan 1: Mewujudkan birokrasi yang baik	Sasaran 1: Terwujudnya integrasi perencanaan dan peng-anggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	Mendorong pengawasan yang ketat terhadap seluruh siklus pemerin-tahan secara bersinergi dengan keterbukaan informasi public ber-basis elektornik

Misi 2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis		
Tujuan-2: Memenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis	Sasaran-2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana dan SDM pelayanan secara beriringan dengan penyadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan dasar secara seksama
	Sasaran-3: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Mendorong daya tarik atas sejumlah layanan strategis secara ber-sinergi dengan pengembangan destinasi wisata
Misi-3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat		
Tujuan-3: Meningkatkan pendapatan masyarakat	Sasaran-3: Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu	Mendorong perlindungan sosial dan pem-bdayaan masyarakat bagi rakyat miskin
	Sasaran-4: Berkembangnya iklim usaha dan investasi	Memperbaiki pelayanan investasi secara ber-sinergi dengan pen-ciptaan wirausaha baru serta stimulus bagi UMKM
	Sasaran-5: Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat	Menyediakan sarana/ prasarana, fasilitas dan penyuluhan teknologi dalam peningkatan pro-duksi dan daya saing produk pertanian, peternakan dan per-ikanan
	Sasaran-6: Meningkatnya produktivitas sumber-sumber pendapatan daerah	Intensifikasi dan eks-tensifikasi pengelolaan sumber-sumber pen-dapatan daerah secara proporsional dengan pemberian layanan dan fasilitas kepada sumber -sumber pendapatan tersebut
Misi-4: Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa		
Tujuan-4: Meningkatkan kualitas manusia	Sasaran-7: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan taraf kualitas lembaga pen-didikan dan memberi bantuan pendidikan pascasarjana dan doktor serta dukungan pendidikan bagi siswa miskin
	Sasaran-8: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan sistem jaminan kesehatan secara proporsional dengan perluasan jangkauan sarana pelayanan serta insentif bagi pelayan kesehatan

	Sasaran-9: Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian dan pembangunan secara luas seiring dengan perlindungan terhadap kekerasan
	Sasaran-10: Meningkatnya aktivitas keagamaan	Mengembangkan Islamic Center sebagai pusat syiar Islam dan memberi dukungan bagi aktivitas lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan
Misi-5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah		
Tujuan-5: Meningkatkan perkembangan wilayah	Sasaran-11: Berkembangnya aktivitas pada sarana/prasarana public kecamatan	Menyediakan sarana/ prasarana dan ruang public sebagai pusat aktivitas tiap kecamatan
	Sasaran-12: Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Membangun, memelihara dan meningkatkan jalan untuk koneksi-vitas dan keterbukaan isolasi wilayah
	Sasaran-13: Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari	Membangun sarana/ prasarana untuk suplai air minum secara beriringan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber air minum
	Sasaran-14 Terpenuhinya sarana/pra-sarana perumahan dan pemukiman	Membangun sarana/ prasarana lingkungan pemukiman dan sanitasi diiringi dengan perbaikan kelayakan huni rumah penduduk
Misi-6: Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.		
Tujuan-6: Meningkatkan kondisi keamanan, ketenteram-an dan ketertiban umum	Sasaran-15: Berkurangnya ganggu-an ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kapa-sitas Satpol-PP dalam pelayanan ketertiban dan ketenteraman se-cara beriringan dengan penguatan kelembaga-an masyarakat dalam swadaya pengamanan lingkungan
Misi-7: Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.		
Tujuan-7: Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup	Sasaran-16: Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan serta sumberdaya alam	Menata taman kota dan RTH pada setiap kecamatan secara ber-sinergi dengan penge-lolaan sampah modern dan revitalisasi terum-bu karang

	Sasaran-17: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Memetakan wilayah rawan bencana seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat untuk tangguh meng-hadapi bencana
--	--	---

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam RPJMD ini diartikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan ini adalah: 1) mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun; 2) mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun; 3) diskusi tim atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi; 4) merumuskan draft arah kebijakan; 5) menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan 6) memutuskan arah kebijakan. Berdasarkan pengertian dan langkah-langkah perumusan tersebut maka arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

	Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing						
No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Misi-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif						
	Tujuan 1: Mewujudkan birokrasi yang baik						
1.	Sasaran 1: Terwujudnya integ-rasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	Mendorong peng-awasan yang ketat terhadap seluruh siklus pemerintahan secara bersinergi dengan keterbukaan informasi public ber-basis elektornik	Pengintegrasian sistem perenca-naan, pengang-garan, monitoring dan evaluasi berbasis elektro-nik	Penataan kepe-gawaian serta organisasi dan tata laksana dalam men-dukung reformasi birokrasi	Pengawasan in-ternal oleh APIP dalam men-dukung reformasi birokrasi	Pelibatan peran tim terpadu pen-cegahan dan pemerantasan korupsi	Penyebarluasan informasi publik dalam men-dukung akun-tabilitas birokrasi
	Misi 2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis						
	Tujuan-2: Memenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis						
2.	Sasaran-2: Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana dan SDM pelayanan secara beriringan dengan penyadaran masyarakat dalam memanfaatkan layan-an dasar secara seksama	Penguatan sistem data penerima layanan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan sarana/prasarana dan SDM untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar	Pemenuhan cakupan dan standar SPM untuk pelayanan dasar	Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPM pelayanan dasar	Pemeliharaan kualitas penyelenggaraan SPM pelayanan dasar
3.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Mendorong daya tarik atas sejumlah layanan strategis secara bersinergi dengan pengembangan destinasi wisata	Pengembangan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau	Pengembangan pusat pelelangan ikan dan wisata kuliner	Pengembangan Taman Hutan Raya	Pengembangan kawasan wisata hutan mangrove	Pemantapan pusat-pusat layanan strategis sebagai destinasi wisata

	Misi-3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat						
	Tujuan-3: Meningkatkan pendapatan masyarakat						
4.	Sasaran-3: Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu	Mendorong per-lindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi rakyat miskin	Pembukaan lapangan kerja baru bagi rakyat miskin	Bantuan bibit kambing dabgi peternak miskin dan perahu serta alat tangkap bagi nelayan miskin	Layanan kesehatan gratis warga miskin	Bantuan pendidikan bagi siswa miskin	Bantuan hukum golongan tidak mampu dan layanan bagi penyandang disabilitas
5.	Sasaran-4: Berkembangnya iklim usaha dan investasi	Memperbaiki pe-layanan investasi secara bersinergi dengan pencipta-an wirausaha baru serta sti-mulus bagi UMKM	Perbaikan regulasi dan pelayanan investasi	Pengembangan wirausaha muda	Stimulus modal dan teknologi bagi UMKM	Pengembangan Badan Usaha Milik Petani	Pemantapan bisnis wirausaha muda
6.	Sasaran-5: Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat	Menyediakan sarana/ prasarana, fasilitas dan penyuluhan teknologi dalam peningkatan pro-duksi dan daya saing produk pertanian, peternakan dan per-ikanan	Pengembangan jalan tani, sum-ber air irigasi, dan bantuan saprodi serta alsintan untuk usaha pertanian	Inseminasi buatan gratis dan pengembangan Sinjai sebagai sentra sapi Sulawesi Selatan	Pengembangan bibit unggul bagi perikanan budidaya dan tambak	Penyuluhan kom-prehensif untuk penguatan komo-ditas unggulan kecamatan	Pengembangan pasar buah modern
7.	Sasaran-6: Meningkatnya produktivitas sumber-sumber pendapatan daerah	Intensifikasi dan eks-tensifikasi pengelola-an sumber-sumber pendapatan daerah secara proporsional dengan pemberian layanan dan fasilitas kepada sumber-sumber pendapatan tersebut	Penataan asset dan sumber-sumber pen-dapatan daerah	Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	Perbaikan pemanfaatan pendapatan daerah	Optimalisasi pemanfaatan pendapatan daerah
	Misi-4: Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa						
	Tujuan-4: Meningkatkan kualitas manusia						
8.	Sasaran-7: Meningkatnya derajat pendidikan	Meningkatkan taraf kualitas lembaga pen-didikan dan	Pengembangan sekolah unggulan dan perbaikan	Beasiswa bagi siswa berpretasi dan	Penguatan kelembagaan	Penguatan kelitbangan	Penguatan peran lembaga pendidikan

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

	masyarakat	memberi bantuan pendidikan pascasarjana dan doktor serta penguatan peran pendidikan tinggi daerah	manajemen berbasis sekolah	pendidikan pascasarjana serta pendidikan doktor	masyarakat dan pemuda serta civil society	daerah dalam mendukung kebijakan dan pembangunan	tinggi daerah dalam pembangunan
9.	Sasaran-8: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan sistem jaminan kesehatan secara proporsional dengan perluasan jangkauan sarana pelayanan serta insentif bagi pelayan kesehatan	Perluasan jangkauan dan kualitas jaminan kesehatan daerah	Pemenuhan dan insentif tenaga kesehatan	Pembangunan rumah sakit tipe D setiap keca-matan	Pelayanan kesehatan khusus serta home care dan home visit	Pemantapan keterpenuhan sarana/prasarana kesehatan
10.	Sasaran-9: Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian dan pembangunan secara luas seiring dengan perlindungan terhadap kekerasan	Penguatan ke-lembagaan peme-rintah daerah dalam pember-dayaan perem-puan dan per-lindungan anak	Perlindungan perempuan dan anak dari KDRT dan kekerasan lingkungan	Penguatan peran perempuan da-lam pengembang-an kesejahteraan keluarga	Penguatan peran perempuan pada birokrasi dan legislatif	Pemantapan peran perempuan dalam pembangunan
11.	Sasaran-10: Meningkatnya aktivitas keagamaan	Mengembangkan Islamic Center se-bagai pusat syiar Islam dan memberi dukungan bagi aktivitas lembaga pendidikan dan lem-baga sosial keagamaan	Pembangunan Islamic Center sebagai pusat pengembangan syiar Islam	Penumbuhkembangan penghafal Al-Qir'an dan revitalisasi Sinjai sebagai Bumi Panrita Kitta	Pemberian insentif kepada pesantren, lembaga keagamaan dan pemuka agama	Pengembangan kegiatan keagamaan pada lembaga pemerintah dan masyarakat	Pemantapan manifestasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
Misi-5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah							
Tujuan-5: Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan sarana/prasarana publik							
12.	Sasaran-11: Berkembangnya aktivitas pada sarana/ prasarana public kecamatan	Menyediakan sarana/prasarana dan ruang public sebagai pusat aktivitas tiap ke-camatan	Pengembangan sarana layanan terpadu kesehatan secara terintegrasi dengan pemadam kebakaran dan siaga bencana tiap kecamatan	Pembangunan stadion bertaraf tinggi di ibukota Kabupaten	Pembangunan sarana/prasarana pasar komoditas unggulan tiap kecamatan	Pembangunan sarana/prasarana pusat olah raga di setiap kecamatan	Pemantapan layanan terpadu kesehatan secara terintegrasi dengan pemadam kebakaran dan siaga bencana tiap kecamatan
13.	Sasaran-12:	Membangun, meme-lihara dan	Perbaiki dan	Pembangunan dan	Pemeliharaan jalan	Pembangunan	Pemantapan jalan

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	meningkat-kan jalan untuk konektivitas dan keterbukaan isolasi wilayah	pemeliharaan akses jalan poros	peningkatan jalan kabupaten	dan jemba-tan secara merata ke pelosok desa	jalan dan jembatan pembuka isiolasi wilayah	kabupaten
14.	Sasaran-13: Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari	Membangun sarana/prasarana untuk suplai air minum secara beriringan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber air minum	Pemetaan wila-yah dan rumah tangga rentan akses air minum sehari-hari	Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana akses air minum	Perluasan jang-kauan infra-struktur dan sarana/prasarana air minum sehari-hari	Akselerasi peme-nuhan jangkauan infrastruktur dan sarana/prasarana air minum sehari-hari	Pemantapan jangkauan infrastruktur dan sarana/prasarana air minum sehari-hari
15.	Sasaran-14: Terpenuhinya sarana/pra-sarana perumahan dan pemukiman	Membangun sarana /prasarana pemuki-man dan sanitasi diiringi dengan perbaikan kelayak-an huni rumah penduduk	Pemetaan wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni	Pembangunan infra-struktur dan sarana/prasarana pemukim-an	Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana perumahan	Perbaikan rumah layak huni	Perbaikan pemukiman kumuh
	Misi-6: Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.						
	Tujuan-6: Meningkatkan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum						
16.	Sasaran-15: Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kapa-sitas Satpol-PP dalam pelayanan ketertiban dan ketenteraman se-cara beriringan dengan penguatan kelembaga-an masyarakat dalam swadaya pengamanan lingkungan	Perbaikan layanan ketenteraman dan ketertiban umum	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam ketertiban dan ketenteraman swakarsa	Penguatan harmoni sosial antar golongan masyarakat	Penguatan kesatuan bangsa	Penyadaran kepatuhan hukum
	Misi-7: Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.						
	Tujuan-7: Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup						
	Sasaran-16: Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan serta sumberdaya alam	Menata taman kota dan RTH pada setiap kecamatan secara ber-sinergi dengan penge-lolaan sampah modern dan revita-lisasi	Modernisasi penanganan sampah	Penyadaran dan gerakan masyarakat pembersihan lingkungan, dengan	Pembangunan dan optimalisasi fungsi drainase perkotaan dan perdesaan	Revitalisasi terumbu karang	Revitalisasi dan pengerukan daerah aliran sungai

		terumbu karang		penanganan sampah RT dan sampah Sejenis RT.			
	Sasaran-17: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Memetakan wilayah rawan bencana se-iring dengan penguatan kapasitas masyarakat untuk tangguh menghadapi bencana	Pemetaan wilayah rawan bencana	Penguatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Pembentukan desa tangguh bencana	Pengembangan desa tangguh bencana	Pemantapan desa tangguh bencana

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih diuraikan dengan tabel berikut :

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Visi																
Misi 1	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Profesional, Transparan Dan Partisipatif															
Tujuan1	Mewujudkan Birokrasi Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	75,5	76,39		77,00		77,15		78,50		79,00		79,00		
Sasaran 1.	Terwujudnya Integrasi Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah	B	B		B		B		BB		A		A		
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKAD
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	RPJPD tepat waktu RPJMD tepat waktu RKPD tdak tepat waktu	RPJPD tepat waktu RPJMD tepat waktu RKPD tepat waktu	4.56 1.24 5.20 0,00	RPJPD tepat waktu RPJMD tepat waktu RKPD tepat waktu	4.483. 694.0 00,00	RPJPD tepat waktu RPJMD tepat waktu RKPD tepat waktu	3.362 .236. 700,0 0	RPJPD tepat waktu RPJMD tepat waktu RKPD tepat waktu	3.702.0 26.000, 00	RPJPD tepat waktu RPJMD tepat waktu RKPD tepat waktu	4.497.0 85.000, 00	RPJPD tepat waktu RPJMD tepat waktu RKPD tepat waktu	20.606.2 86.900,0 0	Bappeda
	Program Peningkatan dan Pengembangan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	4.45 5.08	Tepat Waktu	4.830. 588.0 00	Tepat Waktu	5.313 .646. 800	Tepat Waktu	5.768.0 11.480	Tepat Waktu	6.347.8 12.628	Tepat Waktu	26.715.1 38.908	BPKAD

	Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan			0.00 0											
	Progra Pelaporan Kinerja Keuangan	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja(%)	100	100	90.0 00.0 00	100	99.00 0.000	100	108.9 00.00 0	100	119.79 0.000	100	131.76 9.000	100	131.769. 000	BPKAD
	PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT DAN LAYANAN PUBLIK	Ketersediaan Akses Internet, Penyelenggaraan E-Government, Pemanfaatan website Pemda, Smart City dan tersedianya Data Center di Kabupaten Sinjai	0	100%	2.12 1.29 9.19 4,00	100%	9.813. 569.0 00,00	100%	8.018 .000. 000,0 0	100%	8.030.0 00.000, 00	100%	8.120.0 00.000, 00	100%	36.102.8 68.186,0 0	Kominfo
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA INFORMASI STATISTIK SERTA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Layanan Informasi Publik	0	100%	1.53 2.40 1.29 8,00	100%	2.088. 000.0 00,00	100%	2.177 .600. 000,0 0	100%	2.284.6 00.000, 00	100%	2.422.6 00.000, 00	100%	10.505.2 01.298,0 0	Kominfo
	PROGRAM PERSANDIAN, KEAMANAN DATA DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI	Persentase OPD yang memanfaatkan persandian serta Pengawasan dan	0	100%	178. 581. 404, 00	100%	515.0 00.00 0,00	100%	255.0 00.00 0,00	100%	275.00 0.000,0 0	100%	315.00 0.000,0 0	100%	1.538.58 1.404,00	kominfo

		Pengendalian Layanan Telekomunikasi														
	Program Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	% OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan		100	237.430.000,00	100	210.855.000,00	100	220.855.000,00	100	230.855.000,00	100	240.855.000,00	100	903.420.000,00	setda
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAK-SANA	Persentase Pemenuhan SAKIP Persentase Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran		80%		100%76,39% 85%	352.219.000,00	100%77% 87%,	354.219.000,00	100%77,5% 89%,	356.219.000,00	100%,	358.219.000,00	100%,78,5% 91%	1.420.876.000,00	setda
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah Produk Hukum Daerah; Persentase jumlah temuan yang tertindak lanjut		Perda 12; Perbup 40; SK 830	995.000.000,00								Perda 12; Perbup 40; SK 830	995.000.000,00	setda	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG HUKUM DAN HAM	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif			0,00	Perda 8; Perbup 45; SK 850	670.410.000,00	Perda 10; Perbup 50; SK 850	670.410.000,00	Perda 12; Perbup 50; SK 800	670.410.000,00	Perda 6; Perbup 35; SK 800	670.410.000,00	Perda 58; Perbup 220; SK 4110	2.681.640.000,00	setda

		bidang Hukum dan HAM														
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100%	223.397.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	223.397.000,00	setda
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum			0,00	100%	525.107.900,00	100%	575.818.600,00	100%	629.730.400,00	100%	920.350.400,00	100%	2.651.007.300,00	setda
	PROGRAM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pelaksanaan Prog/Kegiatan Pembangunan di Daerah Kabupaten Lebih Efisien, Efektif, dan Berkualitas		100%	1.300.000,00											setda
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF	Cakupan sistem monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan			0,00	100%	1.009.000.000,00	100%	1.011.500.000,00	100%	1.012.000.000,00	100%	1.012.000.000,00	100%	4.044.500.000,00	setda

	BIDANG PEMBANGUNAN	program pembangunan														
	PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang terpadu efektif dan efisien serta terjaminnya kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat		100%	800.000.000,00											setda
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA	Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang terpadu efektif dan efisien serta terjaminnya kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat			0,00	100%	843.935.000,00	100%	845.000.000,00	100%	845.000.000,00	100%	845.000.000,00	100%	3.378.935.000,00	setda
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100%	223.397.000,00											setda

	KINERJA PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN															
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANGPEMERIN TAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum			0,00	100%	525.1 07.90 0,00	100%	575.8 18.60 0,00	100%	629.73 0.400,0 0	100%	920.35 0.400,0 0	100%	2.651.00 7.300,00	setda
	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100%	14.9 69.1 09.0 55,0 0	100%	13.63 6.082. 485,0 0	100%	15.96 8.995 .784, 00	100%	16.317. 962.46 2,00	100%	22.996. 243.30 8,00	100%	83.888.3 93.094,0 0	setda
	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100%	810. 492. 945, 00	100%	346.5 00.00 0,00	100%	352.0 00.00 0,00	100%	357.00 0.000,0 0	100%	358.00 0.000,0 0	100%	2.223.99 2.945,00	setda
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG KEUANGAN	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja			75.0 00.0 00,0 0	100%	610.0 00.00 0,00	100%	620.0 00.00 0,00	100%	640.00 0.000,0 0	100%	650.00 0.000,0 0	100%	2.595.00 0.000,00	setda
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/	Cakupan pemenuhan pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100%	2.63 2.23 2.10 0,00	100%	2.837. 500.0 00,00	100%	2.967 .775. 000,0 0	100%	3.051.7 96.250, 00	100%	3.116.5 81.500, 00	100%	14.605.8 84.850,0 0	setda

	WAKIL KEPALA DAERAH															
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	% Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	95%	100%	2.66 4.04 7.90 0,00	100%	3.017. 500.0 00,00	100%	1.889 .103. 300,0 0	100%	1.879.5 93.050, 00	100%	2.185.9 74.150, 00	100%	11.636.2 18.400,0 0	setda
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100%	588. 241. 000, 00										588.241. 000,00	setda
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum			0,00	100%	850.0 00.00 0,00	100%	915.0 00.00 0,00	100%	975.00 0.000,0 0	100%	1.035.0 00.000, 00	100%	3.775.00 0.000,00	setda
	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100%	290. 188. 440, 00											setda
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN	Persentase Pemenuhan SAKIP			0,00	100%	523.6 84.00 0,00	100%	533.6 84.00 0,00	100%	543.68 4.000,0 0	100%	553.68 4.000,0 0	100%	2.154.73 6.000,00	setda

	KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA															
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100%	62.605.000,00											setda
	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum			0,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	540.000.000,00	setda
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke			5.081.934.000		7.190.897.000		7.783.518.000		8.217.488.000		8.651.571.000		36.925.408.000	setwan

		dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD														
	Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	Rp 363.824.709	100%	Rp 466.120.000	100%	Rp 464.210.000	100%	Rp 471.020.000	100%	Rp 434.460.000	100%	Rp 2.199.634.709	Kecamatan
	Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	Rp 6.253.759	100%	Rp 7.500.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 8.500.000	100%	Rp 38.253.759	Kecamatan
	Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	Rp 66.378.700	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 386.378.700	Kecamatan
	Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	Rp 155.994.080	100%	Rp 186.900.000	100%	Rp 183.100.000	100%	Rp 184.600.000	100%	Rp 189.500.000	100%	Rp 900.094.080	Kecamatan
	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 1.850.690.000	Kecamatan
	Program Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	% OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi		100		100%	164.586.500,00	100%	168.586.500,00	100%	172.586.500,00	100%	174.586.500,00	100%	680.346.000,00	Bagian Ortala
	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR	Persentase ASN yang Memiliki Nilai SKP ≥ 76 .	70 %	80 %	113.329.250	83 %	185.329.250	87 %	113.329.250	90 %	113.329.250	95 %	113.329.250	95 %	638.646.250	BKPSDMA

	PROGRAM MANAJEMEN PNS	Persentase Capaian Indikator Sistem Merit.	46,30%	56,60 %	3.90 1.66 4.90 6	69,60%	6.128. 899.7 50	71,00%	5.992 .899. 750	80,00%	6.003.8 99.750	81,50%	6.083.8 99.750	81,50%	28.111.2 63.906	BKPSDMA
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	% APIP yang tersertifikasi	100	100	363. 012. 394	100	399.3 13.63 3	100	439.2 44.99 7	100	483.16 9.496	100	531.48 6.446	100	2.216.22 6.967	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% Rekomendasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang Tuntas	78%	78%	2.08 3.90 5.34 0	79%	2.281. 936.1 99	79%	2.499 .628. 848	80%	2.738.1 51.356	81%	3.009.5 69.863	79 %	12.613.1 91.606	Inspektorat
	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Cakupan OPD yang menerapkan Sistem Administrasi Kearsipan		80 %	21.9 25.0 00	80 %	146.1 80.00 0	80 %	148.7 98.00 0	80 %	150.23 7.900	80 %	151.74 9.795	80 %	618.890. 695	perpustakaan
	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP	% Penyelamatan dan Pelestarian Dok/Arsip yang terpenuhi		80	45.2 53.0 00	80	142.0 21.50 0	80	100.3 33.43 0	80	105.20 0.101	80	111.21 0.106	80	504.018. 137	perpustakaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	% Meningkatnya Minat Baca masyarakat		100	440. 493. 700	100	587.9 61.60 0	100	586.9 42.76 0	100	678.42 7.397	100	655.88 1.265	100	2.941.30 6.722	perpustakaan
	Program Peningkatan kapasitas	Terwujudnya peningkatan kapasitas	0	100%	179.	100%	187.3	100%	193.0	100%	197.22 0.000	100%	204.46 3.860	100%	961.970. 984	Litbang

	kelembagaan Litbang Daerah	kelembagaan litbang daerah			904.124		63.000		20.000							
	Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Sosian, Ekonomi, dan Pemerintahan	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	0	90%	345.589.430	1	589.800.000	1	567.500.000	1	345.500.000	1	310.500.000	1	2.158.889.430	Litbang
	Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, SDA dan Lingkungan hidup	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	0	0	247.409.950	1	430.391.248	1	328.000.000	1	651.060.000	1	439.181.200	1	2.096.042.398	Litbang
	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	% kebijakan inovasi yang diimplementasikan	0	90%	73.256.345	1	1.289.361.400	1	439.271.100	1	547.100.770	1	454.223.390	1	2.083.213.005	Litbang
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	100%	Rp 1.084.812.500,00	100%	Rp 1.239.000.000,00	100%	Rp 1.259.000.000,00	100%	Rp 1.282.000.000,00	100%	Rp 1.295.500.000,00	100%	Rp 6.160.312.500,00	Capil
		Cakupan Penerbitan KTP	100	100		100		100		100		100		100		Capil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	100	100		100		100		100		100		100		Capil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100	100		100		100		100		100		100		Capil
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kota Layak Pemuda		1 Ranperda	692.935.	Terbentuknya sentra	1.000.000.000,00	Persentase Pemuda	999.000.000,00	Kota Layak Pemuda	1.136.500.000,00	Kota Layak Pemuda	1.151.800.000,00	100%	4.980.235.905	Pemuda Olah raga

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

				Kepemudaan	905,00	layanan pemuda		a Berprestasi								
	Program Pembinaan dan Pembudayaan Olahraga	Program Pembinaan dan Pembudayaan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional	10 Orang Tingkat Provinsi	2 Org Tingkat Nasional, 8 Orang Tingkat Provinsi	128.095.374,00	5 Org Tingkat Nasional, 10 Orang Tingkat Provinsi	649.850.000,00	7 Org Tingkat Nasional, 15 Orang Tingkat Provinsi	619.500.000,00	8 Org Tingkat Nasional, 18 Orang Tingkat Provinsi	883.580.000,00	10 Org Tingkat Nasional, 20 Orang Tingkat Provinsi	732.770.000,00	100%	Pemuda Olah raga
	Program Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan		100%	98.766.150,00		225.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		265.000.000,00		1.068.766.150	
Misi-3:	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat															
Tujuan-3:	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB/kapita	38.10	38-42		38-42		38-42		38-42		38-42		38-42		
Sasaran 3.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu	Angka Kemiskinan	8-9	8-9		8-9		8-9		8-9		8-9		8-9		
	Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	8.724 KK	8.724 KK	100.097.190	8.724 KK dan 50 Orang	1.275.000.000	9.000 KK dan 100 Orang	1.400.000.000	9.000 KK dan 150 Orang	1.530.000.000	9.500 KK dan 200 Orang	1.655.000.000	9.500 KK dan 500 Orang	5.960.097.190	Dinas Sosial

	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan masyarakat	300 Org	300 Org	140.087.316	500 Org	1.375.000.000	500 Org	1.500.000.000	500 Org	1.500.000.000	500 Org	1.470.000.000	2300 Org	5.985.087.316	Dinas Sosial
Sasaran 4.	Berkembangnya iklim usaha dan investasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,53	1-4		1-4		1-4		1-4		1-4		1-4		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Jumlah wirausaha baru (unit UMKM)	25.500 UMK	25.900 UMK	214.276.054	UMK 26.300	980.000.000	UMK 27.300	1.122.000.000	UMK 28.600	1.247.000.000	UMK 30.600	1.367.000.000	UMK 30.600	25.500 UMK	Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya nilai produksi dari sektor industri daerah	468.293.043 *)	498.293.000	4.566.570.000	513.293.000	1.486.570.000	528.293.000	1.516.570.000	543.293.000	1.501.465.000	558.293.000	1.516.465.000	558.293.000	10.587.640.000,00	Perindag
		Jumlah pertumbuhan industri	3.777	3.877		3.927		3.977		4.027		4.077		4.077		
		Cakupan bina kelompok binaan pengrajin		2 Klp		2 Klp		2 Klp		2 Klp		2 Klp		10 Klp		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang aktif :	84 KOPERASI aktif	87	311.977.158	89	478.190.000	91	1.020.190.000	93	638.190.000	95	475.190.000	95	2.923.737.158	Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI	Jumlah sentra-sentra/IKM industri baru		2 klp	150.000.000,00	2 klp	150.000.000	2 klp	155.000.000	2 klp	155.000.000,00	2 klp	160.000.000,00	10 klp	770.000.000,00	perindag

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEMPATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJA AN	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	393 ORANG	412	366. 937. 148	453	1.530. 000.0 00	520	3.650 .000. 000	624	1.705.0 00.000	780	1.750.0 00.000	780 org	9.001.93 7.148	Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah perusahaan yang melakukan realisasi investasi (unit perusahaan)Juml ah Nilai Investasi	6.007.662.08 7.394	1.312. 938.81 3.787	73.3 70.0 00	1.339.1 97.590. 063	348.0 00.00 0	1.367.5 57.274. 392	473.0 00.00 0	1.394.908 .419.880	178.00 0.000	1.422.80 6.588.27 7	165.00 0.000	6.837.40 8.686.39 9	1.237.37 0.000	PTSP
	Program Promosi dan Kerjasama Invesatasi	Jumlah MOU yang disepakati (unit MOU)	PMDN = 304	10 Calon Invest or	172. 895. 000	10 Calon Investo r	271.0 00.00 0	10 Calon Investo r	316.0 00.00 0	10 Calon Investor	351.00 0.000	10 Calon Investor	400.00 0.000	50 Calon Investor	1.510.89 5.000	PTSP
Sasaran 5.	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	45,99	45,75		45,52		45,30		45,07		44,84		444,84		
		Kontribusi sektor industri dalam PDRB	2,78	3,00		4,12		5,37		6,00		7,00		7,00		
		Kontribusi sektor jasa dalam PDRB	14,00	14,45- 16,00		14,45- 16,00		14,45- 16,00		14,45- 16,00		14,45- 16,00		14,45- 16,00		
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS	Meningkatkan Produksi Tanaman Bahan	1) Produksi Padi (Ton GKG) 2) Produksi	Produ ksi Padi (Ton	1.21 0.00	Produk si Padi (Ton	1.270. 500.0 00	Produk si Padi (Ton	1.334 .025. 000	Produksi Padi (Ton GKG) = 139.523,	1.400.7 26.250	Produk si Padi (Ton	1.470.7 62.563	Produksi Padi (Ton	6.686.01 3.813	Pertanian

	DAN MUTU SERTA NILAI TAMBAH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pangan Utama dan Hortikultura	Jagung (Ton PPK) 3). Produksi Hortikultura Sayuran (Ton Sayuran Segar) 4). Produksi Hortikultura Buah - buahan (Ton Buah Segar)	GKG) = 131.47 6, Produksi Jagung (Ton PPK) = 15.552 , Produksi Hortikultura Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 6.135, Produksi Hortikultura Buah - buahan (Ton Buah Segar) = 21.298	0.00 0	GKG) = 134.106 , Produk si Jagung (Ton PPK) = 16.330, Produk si Hortiku ltura Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 6.442, Produk si Hortiku ltura Buah - buahan (Ton Buah Segar)= 21.363		GKG) = 136.78 8, Produk si Jagung (Ton PPK) = 17.146, Produk si Hortiku ltura Sayura n (Ton Sayura n Segar) = 6.764, Produk si Hortiku ltura Buah - buahan (Ton Buah Segar)= 23.481		Produksi Jagung (Ton PPK) = 18.003, Produksi Hortikult ura Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 7.102, Produksi Hortikult ura Buah -buahan (Ton Buah Segar)=2 4.655		GKG) = 142.314, Produk si Jagung (Ton PPK) = 18.904, Produk si Hortikul tura Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 7.457, Produk si Hortikul tura Buah - buahan (Ton Buah Segar)= 25.888		GKG) = 142.314, Produk si Jagung (Ton PPK) = 18.904, Produk si Hortikul tura Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 7.457, Produk si Hortikul tura Buah - buahan (Ton Buah Segar)= 25.888		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Pertanian Penunjang	1). Pengembang an Prasarana dan Sarana Air (Ha), 2)	Penge mbang an Prasar ana	10.0 40.0 00.0 00	Pengem bangan Prasara na dan Sarana	10.54 2.000. 000	Penge mbang an Prasara na dan	11.06 9.100 .000	Pengemb angan Prasaran a dan Sarana	11.622. 555.00 0	Pengem bangan Prasaran a dan Sarana	12.203. 682.75 0	Pengemb angan Prasaran a dan Sarana	55.477.3 37.750	Pertanian

	SARANA PERTANIAN	Usahatani/Agribisnis	Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM), 3). Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	dan Sarana Air (Ha), 2.000, Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian=50		Air (Ha), 2.000, Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian=50		Sarana Air (Ha), 2.000, Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian=50		Air (Ha), 2.000, Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian=50		Air (Ha), 2.000, Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian=50		Air (Ha), 2.000, Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian=50		
	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Pertanian Penunjang Usahatani/Agribisnis	a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air (Ha) b. Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM) c. Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	a. 2.000, b. 20, c. 50	<u>8.82</u> <u>9.19</u> <u>5.31</u> <u>2</u>	a.1.000 b.20 c. 50	<u>9.270.</u> <u>655.0</u> <u>78</u>	a.1.000 b. 20 c. 50	<u>9.734.</u> <u>187.8</u> <u>31</u>	a. 1.000 b. 20 c. 50	<u>10.220.</u> <u>897.223</u>	a. 1.000 b. 20 c. 50	<u>10.731.</u> <u>942.084</u>	a. 1.000 b. 20 c. 50	<u>48.786.8</u> <u>77.528</u>	Pertanian

			2. Mewujudkan kelembagaan petani sebagai basis kegiatan pembangunan pertanian a. Meningkatkan Kemampuan Kelompok Tani b. Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) - KEP - BUMP													
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Mewujudkan kelembagaan petani sebagai basis kegiatan pembangunan pertanian	1). Meningkatkan Kemampuan Kelompok Tani 2). Peningkatan Jumlah		1.135.000	1). Meningkatnya Kemampuan Kelompok Tani =240,	1.191.750.000	1). Meningkatnya Kemampuan Kelompok Tani =240,	1.251.337.500	1). Meningkatkan Kemampuan Kelompok Tani =240, 2).	1.313.904.375	1). Meningkatnya Kemampuan Kelompok Tani =240, 2).	1.379.599.594	1). Meningkatnya Kemampuan Kelompok Tani =240, 2).	6.271.591.469	Pertanian

			Kelompok Tani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP)			2). Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP=1		2). Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP=2		Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP=2		Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP=2		Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP=2		
	Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan	Populasi ternak sapi potong (ekor) Peningkatan jumlah kelompok binaan pengolahan peternakan		3 % 2 Kelompok	2.57 5.33 1.20 0,00	3 % 3 Kelompok	5.614. 258.5 00,00	3 % 3 Kelompok	5.757 .008. 500,0 0	3 % 3 Kelompok	5.786.5 46.000, 00	3 % 3 Kelompok	5.811.9 10.375, 00	3 % 15 Kelompok	25.545.0 54.575,0 0	Peternakan

	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat	87,50%	89,50 %	515.889.949	92,50%	593.273.441	93,50%	652.600.785	95,00%	750.490.903	96,50%	863.064.539	96,50%	3.375.319.618	Dinas Ketahanan pangan
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan		10 %	2.060.170.808,00	10 %	2.949.000.000,00	10 %	3.129.000.000,00	10 %	3.199.000.000,00	10 %	3.379.000.000,00	10 %	14.716.170.808,00	Peternakan
	Program peningkatan pemasaran teknologi dan usaha hasil peternakan	Peningkatan Promosi Produk Unggulan Peternakan		6 Kali	495.999.950,00	6 Kali	920.000.000,00	6 Kali	750.000.000,00	6 Kali	895.000.000,00	6 Kali	835.000.000,00	6 Kali	3.895.999.950,00	Peternakan
		Peningkatan Jumlah Kelompok Peternak yang Memanfaatkan Teknologi		4 klp		4 klp		4 klp		4 klp		4 klp		4 klp		
	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Volume produksi budidaya perikanan (ton)	35.418	41212	885.050.000	35.418	2.118.500.000	37.189	1.886.500.000	39.048	1.272.500.000	41.000	1.931.500.000	193.867	8.094.050.000	Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	31.462	31.462	1.721.172.000	32.406	2.145.000.000	33378	1.924.000.000	34.379	2.223.000.000	35.410	2.231.000.000	167.035	10.244.172.000	Perikanan
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Meningkatnya industri hasil olahan	1.420	1.448	101.382.998	1.476	134.500.000	1.505	243.000.000	1.535	161.500.000	1.565	170.000.000	7.529	672.882.998	Perikanan

	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin		2 Klp		2 Klp		2 Klp		2 Klp		2 Klp		10 Klp		Perindag
					4.56 6.57 0.00 0,00		1.486. 570.0 00,00		1.516 .570. 000,0 0		1.501.4 65.000, 00		1.516.4 65.000, 00		10.587.6 40.000,0 0	perindag
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0	100%	14.4 71.4 97.0 00,0 0	100%	8.286. 887.0 00,00	100%	9.084 .967. 000,0 0	100%	9.894.7 59.000, 00	100%	10.777. 058.00 0,00	100%	52.515.1 68.000,0 0	Perindag
	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEREKONOMIAN	Terwujudnya Akselerasi Program bidang Perekonomian		100%	725. 000. 000, 00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	725.000. 000,00	setda
	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase penyelenggaraan koordinasi administrasi yang dihasilkan			200. 000. 000, 00	100%	1.105. 000.0 00,00	100%	1.190 .000. 000,0 0	100%	1.255.0 00.000, 00	100%	1.300.0 00.000, 00	100%	5.050.00 0.000,00	setda
		Jumlah rumusan kebijakan bidang ekonomi yang dihasilkan				1 Perda; 6 Perbup /Pedum /Juklak /Juknis		6 Perbup /Pedum /Juklak /Juknis		6 Perbup/P edum/Ju klak/Juk nis		6 Perbup/ Pedum/J uklak/Ju knis		1 Perda; 16 Perbup/ Pedum/J uklak/Ju knis		
Sasaran 6.	Meningkatnya produktivitas sumber-sumber pendapatan daerah	Kontribusi PAD dalam APBD	8.17%	8,05%		8,70%		8,84%		8,64%		8,55%		8,55%		

	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok/pedagang usaha informal	17 PKL	67 PKL	758.120.000,00	80 PKL	788.120.000,00	90 PKL	818.120.000,00	100 PKL	823.120.000,00	100 PKL	758.120.000,00	100 PKL	5.453.840.000,00	perindag
		Terlaksananya pembinaan pelaku usaha makan dan minum tradisional/jajanan sekolah dan sosialisasi perlindungan konsumen		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		
		Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	100%	100%	2.210.050.000	100%	2.250.200.000	100%	2.310.380.000	100%	2.350.500.000	100%	2.458.560.000	100%	2.458.560.000	bapenda
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% kontribusi peningkatan retribusi sektor pariwisata	215% dari tahun sebelumnya	5% (dari tahun sebelumnya)	1.754.530.400	8% (dari tahun sebelumnya)	4.785.000.000	10% dari tahun sebelumnya	2.100.000.000	15% dari tahun sebelumnya	1.400.000.000	20% dari tahun sebelumnya	1.210.000.000	20% dari tahun sebelumnya	11.249.530.400	pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	84.606	88.836	295.202.500	93.277	1.245.000.000	97.940	970.000.000	102.837	1.375.000.000	107.978	1.350.000.000	107.978	5.235.202.500	pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan dan	Jumlah Kegiatan Budaya Yang Terpelihara	3 event	3 event	300.	3 event	870.3	3 event	798.0	3 event	1.095.000.000	3 event	773.000.000	3 event	3.836.738.000	pariwisata

	Keragaman Budaya				438.000		00.000		00.000							
Misi-4:	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa															
Tujuan-4:	Meningkatkan kualitas manusia	IPM	65,80	65-70		65-70		65-70		65-70		65-70		65-70		
		IPG dan IDG	IPG: 98,07 IDG :72,60	IPG: 98,10 IDG :72,64		IPG: 98,22 IDG :72,68		IPG: 98,28 IDG :72,70		IPG: 98,28 IDG :72,74		IPG: 98,30 IDG :72,80		IPG: 98,30 IDG :72,80		
Sasaran 7.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7-10	7-10		7-10		7-10		7-10		7-10		7-10		
		Angka Harapan Lama Sekolah	12-14	12-14		12-14		12-14		12-14		12-14		12-14		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru SD dan SMP yang tersertifikasi (%)	SD= SMP=	100	649.207.470		821.295.470	100	821.295.470	100	671.295.470	100	671.295.470	100	671.295.470	pendidikan
Sasaran 8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	66-70	66-70		66-70		66-70		66-70		66-70		66-70		
	PROGRAM KEFARMASIAN, PERBEKALAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai standar Pelayanan Minimal		100%	14.862.200.850	100%	16.856.808.245	100%	20.595.469.390	100%	22.822.642.729	100%	26.128.332.012		101.265.453.226	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Cakupan desa Melaksanakan STBM		100%	454.666.000	100%	527.245.000	100%	566.100.500	100%	556.100.500	100%	556.100.500	100%	2.660.212.500	Dinas Kesehatan

	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100%	100%	87.659.186.600	100%	87.971.735.335	100%	92.502.124.769	100%	94.316.416.145	100%	101.042.719.359	100%	463.492.182.208	Dinas Kesehatan
	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Pelayanan Pasien Miskin yang datang di RS dan Dilayani di RS	100%	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	200.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	% Rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)		80%	877.711.500	80%	1.519.711.500	80%	1.369.711.500	80%	1.469.711.500	80%	1.419.711.500	80%	6.656.557.500	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	% Pasien Klinik Berhenti Merokok yang berhenti merokok	-	6 %	89.090.000	6 %	120.000.000	6 %	130.000.000	7 %	140.000.000	7 %	155.000.000	7 %	634.090.000	Rumah Sakit Umum Daerah
		% Pasien rawat Jalan dan rawat inap TB yang ditangani dengan Strategi DOTS	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Pengadaan, Pemeliharaan, Peningkatan dan Perbaikan Saraana/Prasaraan Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk		1/100.000 pddk	30.420.000.000		67.100.000.000		22.300.000.000		51.800.000.000		22.100.000.000		193.720.000.000	Dinas Kesehatan

	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSUD	% Pemenuhan sarana/prasarana RS sesuai standar RS kelas B	72%, 100%	82 % 100 %	284.910.000	1/100.000 pddk	395.000.000	83 % 100 %	265.000.000	83% 100%	365.000.000	84% 100%	405.000.000	84 % 100%	1.714.910.000	
	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	% Pemenuhan Kebutuhan makan minum pasien sesuai standar	90%	100 %	5.000.000	100 %	5.500.000	100 %	6.000.000	100 %	6.500.000	100 %	7.000.000	100 %	30.000.000	RSUD
	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase Pemenuhan Indikator Lingkungan Sehat dan Lingkungan Sosial	0	80 %	250.000.000	85 %	60.000.000	90 %	70.000.000	95 %	80.000.000	100 %	90.000.000	100 %	550.000.000	RSUD
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD	Quality of Place (Bad Occupation Rate/BOR, Length of Stay /LOS, Turn over interval/TOI, Bad Turn Over)	GDR (21/1000), NDR (14/1000), BOR (64%), LOS (4HR), BTO (39), TOI (3)	GDR (40/1000), NDR (20/1000), BOR (65%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	40.000.000	GDR (40/1000), NDR (20/1000), BOR (65%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	44.000.000	GDR (40/1000), NDR (20/1000), BOR (65%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	48.000.000	GDR (40/1000), NDR (20/1000), BOR (65%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	50.000.000	GDR (40/1000), NDR (20/1000), BOR (65%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	55.000.000	GDR (40/1000), NDR (20/1000), BOR (65%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	237.000.000	RSUD
	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS	67%	65 %	37.165.673.000	66 %	48.255.000.000	67 %	52.610.000.000	68 %	38.865.000.000	69 %	37.620.000.000	69 %	218.515.673.000	RSUD

	PRASARANA RUMH SAKIT/ RS JIWA/ RS PARU-PARU/ RS MATA	Sesuai Standar RS Kelas B														
	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Sesuai Akreditasi RS	72%	82 %	284.910.000	82 %	395.000.000	83%	265.000.000	83 %	365.000.000	84%	405.000.000	84 %	1.714.910.000	RSUD
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU ME-LAHIRKAN DAN ANAK	Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Pre-eklampsia	2,42%	≤30 %	25.480.000	≤30 %	34.000.000	≤30 %	37.000.000	≤30 %	40.000.000	≤30 %	42.000.000	≤30 %	7.500.000	RSUD
		Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan : Perdarahan	3,30%	≤1 %		≤1 %		≤1 %		≤1 %		≤1 %		≤1 %		
		Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Sepsis	0%	0.1 %		0.1 %		0.1 %		0.1 %		0.1 %		0.1 %		
	PROGRAM, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN BAGI	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Bagi Pasien Dampak	-	83 %	-	83 %	3.000.000.000	84 %	3.000.000.000	84 %	3.000.000.000	85 %	3.000.000.000	85 %	12.000.000.000	RSUD

	PASIENT DAPAK ASAP ROKOK	Asap Rokok Sesuai Standar														
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	70%	71,57	4.08 1.88 0.00 0	71,6	4.658. 000.0 00	71,62	3.033 .000. 000	71,68	5.570.0 00.000	71,7	5.882.0 00.000	71,7	23.224.8 80.000	Pemberday aan perempuan dan KB
Sasaran 9.	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	IPG dan IDG	IPG: 98,07 IDG :72,60	IPG: 98,10 IDG :72,64		IPG: 98,22 IDG :72,68		IPG: 98,28 IDG :72,70		IPG: 98,28 IDG :72,74		IPG: 98,30 IDG :72,80		IPG: 98,30 IDG :72,80		
	Program Pemberdayaan Perempuan	% PD yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	21,42%	23.81	62,5 00,0 00	33.33	235,0 00,00 0	42.86	242,0 00,00 0	52.38	155,00 0,000	61.90	390,00 0,000	61.9	1,084,50 0,000	Pemberday aan perempuan dan KB
	Program Perlindungan Anak	% Indikator Pemenuhan Hak Anak yang Tercapai	48,39%	61.29	132, 016, 000	64,52	297,0 00,00 0	67.74	289,0 00,00 0	70.97	148,00 0,000	74.19	279,00 0,000	74.19	1,145,01 6,000	Pemberday aan perempuan dan KB
Sasaran10.	Meningkatnya aktivitas keagamaan	Cakupan aktivitas keagamaan yang terlaksana														
	Program Peningkatan Mental -Spiritual, Sosial- Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Mental Spritual dan Keagamaan serta Bidang Kesra		100%	6.24 9.79 2.00 0,00										6.249.79 2.000,00	Bagian Kesra Setda
Misi 5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah															
Tujuan 5	Meningkatkan kapasitas infrastruktur	% kecamatan yang memiliki aksesibilitas dan														

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

	dalam mendukung konektivitas wilayah dan sarana/prasarana publik	sarana-prasarana publik														
Sasaran 11.	Berkembangnya aktivitas pada sarana/prasarana public kecamatan	Cakupan ketersediaan sarana-prasarana public kecamatan	PRC(1)Sport Center , Pasar	PRC(1) Sport Center (1) , Pasar (2)		PRC(1) Sport Center (6), Pasar (2)		PRC(1) Sport Center (4) , Pasar (2)		PRC(1)Sport Center (4) , Pasar (2)		PRC(1)Sport Center (2), Pasar (2)		PRC(1)Sport Center (2), Pasar (2)		
	Program Keciaptakaryaan	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	100%	100%	32.709.003.720,00	100%	42.592.060.000,00	100%	25.215.020.000,00	100%	20.138.260.000,00	100%	18.553.160.000,00	100%	144.722.601.940,00	
Sasaran 12.	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan kualitas baik	62,62	62,30		62,33		62,40		62,40		62,44		62,44		
		Jumlah pengguna pelabuhan dan terminal	69	69		69,5		70		70,5		71		71		
	Program Kebinamargaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	38,67%	45,52 %	235.409.053.995,00	50,30%	124.940.000.000,00	51,49%	122.950.000.000,00	52,68%	123.360.000.000,00	53,88%	121.660.000.000,00	53,88%	618.707.200.000,00	PUPR
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	91,41%	91,41 %		92.02 %		92.02 %		92.14 %		92.33 %		92.33 %		
	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha JAsa	36,67%	100%	970.000.000	100%	1.185.000.000,00	100%	1.210.000.000,00	100%	1.205.000.000,00	100%	1.330.000.000,00	100%	5.900.000.000,00	PUPR

		Konstruksi (IUK)														
	Program penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	57,14%	100 %	220.212.950,00	100 %	6.991.254.950,00	100 %	5.690.000.000,00	100 %	5.280.000.000,00	100 %	6.267.000.000,00	100 %	30.012.509.900,00	PUPR
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB	0,03%	0,03%		0,04 Ha		0,05 Ha		0,07 Ha		0,08 Ha		0,10Ha		
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah ketersediaan angkutan umum darat dan laut	259 unit AUD, 21 AUL.	269 unit AUD, 22 AUL.	1.013.716.300	279 unit AUD, 23 AUL.	1.546.128.700,00	289 unit AUD, 24 AUL.	1.023.376.700,00	299 unit AUD, 25 AUL.	1.045.376.700,00	309 unit AUD, 26 AUL.	846.376.700,00	309 unit AUD, 26 AUL.	5.474,975.100,00	perhubungan
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	SOT RLL,1 3.53 1 MJ,5 14 Guadril,5 TL,28 RPPJ, 552	1000 m mark a jalan	389.265.300	100 RLL,1.000 MJ,10 OGua dril,5 0 DL,2 CT,1 ZS, 2 RS	1.137.000.000,00	100 RLL,1.000 MJ,1 TL,10 OGua dril,1 TL,50 DL,2 CT,1 ZS, 1	1.518.000.000,00	100 RLL,1.000 MJ,10 OGua dril,6 RPPJ, 50 DL,2 CT,1 ZS, 2	1.255.000.000,00	100 RLL,1.000 MJ,10 OGua dril,5 0 DL,2 CT,1 ZS, 1 RS	1.150.000.000,00	1.302 RLL,18 .531 MJ,1.041 Guadr il,7 TL,40 RPPJ, 802 DL,18	5,449,265.300,00	perhubungan
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	% kendaraan umum yang laik operasi	1500 KBW U&6 Alat Uji	1550 KBW U&1 1 Alat Uji	120.893.000,00	1600 KBW U&11 Alat Uji	1.260.000.000,00	1650 KBW U&11 Alat Uji	162.000.000,00	1700 KBW U&11 Alat Uji	140.000.000,00	1750 KBW U&11 Alat Uji	163.000.000,00	1800 KBWU &6 Alat Uji	1.845.893.000,00	perhubungan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	7 halte bus, 2 rambu suar, 17 derm	0	0,00	2 halte bus, 1 rambu suar,1 derm aga,5 0	715.000.000,00	2 halte bus, 1 rambu suar, 50ta	190.000.000,00	2 halte bus, 1 rambu suar,5 0tam	215.000.000,00	2 halte bus, 1 rambu suar, 1 derm aga,5	390.000.000,00	17 halte bus, 6 rambu suar,1 9 derma ga,45	1.510.000.000,00	perhubungan

								mbat an		batan perah						
Sasaran 13.	Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari	% Penduduk yang mengakses sumber air minum	65,23 %	69 %		69 %		69,5 %		70 %		70,5 %		71 %		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	71,26%	70.46 %	10.1 25.6 59.9 75,0 0	71.16 %	33.23 4.690. 000,0 0	71.87 %	34.42 5.580 .000, 00	72.62 %	32.175. 620.00 0,00	73.37 %	34.011. 597.00 0,00	73.37 %	205.775. 527.000, 00	PUPR
Sasaran 14.	Terpenuhinya sarana prasarana perumahan, pemukiman	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	88,73%	88,76 %	4.09 0.00 0.00 0	88,77%	1.430. 000.0 00	88,79%	1.380 .000. 000	88,80%	1.230.0 00.000	88,82%	1.230.0 00.000	88,82%	9.360.00 0.000	Tarkim
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,07	0,133		0,127		0,121		0,115		0,109		0,109		Tarkim
		Rasio jaringan irigasi	71,26%	72,01 %		72,76%		73,51%		74,34%		75,17%		75,17%		Tarkim
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun menjadi layak huni	88,73%	88,76 %	4.09 0.00 0.00 0	88,77%	1.430. 000.0 00	88,79%	1.380 .000. 000	88,80%	1.230.0 00.000	88,82%	1.230.0 00.000	88,82%	9.360.00 0.000	Tarkim
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS PERMUKIMAN KUMUH	114,3 Ha	109,30 Ha (-5 Ha)	9.36 6.02 7.50 0	104,30 Ha (-5 Ha)	9.290. 000.0 00	99,30 Ha (-5 Ha)	8.840 .000. 000	94,30 Ha (-5 Ha)	8.840.0 00.000	89,30 Ha (-5 Ha)	8.840.0 00.000	89,30 Ha (-25 Ha)	45.176.0 27.500	Tarkim
	PROGRAM PERTANAHAN	JUMLAH SERTIFIKAT TANAH PEMDA	8 Sertifikat	10 Sertifikat	3.13 2.05 5.00 0	10 Sertifikat	270.0 00.00 0	10 Sertifikat	270.0 00.00 0	10 Sertifikat	270.00 0.000	10 Sertifikat	270.00 0.000	50 Sertifikat	4.212.05 5.000	Tarkim

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Misi-6	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum															
Tujuan 6	Meningkatkan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Sasaran 15	Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	% Gangguan K3 yang tertangani	75%	76%		77%		78%		79%		80%		80%		
	Program Peningkatan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban, kemandirian dan kenyamanan lingkungan serta pencegahan tindak kriminal	Jumlah kejadian gangguan K3 dan tindak kriminal	2 Kali	2 Kali	4.79 1.80 1.00 0,00	2 Kali	4.237. 730.0 00,00	2 Kali	4.405 .370. 000,0 0	3 Kali	4.409.3 70.000, 00	3 Kali	5.863.8 37.000, 00	12 Kali	23.708.1 08.000,0 0	
	Program Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	951. 170. 000	100%	683.6 70.00 0	100%	688.6 70.00 0	100%	788.67 0.000	100%	853.67 0.000	100%	3.965.85 0.000	Pol. PP
	Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga dan Unsur Agama/etnis yang berkoordinasi dalam kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Tingkat Daerah	9 Lembaga, 4 Agama, 7 Etnis	9 Lemba ga/ 5 Agama / 7 Etnis	256. 202. 500	9 Lembag a/ 5 Agama/ 7 Etnis	290.0 00.00 0	9 Lembag a/ 5 Agama / 7 Etnis	308.0 00.00 0	9 Lembaga / 5 Agama/ 7 Etnis	318.00 0.000	9 Lembag a/ 5 Agama/ 7 Etnis	331.00 0.000	9 Lembaga / 5 Agama/ 7 Etnis	1.503.20 2.500	Kesbang

	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Jumlah Kelompok dan Organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	1 Lembaga	9 lembaga	577.447.500	9 lembaga	606.000.000	9 lembaga	740.000.000	9 lembaga	755.000.000	9 lembaga	771.000.000	9 lembaga	1 Lembaga	Kesbang
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Parpol, Ormas dan LSM pada Pilleg,Pilpres,Pilgub Pilbup dan Pilkades	80%	80%	23.019.130.572	80%	27.441.986.476	80%	26.344.746.716	80%	27.840.414.855	80%	29.257.882.192	80%	133.904.160.811	Kesbang
Misi 7	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan															
Tujuan 7	Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup	IKLHD	68,29	67		68		69		70		71		71		
Sasaran 16	Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan serta sumberdaya alam	Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura)	-	Adipura		Adipura		Adipura		Adipura		Adipura		Adipura		LH
	Program Pengolahan Persampahan dan Limbah B3	Prosentase Pengelolaan Sampah	42,58%	100%	5.670.500	97%	9.783.000.000	98%	9.443.000.000	99%	10.810.000.000	99%	10.320.000.000	99%	Prosentase Pengelolaan Sampah	LH
	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	68.29 (cukup baik)	67 (cukup baik)	823.500.000	68 (cukup baik)	1.212.500.000	69 (cukup baik)	2.187.500.000	70 (baik)	929.500.000	71 (baik)	970.000.000	71 (baik)	Indeks kualitas lingkungan hidup	LH

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemenuhan parameter Pengujian kualitas lingkungan	7 paramater	7 paramater	945.000.000	14 parameter	1.483.000.000	14 parameter	2.510.000.000	14 parameter	3.090.000.000	20 parameter	3.560.000.000		11.588.000.000	LH
	PROGRAM PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (%)	2%	10%	1.520.500.000	20 %	1.288.000.000	30 %	847.000.000	40%	893.000.000	50%	988.500.000	50%	5.537.000.000	LH
	PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI	Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat	0	10 PJUTS, 1 DED, 20 Biogas	1.283.048.000,00	10 PJUTS, 1 DED, 20 Biogas	909.000.000,00	10 PJUTS, 1 DED, 20 Biogas	984.900.000,00	10 PJUTS, 1 DED, 20 Biogas	1.068.390.000,00	10 PJUTS, 20 Biogas	1.160.533.000,00	50 PJUTS, 100 Biogas, 4 DED EBTKE	5.405.871.000,00	SDA
Sasaran 17	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Jumlah desa tangguh bencana	1 Kelurahan	1 Desa		1 Desa		1 kel.		1 desa		1 desa		1 kel, 4 desa		
	Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa yang dibina untuk tangguh bencana	0		-	2 kel, 7 desa	70.000.000	2 kel, 7 desa	71.693.000	2 kel, 8 desa	73.386.000	1 kel, 8 desa	75.079.000	7 kel, 30 desa	290.158.000	BPBD
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase LSM Aktif, Persentase LPM Berprestasi, Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM	Persentase LSM Aktif = 18,75%, Persentase LPM Berprestasi = 3,75%, Rata-	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi	57.888.315	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi	179.565.000	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi	149.565.000	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi	149.565.000	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi	149.565.000	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi	686.148.315	Pemberdayaan masyarakat

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

			rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1	LPM Berprestasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1		tasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1		LPM Berprestasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1		si = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1		asi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1		asi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1		
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 25,11%	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 29,56%	12.098.875	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 34,54%	65.000.000	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 37,03%	65.000.000	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 40,04%	65.000.000	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 46,87%	65.000.000	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 46,87%	272.098.875	Pemberdayaan masyarakat
	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 47,44; PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 47,44; PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif	611.549.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif	1.272.263.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif	1.197.263.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu	1.197.263.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu	1.197.263.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu	5.475.603.500	Pemberdayaan masyarakat

				100%, Posyan du Aktif = 100%		100%, Posyan du Aktif = 100%		100%, Posyan du Aktif = 100%		Aktif = 100%		Posyand u Aktif = 100%		u Aktif = 100%		
	Program Pendorongan Swadaya Masyarakat Dalam Menurunkan AKI, AKB, Perbaikan Gizi Balita dan Imunisasi	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, perbaikan Gizi balita dan Cakupan Imunisasi		AKI<6 /4050 Kelahi ran Hidup, AKB<5 /1000 Kelahi ran Hidup, Stunti ng 43%, IDL 92%	170. 883. 000	AKI<5/ 4050 Kelahir an Hidup, AKB<4/ 1000 Kelahir an Hidup, Stuntin g 35%, IDL 92%	-	AKI<4/ 4050 Kelahir an Hidup, AKB<3 /1000 Kelahir an Hidup, Stuntin g 29%, IDL 92%	-	AKI<3/40 50 Kelahiran Hidup, AKB<2/1 000 Kelahiran Hidup, Stunting 25%, IDL 92%	-	AKI<2/4 050 Kelahira n Hidup, AKB<1/ 1000 Kelahira n Hidup, Stunting 20%, IDL 92%	-	AKI<2/4 050 Kelahira n Hidup, AKB<1/ 1000 Kelahira n Hidup, Stunting 20%, IDL 92%	170.883. 000	Pemberday aan masyarakat
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif		100%	49.3 79.6 30	100%	341.5 00.00 0	100%	341.5 00.00 0	100%	341.50 0.000	100%	341.50 0.000	100%	1.415.37 9.630	Pemberday aan masyarakat
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Persentase Posyantek Aktif		100%	28.8 52.4 25	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	28.852.4 25	Pemberday aan masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik = 94,00%	Cakup an sarana prasar ana perkan toran pemer	231. 692. 690	Cakupa n sarana prasara na perkant oran pemer	703.7 24.00 0	Cakupa n sarana prasara na perkant oran pemer	547.4 47.00 0	Cakupan sarana prasaran a perkanto ran pemerint ahan desa	547.44 7.000	Cakupan sarana prasaran a perkant oran pemerin tahan	547.44 7.000	Cakupan sarana prasaran a perkant oran pemerint ahan	2.577.75 7.690	Pemberday aan masyarakat

				ntahan desa yang baik = 95,52 %		ntahan desa yang baik = 97,01%		ntahan desa yang baik = 98,51%		yang baik = 100%		desa yang baik = 100%		desa yang baik = 100%		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--

Tabel 6.4
Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sinjai 2018-2023

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir (2023)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Misi 2	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis															
Tujuan 2	Memenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis	Cakupan pemenuhan SPM pelayanan dasar		100		100		100		100		100		100		
Sasaran 2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dasar (SPM)		100		100		100		100		100		100		
	ROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MT S)	100%	100%	16.7 14.2 20.7 50,0 0	100%	56.65 8.069. 230	100%	56.65 8.069 .230	100%	56.658. 069.23 0	100%	56.658. 069.23 0	100%	280.010. 945.420	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi	100%	100%	1.23 6.68 1.99 0,00	100%	1.316. 535.7 40	100%	1.316 .535. 740	100%	1.316.5 35.740	100%	1.316.5 35.740	100%	6.582.67 8.700	Dinas Pendidikan

		dalam Pendidikan Kesetaraan														
	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	100%	727.607.730,00	100%	6.218.708.350	100	6.218.708.350	100	6.218.708.350	100	6.218.708.350	100%	30.339.930.520	Dinas Pendidikan
	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar		100%	5.573.753.260	100%	5.889.241.260	100%	5.906.241.260	100%	6.058.241.260	100%	6.059.241.260		29.486.718.300	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar		100%	4.073.366.260	100%	4.238.854.260	100%	4.245.854.260	100%	4.247.854.260	100%	4.248.854.260		21.054.783.300	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar		100%	2.730.397.000		2.768.240.000		2.773.240.000		2.773.240.000		2.773.240.000		13.818.357.000	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100%												
	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	70%	100%	721.144.000	100%	636.628.000	100%	646.628.000	100%	646.628.000	100%	746.628.000	100%	3.397.656.000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PELAYANAN	Cakupan Pelayanan		100%	945.	100%	964.9	100%	969.9	100%	931.928.000	100%	949.928.000	100%	4.762.016.000	Dinas Kesehatan

	KESEHATAN USIA LANJUT	Kesehatan Pada Usia Lanjut			304.000		28.000		28.000							
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Penanganan dan pencegahan penyakit tidak menular tertangani sesuai standar :		100%	7.639.601.000		7.615.592.000	100%	7.707.592.000	100%	8.005.592.000	100%	7.207.592.000	100%	38.175.969.000	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus sesuai standar		100%	1.726.057.000	100%	1.788.405.000	100%	1.880.405.000	100%	1.518.405.000	100%	1.380.405.000	100%		Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Penanganan dan pencegahan penyakit menular tertangani sesuai standar:		100%	5.826.971.950	100%	6.339.487.845	100%	6.035.893.030	100%	6.925.652.047	100%	6.974.393.087	100%		Dinas Kesehatan dan RSUD
		cakupan Pelayanan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

		Kesehatan orang dengan TB sesuai standar														
		cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita HIV AIDS	100%	100 %	151.025.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	220.000.000	100 %	230.000.000	100 %	1.021.025.000	RSUD
	Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	71,10	100 %	17.778.300.770	100%	141.200.000.000	100%	28.445.000.000	100%	28.445.000.000	100%	34.416.000.000	100%	114.951.079.000,00	Dinas PUPR
	Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	86,80	100%		100%		100%		100%		100%		100%	235.280.468.950	Dinas PUPR
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	0,38%	0,60%	13.069.208.950	0,80%	79.451.110.000	1,1%	54.296.130.000	1,5%	47.349.860.000	1,5%	41.114.160.000	1,5%		
		Persentase drainase dalam kondisi	80,56%	84,00 %		86,00%		88,00%		90,00%		90,00%		(0,00%		

		baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat														
	Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)		100		100		100		100		100		100		Dinas Perkimtan
	Program Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		100		100		100		100		100		100		Dinas Perkimtan
	Program Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		100	951.170.000,00	100	583.670.000,00	100	588.670.000,00	100	688.670.000,00	100	753.670.000,00	100	3.565.850.000,00	Satpol PP dan Damkar
	Perogram Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Tingkat kerentanan masyarakat dalam upaya pengurangan resikoencana	100%	100%	381.861.000	100%	1.632.019.000	100%	807.177.000	100%	902.335.000	100%	662.493.000	100%	4.385.885.000	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan	Persentase Warga Negara yang	100%	100%	65.0	100%	236.6	100%	245.1	100%	253.623.000	100%	262.088.000	100%	1.062.562.000	BPBD

	Evakuasi Korban Bencana	Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana			00.000		93.000		58.000							
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN	Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	100%	3.290.500,00	100%	2.525.500,00	100%	4.172.500,00	100%	2.729.000,00	100%	1.556.000,00	100%	14.273.500,00	Pol. PP dan Damkar
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Tuna Sosial di Luar Panti	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)	100%	100%	739.188.646	100%	1.505.000,00	100%	1.520.000,00	100%	1.520.000,00	100%	1.575.000,00	100%	6.859.188.646	Dinas Sosial
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)	100%	100%	791.824.790	100%	1.055.000,00	100%	965.000,00	100%	1.115.000,00	100%	1.015.000,00	100%	4.941.824.790	Dinas Sosial
Sasaran 3.	Berkembangnya pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan	% Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	30586 Izin	100%	617.787.000	100%	787.520,00	100%	1.243.020.000	100%	910.020.000	100%	981.520.000	100%	4.539.867.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Publik	% Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	30586 Izin	100%	617.787.000	100%	787.520,00	100%	1.243.020.000	100%	910.020.000	100%	981.520.000	100%	4.539.867.000	ptsp

	Program Pengelolaan dan Pengembangan Tahura Abdul Latief	% Implementasi RPJP Tahura	10%	25%	789.750	40%	4.938.500	55%	6.010.190	75%	6.186.300	100%	6.683.800	100%	24.608.540	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan
	Program Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove dan Taman Hutan Raya (TAHURA)	% peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada kawasan ekowisata hutan mangrove dan taman hutan raya	-	20%	3.220.357.000	20%	2.700.000.000	20%	1.200.000.000	20%	2.700.000.000	20%	2.200.000.000	20%	12.020.357.000	Dinas Parwisata
	Program penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	57,14%	100 %	220.212.950,00	100 %	6.991.254.950,00	100 %	5.690.000.000,00	100 %	5.280.000.000,00	100 %	6.267.000.000,00	100 %	30.012.509.900,00	PUPR
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB	0,03%	0,03%		0.04 Ha		0.05 Ha		0.07 Ha		0.08 Ha		0.10Ha		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Restra Perangkat Daerah beserta indikator Kinerja, Pagu Indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini merupakan perspektif rencana penganggaran untuk alokasi belanja langsung program pemerintah daerah, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah untuk lima tahun periode pemerintahan 2018-2023 Kabupaten Sinjai yang akan datang. Memuat hasil perhitungan dan perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja langsung program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan kerangka pendanaan ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan sosial daerah, sebagai instrumen-instrumen pokok dalam memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode lima tahun pembangunan Kabupaten Sinjai yang akan datang.

a. Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah diperlukan untuk melakukan analisis keuangan daerah, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun dari sisi peningkatan belanja daerah. Asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah tersebut, meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi daerah, (2) PDRB per kapita, (3) tingkat inflasi, (4) tingkat kemiskinan, (5) tingkat pengangguran terbuka, serta (6) indeks pembangunan manusia (IPM) yang akan menjadi tujuan dan sasaran makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Sinjai lima tahun yang akan datang.

Pada sisi pendapatan, upaya peningkatan pendapatan daerah menempatkan asumsi makro ekonomi dan sosial daerah ini sebagai potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kondisi makro ekonomi dan sosial daerah yang baik, bukan hanya akan memperbaiki kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik, tetapi diekspektasikan akan mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah dan masyarakat dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, dengan asumsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga berjalan dengan baik.

Sebaliknya, pada sisi belanja, target-target makro ekonomi dan sosial daerah akan berdampak pada kebutuhan alokasi belanja daerah yang besar. Semakin tinggi target makro ekonomi dan sosial daerah semakin tinggi kebutuhan fiskal daerah bersangkutan. Selanjutnya, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah tersebut merupakan potensi dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah, sehingga antara asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial ini akan memiliki hubungan timbal balik dengan aspek keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja daerah.

Berikut asumsi makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Sinjai yang hendak dicapai dan diharapkan menjadi instrumen pokok dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun implementasi pembangunan daerah ke depan.

Tabel 7.1
Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi dan Sosial Daerah Kabupaten Sinjai,
Tahun 2019-2023

No	Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,50	7,72	7,91	8,06	8,21
2	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	46,94	52,11	57,84	64,20	71,26
3	Inflasi (%)	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,68	8,42	8,25	8,04	7,78
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,22	4,04	3,88	3,75	3,12
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,00	67,60	68,22	68,83	69,46

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Hasil proyeksi asumsi makro ekonomi dan sosial daerah ini berdasarkan pada capaian Kabupaten Sinjai dalam lima tahun terakhir. Selain itu, asumsi-asumsi tersebut memperhitungkan kondisi lingkungan strategis, seperti capaian makro ekonomi dan sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, serta wilayah-wilayah

terkait lainnya yang dapat berdampak pada capaian kinerja ekonomi dan sosial Kabupaten Sinjai.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kabupaten Sinjai akan terus membaik, baik nilai indeksnya maupun peringkatnya di wilayah Sulawesi Selatan. Indikator makro ekonomi Kabupaten Sinjai 5 (lima) tahun ke depan diperkirakan akan terus meningkat melalui kebijakan pemerintah kabupen Sinjai yang mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

b. Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Selama periode 2019-2023, dana perimbangan diperkirakan tetap menyumbang hingga 80,0 persen terhadap total pendapatan daerah, dengan harapan kebijakan keuangan negara juga tetap konsisten dalam mendorong peningkatan pendapatan negara, sehingga bagi hasil ke daerah juga tetap memadai untuk mendukung operasional pemerintahan daerah. Sedangkan pendapatan dari PAD mencapai 12,0 persen dari total pendapatan daerah selama periode ini. Kontribusi PAD ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Mengingat kontribusi PAD diperkirakan akan meningkat dari hanya sekitar 7,0 persen selama periode sebelumnya dan diharapkan meningkat hingga 12,0 persen selama periode pembangunan 2019-2023 yang akan datang.

Harapan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah secara bertahap ini, terutama dibebankan pada sumber PAD dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan berkontribusi minimal 23,0 persen hingga tahun 2023 yang akan datang. Pada saat yang sama kinerja sumber PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah (HPKD) yang dipisahkan diharapkan juga akan semakin baik, terutama inovasi dalam pengelolaan BUMD, serta penyertaan modal pada BUMD/BUMN/BUMS yang mampu menghasilkan deviden dan menjadi sumber PAD yang berkesinambungan bagi Kabupaten Sinjai ke depan. Selanjutnya Dana Perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 10,92 persen selama periode 2019-2023.

Tabel 7.2
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Kabupaten Sinjai Tahun

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan PAD	7,64	8,48	9,67	11,63	12,00
2.	Pertumbuhan Dana Perimbangan:					
		11,94	10,04	7,97	11,18	13,45
	a. Pertumbuhan DBH	5.34	09,57	8,39	11,18	13,04
	b. Pertumbuhan DAU	15,79	09,12	8,52	10,15	10,50
	c. Pertumbuhan DAK	05,83	06,10	7,96	07,81	08,05

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Kerangka pendanaan merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Sehubungan dengan hal tersebut kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7.3
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2023

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			KAPASITAS RIIL BELANJA					
2			BELANJA DAERAH	1.292.735.251.035	1.438.814.334.402	1.604.277.982.858	1.791.978.506.853	2.005.223.949.168
2	1		Belanja Tidak Langsung	672.222.330.538	733.795.310.545	802.138.991.429	878.069.468.358	962.507.495.601
2	1	1	Belanja Pegawai	537.538.636.794	586.775.108.468	641.425.731.316	702.143.091.042	769.663.463.389
2	1	2	Belanja Bunga					
2	1	3	Belanja Subsidi					
2	1	4	Belanja Hibah	35.510.334.052	38.762.944.073	42.373.218.276	46.384.267.118	50.844.729.703
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	1.618.899.246	1.767.184.190	1.931.774.875	2.114.636.684	2.317.987.053
2	1	6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	1.308.098.902	1.427.915.731	1.560.907.882	1.708.663.422	1.872.974.076
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	93.476.931.528	102.039.058.929	111.542.696.771	122.101.328.447	133.842.990.889
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	2.768.430.016	3.023.099.154	3.304.662.310	3.617.481.645	3.965.350.492

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	2		Belanja Langsung	620.512.920.497	705.019.023.857	802.138.991.429	913.909.038.495	1.042.716.453.568
2	2	1	Belanja Pegawai	32.507.475.924	36.934.587.802	42.022.515.713	47.877.933.053	54.625.905.264
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	277.235.880.892	314.991.942.421	358.383.689.591	408.320.872.899	465.870.097.102
2	2	3	Belanja Modal	310.769.563.681	353.092.493.635	401.732.786.125	457.710.232.544	522.220.451.201

7.2 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan Kondisi Umum Daerah, Visi dan Misi, Strategi, Arah Kebijakan Keuangan dan Arah Kebijakan Umum yang telah diuraikan di atas , serta guna mencapai sinergitas dan sinkronisasi Kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten, maka rumusan program prioritas pembangunan daerah telah diformulasikan menurut **urusan Pemerintahan, wajib dan pilihan** yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian disesuaikan dan dikembangkan guna menjawab tantangan dan kebutuhan daerah yang akan dicapai selang lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sinjai

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR														
PENDIDIKAN														
DINAS PENDIDIKAN				60.129.029.000,00		69.305.791.840		69.305.791.840		69.155.791.840		69.155.791.840		341.988.859.240
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	3.076.393.750,00	100%	3.040.590.540	100%	3.040.590.540	100%	3.040.590.540	100%	3.040.590.540	100%	15.167.952.700
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	201.048.510,00	100%	239.098.510	100%	239.098.510	100%	239.098.510	100%	239.098.510	100%	1.195.492.550
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	100%	727.607.730,00	100%	6.218.708.350	100	6.218.708.350	100	6.218.708.350	100	6.218.708.350	100%	30.339.930.520
ROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS)	100%	100%	16.714.220.750,00	100%	56.658.069.230	100%	56.658.069.230	100%	56.658.069.230	100%	56.658.069.230	100%	280.010.945.420
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	1.236.681.990,00	100%	1.316.535.740	100%	1.316.535.740	100%	1.316.535.740	100%	1.316.535.740	100%	6.582.678.700

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	% Guru Kualifikasi S1,S2,D4, dan tersertifikasi	100%	100%	3.299.964.770,00	100%	821.295.470	100%	821.295.470	100%	671.295.470	100%	671.295.470	100%	3.634.389.350
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan		100%	1.011.494.000	100%	1.011.494.000	100%	1.011.494.000	100%	1.011.494.000	100%	1.011.494.000	100%	5.057.470.000
KESEHATAN														
Dinas Kesehatan				109.544.166.660		212.736.364.485		176.670.938.249		212.440.267.461		193.121.562.025		966.265.867.180
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	cakupan pemenuhan Pelayanan Perkantoran	12 BL	12 BL	4.567.973.425,00	12 BL	13.201.747.300	12 BL	13.948.009.800	12 BL	14.767.615.280	12 BL	15.779.026.308	12 BL	
PROGRAM PELAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	285.738.905,00	100%	985.000.000	100%	990.000.000	100%	1.006.500.000	100%	1.024.650.000	100%	4.984.150.000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN IBU BERSALIN	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar		100%	5.573.753.260	100%	5.889.241.260	100%	5.906.241.260	100%	6.058.241.260	100%	6.059.241.260		29.486.718.300
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar		100%		100%	4.238.854.260	100%	4.245.854.260	100%	4.247.854.260	100%	4.248.854.260		21.054.783.300
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR DAN BALITA	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar		100%	2.730.397.000		2.768.240.000		2.773.240.000		2.773.240.000		2.773.240.000		13.818.357.000
	2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100%											
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	70%	100%	721.144.000	100%	636.628.000	100%	646.628.000	100%	646.628.000	100%	746.628.000	100%	3.397.656.000
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		100%	945.304.000	100%	964.928.000	100%	969.928.000	100%	931.928.000	100%	949.928.000	100%	4.762.016.000

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
'PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan masyarakat yang BerPHBS		80%	877.711.500	80%	1.519.711.500	80%	1.369.711.500	80%	1.469.711.500	80%	1.419.711.500	80%	6.656.557.500
PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Cakupan desa Melaksanakan STBM		100%	454.666.000	100%	527.245.000	100%	566.100.500	100%	556.100.500	100%	556.100.500		2.660.212.500
PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100%	100%	87.659.186.600	100%	87.971.735.335	100%	92.502.124.769	100%	94.316.416.145	100%	101.042.719.359	100%	463.492.182.208
PROGRAM PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA/PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN JARINGANNYA	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk		1/100.000 pddk	30.420.000.000		67.100.000.000		22.300.000.000		51.800.000.000		22.100.000.000		193.720.000.000
PROGRAM KEFARMASIAN, PERBEKALAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Ketersedian Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai standar Pelayanan Minimal		100%	14.862.200.850	100%	16.856.808.245	100%	20.595.469.390	100%	22.822.642.729	100%	26.128.332.012		101.265.453.226
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Penanganan dan pencegahan penyakit menular tertangani sesuai standar:		100%	5.826.971.950	100%	6.339.487.845	100%	6.035.893.030	100%	6.925.652.047	100%	6.974.393.087	100%	32.102.397.959
	cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%			
	cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%			
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Penanganan dan pencegahan penyakit tidak menular tertangani sesuai standar :		100%	7.639.601.000		7.615.592.000	100%	7.707.592.000	100%	8.005.592.000	100%	7.207.592.000	100%	38.175.969.000

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Rumah Sakit Umum Daerah				81.935.473.000		100.877.500.000		109.917.500.00		98.764.500.000		103.125.000.000		505.941.493.000
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	3.902.105.000	100 %	4.718.500.000	100 %	5.508.500.000	100 %	5.960.000.000	100 %	6.486.000.000	100 %	26.575.105.000
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	100 %	32.190.000	100 %	39.500.000	100 %	41.000.000	100 %	43.000.000	100 %	45.000.000	100 %	200.690.000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	Quality of Services (GDR, NDR)	GDR (21/1000), NDR (14/1000)	GDR (40/1000), NDR (20/1000)	40.000.000.000	GDR (40/1000) , NDR (20/1000)	44.000.000.000	GDR (40/1000), NDR (20/1000)	48.000.000.000	BOR (67%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	50.000.000.000	GDR (40/1000) , NDR (20/1000) 0	55.000.000.000	GDR (40/1000) , NDR (20/1000)	237.000.000.000
	Quality of Place (BOR, LOS, BTO,TOI)	BOR (64%), LOS (4HR), BTO (39), TOI (3)	BOR (65%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)		BOR (66%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)		BOR (67%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)		BOR (68%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (2)		BOR (70%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (2) 0		BOR (70%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (2)	
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Pelayanan Pasien Miskin yang datang di RS dan Dilayani di RS	100%	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	200.000.000
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN	% Pasien Klinik Berhenti Merokok yang berhenti merokok	-	6 %	89.090.000	6 %	120.000.000	6 %	130.000.000	7 %	140.000.000	7 %	155.000.000	7 %	634.090.000

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
	% Pasien rawat Jalan dan rawat inap TB yang ditangani dengan Strategi DOTS	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	% Pemenuhan Kebutuhan makan minum pasien sesuai standar	90%	100 %	5.000.000	100 %	5.500.000	100 %	6.000.000	100 %	6.500.000	100 %	7.000.000	100 %	30.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase Pemenuhan Indikator Lingkungan Sehat dan Lingkungan Sosial	0	80 %	250.000.000	85 %	60.000.000	90 %	70.000.000	95 %	80.000.000	100 %	90.000.000	100 %	550.000.000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita HIV AIDS	100%	100 %	151.025.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	220.000.000	100 %	230.000.000	100 %	1.021.025.000
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Sesuai Akreditasi RS	72%	82 %		82 %		83 %		83 %		84 %		84 %	
				284.910.000		395.000.000		265.000.000		365.000.000		405.000.000		1.714.910.000
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMH SAKIT/ RS JIWA/ RS PARU-PARU/ RS MATA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar RS Kelas B	67%	65 %	37.165.673.000	66 %	48.255.000.000	67 %	52.610.000.000	68 %	38.865.000.000	69 %	37.620.000.000	69 %	218.515.673.000
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Pre-eklampsia	2,42%	≤30 %	25.480.000	≤30 %	34.000.000	≤30 %	37.000.000	≤30 %	40.000.000	≤30 %	42.000.000	≤30 %	7.500.000.000

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan : Perdarahan	3,30%	≤1 %				≤1 %				≤1 %			
	Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Sepsis	0%	0.1 %				0.1 %				0.1 %			
PROGRAM, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN BAGI PASIEN DAMPAK ASAP ROKOK	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Bagi Pasien Dampak Asap Rokok Sesuai Standar	-	83 %	-	83 %	3.000.000.000	84 %	3.000.000.000	84 %	3.000.000.000	85 %	3.000.000.000	85 %	12.000.000.000
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
Dinas Pekerjaan Umum				280.354.543.000		283.212.048.575		254.261.178.982		247.281.987.741		229.721.133.901		1.316.325.664.805
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100 %	1.339.968.485,00	100 %	2.531.445.127,00	100 %	2.884.901.187,00	100 %	3.324.472.434,00	100 %	3.943.248.019,00	100 %	15.012.929.093,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100	100 %	339.269.440,00	100 %	391.598.498,00	100 %	407.677.795,00	100 %	425.635.307,00	100 %	445.128.882,00	100 %	2.045.769.922,00
PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	71,10	100 %	17.778.300.770	100%	141.200.000.000	100%	28.445.000000	100%	28.445.000000	100%	34.416.000.000	100%	114.951.079.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	86,80	100%	13.069.208.950	100%	79.451.110.000	100%	54.296.130.000	100%	47.349.860.000	100%	41.114.160.000	100%	235.280.468.950

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	0,38%	0,60%		0,80%		1,1%		1,5%		1,5%		1,5%	
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	80,56%	84,00%		86,00%		88,00%		90,00%		90,00%		(0,00%	
PROGRAM KECIPTAKARYAAN	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	100%	100%	32.709.003.720,00	100%	42.592.060.000,00	100%	25.215.020.000 ,00	100%	20.138.260.000,00	100%	18.553.160.000,00	100%	144.722.601.940,00
PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	38,67%	45,52%	235.409.053.995,00	50,30%	124.940.000.000,00	51,49%	122.950.000.000,00	52,68%	123.360.000.000,00	53,88%	121.660.000.000,00	53,88%	618.707.200.000,00
					92.02 %		92.02 %		92.14 %		92.33 %		92.33 %	
	Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	91,41%	91.72 %											
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	71,26%	70.46 %	10.125.659.975,00	71.16 %	33.234.690.000,00	71.87 %	34.425.580.000 ,00	72.62 %	32.175.620.000,00	73.37 %	34.011.597.000,00	73.37 %	205.775.527.000,00
PROGRAM PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	57,14%	100 %	220.212.950,00	100 %	6.991.254.950,00	100 %	5.690.000.000,00	100 %	5.280.000.000,00	100 %	6.267.000.000 ,00	100 %	30.012.509.900,00
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB	0,03%	0,03%		0.04 Ha		0.05 Ha		0.07 Ha		0.08 Ha		0.10Ha	
PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha JAsa Konstruksi (IUJK)	36,67%	100%	970.000.000	100%	1.185.000.000,00	100%	1.210.000.000,00	100%	1.205.000.000,00	100%	1.330.000.000 ,00	100%	5.900.000.000,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				26.630.627.500		22.340.000.000		21.840.000.000		21.690.000.000		21.690.000.000		114.190.627.500
PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN	JUMLAH WARGA KABUPATEN SINJAI KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH WARGA KABUPATEN SINJAI YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	88,73%	88,76%	4.090.000.000	88,77%	1.430.000.000	88,79%	1.380.000.000	88,80%	1.230.000.000	88,82%	1.230.000.000	88,82%	9.360.000.000
	CAKUPAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PSU	5,08 %,	7,91%	9.910.000.000	10,73%	11.210.000.000	13,56%	11.210.000.000	16,38%	11.210.000.000	19,21%	11.210.000.000	19,21%	54.750.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS PERMUKIMAN KUMUH	114,3 Ha	109,30 Ha (-5 Ha)	9.366.027.500	104,30 Ha (-5 Ha)	9.290.000.000	99,30 Ha (-5 Ha)	8.840.000.000	94,30 Ha (-5 Ha)	8.840.000.000	89,30 Ha (-5 Ha)	8.840.000.000	89,30 Ha (-25 Ha)	45.176.027.500
	Luas Permukiman Kumuh	43,96 Ha	38.96 Ha (-5 Ha)	132.545.000	33.96 Ha (-5 Ha)	140.000.000	28.96 Ha (-5 Ha)	140.000.000	23.96 Ha (-5 Ha)	140.000.000	18.96 Ha (-5 Ha)	140.000.000	18.96 Ha	692.545.000
PROGRAM PERTANAHAN	JUMLAH SERTIFIKAT TANAH PEMDA	8 Sertifikat	10 Sertifikat	3.132.055.000	10 Sertifikat	270.000.000	10 Sertifikat	270.000.000	10 Sertifikat	270.000.000	10 Sertifikat	270.000.000	50 Sertifikat	4.212.055.000

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				9.816.412.000,00		9.473.150.750,00		10.583.762.000,00		9.146.462.000,00		9.586.079.000,00		48.605.865.750,00
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1.679.371.000,00	100%	2.651.540.750,00	100%	1.945.152.000,00	100%	1.944.852.000,00	100%	2.103.002.000,00	100%	10.323.917.750,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	54.740.000,00	100%	58.740.000,00	100%	60.740.000,00	100%	63.240.000,00	100%	63.240.000,00	100%	300.700.000,00
PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Frekwensi Patroli pada Lokasi Strategis	2 Kali/jam	2 Kali/jam	3.840.631.000	2 Kali/jam	3.653.700.000	2 Kali/jam	3.816.700.000	3 Kali/jam	3.720.700.000	3 Kali/jam	5.110.167.000	12 Kali	20.141.898.000
PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	100%	100%	951.170.000	100%	683.670.000	100%	688.670.000	100%	788.670.000	100%	853.670.000	100%	3.965.850.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN	Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	100%	3.290.500.000,00	100%	2.525.500.000,00	100%	4.172.500.000,00	100%	2.729.000.000,00	100%	1.556.000.000,00	100%	14.273.500.000,00
Badan Penanggulangan Bencana				4.836.786.694,00		6.127.576.694,00		5.343.366.694,00		5.479.156.694,00		5.279.946.694,00		27.066.833.470,00
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	3.585.229.280	100%	3.620.782.280	100%	3.656.335.280	100%	3.691.888.280	100%	3.727.441.280	100%	18.281.676.400
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	5 laporan/dok	100%	26.475.000	100%	29.861.000	100%	33.247.000	100%	36.633.000	100%	40.019.000	100%	166.235.000
Perogram Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Tingkat kerentanan masyarakat dalam	100%	100%	381.861.000	100%	1.632.019.000	100%	807.177.000	100%	902.335.000	100%	662.493.000	100%	4.385.885.000

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	upaya pengurangan resikoencana													
Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa yang dibina untuk Tangguh Bencana	0		-	2 kel, 7 desa	70.000.000	2 kel, 7 desa	71.693.000	2 kel, 8 desa	73.386.000	1 kel, 8 desa	75.079.000	7 kel, 30 desa	290.158.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	100%	100%	65.000.000	100%	236.693.000	100%	245.158.000	100%	253.623.000	100%	262.088.000	100%	1.062.562.000
Pogram Logistik dan tanggap darurat Bencana	Cakupan Layanan Logistik dan Tanggap Darurat	90 org	105 org, 10 paket	725.082.414	105 org, 10 paket	2.228.468.414	105 org, 10 paket	731.854.414	105 org, 10 paket	735.240.414	105 org, 10 paket	738.626.414	105 org, 10 paket	3.659.272.070
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahap Pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	8 Paket	4 paket, 5 dok, 150 org	435.000.000	4 paket, 5 dok, 150 org	441.772.000	4 paket, 5 dok, 150 org	448.544.000	4 paket, 5 dok, 150 org	455.316.000	4 paket, 5 dok, 150 org	462.088.000	4 paket, 5 dok, 150 org	2.242.720.000
Sosial														
Dinas Sosial				3.234.314.613		7.174.860.000		6.999.260.000		7.199.760.000		7.254.760.000		31.862.954.613
Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1.372.286.348	100%	1.849.860.000	100%	1.499.260.000	100%	1.419.760.000	100%	1.424.760.000	100%	7.565.926.348
Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	90.830.323	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	550.830.323
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Tuna Sosial di Luar Panti	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)	100%	100%	739.188.646	100%	1.505.000.000	100%	1.520.000.000	100%	1.520.000.000	100%	1.575.000.000	100%	6.859.188.646
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)	100%	100%	791.824.790	100%	1.055.000.000	100%	965.000.000	100%	1.115.000.000	100%	1.015.000.000	100%	4.941.824.790
Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	8.724 KK	8.724 KK	100.097.190	8.724 KK dan 50 Orang	1.275.000.000	9.000 KK dan 100 Orang	1.400.000.000	9.000 KK dan 150 Orang	1.530.000.000	9.500 KK dan 200 Orang	1.655.000.000	9.500 KK dan 500 Orang	5.960.097.190

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan masyarakat	300 Org	300 Org	140.087.316	500 Org	1.375.000.000	500 Org	1.500.000.000	500 Org	1.500.000.000	500 Org	1.470.000.000	2300 Org	5.985.087.316
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
Perhubungan														
Dinas Perhubungan				2.780.357.600,00		6.234.793.700,00		4.320.423.700,00		4.092.143.700,00		3.988.143.700,00	21.415.862.400,00	
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	1.195.524.000,00	100%	1.513.706.000,00	100%	1.362.088.000,00	100%	1.369.808.000,00	100%	1.369.808.000,00	100%	6.810.934.000,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	100 %	60.959.000,00	100%	62.959.000,00	100%	64.959.000,00	100%	66.959.000,00	100%	68.959.000,00	100%	324.795.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	7 halte bus, 2 rambu suar, 17 derm	0	0,00	2 halte bus, 1 rambu suar, 1 dermaga, 50	715.000.000,00	2 halte bus, 1 rambu suar, 50ta mbat an	190.000.000,00	2 halte bus, 1 rambu suar, 5 Otambatan perah	215.000.000,00	2 halte bus, 1 rambu suar, 1 dermaga, 5	390.000.000,00	17 halte bus, 6 rambu suar, 19 dermaga, 45	1.510.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Tersedia	SOT RLL, 1 3.53 1 MJ, 5 14 Guadril, 5 TL, 28 RPPJ, 552	1000 m mark a jalan	389.265.300	100 RLL, 1. 000 MJ, 10 OGua dril, 5 O DL, 2 CT, 1 ZS, 2 RS	1.137.000.000,00	100 RLL, 1. 000 MJ, 1 TL, 10 OGua dril, 1 TL, 50 DL, 2 CT, 1 ZS, 1	1.518.000.000,00	100 RLL, 1. 000 MJ, 10 OGua dril, 6 RPPJ, 50 DL, 2 CT, 1 ZS, 2	1.255.000.000,00	100 RLL, 1. 000 MJ, 10 OGua dril, 5 O DL, 2 CT, 1 ZS, 1 RS	1.150.000.000,00	1.302 RLL, 18 .531 MJ, 1. 041 Guadril, 7 TL, 40 RPPJ, 802 DL, 18	5,449,265,300. 00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		259 unit AUD, 21 AUL.	269 unit AUD, 22 AUL.	1.013.716.300	279 unit AUD, 23 AUL.	1.546.128.700,00	289 unit AUD, 24 AUL.	1.023.376.700,00	299 unit AUD, 25 AUL.	1.045.376.700,00	309 unit AUD, 26 AUL.	846.376.700,00	309 unit AUD, 26 AUL.	5,474,975,100.00
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Jumlah Alat Uji	1500 KBW U&6 Alat Uji	1550 KBW U&11 Alat Uji	120.893.000,00	1600 KBW U&11 Alat Uji	1.260.000.000,00	1650 KBW U&11 Alat Uji	162.000.000,00	1700 KBW U&11 Alat Uji	140.000.000,00	1750 KBW U&11 Alat Uji	163.000.000,00	1800 KBW U &6 Alat Uji	1.845.893.000,00
Lingkungan Hidup														
Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan				11.080.383.500		20.633.950.535		22.952.171.115		23.352.489.115		24.183.863.815		102.202.858.080
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	Prosentase Pengelolaan Sampah	42,58%	100%	5.670.505.500	97%	9.783.000.000	98%	9.443.000.000	99%	10.810.000.000	99%	10.320.000.000	99%	46.026.505.500
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks kualitas lingkungan hidup	68.29 (cukup baik)	67 (cukup baik)	823.500.000	68 (cukup baik)	1.212.500.000	69 (cukup baik)	2.187.500.000	70 (baik)	929.500.000	71 (baik)	970.000.000	71 (baik)	6.123.000.000
PROGRAM PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (%)	2%	10%	1.520.500.000	20 %	1.288.000.000	30 %	847.000.000	40%	893.000.000	50%	988.500.000	50%	5.537.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA	Prosentase pelaksanaan RPJP Tahura	10%	25%	789.750.000	40%	4.938.500.000	55%	6.010.190.000	75%	6.186.300.000	100%	6.683.800.000	100%	24.608.540.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemenuhan parameter Pengujian kualitas lingkungan	7 paramater	7 paramater	945.000.000	14 paramete r	1.483.000.000	14 paramet er	2.510.000.000	14 parameter	3.090.000.000	20 paramete r	3.560.000.000		11.588.000.000
PROGRAM PELAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	114.900.000	100%	208.300.535	100%	131.751.115	100%	135.951.115	100%	140.833.815	100%	731.736.580

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pelayanan perkantoran	100%	100%	1.216.228.000	100%	1.720.650.000	100%	1.822.730.000	100%	1.307.738.000	100%	1.520.730.000	100%	7.588.076.000
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.151.604.000		3.188.500.000		2.617.000.000		2.716.500.000		2.804.500.000		13.478.104.000
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Layanan Perkantoran	100%	100%	Rp 1.042.057.700,00	100%	Rp 1.929.500.000,00	100%	Rp 1.337.000.000,00	100%	Rp 1.412.500.000,00	100%	Rp 1.486.000.000,00	100%	Rp 7.207.057.700,00
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Laporan Kinerja	100%	100%	Rp 18.971.300,00	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 21.000.000,00	100%	Rp 22.000.000,00	100%	Rp 23.000.000,00	100%	Rp 104.971.300,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	100%	Rp 1.084.812.500,00	100%	Rp 1.239.000.000,00	100%	Rp 1.259.000.000,00	100%	Rp 1.282.000.000,00	100%	Rp 1.295.500.000,00	100%	Rp 6.160.312.500,00
Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pemenuhan perjanjian kerjasama administrasi kependudukan	100%	100%	Rp 5.762.500,00	-	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	100%	Rp 5.762.500,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perl. Anak, Pengend. Penduduk & KB				4.894.796.000		6.028.000.000		4.434.000.000		6.781.000.000		7.488.000.000		29.625.796.000
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	569.400.000	100%	733.000.000	100%	763.000.000	100%	799.000.000	100%	825.000.000	100%	3.689.400.000

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	49.000.000	100%	105.000.000	100%	107.000.000	100%	109.000.000	100%	112.000.000	100%	482.000.000
Program Perlindungan anak	Persentase Indikator Pemenuhan Hak Anak yang tercapai	48,39%	61,29	132.016.000	64,52	297.000.000	67,74	289.000.000	70,97	148.000.000	74,19	279.000.000	74,19	1.145.016.000
Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	21,42%	23,81	62.500.000	33,33	235.000.000	42,86	242.000.000	52,38	155.000.000	61,90	390.000.000	61,90	1.084.500.000
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	70%	71,57	4.081.880.000	71,6	4.658.000.000	71,62	3.033.000.000	71,68	5.570.000.00	71,7	5.882.000.000	71,7	23.224.880.000
Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja				1.902.090.800		4.460.107.215		7.021.322.297		4.832.764.641		4.958.691.138		23.174.976.090
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	947.596.840	100%	1.404.417.215	100%	1.160.932.297	100%	1.173.574.641	100%	1.296.801.138	100%	5.983.322.130
PROGRAM PELAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	61.303.600	100%	67.500.000	100%	68.200.000	100%	69.000.000	100%	69.700.000	100%	335.703.600
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH														
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	JUMLAH WIRAUSAHA BARU	25.500 UMK	25.900 UMK	214.276.054	UMK 26.300	980.000.000	UMK 27.300	1.122.000.000	UMK 28.600	1.247.000.000	UMK 30.600	1.367.000.000	UMK 30.600	4.930.276.054
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang aktif :	84 KOPERASI aktif	87	311.977.158	89	478.190.000	91	1.020.190.000	93	638.190.000	95	475.190.000	95	2.923.737.158
URUSAN TENAGA KERJA														

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEMPATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	393 ORANG	412%	366.937.148	453	1.530.000.000	520	3.650.000.000	624	1.705.000.000	780	1.750.000.000	780 org	9.001.937.148
Penanaman Modal														
Dinas Penanaman Modal & PTSP				1.898.360.000		2.654.770.000		3.501.265.000		2.534.445.000		2.782.880.000		13.371.720.000
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Publik	% Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	30586 Izin	100%	617.787.000	100%	787.520.000	100%	1.243.020.000	100%	910.020.000	100%	981.520.000	100%	4.539.867.000
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah Nilai Investasi	6.007.662.087.394	1.312.938.813.787	73.370.000	1.339.197.590.063	348.000.000	1.367.557.274.392	473.000.000	1.394.908.419.880	178.000.000	1.422.806.588.277	165.000.000	6.837.408.686.399	1.237.370.000
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Minat Investasi	PMDN = 304	10 Calon Investor	172.895.000	10 Calon Investor	271.000.000	10 Calon Investor	316.000.000	10 Calon Investor	351.000.000	10 Calon Investor	400.000.000	50 Calon Investor	1.510.895.000
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1.023.331.930	100%	1.227.930.000	100%	1.447.995.000	100%	1.071.425.000	100%	1.208.360.000	100%	5.979.041.930
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	10.976.070	100%	20.320.000	100%	21.250.000	100%	24.000.000	100%	28.000.000	100%	104.546.070
Kebudayaan														
Dinas Pariwisata & Kebudayaan				6.227.611.000		12.065.500.000		7.480.500.000		7.403.000.000		6.628.000.000		
Program Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove dan Taman Hutan Raya (TAHURA)	% peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada kawasan ekowisata hutan mangrove dan taman hutan raya	-	20%	3.220.357.000	20%	2.700.000.000	20%	1.200.000.000	20%	2.700.000.000	20%	2.200.000.000	20%	12.020.357.000

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% kontribusi peningkatan retribusi sektor pariwisata	215% dari tahun sebelumnya	5% (dari tahun sebelumnya)	1.754.530.400	8% (dari tahun sebelumnya)	4.785.000.000	10% dari tahun sebelumnya	2.100.000.000	15% dari tahun sebelumnya	1.400.000.000	20% dari tahun sebelumnya	1.210.000.000	20% dari tahun sebelumnya	11.249.530.400
Program Pengembangan Kemitraan dan Sumber Daya Pariwisata	% kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	0.8%	0,9%	521.736.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9 %	521.736.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	84.606	88.836	295.202.500	93.277	1.245.000.000	97.940	970.000.000	102.837	1.375.000.000	107.978	1.350.000.000	107.978	5.235.202.500
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Jumlah Kegiatan Budaya Yang Terpelihara	3 event	3 event	300.438.000	3 event	870.300.000	3 event	798.000.000	3 event	1.095.000.000	3 event	773.000.000	3 event	3.836.738.000
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	584.901.100	100%	708.000.000	100%	708.000.000	100%	778.000.000	100%	778.000.000	100%	
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	72.182.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100%	77.500.000	100%	
Kepemudaan dan Olah Raga														
Dinas Pemuda dan Olahraga				2.008.598.839,00		3.152.210.000,00		2.804.400.000,00		3.184.310.000,00		3.077.090.000,00		14.226.608.839,00
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	1.062.654.504,00	100%	1.241.860.000,00	100%	941.400.000,00	100%	919.730.000,00	100%	948.020.000,00	100%	5.113.664.504
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	61.147.056,00	100%	110.500.000,00	100%	69.500.000,00	100%	69.500.000,00	100%	69.500.000,00	100%	380.147.056,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kota Layak Pemuda		1 Ranperda Kepemudaan	692.935.905,00	Terbentuknya sentra layanan pemuda	1.000.000.000,00	Persentase Pemuda Berprestasi	999.000.000,00	Kota Layak Pemuda	1.136.500.000,00	Kota Layak Pemuda	1.151.800.000,00	100%	4.980.235.905
Program Pembinaan dan Pembudayaan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional	10 Orang Tingkat Provinsi	2 Org Tingkat Nasional, 8	128.095.374,00	5 Org Tingkat Nasional,	649.850.000,00	7 Org Tingkat Nasional	619.500.000,00	8 Org Tingkat Nasional,	883.580.000,00	10 Org Tingkat Nasional,	732.770.000,00	100%	3.013.795.374

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Orang Tingkat Provinsi		10 Orang Tingkat Provinsi		, 15 Orang Tingkat Provinsi		18 Orang Tingkat Provinsi		20 Orang Tingkat Provinsi			
	Jumlah Cabang Olahraga Unggulan	1 Cabang Olahraga	1 Cabang Olahraga		2 Cabang Olahraga		3 Cabang Olahraga		4 Cabang Olahraga		5 Cabang Olahraga			
	Berkembangnya kearifan olahraga tradisional/disabilitas		5 cabang olahraga		7 Cabor		7 Cabor		8 Cabor		10 Cabor			
Program Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan			98.766.150,00		225.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		265.000.000,00		1.068.766.150
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa				1.668.927.680		2.760.997.500		2.208.903.500		2.209.003.500		2.204.510.300		11.052.342.480
Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase LSM Aktif, Persentase LPM Berprestasi, Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM	Persentase LSM Aktif = 18,75%, Persentase LPM Berprestasi = 3,75%, Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1	57.888.315	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1	179.565.000	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1	149.565.000	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1	149.565.000	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1	149.565.000	Persentase LSM Aktif = 100%; Persentase LPM Berprestasi = 3,75%; Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM = 1	686.148.315

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 25,11%	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 29,56%	12.098.875	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 34,54%	65.000.000	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 37,03%	65.000.000	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 40,04%	65.000.000	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 46,87%	65.000.000	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat = 46,87%	272.098.875
Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 47,44; PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 47,44; PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	611.549.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	1.272.263.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	1.197.263.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	1.197.263.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	1.197.263.500	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK = 5.208, PKK Aktif 100%, Posyandu Aktif = 100%	5.475.603.500
Program Pendorongan Swadaya Masyarakat Dalam Menurunkan AKI, AKB, Perbaikan Gizi Balita dan Imunisasi	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, perbaikan Gizi balita dan Cakupan Imunisasi		AKI<6/4050 Kelahiran Hidup, AKB<5/1000 Kelahiran Hidup, Stunting 43%, IDL 92%	170.883.000	AKI<5/4050 Kelahiran Hidup, AKB<4/1000 Kelahiran Hidup, Stunting 35%, IDL 92%	-	AKI<4/4050 Kelahiran Hidup, AKB<3/1000 Kelahiran Hidup, Stunting 29%, IDL 92%	-	AKI<3/4050 Kelahiran Hidup, AKB<2/1000 Kelahiran Hidup, Stunting 25%, IDL 92%	-	AKI<2/4050 Kelahiran Hidup, AKB<1/1000 Kelahiran Hidup, Stunting 20%, IDL 92%	-	AKI<2/4050 Kelahiran Hidup, AKB<1/1000 Kelahiran Hidup, Stunting 20%, IDL 92%	170.883.000
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif		100%	49.379.630	100%	341.500.000	100%	341.500.000	100%	341.500.000	100%	341.500.000	100%	1.415.379.630

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Persentase Posyantek Aktif		100%	28.852.425	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	28.852.425
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik = 94,00%	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik = 95,52%	231.692.690	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik = 97,01%	703.724.000	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik = 98,51%	547.447.000	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik = 100%	547.447.000	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik = 100%	547.447.000	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik = 100%	2.577.757.690
Pelayanan Perkantoran	Cakupan pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	748.166.595	100%	1.197.107.450	100%	749.713.450	100%	749.713.450	100%	745.988.450	100%	4.190.689.395
Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan pelaporan Kinerja	100%	100%	39.488.970	100%	47.061.550	100%	47.361.550	100%	47.461.550	100%	46.693.350	100%	228.066.970
Statistik														
Persandian														
Perpustakaan														
Dinas Arsip & Perpustakaan				991.819.306,00		1.423.899.686,00		1.428.193.855,00		1.603.876.971,00		1.431.584.122,00		6.870.973.940,00
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	518.280.606	100 %	677.570.086	100 %	679.047.095	100 %	761.134.534	100 %	609.172.065	100 %	3.245.204.386
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	100 %	11.120.000	100 %	12.188.000	100 %	13.406.000	100 %	14.077.140	100 %	14.780.997	100 %	65.572.137
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Cakupan SKPD yang menerapkan Sistem Administrasi Kearsipan	99,2%	100 %	21.925.000	100 %	146.180.000	100 %	148.798.000	100 %	150.237.900	100 %	151.749.795	100 %	618.890.695

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP	% Penyelamatan dan Pelestarian Dok/Arsip yang terpenuhi	99,9%	100 %	45.253.000	100 %	142.021.500	100 %	100.333.430	100 %	105.200.101	100 %	111.210.106	100 %	504.018.137
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	% Meningkatnya Minat Baca masyarakat	99,7%	100 %	440.493.700	100 %	587.961.600	100 %	586.942.760	100 %	678.427.397	100 %	655.881.265	100 %	2.941.306.722
Komunikasi dan Informatika														
Dinas Kominfo, Persandian & Statistik				5.010.000.000,00		14.575.069.000,00		12.345.600.000,00		12.636.500.000,00		13.074.000.000,00		57.472.168.992,00
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Pemenuhan Perkantoran	100%	100%	1.116.017.158,00	100%	2.078.500.000,00	100%	1.803.000.000,00	100%	1.948.900.000,00	100%	2.106.400.000,00	100%	8.883.817.158,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	61.700.946,00	100%	80.000.000,00	100%	92.000.000,00	100%	98.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	441.700.946,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA INFORMASI STATISTIK SERTA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Layanan Informasi Publik	0	100%	1.532.401.298,00	100%	2.088.000.000,00	100%	2.177.600.000,00	100%	2.284.600.000,00	100%	2.422.600.000,00	100%	10.505.201.298,00
PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT DAN LAYANAN PUBLIK	Ketersediaan Akses Internet, Penyelenggaraan E-Government, Pemanfaatan website Pemda, Smart City dan tersedianya Data Center di Kabupaten Sinjai	0	100%	2.121.299.194,00	100%	9.813.569.000,00	100%	8.018.000.000,00	100%	8.030.000.000,00	100%	8.120.000.000,00	100%	36.102.868.186,00
PROGRAM PERSANDIAN, KEAMANAN DATA DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI	Persentase SKPD yang memanfaatkan persandian serta Pengawasan dan Pengendalian Layanan Telekomunikasi	0	100%	178.581.404,00	100%	515.000.000,00	100%	255.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	315.000.000,00	100%	1.538.581.404,00
Pangan														

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dinas Ketahanan Pangan		Total Pagu		1.018.079.109		1.181.040.975		1.326.105.015		1.525.020.767		1.753.773.882		6.804.019.748
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	459.955.510	100%	539.198.837	100%	620.078.662	100%	713.090.461	100%	820.054.030	100%	3.152.377.500
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	42.233.650	100%	48.568.698	100%	53.425.567	100%	61.439.402	100%	70.655.313	100%	276.322.630
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat	87,50%	89,50%	515.889.949	92,50%	593.273.441	93,50%	652.600.785	95,00%	750.490.903	96,50%	863.064.539	96,50%	3.375.319.618
URUSAN PILIHAN														
Dinas Tanaman Pangan, Hort. & Perkebunan				14.035.000.000		14.736.750.000		15.473.587.500		16.247.266.875		17.059.630.219		77.552.234.594
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU SERTA NILAI TAMBAH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Meningkatkan Produksi Tanaman Bahan Pangan Utama dan Hortikultura	1) Produksi Padi (Ton GKG) 2) Produksi Jagung (Ton PPK) = 15.552, 3). Produksi Hortikultura Sayuran (Ton Sayuran Segar) 4). Produksi Hortikultura Buah - buahan (Ton Buah Segar)	Produksi Padi (Ton GKG) = 131.476, Produksi Jagung (Ton PPK) = 15.552, Produksi Hortikultur a Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 6.135, Produksi Hortikultur a Buah - buahan (Ton Buah Segar)=21.298	1.210.000.000	Produksi Padi (Ton GKG) = 134.106, Produksi Jagung (Ton PPK) = 16.330, Produksi Hortikultu ra Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 6.442, Produksi Hortikultu ra Buah - buahan (Ton	1.270.500.000	Produksi Padi (Ton GKG) = 136.788, Produksi Jagung (Ton PPK) = 17.146, Produksi Hortikult ura Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 6.764, Produksi Hortikult ura	1.334.025.000	Produksi Padi (Ton GKG) = 139.523, Produksi Jagung (Ton PPK) = 18.003, Produksi Hortikultura Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 7.102, Produksi Hortikultura Buah - buahan (Ton Buah Segar)=24.655	1.400.726.250	Produksi Padi (Ton GKG) = 142.314, Produksi Jagung (Ton PPK) = 18.904, Produksi Hortikultu ra Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 7.457, Produksi Hortikultu ra Buah - buahan (Ton	1.470.762.563	Produksi Padi (Ton GKG) = 142.314, Produksi Jagung (Ton PPK) = 18.904, Produksi Hortikultu ra Sayuran (Ton Sayuran Segar) = 7.457, Produksi Hortikultu ra Buah - buahan (Ton	6.686.013.813

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Buah Segar)=2 1.363		Buah - buahan (Ton Buah Segar)= 23.481				Buah Segar)=2 5.888		Buah Segar)=2 5.888	
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU SERTA NILAI TAMBAH TANAMAN PERKEBUNAN	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan	1). Produksi kakao (ton), 2). produksi cengkeh (ton), 3). produksi kopi (ton), 4). produksi lada(ton)	Produksi kakao (ton)= 4.200, produksi cengkeh (ton)=2.500, produksi kopi (ton)=2.500,produksi lada(ton)= 1.200	1.650.000.000	Produksi kakao (ton)= 4.326, produksi cengkeh (ton)=2.575, produksi kopi (ton)=2.575,produk si lada(ton) =1.236	1.732.500.000	Produksi kakao (ton)= 4.456, produksi cengkeh (ton)=2.652, produksi kopi (ton)=2.652,prod uksi lada(ton) =1.273	1.819.125.000	Produksi kakao (ton)= 4.489, produksi cengkeh (ton)=2.732, produksi kopi (ton)=2.732, produksi lada(ton)=1.311	1.910.081.250	Produksi kakao (ton)= 4.727, produksi cengkeh (ton)=2.814, produksi kopi (ton)=2.814,produk si lada(ton) =1.351	2.005.585.313	Produksi kakao (ton)= 4.727, produksi cengkeh (ton)=2.814, produksi kopi (ton)=2.814,produk si lada(ton) =1.351	9.117.291.563

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Pertanian Penunjang Usahatani/Agribisnis	1). Pengembangan Prasarana dan Sarana Air (Ha), 2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan (KM), 3). Ketersediaa n Alat dan Mesin Pertanian	Pengemban gan Prasarana dan Sarana Air (Ha), 2.000, Pengemban gan Prasarana dan Sarana Lahan (KM), 3). Ketersedia an Alat dan Mesin Pertanian= 50	10.040.000.000	Pengemb angsan Prasaran a dan Sarana Air (Ha), 2.000, Pengemb angsan Prasaran a dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersedi aan Alat dan Mesin Pertanian =50	10.542.000.000	Pengem bangan Prasara na dan Sarana Air (Ha), 2.000, Pengem bangan Prasaran a dan Sarana Lahan (KM)=20 , Ketersed iaan Alat dan Mesin Pertania n=50	11.069.100.000	Pengemban gan Prasarana dan Sarana Air (Ha), 2.000, Pengemban gan Prasarana dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersedi aa n Alat dan Mesin Pertanian=5 0	11.622.555.0 00	Pengemb angsan Prasaran a dan Sarana Air (Ha), 2.000, Pengemb angsan Prasaran a dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersedi aan Alat dan Mesin Pertanian =50	12.203.682.75 0	Pengemb angsan Prasaran a dan Sarana Air (Ha), 2.000, Pengemb angsan Prasaran a dan Sarana Lahan (KM)=20, Ketersedi aan Alat dan Mesin Pertanian =50	55.477.337.750
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Mewujudkan kelembagaan petani sebagai basis kegiatan pembangunan pertanian	1). Meningkatkan Kemampuan Kelompok Tani 2). Peningkata n Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembaga an Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP)		1.135.000.000	1). Menginka tnya Kemamp uan Kelompok Tani =240, 2). Peningkat an Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembag aan Ekonomi Petani (KEP)	1.191.750.000	1). Meningk atnya Kemamp uan Kelompo k Tani =240, 2). Peningk atan Jumlah Kelompo k Tani yang menjadi Kelemba gaan Ekonomi Petani	1.251.337.500	1). Meningkatkan Kemampuan Kelompok Tani =240, 2). Peningkata n Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembaga an Ekonomi Petani (KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani	1.313.904.37 5	1). Menginka tnya Kemamp uan Kelompok Tani =240, 2). Peningkat an Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembag aan Ekonomi Petani (KEP)	1.379.599.594	1). Menginka tnya Kemamp uan Kelompok Tani =240, 2). Peningkat an Jumlah Kelompok Tani yang menjadi Kelembag aan Ekonomi Petani (KEP)	6.271.591.469

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP=1		(KEP) dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP= 2		(BUMP), KEP=8, BUMP=2		dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP=2		dan Badan Usaha Milik KEP Petani (BUMP), KEP=8, BUMP=2	
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				5.925.760.408,00		11.134.758.500,00		11.270.258.500,00		11.679.546.000,00		12.180.160.375,00		52.190.483.783,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	Presentase Peningkatan Populasi Sapi Potong		3 %	2.575.331.200,00	3 %	5.614.258.500,00	3 %	5.757.008.500,00	3 %	5.786.546.000,00	3 %	5.811.910.375,00	3 %	25.545.054.575,00
	Peningkatan jumlah kelompok binaan pengolahan peternakan	2 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok		3 kelompok		14 kelompok					
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan		10 %	2.060.170.808,00	10 %	2.949.000.000,00	10 %	3.129.000.000,00	10 %	3.199.000.000,00	10 %	3.379.000.000,00	10 %	14.716.170.808,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN, TEKNOLOGI DAN USAHA PETERNAKAN	Peningkatan Promosi Produk Unggulan Peternakan		6 Kali	495.999.950,00	6 Kali	920.000.000,00	6 Kali	750.000.000,00	6 Kali	895.000.000,00	6 Kali	835.000.000,00	6 Kali	3.895.999.950,00
	Peningkatan Jumlah Kelompok Peternak yang Memanfaatkan Teknologi	4 Kelompok	4 Kelompok		4 Kelompok		4 Kelompok		4 Kelompok					
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100 %	749.462.650,00	100 %	1.501.500.000,00	100 %	1.484.250.000,00	100 %	1.649.000.000,00	100 %	2.004.250.000,00	100 %	7.388.462.650,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100 %	44.795.800,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	644.795.800,00

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dinas Perdagangan, Perindustrian & ESDM				#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100 %	1.827.433.000,00	100 %	1.681.803.000,00	100 %	1.686.953.000,00	100 %	1.693.233.000,00	100 %	1.698.233.000,00	100 %	8.587.655.000,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100 %	26.085.000,00	100 %	26.085.000,00	100 %	26.755.000,00	100 %	26.755.000,00	100 %	26.755.000,00	100 %	132.435.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI	Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat	0	10 PJUTS, 1 DED, 20 Biogas	1.283.048.000,00	10 PJUTS, 1 DED, 20 Biogas	909.000.000,00	10 PJUTS, 1 DED, 20 Biogas	984.900.000,00	10 PJUTS, 1 DED, 20 Biogas	1.068.390.000,00	10 PJUTS, 20 Biogas	1.160.533.000,00	50 PJUTS, 100 Biogas, 4 DED EBTKE	5.405.871.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok/pedagang usaha informal	17 PKL	17 PKL	2.266.360.000,00	67 PKL	758.120.000,00	80 PKL	788.120.000,00	90 PKL	818.120.000,00	100 PKL	823.120.000,00	100 PKL	5.453.840.000,00
	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha makan dan minum tradisional/jajanan sekolah dan sosialisasi perlindungan konsumen		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan		Pembinaan di 27 sekolah dan sosialisasi di 6 kecamatan					
	Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP		> 95% dari jumlah alat UTTP					
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	0	3 pasar rakyat	14.471.497.000,00	3 pasar rakyat	8.286.887.000,00	3 pasar rakyat	9.084.967.000,00	3 pasar rakyat	9.894.759.000,00	3 pasar rakyat	10.777.058.000,00	15 pasar rakyat	52.515.168.000,00
	Meningkatnya nilai perdagangan		121829700		127829700		1333297000							

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya nilai produksi dari sektor industri daerah	468.293.04 3*)	498.293.00 0	4.566.570.000,0 0	513.293.0 00	1.486.570.000,00	528.293. 000	1.516.570.000, 00	543.293.00 0	1.501.465.00 0,00	558.293.0 00	1.516.465.000 ,00	558.293.0 00	10.587.640.000,0 0
	Jumlah pertumbuhan industri	3.777	3.877		3.927		3.977		4.027		4.077		4.077	
	Cakupan bina kelompok binaan pengrajin		2 klp		2 klp		2 klp		2 klp		2 klp		10 klp	
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI	Jumlah sentra-sentra/IKM industri baru		2 klp	150.000.000,00	2 klp	150.000.000,00	2 klp	155.000.000,00	2 klp	155.000.000, 00	2 klp	160.000.000,0 0	10 klp	770.000.000,00
Dinas Perikanan				3.557.532.725		5.907.648.000		5.491.148.000		5.267.648.00 0		6.895.500.000		26.981.976.725
Program Pelayanan Perkantoran	Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas dalam pelayanan	100 %	100 %	782.785.227	100 %	1.184.648.000	100 %	1.207.648.000	100 %	1.280.648.00 0	100 %	2.221.000.000	100 %	6.676.729.227
Program Pelaporan Kinerja	Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %	100 %	67.142.500	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	80.000.000	100 %	87.000.000	100 %	384.142.500
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	31.462	31.462	1.721.172.000	32.406	2.145.000.000	33378	1.924.000.000	34.379	2.223.000.00 0	35.410	2.231.000.000	167.035	10.244.172.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	35.418	41.212	885.050.000	35.418	2.118.500.000	37.189	1.886.500.000	39.048	1.272.500.00 0	41.000	1.931.500.000	193.867	8.094.050.000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Meningkatnya industri hasil laut dan tambak	1.420	1.448	101.382.998	1.476	384.500.000	1.505	398.000.000	1.535	411.500.000	1.565	425.000.000	7.529	1.582.882.998
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
Perencanaan														

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				5.891.884.800,00		5.857.368.800,00		4.725.661.500,00		5.001.450.800,00		5.795.509.800,00		27.271.875.700,00
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	1.150.839.800,00	100 %	1.193.000.000,00	100 %	1.182.750.000,00	100 %	1.117.250.000,00	100 %	1.116.250.000,00	100 %	5.760.089.800,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	100 %	179.799.800,00	100 %	180.674.800,00	100 %	180.674.800,00	100 %	182.174.800,00	100 %	182.174.800,00	100 %	905.499.000,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	ada	ada	4.561.245.200,00	ada	4.483.694.000,00	ada	3.362.236.700,00	ada	3.702.026.000,00	ada	4.497.085.000,00	ada	20.606.286.900,00
Sekretariat Daerah														
Sekretariat Daerah				34.333.542.000,00		36.752.388.885,00		38.060.549.184,00		40.007.158.462,00		47.597.887.438,00		196.751.525.969,00
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah Produk Hukum Daerah; Persentase jumlah temuan yang tertindak lanjut		Perda 12; Perbup 40; SK 830	995.000.000,00									Perda 12; Perbup 40; SK 830	995.000.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG HUKUM DAN HAM	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang Hukum dan HAM			0,00	Perda 8; Perbup 45; SK 850	670.410.000,00	Perda 10; Perbup 50; SK 850	670.410.000,00	Perda 12; Perbup 50; SK 800	670.410.000,00	Perda 6; Perbup 35; SK 800	670.410.000,00	Perda 58; Perbup 220; SK 4110	2.681.640.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100%	738.625.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	738.625.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi	100%		0,00	100%	1.115.180.000,00	100%	1.209.898.000,00	100%	1.311.617.800,00	100%	1.428.279.580,00	100%	5.064.975.380,00

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	administratif bidang pemerintahan umum													
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Organisasi tepat fungsi dan tetap ukuran		80%	93.751.850,00									80%	93.751.850,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Persentase Pemenuhan SAKIP			0,00	100%	164.586.500,00	100%	168.586.500,00	100%	172.586.500,00	100%	174.586.500,00	100%	680.346.000,00
	Persentase Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		76,39%		77%		77,5%		78,5%		79,5			
	Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran		85%		87%		89%		91%		93%			
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEREKONOMIAN	Terwujudnya Akselerasi Program bidang Perekonomian		100%	725.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	725.000.000,00
PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase penyelenggaraan koordinasi administrasi yang dihasilkan			200.000.000,00	100%	1.105.000.000,00	100%	1.190.000.000,00	100%	1.255.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	5.050.000.000,00
	Jumlah rumusan kebijakan bidang ekonomi yang dihasilkan		1 Perda; 6 Perbup/Pedum/Juklak/Juknis		6 Perbup/Pedum/Juklak/Juknis		6 Perbup/Pedum/Juklak/Juknis		6 Perbup/Pedum/Juklak/Juknis		1 Perda; 16 Perbup/Pedum/Juklak/Juknis			
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Organisasi tepat fungsi dan tetap ukuran		80%	133.646.850,00									80%	133.646.850,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Persentase Pemenuhan SAKIP			0,00	100%	352.219.000,00	100%	354.219.000,00	100%	356.219.000,00	100%	358.219.000,00	100%	1.420.876.000,00
	Persentase Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		76,39%		77%		77,5%		78,5%		79,5			

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran				85%		87%		89%		91%		93%	
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100%	104.555.460,00									100%	104.555.460,00
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Organisasi tepat fungsi dan tetap ukuran		80%	135.456.850,00									80%	135.456.850,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Persentase Pemenuhan SAKIP			0,00	100%	379.376.000,00	100%	383.376.000,00	100%	387.376.000,00	100%	394.376.000,00	100%	1.544.504.000,00
	Persentase Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		76,39%		77%		77,5%		78,5%					
	Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran		85%		87%		89%		91%					
PROGRAM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pelaksanaan Prog/Kegiatan Pembangunan di Daerah Kabupaten Lebih Efisien, Efektif, dan Berkualitas		100%	1.300.000.000,00									100%	1.300.000.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMBANGUNAN	Cakupan sistem monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan			0,00	100%	1.009.000.000,00	100%	1.011.500.000,00	100%	1.012.000.000,00	100%	1.012.000.000,00	100%	4.044.500.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang terpadu efektif dan efesien serta terjaminnya kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar		100%	800.000.000,00									100%	800.000.000,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	tercipta persaingan usaha yang sehat													
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA	Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang terpadu efektif dan efisien serta terjaminnya kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat			0,00	100%	843.935.000,00	100%	845.000.000,00	100%	845.000.000,00	100%	845.000.000,00	100%	3.378.935.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100%	223.397.000,00									100%	223.397.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum			0,00	100%	525.107.900,00	100%	575.818.600,00	100%	629.730.400,00	100%	920.350.400,00	100%	2.651.007.300,00
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	14.969.109.055,00	100%	13.636.082.485,00	100%	15.968.995.784,00	100%	16.317.962.462,00	100%	22.996.243.308,00	100%	83.888.393.094,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	810.492.945,00	100%	346.500.000,00	100%	352.000.000,00	100%	357.000.000,00	100%	358.000.000,00	100%	2.223.992.945,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG KEUANGAN	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	75.000.000,00	100%	610.000.000,00	100%	620.000.000,00	100%	640.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	2.595.000.000,00

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan pemenuhan pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	2.632.232.100,00	100%	2.837.500.000,00	100%	2.967.775.000,00	100%	3.051.796.250,00	100%	3.116.581.500,00	100%	14.605.884.850,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	% Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	100%	100%	2.664.047.900,00	100%	3.017.500.000,00	100%	1.889.103.300,00	100%	1.879.593.050,00	100%	2.185.974.150,00	100%	11.636.218.400,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	588.241.000,00										588.241.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANGPemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum			0,00	100%	850.000.000,00	100%	915.000.000,00	100%	975.000.000,00	100%	1.035.000.000,00	100%	3.775.000.000,00
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	290.188.440,00										290.188.440,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Persentase Pemenuhan SAKIP	100%			100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0,00	76,39%	523.684.000,00	77%	533.684.000,00	77,5%	543.684.000,00	78,5%	553.684.000,00	79,5	2.154.736.000,00
	Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran				85%		87%		89%		91%		93%	
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN	Ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan		80%	242.400.550,00									80%	242.400.550,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI	Persentase Pemenuhan SAKIP			0,00	100%	946.308.000,00	100%	675.183.000,00	100%	687.183.000,00	100%	699.183.000,00	100%	3.007.857.000,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Persentase Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				76,39%		77%		77,5%		78,5%		79,5	
	Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran				85%		87%		89%		91%		93%	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	62.605.000,00									100%	62.605.000,00
PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum			0,00	100%	120.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	540.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN BIDANG MENTAL SPRITUAL, SOSIAL KEMASYARAKATAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Mental Spritual dan Keagamaan serta Bidang Kesra		100%	6.249.792.000,00										6.249.792.000,00
PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG KESRA DALAM PENINGKATAN MENTAL SPIRITUAL, SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	Persentase penyelenggaraan koordinasi administrasi dalam bidang kesra yang dihasilkan	100%		300.000.000,00	100%	7.700.000.000,00	100%	7.600.000.000,00	100%	8.775.000.000,00	100%	8.750.000.000,00	100%	33.125.000.000,00
	Jumlah rumusan kebijakan bidang Kesra yang dihasilkan				8 Perbup dan Juknis		8 Perbup dan Juknis		8 Perbup dan Juknis		8 Perbup dan Juknis			
Sekretariat DPRD														
Sekretariat DPRD				15.000.000.000		21.311.959.000		24.125.987.000		23.560.456.000		24.793.311.000		108.791.713.000

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase penetapan prolegda menjadi perda	100%	100%	5.081.934.000	100%	7.190.897.000	100%	7.783.518.000	100%	8.217.488.00	100%	8.651.571.000	100%	36.925.408.000
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	9.410.227.000	100%	13.563.008.000	100%	15.739.765.000	100%	14.682.648.000	100%	15.429.411.000	100%	68.825.059.000
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	507.839.000	100%	558.054.000	100%	602.704.000	100%	660.320.000	100%	712.329.000	100%	3.041.246.000
Keuangan														
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				6.180.580.000		6.652.888.000		7.417.926.800		7.985.894.480		8.781.068.928		37.018.358.208
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%	1.635.500.000	100%	1.723.300.000	100%	1.995.380.000	100%	2.098.093.000	100%	2.301.487.300	100%	9.753.760.300
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja(%)	100%	100%	90.000.000	100%	99.000.000	100%	108.900.000	100%	119.790.000	100%	131.769.000	100%	549.459.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	4.455.080.000	Tepat Waktu	4.830.588.000	Tepat Waktu	5.313.646.800	Tepat Waktu	5.768.011.480	Tepat Waktu	6.347.812.628	Tepat Waktu	26.715.138.908
Badan Pendapatan Daerah				3.387.702.000		3.499.950.000		3.692.152.000		3.914.000.000		4.156.630.000		#REF!
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1.141.121.000	100%	1.211.250.000	100%	1.341.522.000	100%	1.521.150.000	100%	1.642.500.000		
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	9 dok	7 dok	36.531.000	6 dok	38.500.000	6 dok	40.250.000	6 dok	42.350.000	6 dok	55.570.000		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	100%	100%	2.210.050.000	100%	2.250.200.000	100%	2.310.380.000	100%	2.350.500.000	100%	2.458.560.000		
Penelitian dan Pengembangan														
Badan Litbang Daerah				1.347.120.500		5.891.843.548		2.328.813.300		2.558.853.630		2.186.344.250		13.625.209.728
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	443.682.179	100%	3.336.509.900	100%	741.433.200	100%	757.192.860	100%	716.045.800	100%	6.027.098.439
Program Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Prlaporan Kinerja	100%	100%	57.278.472	100%	58.418.000	100%	59.589.000	100%	60.780.000	100%	61.930.000	100%	297.995.472
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan Litbang Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan litbang daerah	100%	100%	179.904.124	100%	187.363.000	100%	193.020.000	100%	197.220.000	100%	204.463.860	100%	961.970.984
Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Sosian, Ekonomi, dan Pemerintahan	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	0	90%	345.589.430	1	589.800.000	1	567.500.000	1	345.500.000	1	310.500.000	1	2.158.889.430
Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, SDA dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	0	0	247.409.950	1	430.391.248	1	328.000.000	1	651.060.000	1	439.181.200	1	2.096.042.398
Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	% kebijakan inovasi yang diimplementasikan	0	90%	73.256.345	1	1.289.361.400	1	439.271.100	1	547.100.770	1	454.223.390	1	2.083.213.005
Kecamatan														
KECAMATAN SINJAI UTARA				3.429.209.300		4.483.094.000		5.264.210.000		6.092.742.000		6.934.970.000		26.204.225.300

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	511.653.850	100%	954.926.000	100%	990.374.000	100%	1.075.162.000	100%	1.167.030.000	100%	4.699.145.850
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	13.232.640	100%	19.580.000	100%	24.580.000	100%	29.580.000	100%	34.580.000	100%	121.552.640
Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	485.941.880	100%	543.000.000	100%	603.000.000	100%	663.000.000	100%	723.000.000	100%	3.017.941.880
Program Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	197.552.930	100%	265.588.000	100%	346.256.000	100%	425.000.000	100%	510.360.000	100%	1.744.756.930
KECAMATAN SINJAI TENGAH				Rp 962.589.248		Rp 1.110.658.000		Rp 1.105.448.000		Rp 1.113.758.000		Rp 1.082.598.000		Rp 5.375.051.248
Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	Rp 363.824.709	100%	Rp 466.120.000	100%	Rp 464.210.000	100%	Rp 471.020.000	100%	Rp 434.460.000	100%	Rp 2.199.634.709
Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	Rp 6.253.759	100%	Rp 7.500.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 8.000.000	100%	Rp 8.500.000	100%	Rp 38.253.759
Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	Rp 66.378.700	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 80.000.000	100%	Rp 386.378.700
Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	Rp 155.994.080	100%	Rp 186.900.000	100%	Rp 183.100.000	100%	Rp 184.600.000	100%	Rp 189.500.000	100%	Rp 900.094.080
Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 370.138.000	100%	Rp 1.850.690.000
KECAMATAN BULUPODDO				463.644.900		595.744.457		647.620.000		801.620.000		711.120.000		3.219.749.357
Program pelayanan Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adiminsitrasi Perkantoran	100%	100%	269.008.275	100%	331.244.457	100%	352.120.000	100%	439.120.000	100%	264.120.000	100%	1.655.612.732
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	7.684.750	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	97.684.750

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	186.951.875	100%	249.500.000	100%	275.500.000	100%	337.500.000	100%	417.000.000	100%	1.466.451.875
KECAMATAN PULAU SEMBILAN				458.186.384		481.095.704		505.150.489		530.408.013		556.928.414		2.531.769.004
Program pelayanan perkantoran	Cakupan Pelayanan Adiminsitrasi Perkantoran	100%	100%	289.981.212	100%	308.010.532	100%	332.065.317	100%	354.442.841	100%	374.643.242	100%	1.659.143.144
Program pelaporan kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	17.147.452	100%	19.827.452	100%	19.827.452	100%	19.827.452	100%	26.147.452	100%	102.777.260
Program pelayanan dan koordinasi pemerintahan kecamatan	Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	151.057.720	100%	153.257.720	100%	153.257.720	100%	156.137.720	100%	156.137.720	100%	769.848.600
KECAMATAN SINJAI BORONG				1.025.429.200		1.106.487.990		1.179.500.000		1.421.507.990		1.630.307.990		6.363.233.170
Program pelayanan Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adiminsitrasi Perkantoran	100%	100%	334.284.510	100%	325.480.000	100%	391.000.000	100%	398.400.000	100%	461.800.000	100%	1.910.964.510
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	17.645.980	100%	18.000.000	100%	19.000.000	100%	21.000.000	100%	23.000.000	100%	98.645.980
Program Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	224.723.010	100%	233.007.990	100%	129.500.000	100%	252.107.990	100%	285.507.990	100%	1.124.846.980
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	370.138.000	100%	450.000.000	100%	550.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	2.770.138.000
KECAMATAN SINJAI SELATAN				1.034.854.000		1.179.876.484		1.282.300.000		1.410.000.000		1.506.700.000		6.400.625.652
Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adiminsitrasi Perkantoran	100%	100%	391.391.593	100%	379.176.484	100%	388.700.000	100%	398.700.000	100%	428.500.000	100%	1.973.363.245
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	15.223.632	100%	16.800.000	100%	17.200.000	100%	18.800.000	100%	20.400.000	100%	88.423.632

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	175.751.986	100%	180.200.000	100%	186.900.000	100%	192.500.000	100%	202.800.000	100%	938.151.986
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	452.486.789	100%	603.700.000	100%	689.500.000	100%	800.000.000	100%	855.000.000	100%	3.400.686.789
SINJAI TIMUR				1.007.186.000		1.497.940.595		1.527.026.550		1.583.213.750		1.592.527.575		7.207.894.470
Program pelayanan Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adiminsitrasi Perkantoran	100%	100%	388.377.420	100%	495.841.125	100%	463.795.000	100%	491.430.000	100%	485.102.125	100%	2.324.545.670
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	14.418.550	100%	16.500.000	100%	20.000.000	100%	22.500.000	100%	22.500.000	100%	95.918.550
Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	62.086.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.300.000	100%	90.000.000	100%	392.386.000
Program Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	172.166.030	100%	210.599.470	100%	213.231.550	100%	233.983.750	100%	244.925.450	100%	1.074.906.250
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	370.138.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.320.138.000
SINJAI BARAT				1.460.239.400		1.495.189.400		1.500.939.400		1.506.689.400		1.509.439.400		7.472.497.000
Program pelayanan Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adiminsitrasi Perkantoran	100%	100%	388.031.000	100%	422.981.000	100%	428.731.000	100%	434.481.000	100%	437.231.000	100%	2.111.455.000
Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	144.137.700	100%	144.137.700	100%	144.137.700	100%	144.137.700	100%	144.137.700	100%	720.688.500
Program Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	175.282.590	100%	175.282.590	100%	175.282.590	100%	175.282.590	100%	175.282.590	100%	876.412.950

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KECAMATAN TELLULIMPOE				993.232.920		1.839.791.845		2.242.481.550		2.474.033.750		3.091.937.575		10.641.477.640
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pelayanan Adiminsitrasi Perkantoran	100%	100%	5.784.170	100%	8.750.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	22.500.000	100%	70.034.170
Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	90.296.890	100%	105.000.000	100%	113.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	558.296.890
Program Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	157.511.850	100%	212.500.720	100%	227.731.550	100%	250.783.750	100%	265.425.450	100%	1.113.953.320
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	370.138.000	100%	1.000.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.550.000.000	100%	2.150.000.000	100%	6.470.138.000
Pemerintahan														
Kantor Kesatuan Bangsa				24.416.150.572		28.953.936.476		27.888.296.716		29.578.714.855		31.056.332.192		141.893.430.811
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100%	530.220.000	100%	581.450.000	100%	458.650.000	100%	626.900.000	100%	655.550.000	100%	2.852.770.000
Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Persentase Pelaporan Kinerja		100%	33.150.000	100%	34.500.000	100%	36.900.000	100%	38.400.000	100%	40.900.000		183.850.000
Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga dan Unsur Agama/etnis dalam kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Tingkat Daerah	9 Lembaga, 4 Agama, 7 Etnis	9 Lembaga/ 5 Agama/ 7 Etnis	256.202.500	9 Lembaga / 5 Agama/ 7 Etnis	290.000.000	9 Lembaga/ 5 Agama/ 7 Etnis	308.000.000	9 Lembaga/ 5 Agama/ 7 Etnis	318.000.000	9 Lembaga / 5 Agama/ 7 Etnis	331.000.000	9 Lembaga / 5 Agama/ 7 Etnis	1.503.202.500
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Jumlah Kelompok dan Organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	1 Lembaga	9 lembaga	577.447.500	9 lembaga	606.000.000	9 lembaga	740.000.000	9 lembaga	755.000.000	9 lembaga	771.000.000	9 lembaga	3.449.447.500

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pengembangan wawasan kebangsaan													
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Parpol, Ormas dan LSM pada Pilleg, Pilpres, Pilgub Pilbup dan Pilkades	80%	80%	23.019.130.572	80%	27.441.986.476	80%	26.344.746.716	80%	27.840.414.855	80%	29.257.882.192	80%	133.904.160.811
Inspektorat Kabupaten				3.424.557.124		3.707.771.192		4.016.721.272		4.353.060.652		4.729.383.097		15.068.155.349
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi Tindaklanjuti Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang tuntas	78%	78%	2.083.905.340	79%	2.281.936.199	79%	2.499.628.848	80%	2.738.151.356	81%	3.009.569.863		12.613.191.606
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang tersertifikasi	100%	100%	363.012.394	100%	399.313.633	100%	439.244.997	100%	483.169.496	100%	531.486.446	100%	2.216.226.967
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN		100%	100%	934.434.050	100%	981.155.753	100%	1.030.213.540	100%	1.081.724.217	100%	1.135.810.428	100%	
PROGRAM PELAPORAN KINERJA		100%	100%	43.205.340	100%	45.365.607	100%	47.633.887	100%	50.015.582	100%	52.516.361	100%	238.736.777
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDMA				4.800.000.000,00		6.229.640.300,00		5.532.610.300,00		5.564.160.300,00		5.672.660.300,00		27.799.071.200,00
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	850.905.744	100 %	1.634.788.000	100 %	992.168.000	100 %	1.067.838.000	100 %	1.016.218.000	100 %	5.561.917.744
PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan PeLap. Kinerja	100 %	100 %	47.429.350	100 %	63.000.000	100 %	70.000.000	100 %	78.000.000	100 %	85.000.000	100 %	343.429.350

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (n-2)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2023	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)	Target	Rp(jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM MANAJEMEN PNS	Persentase Capaian Indikator Sistem Merit.	46,30%	56,60%	3.901.664.906	69,60%	6.128.899.750	71,00%	5.992.899.750	80,00%	6.003.899.750	81,50%	6.083.899.750	81,50%	28.111.263.906

Adapun Indikasi program prioritas Kabupaten Sinjai dalam mendukung prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada table 7.5 berikut:

Tabel 7.5
Indikasi Program Prioritas Kabupaten Sinjai dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi		Program RPJMD Kabupaten Sinjai yang mendukung
1	2		3
1.	Misi 1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	
	Tujuan 1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA INFORMASI STATISTIK SERTA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2. PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT DAN LAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK 4. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
	Sasaran 1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan	1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
	Sasaran 1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public	1. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2. PENERAPAN KAJIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN 4. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 5. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
2.	Misi 2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibilitas	
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	
	Sasaran 2.1	Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah	1. PROGRAM KECIPTAKARYAAN 2. PROGRAM KEBINAMARGAAN 3. PROGRAM PENATAAN RUANG 4. PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

No.	Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi		Program RPJMD Kabupaten Sinjai yang mendukung
	Sasaran 2.2	Berfungsinya infrastruktur kawasan layanan pendukung pembangunan	
3.	Misi 3	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibilitas	
	Tujuan 3	Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	
	Sasaran 3.1	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan	1. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 2. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 3. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN 4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL 5. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 6. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 7. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KALI LIMA DAN ASONGAN 8. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 9. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI
	Sasaran 3.2	Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah	1. PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
4.	Misi 4	Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter	1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 3. PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN 4. PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 6. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 7. PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI
	Tujuan 4	Meningkatnya kualitas SDM secara inklusif	
	Sasaran 4.1	Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat	

No.	Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi		Program RPJMD Kabupaten Sinjai yang mendukung
	Sasaran 4.2	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2. PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 4. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
	Sasaran 4.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN IBU BERSALIN 2. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR DAN BALITA 3. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA 4. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT 5. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6. PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN 7. PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN 8. PROGRAM KEFARMASIAN, PERBEKALAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 9. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 10. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 11. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 12. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 13. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 14. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 15. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 16. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 17. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMH SAKIT/ RS Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata 18. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 19. PROGRAM, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN BAGI PASIEN DAMPAK ASAP ROKOK 20. PROGRAM PENDORONGAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENURUNKAN AKI, AKB, PERBAIKAN GIZI BALITA DAN IMUNISASI
	Sasaran 4.4	Berkembangnya kebudayaan daerah sebagai spirit penyelenggaraan pembangunan	1. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) 3. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 4. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

No.	Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi		Program RPJMD Kabupaten Sinjai yang mendukung
5.	Misi 5	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	
	Tujuan 5	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	
	Sasaran 5.1	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sector perekonomian berbasis sumber daya alam	<div>1. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</div> <div>2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TTG</div> <div>3. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</div> <div>4. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU SERTA NILAI TAMBAH TANAMAN PERKEBUNAN</div> <div>5. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU SERTA NILAI TAMBAH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</div> <div>6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</div> <div>7. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN</div> <div>8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN, TEKNOLOGI DAN USAHA PETERNAKAN</div>
	Sasaran 5.2	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dalam menjamin keberlanjutan pembangunan	<div>1. PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK</div> <div>2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</div> <div>3. PROGRAM KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU"</div> <div>4. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</div> <div>5. PROGRAM PENATAAN PPLH</div> <div>6. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN</div> <div>7. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3</div>

BAB VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan menjadi indicator kinerja utama Daerah dan Indikator kinerja, penyelenggaran pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indicator kinerja kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 selanjutnya disajikan dalam tabel 8.1 dan table 8.2 sebagai Berikut :

Tabel 8.1
Tabel Penetapan indikator kinerja utama (IKU)
Kabupaten Sinjai 2018-2023

No.	Indikator	Kondisi Awal: 2017	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks reformasi birokrasi	75,5	76,39	77	77,5	78,5	79	80
2.	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP) (Nilai Huruf)	B	B	B	B	B	BB	A
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Cakupan pemenuhan SPM pelayan dasar (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dasar (Nilai)	-	-	75 Baik	77 Baik	80 Bak	82 Baik	85 Baik
5.	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan umum yang strategis (Nilai)	RSUD: 73,09 Capil; 80,05 PTSP:	RSUD: 80,88 Capil; 80,81 PTSP:	RSUD: 80 Capil; 80 PTSP: 85,95	RSUD: 81 Capil; 80,02 PTSP: 86,20	RSUD: 82 Capil; 81,11 PTSP: 86,21	RSUD: 83 Capil; 82,25 PTSP: 86,25	RSUD: 84 Capil; 82,36 PTSP: 86,37

No.	Indikator	Kondisi Awal: 2017	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	PDRB/kapita (Rp. Juta/tahun)	38,10	42,15	38-42	38-42	38-42	38-42	38-42
7.	Angka Kemiskinan {%}	9,24	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.53	4.33	4.12	3.92	3.72	3.52	3.33
9.	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (%)	46,22	45,99	45,75	45,52	45,30	45,07	44,84
10.	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (%)	2,76	2,78	3,00	4,12	5,37	6,00	7,00
11	Kontribusi sektor jasa dalam PDRB (%)	14,00	14,45-16,00	14,45-16.00	16,00-17,80	16,00-17,80	16,00-17,80	16,00-17,80
12.	Kontribusi PAD terhadap pendapatan (%)	8,17%	8,17%	8,05%	8,70%	8,84%	8,64%	8,55%
13.	IPM	65,80 %	66,24 %	65-70 %	65-70 %	65-70 %	65-70 %	65-70 %
14	Angka rata-rata lama sekolah (%)	7,28	7,29	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10
15.	Angka harapan lama sekolah (%)	12,84	12,85	12 - 14	12 - 14	12 - 14	12 - 14	12 - 14
16.	Angka harapan hidup (%)	66,70	66-70	66-70	66-70	66-70	66-70	66-70
17.	IPG dan IDG (%)	IPG 98.01	IPG 98.07	IPG 98.1	IPG 98.22	IPG 98.28	IPG 98.28	IPG 98.3
		IDG 72.56	IDG 72.6	IDG 72.64	IDG 72.68	IDG 72.7	IDG 72.74	IDG 73.8
18.	Cakupan aktivitas keagamaan (Jenis Aktivitas)	1	1	3	3	3	3	3
19.	% kecamatan dengan sarana/ prasarana publik yang mencukupi							
20.	Cakupan ketersediaan sarana/ prasarana publik kecamatan (PRC, sport center dan pasar)	-	PRC (1) Sport center	PRC (1) Sport center (1) Pasar (2)	PRC (1) Sport center (6) Pasar (2)	PRC (1) Sport center (4) Pasar (2)	PRC (1) Sport center (4) Pasar (2)	PRC (1) Sport center (2) Pasar (2)
21.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	56-28	62.62	62.30	62.33	62.40	62.40	62.44

No.	Indikator	Kondisi Awal: 2017	Target tahun ke-					Kondisi Akhir (2023)
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22.	Jumlah pengguna pelabuhan dan terminal	458.975	483.838,05	513.470,54	515.819,91	578.616,81	614.401,22	652.523,15
23.	% Penduduk yang mengakses sumber air minum	70,83 %	71,79%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	88,68	88,84	88,87	88,89	88,90	88,92	88,93
25.	Presentase Lingkungan Pemukiman kumuh	0,07	0,139	0,133	0,127	0,121	0,115	0,109
26.	Angka kriminalitas tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
27.	% Gangguan K3 yang tertangani	72%	75%	76%	77%	78%	79%	80%
28.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Poin)		68.29	67	68	69	70	71
29.	Penghargaan Lingkungan (Adipura)	-	-	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura
30.	Jumlah desa tangguh bencana	1 desa	1 Kel.	1 desa	1 Kel.	1 desa	1 desa	4 desa, 2 Kelurahan

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sinjai 2018-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
ASPEK KESEJAHTRAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	7,23	7,49	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9
2	Laju Inflasi Kabupaten	5,10	2-3	3-4	3-5	4-5	4-6	4-6
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	38,10	42,15	38 - 42	38 - 42	38 - 42	38 - 42	38 - 42
4	Indeks Gini	0,376	0,369	0,2 - 0,4	0,2 - 0,4	0,2 - 0,4	0,2 - 0,4	0,2 - 0,4
5	Persentase Angka Kemiskinan (%)	9,24	8 - 9	8 - 9	8 - 9	8 - 9	8 - 9	8 - 9
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	65,80	66,24	65 - 70	65 - 70	65 - 70	65 - 70	65 - 70
7	Angka melek huruf (%)	90,70	89,97	0	0	0	0	0
8	Angka rata-rata lama sekolah (%)	7,84	7,29	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10
9	Angka usia harapan hidup (%)	66,61	66,83	66 - 70	66 - 70	66 - 70	66 - 70	66 - 70
10	Persentase balita gizi buruk (%)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	Prevalensi balita gizi kurang (%)	0,81	0,86	0,74	0,66	0,58	0,52	0,33
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	77,5	80	83,75	87,5	91,25	95	100
13	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	69,61	68,80	69,87	70,00	70,15	70,30	70,45

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,53	2,14	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
15	Rasio penduduk yang bekerja (%)	95,47	94,84	0	91,42	86,24	0	89,00
16	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	-	-	-	-	-	-	-
17	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas (%)	66,14	66,72	66,99	67,26	67,54	67,82	68,10
18	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	40,54	40,01	39,66	39,31	38,96	38,61	38,25
19	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (%)	-	-	-	-	-	-	-
20	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	7,56	8,17	8,71	8,70	8,70	8,64	8,55
21	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (%)	0	0	0	0	0	0	0
23	Penguatan cadangan pangan (%)	0	0	0	0	0	0	0
24	Penanganan daerah rawan pangan (%)	0	0	0	0	0	0	0
25	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	46,22	45,99	45,75	45,52	45,30	45,07	44,84
26	Kontribusi sektor pertanian(palawija)terhadap PDRB (%)	17,34	16,72	16,13	15,55	15,00	14,47	13,95
27	Produksi sektor pertanian (%)	153,222	157.818	162.552	167.429	172.452	177.625	182.954

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
28	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	11,56	11,15	10,75	10,37	10,00	9,64	9,30
29	produksi sektor perkebunan (%)	19,300	20,651	22,097	23.643	25.298	27.069	28.964
30	Kontribusi produksi kelompok petani petani terhadap PDRB (%)	87,09	86,24	85,41	84,58	83,76	82,94	82,14
31	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	1,00	1,03
32	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	2,60	13,56	14,36	14,76	15,36	15,66	16,05
33	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	-	-
34	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	18,46	19,39	19,79	20,24	20,74	21,19	21,59
35	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,90	12,22	12,52	12,83	13,13	13,43	13,75
36	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2,76	2,78	3,00	4,12	5,37	6,00	7,00
37	Pertumbuhan Industri (%)	0	7,91	37,33	30,34	11,73	16,67	18,04
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (%)	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai tukar petani (%)	100,58	101,58	102,60	103,63	104,66	105,71	106,77
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	50,64	51,65	52,68	53,73	54,81	55,91	57,03

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4	Produktifitas total daerah (%)	45,00	45,45	45,90	46,36	46,82	47,29	47,76
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	46,00	46,46	46,92	47,39	47,87	48,35	48,83
6	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	8,39	7,91	7,12	6,72	5,93	4,35	2,77
7	Rasio Ketergantungan (Jiwa)	238,099	240.479	242.885	245.314	247,767	250,244	252.747
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	46,52	100	100	100	100	100	100
1.2	Angka Partisipasi Kasar							
	- SD/MI/Sederajat	113,98	114,00	114,50	114,90	115,00	115,50	
	- SMP/MTS/Sederajat	115,35	115,00	116,00	117,00	118,00	119,00	
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan							
	- Persentase SD/MI/Sederajat	98,46	100	100	100	100	100	
	- Persentase SMP/MTS/Sederajat	98,36	100	100	100	100	100	
1.4	Angka Partisipasi Murni							
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100	
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100	
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.5	Angka partisipasi Sekolah							
1.5.1	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	114,00	114,50	114,90	115,00	115,50	116,00	
1.5.2	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	115,00	115,00	115,50	115,90	116,00	116,20	
1.5.3	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Angka Putus Sekolah							
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	-	-	-	-	-	
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,07	-	-	-	-	-	
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-	-	
1.7	Angka Kelulusan							
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,46	100	100	100	100	100	
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,36	100	100	100	100	100	
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	-						
1.8	Angka Melanjutkan (AM);							

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	96,56	100	100	100	100	100	
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM)dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-	-	
1.9	Fasilitas Pendidikan							
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	76,10	77,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	69,76	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
1,10	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan Dasar	1 : 100	1 : 103	1 : 103	1 : 103	1 : 104	1 : 105	
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan Menengah	1 :153	1 : 154	1 :155	1 : 156	1 : 157	1 : 162	
1,12	Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar	1 : 57,87	1 : 58,32	1 : 58,45	1 : 58,58	1 : 58,72	1 : 58,85	
1,13	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	-	-	-	-	-	-	
1.14	Rasio Guru/ Murid Perkelas Rata- Rata Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	
1.15	Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas Rata-rata	446,74	437,50	444,47	456,79	466,29	478,53	
1.16	Proporsi Murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98,46	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	42,55	-	-	-	-	-	
1.18	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100	100	100	100	100	100	
1.19	guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,50	100	100	100	100	100	
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	69	71	69	64	62	56	50
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	982,95	983,49	983,96	985,12	985,58	986,98	988,37
2.3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	83	80	76	70	68	61	53
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	52	52	50	47	47	45	40
2.5	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	148	148	123	98,77	74,07	49,38	24,69
2.6	Rasio posyandu persatuan balita	18,60	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
2.7	Rasio Puskesmas Persatuan Rasio poliklinik persatuan Rasio pustu persatuan penduduk	0,063 0,368 0,245	0,063 0,364 0,243	0,062 0,361 0,240	0,061 0,357 0,238	0,061 0,353 0,235	0,060 0,349 0,233	0,059 0,346 0,231
2.8	rasio rumah sakit persatuan penduduk	0,00396	0,00392	0,00775	0,00767	0,01139	0,01127	0,01116
2.9	rasio dokter persatuan penduduk	0,24	0,25	0,30	0,45	0,59	0,73	0,94

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,76	3,69	3,81	3,93	4,04	4,16	4,30
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.12	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Cakup balita Gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan indonesia 2.10 Kkal/kapita/hari	0	0	0	0	0	0	0
2.16	persentase anak usia I Tahun yang diimunisasi campak	95,06	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.18	Cakupan Balita pnemonia yang ditangani	42	28	85	85	85	85	85
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	68,60	26,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.20	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk	0,17	0,10	0,15	0,14	0,22	0,20	0,18
2.21	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	5,94	2,74	2,71	2,69	2,66	2,63	2,60

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.22	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam programDOTS	100	100	100	100	100	100	100
2.23	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS	70,00	100	100	100	0	0	0
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani							
2.26	Angka kejadian malaria	0,143	0,141	0,140	0,138	0,137	0,135	0,134
2.27	Tingkat Kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	0
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	1,25	1,38	1,38	1,65	1,65	1,65	1,65
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100	100	100	100	100	100	100
2.30	prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,019	0,020	0,021	0,021	0,022	0,023	0,024
2.31	Penggunaan kodom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	53,85	53,85	60,02	60,01	60,00	59,99	59,99
2.32	Proporsi jumlah penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	100	100	100	100	100	100	100
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	3,186	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.34	Cakupan Kunjungan bayi	134,37	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07
2.35	Cakupan puskesmas	177,78	177,78	177,78	177,78	177,78	177,78	177,78
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
2.37	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	90,82	91,60	91,67	91,75	91,80	91,85	91,96
2.38	Cakupan pelayanan nifas	94,80	96,76	96,80	96,83	96,83	96,88	96,88
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang tangani	65,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.40	Cakupan Pelayanan anak balita	102,45	104,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.41	cakupan pemberian makanan pendapatan ASI pada anak usia 6 -24 bulankeluarga miskin	100	100	100	100	100	100	100
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	70,23	77,26	84,98	93,48	93,47	100,00	100,00
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	18,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level Iyang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	593.200	622.900	327.000	228.900	360.500	252.367	252.367
2.45	Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi , 24 jam	100	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Pekerjaan Umum							

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	0,3867	0,4492	0,4452	0,5030	0,5149	0,5268	0,5388
3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (Jiwa/Km)	192	193	194	196	197	198	199
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM / Jam	38,67%	44,92%	45,52%	50,30%	51,49%	52,68%	53,88%
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluranpembuangan air (minimal 1,5 m)	0,38%	0,38%	0,60%	0,80%	1,1%	1,5%	1,5%
3.1.6	persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,32%	0,20%	0,08%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.7	persentase rumah tinggal bersanitasi	86,80%	87,97%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.8	persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	20,00%	20,00%	19,00%	19,00%	18,00%	18,00%	18,00%
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembangunan aliran air tidak tersumbat	80,56%	81,44%	84,00%	86,00%	88,00%	90,00%	90,00%
3.1.10	Tidak terjadi genangan .> 2 kali setahun	52,47%	51,63%	48,00%	46,00%	44,00%	42,00%	40,00%
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawa longsor (%)	6,52	6,52	6,19	6,19	5,87	5,87	5,87
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	69,09	71,26	72,01	72,76	73,51	74,34	75,17
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi (%)	23,19	23,81	24,33	24,97	25,48	26,14	26,66

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	70,83%	71,79%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	71,10 %	72,04 %	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.17	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1.18	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%)	2,1	1,18	15,35	20,5	35	45,78	48,11
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)	2,9	2,9	2,91	2,93	2,94	2,96	3,01
3.2	Penataan Ruang							
3.2.1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%	0,10%
3.2.2	Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan (%)	33,65%	33,65%	33,75%	33,75%	33,80%	33,85%	33,85%
3.2.3	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (%)	74,71	75,09					
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	7	7	15	15	22	30	37
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daerah (%)	25	30	35	40	50	60	50
3.2.6	ketaatan terhadap RTRW (%)	57,14%	71,42%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman							
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	0,20	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
4.2	Rasio pemukiman layak huni (%)	47,43	47,45	47,46	47,47	47,47	47,48	47,49
4.3	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni (%)	88,68	88,84	88,87	88,89	88,90	88,92	88,93
4.4	cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	persentase permukiman yang tertata (%)	15,19	15,20	15,21	15,22	15,23	15,23	15,23
4.6	persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,07	0,139	0,133	0,127	0,121	0,115	0,115
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkantoran (%)	38,62	27,17	32,99	39,37	46,38	51,42	51,42
4.8	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	1,08	0,81	0,67	0,53	0,40	0,26	0,26
4.9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	2,26	5,08	7,9 1	10,73	13,56	16,38	16,38
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2	Tibgkat Penyelesaian Pelanggaran (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	77	74	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota (%)	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	SOSIAL							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,61	0,20	0,26	0,20	0,26	0,20	1,24
6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	0,61	0,21	0,26	0,21	0,26	0,21	1,24
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar (%)	0,96	88,14	93,53	94,30	85,00	90,00	90,00
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	1,34	0,13	0,13	0,15	0,15	0,38	1,14
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)	-	-	-	-	-	-	-
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social (%)	0	37,23	37,23	37,23	37,23	37,23	37,23
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	Tenaga Kerja							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	0	7,39	8,00	5,71	5,88	3,85	3,33
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	0	100,00	50,00	66,67	50,00	75,00	60,00
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	91,86	98,79	93,85	94,77	95,59	96,45	98,11
1.4	Keselamatan dan Perlindungan (%)	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	16,55	13,81	14,29	15,10	15,55	15,63	16,47
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	74,42	0,00	62,50	68,97	74,07	78,95	85,71
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	61,22	55,56	57,14	58,82	66,67	28,57	80,00
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	76,19	65,45	66,67	69,57	71,43	72,73	76,19
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	4,05	7,95	8,03	8,10	8,18	8,25	8,33
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	18,33	18,40	18,50	18,60	18,70	18,80	18,80
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	18,75	26	26	16	16	16	16
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	81,66	82	82,20	82,50	82,70	83	83
2.4	Rasio KDRT (%)	0,0003	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah um ur (%)	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	11,18	11,20	11,22	11,25	11,27	11,30	11,30

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (%)	33,30	32	31	30	29	28	28
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum (%)	0	100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	14,81	15,3	15,3	15,3	15	15	15
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	99,02	99,02	99,02	100	100	100	100
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	88,77	88,77	88,65	90,77	90,77	92,71	93,11
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	99,08	99,08	99,08	99,08	99,08	99,08	99,08
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	70	71	72	73	74	75	75
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	100	100	100	100	100	100	100
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	20,16	20,10	20,05	20	19,05	19,05	19
3	Pangan							
3.1	Persentase Ketersediaan pangan utama (%)	5	5	5	5	5	5	5
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	62	62	70	75	81	83	83
4	Pertanahan							
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	78,67	-	-	-	-	-	-
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Penyelesaian izin lokas (%)	-	-	-	-	-	-	-
5	Lingkungan Hidup							

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH Kab/Kota	-	-	-	-	Ada		
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kab./Kota	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (%)	-	-	60	60	60	60	60
5.5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (%)	-	-	89	89,3	90	90,5	91
5.6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	-	-	54,15	56,10	55,15	55,20	55,30
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. (%)	-	-	10	20	30	40	50
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kab. (%)	-	-	-	-	-	-	1
5.9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	-	3	-	-	-	-
5.10	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	-	-	3	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
5.11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	-	1	-	-	-	-
5.12	Penetapan hak MHA	-	-	-	1	-	-	-
5.13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	-	-	-	-	-	-
5.14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	-	-	-	-	-	-
5.15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-	-	1	1	1	1
5.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada
5.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani (%)	-	100	100	100	100	100	100
5.18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	-	-	75	74	74	73	72
5.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	-	-	20	22	24	26	27
5.20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	-	-	100	100	100	100	100
5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	-	80	75	74	73	72

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
5.22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	-	72	73	74	74	75
5.23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	-	20,83	41,67	62,50	83,33	100
5.24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangundangan	-	-	100	100	100	100	100
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	45,95	53.44	54.89	53.31	51.62	50.05	48.68
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	0,98	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.95
6.3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	0,08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	97,49	98.98	99.42	99.69	99.78	99.8	99.96
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	98,38	99.3	98.91	98.31	97.51	96.53	95.4
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	97,01	94,03	95,52	97,01	98,51	100	100
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	47,44	65,10	65,10	65,10	65,10	65,10	65,10
7.4	Persentase LSM aktif (%)	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
7.5	Persentase LPM Berprestasi (%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
7.6	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	25,84	25,11	29,55	34,54	37,04	40,04	46,87
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	-	-	-	-	-	-	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	1,15	1,15	2	2	2	2	2
8.2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,36	2,36	2,36	2,21	2,21	2,21	2,21
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	47,60	52,30	57,10	62	66,60	71,40	71,40

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	0	3,03	3,03	12,12	18,18	24,24	24,22
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk (%)	0	0	1	0	0	0	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (%)	-	1	1	4	6	8	8
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan (%)	-	-	-	1	2	3	6
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)	2,48	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
8.9	Rasio Akseptor KB (%)	74,24	73,46	73,50	73,55	73,60	73,70	73,70
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	73,46	73,50	73,55	73,60	73,65	73,70	73,70
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) (%)	0,3	0,27	0,27	0,23	0,23	0,2	0,2
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	6,68	6,68	6,68	6,65	6,65	6,60	6,60

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	25,5	25,5	25,5	25,5	25,3	25	25
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	17,83	17,90	18	18	18,50	18,50	18,50
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	11,92	11,91	11,90	11,88	11,88	11,85	11,85
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	56,19	56,50	56,50	56,70	56,70	57	57
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	51,86	52	52	52,20	52,50	53	53
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	47,20	47,20	47,20	47,50	47,70	48	48
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	22,22	11,11	11,11	23,22	22,22	33,33	33,33
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	6,67	67,77	72,22	75,55	78,88	83,33	87,77
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100	100
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	15,50	15,55	15,55	15,60	15,60	15,65	15,65

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100	100	100
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100	100	100
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	-	-	-	-	-
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100	100	100
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	48	48	48	49	49	50	50
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	-	-	-	-	-
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan	23,6	23,6	23,8	23,8	24	24	24

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes							
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	253..807	272.557	294.362	326.742	356.148	395.325	438.810
9.2	Rasio ijin trayek	673	536	482	434	391	352	317
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum (%)	100	100	100	100	100	100	100
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Unit)	15	15	14	15	15	15	15
9.5	Persentase layanan angkutan darat (%)	1,83	1,83	1,86	1,84	1,86	1,84	1,83
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	100	100	100	100	100	100	100
9.7	Persentase Pemasangan Rambu rambu	8,81	0	11,24	0	14,49	16,95	20,41
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,91	1,87	1,84	1,80	1,77	1,74	1,70
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	3.168.891	3.327.335	3.493.702	3.668.387	3.851.806	4.044.396	4,246.616
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	-	-	-	-	-	-
10	Komunikasi dan Informatika							

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	100	100	100	100
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	100	100	100	100	100	100	100
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	100	100	100	100	100	100	100
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	-	-	-	-
11	Koprasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif	86,82	64,62	65,91	66,42	66,91	67,39	67,87
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	90,00	90,04	90,29	90,69	90,96	91,22	91,30
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	88,62	91,50	91,62	91,73	92,01	92,35	92,81
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	383	304	1	1	1	1	1
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	1:4	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	37 %	30 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	94	94	91	91	91	100
13.2	Persentase wirausaha muda	0	25,65	28,23	29,61	31,05	32,59	34,18
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100	100	100
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	63,64	59,67	68,08	66,15	70,76	84,66	90,30
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	47,62	62,69	58,95	80,14	80,56	82,76	83,33
13.6	Jumlah atlet berprestasi	-	-	-	-	-	-	-
13.7	Jumlah prestasi olahraga	9	19	29	29	29	29	29
14	Statistik							
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
14.3	Buku "PDRB"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
15	Persandiaan							

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	4	4	5	5
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	153	150	154	155	156	157	158
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	3	3	9	11	13	15	16
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	96	100	105	107	108	109	110
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang	35.685	42.000	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
17.2	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	62,52	50	50	50	50	50	50
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	25,26	25,52	25,79	26,07	26,34	25,65	26,89
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	35.685	42.000	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	18.156	251	200	200	200	200	200

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	-	-	-	-	-	-
18	Kearsipan							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	1	1	1	1
Layanan Urusan Pilihan								
1	Pariwisata							
1.1	Kunjungan wisata	91,34	35.919	88.836	93.277	97.940	102.837	107.978
1.2	Lama kunjungan Wisata	40.750	190,00	5,00	10,00	15,00	15,00	10,00
1.3	PAD sektor pariwisata	-	54,68	100	100	100	100	100
2	Pertanian							
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	46,22	45,99	45,75	45,52	45,30	45,07	44,84
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	17,34	16,72	16,13	15,55	15,00	14,47	13,95
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	11,56	11,15	10,75	10,37	10,00	9,64	9,30
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	87,09	86,24	85,41	84,58	83,76	82,94	82,14

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.5	Posentase Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	51,37	51,87	52,38	52,90	53,42	53,94	54,47
2.6	Cakupan bina kelompok petani	58,13	59,20	60,29	61,41	62,54	63,70	64,87
3	Kehutanan							
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	-
4	Energi dan Sumberdaya Mineral							
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik (%)	83,50	83,70	83,70	83,90	84,20	84,60	84,60
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	80,30	80,30	80,40	80,42	80,46	80,60	80,60
4.3	Persentase pertambangan tanpa ijin (%)	-	-	-	-	-	-	-
5	Perdagangan							
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	25,00	25,41	6,58	5,58	5,04	4,62	4,62
6	Perindustrian							

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	55,56	100	50	50	50	50	55,56
7	Transmigrasi							
7.1	Persentase transmigran swakarsa	-	-	-	-	-	-	-
8	Kelautan dan Perikanan							
8.1	Produksi perikanan	100	100	100	100	100	100	100
8.2	Konsumsi ikan	100	100	100	100	100	100	100
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan	100	100	100	100	100	100	100
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-	-	-
8.7	Nilai tukar nelayan							
Penunjang Urusan								
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	4,14						
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	4,14	3,83	6,73	17,38	9,29	7,42	2,29
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana							
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	28,83	27,27	25,01	22,67	20,55	20,00	20,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,48	12,09	14,81	13,42	12,91	11,07	10,07
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		54%	52%	51%	50%	49%	48%
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,15						
2.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
3.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,88	0,86	0,83	0,92	0,96	0,99	0,99
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	70,82	89,00	94,35	98,20	98,84	100	100
3.3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	32	37	37	37	37	37
3.4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.755	1.045	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
3.5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.106	3.007	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
4	Penelitian dan pengembangan							
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	60 %	16,67%	22,22%	19,44%	22,22%	19,44%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	2,44	2,38	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penerapan SIDA:								
5	Pengawasan							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	78	79	79	80	80	81	81
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Jumlah temuan BPK	9	9	9	9	8	8	7
6	Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Jumlah dokumen teknis kecamatan dan kelurahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Jumlah laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1 Laporan						
3	Jumlah laporan hasil rakor desa/kecamatan	-	-	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
4	Jumlah Dok penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum lainnya (pemerkar desa/kelurahan, dll)	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Peraturan Daerah, dan Produk Hukum Lainnya yang terbentuk	18 Perda 78 Perbup 763 SK	10 Perda 45 Perbup 840 SK	12 Perda 40 Perbup 830 SK	8 Perda 45 Perbup 850 SK	10 Perda 50 Perbup 830 SK	1 Perda 50 Perbup 830 SK	18 Perda 50 Perbup 800 SK
6	Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan	3 Produk Hukum	3 produk hukum	0	3 produk hukum	3 produk hukum	3 produk hukum	3 produk hukum
7	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi	3 Kasus	0	3 Kasus	3 Kasus	0	0	3 Kasus
8	Jumlah rumusan kebijakan Perekonomian yang dikoordinasikan	2 Ranperda 1 MOU 1 Perbup	2 MOU	1 Ranperda 1 Perbup 1 MOU	1 Perbup 1 MOU	1 Perbup 1 MOU	1 Perbup 1 MOU	3 Ranperda 5 Perbup 7 MOU

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
9	Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah yang tersusun dan dikoordinasikan	1 Jenis Buku	1 Jenis buku	1 Jenis buku	1 Jenis buku	1 Jenis buku	1 Jenis buku	5 Jenis buku
10	Jumlah Rumusan Kebijakan Kerjasama Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah Kerjasama Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dan dikoordinasikan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
13	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Tugas – tugas Pemerintahan Daerah	415	420	425	430	435	440	445
14	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	1 Perda PD 45 Perbup Tupoksi 16 Perbup Pembentukan UPTD	8 Perbup Revisi Tupoksi OPD 1 Perbup Penetapan kelas jabatan 1 Sk Penetapan SOP	1 Perda PD 1 Perbup Revisi Penetapan Kelas Jabatan 5 Revisi Perpub Tupoksi OPD 1 SK Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 1 SK Penetapan Analisi jabatan & Analisis Beban Kerja	1 SK penetapan peta proses bisnis 1 Perbup Revisi Tata Naskah Dinas	1 SK Penetapan Pengembangan SOP	1 SK Penetapan Pengembangan SOP	1 Perda PD 45 Perbup Tupoksi 18 Perbup Pembentukan OPD 1 13 Perbup Revisi Tupoksi OPD 1 Perbup Penetapan Kelas Jabatan 1 Perbup Revisi

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
				1 SK Penetapan tentang jabatan & pemangku jabatan				penetapan Kelas Jabatan 1 SK Penetapan tentang Kelas Jabatan & Pemangku Jabatan 1 SK Penetapan Standar Kompotensi Jabatan 1 SK Penetapan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja 1 SK Penetepan Peta Proses Bisnis 1 SK Penetapan SOP

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	2018	Proyeksi Tahun				Kondisi Akhir 2023
				2019	2020	2021	2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
15	Persentase Keterpenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan sarana prasarana Aparatur Lingkup Setda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Presentase Keterpenuhan Saran Prasarana Aparatur Lingkup Setda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	64 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
18	Persentase Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan lingkup Setda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 8.3

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Tahun					Kondisi Akhir 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)							
1	URUSAN PENDIDIKAN							
1.1	Jumlah warga Negara usia 7 – 18 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	40.526		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaian Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	600		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	12.290		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	URUSAN KESEHATAN							
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90,76 %	83,36 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95 %	99,28 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,69 %	98,21 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Tahun					Kondisi Akhir 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	83,51%	54,32 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	70,20 %	94,36 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	33,,94 %	10,14 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	42,65 %	58,18 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	12,53 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %	15,60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	100 %	61,80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
3.1	Persentase Rumah Tinggal Bersenitasi	86,80 %	87,97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Pedesaan	71,10 %	72,04 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Tahun					Kondisi Akhir 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	0,20	0,21	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	Cakupan Permukiman Layak Huni (%)	88,68	88,84	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARKAT							
5.1	Pelayanan Kementrian dan Ketertiban Umum	27,37 %	27,73 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	219,15%	55 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	URUSAN SOSIAL							
6.1	Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani	14,24 %	18,83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.2	Persentase jumlah anak terlantar di luar panti yang tertangani	4,62 %	83,45 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Tahun					Kondisi Akhir 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.3	Persentase jumlah lanjutan usia terlantar di luar panti yang tertangani	1,8 %	42,70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.4	Persentase jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang tertangani	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.5	Persentase penanganan jumlah korban bencana alam dan sosial skala kabupaten yang tertangani	100	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.4
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
WAJIB PELAYANAN DASAR								
PENDIDIKAN								Dinas Pendidikan
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	46,52	100	100	100	100	100	
1.2	Angka Partisipasi Kasar	113,98	114,50	114,90	115,00	115,50		
	- SD/MI/Sederajat - SMP/MTS/Sederajat	115,35	116,00	117,00	118,00	119,00		
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan	98,46	100	100	100	100		
	- Persentase SD/MI/Sederajat - Persentase SMP/MTS/Sederajat	98,36	100	100	100	100		
1.4	Angka Partisipasi Murni							
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100		

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100		
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	-	-	-	-	-		
1.5	Angka partisipasi Sekolah							
1.5.1	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	114,00	114,90	115,00	115,50	116,00		
1.5.2	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	115,00	115,50	115,90	116,00	116,20		
1.5.3	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	-	-	-	-	-		-
1.6	Angka Putus Sekolah							
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0	0	0	0		
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,07	0	0	0	0		
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-		
1.7	Angka Kelulusan							
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,46	100	100	100	100		
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,36	100	100	100	100		
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	-						

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.8	Angka Melanjutkan (AM);							
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	96,56	100	100	100	100		
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM)dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-		
1.9	Fasilitasi Pendidikan							
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	76,10	80,00	85,00	90,00	95,00		
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	69,76	75,00	80,00	85,00	90,00		
1,10	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan Dasar	1 ; 100	1 : 103	1 : 103	1 : 104	1 : 105		
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan Menengah	1 :153	1 :155	1 : 156	1 : 157	1 : 162		
1,12	Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar	1 : 57,87	1 : 58,45	1 : 58,58	1 : 58,72	1 : 58,85		
1,13	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	-	-	-	-	-		
1.14	Rasio Guru/ Murid Perkelas Rata- Rata Sekolah Dasar	-	-	-	-	-		
1.15	Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas Rata-rata	446,74	444,47	456,79	466,29	478,53		

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.16	Proporsi Murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98,46	100	100	100	100		
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	42,55	-	-	-	-		
1.18	Penduduk yang berusia> 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100	100	100	100	100		
1.19	guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,50	100	100	100	100		
2	KESEHATAN							
2.1	Angka Kematiaan Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	982,95	983,96	985,12	985,58	986,98	988,37	Dinas Kesehatan
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	69	69	64	62	56	50	
2.3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	979,49	982,33	983,72	984,19	985,82	987,68	
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	987,16	988,37	989,07	989,07	989,54	990,70	
2.5	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	998,52	998,77	999,01	999,26	999,51	999,75	
2.6	Rasio posyandu persatuan balita	18,60	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	
2.7	Rasio Puskesmas Persatuan	0,063	0,062	0,061	0,061	0,060	0,059	
	Rasio poliklinik persatuan	0,368	0,361	0,357	0,353	0,349	0,346	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Rasio pustu persatuan penduduk	0,245	0,240	0,238	0,235	0,233	0,231	
2.8	rasio rumah sakit persatuan penduduk	0,00396	0,00775	0,00767	0,01139	0,01127	0,01116	
2.9	rasio dokter persatuan penduduk	0,24	0,30	0,45	0,59	0,73	0,94	
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,76	3,81	3,93	4,04	4,16	4,30	
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.12	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang ditangani	100	100	100	100	100	100	
2.13	Cakupan desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	100	100	100	100	100	100	
2.14	Cakup balita Gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan indonesia 2.10 Kkal/kapita/hari	0	0	0	0	0	0	
2.16	persentase anak usia I Tahun yang diimunisasi campak	95,06	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
2.18	Cakupan Balita pnemonia yang ditangani	43	85	85	85	85	85	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	66,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.20	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk	0,17	0,15	0,14	0,22	0,20	0,18	
2.21	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	7,52	2,71	2,69	2,66	2,63	2,60	
2.22	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam programDOTS	100	100	100	100	100	100	
2.23	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS	100	100	100	0	0	0	
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	
2.25	Penderita diare yang ditangani							
2.26	Angka kejadian malaria	0,143	0,140	0,138	0,137	0,135	0,134	
2.27	Tingkat Kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	1,25	1,38	1,65	1,65	1,65	1,65	
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100	100	100	100	100	100	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.30	prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,019	0,021	0,021	0,022	0,023	0,024	
2.31	Penggunaan kodom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	53,85	60,02	60,01	60,00	59,99	59,99	
2.32	Proporsi jumlah penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	100	100	100	100	100	100	
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	3,186	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.34	Cakupan Kunjungan bayi	134,37	95,07	95,07	95,07	95,07	95,07	
2.35	Cakupan puskesmas	177,78	177,78	177,78	177,78	177,78	177,78	
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	
2.37	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	90,82	91,67	91,75	91,80	91,85	91,96	
2.38	Cakupan pelayanan nifas	94,80	96,80	96,83	96,83	96,88	96,88	
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang tangani	65,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.40	Cakupan Pelayanan anak balita	102,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.41	cakupan pemberian makanan pendapatan ASI pada anak usia 6 -24 bulankeluarga miskin	100	100	100	100	100	100	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	70,23	84,98	93,48	93,47	100,00	100,00	
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	18,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	593.200	327.000	228.900	360.500	252.367	252.367	
2.45	Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi , 24 jam	100	100	100	100	100	100	
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Pekerjaan Umum							
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	0,3867	0,4452	0,5030	0,5149	0,5268	0,5388	Dinas Pekerjaan Umum
3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (Jiwa/Km)	192	194	196	197	198	199	
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0	0	0	0	0	0	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
3.1.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM / Jam	38,67%	45,52%	50,30%	51,49%	52,68%	53,88%	
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluranpembuangan air (minimal 1,5 m)							
3.1.6	persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar							
3.1.7	persentase rumah tinggal bersanitasi							
3.1.8	persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar							
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembangunan aliran air tidak tersumbat							
3.1.10	Tidak terjadi genangan .> 2 kali setahun							
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawa longsor (%)	6,52	6,19	6,19	5,87	5,87	5,87	
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	69,09	73,51	75,80	78,08	80,41	82,78	
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi (%)	23,19	24,33	24,97	25,48	26,14	26,66	
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum							

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan							
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh (%)							
3.1.17	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)							
3.1.18	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%)	2,135	15,35	20,5	35	45,78	48,11	
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)							
3.2								
3.2.1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	41,28	37,86	41,9	66,76	37,7	76,87	
3.2.2	Luas rht Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.2.3	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (%)							
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)							

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daerah (%)							
3.2.6	ketaatan terhadap RTRW (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.2	Rasio pemukiman layak huni (%)	47,43	47,46	47,47	47,47	47,48	47,49	
4.3	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni (%)	88,68	88,87	88,89	88,90	88,92	88,93	
4.4	cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	persentase permukiman yang tertata (%)	15,19	15,21	15,22	15,23	15,23	15,23	
4.6	persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,07	0,133	0,127	0,121	0,115	0,115	
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkantoran (%)	38,62	32,99	39,37	46,38	51,42	51,42	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4.8	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	1,08	0,67	0,53	0,40	0,26	0,26	
4.9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	2,26	7,9 1	10,73	13,56	16,38	16,38	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sat.pol PP dan Pemadam Kebakaran
5.2	Tibgkat Penyelesaian Pelanggaran (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	77	100	100	100	100	100	
5.3	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota (%)	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	100	100	100	100	100	100	
5.5	Persentase penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100	
6	SOSIAL							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,61	0,26	0,20	0,26	0,20	1,24	Dinas Sosial
6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	0,61	0,26	0,21	0,26	0,21	1,24	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar (%)	0,96	93,53	94,30	85,00	90,00	90,00	
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	1,34	0,13	0,15	0,15	0,38	1,14	
6.5	persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social (%)	100	100	100	100	100	100	
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social (%)	100	100	100	100	100	100	
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	-	-	-	-	-		-
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)	-	-	-	-	-		-
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social (%)	0	37,23	37,23	37,23	37,23	37,23	
WAJIB NON PELAYANAN DASAR								

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	TENAGA KERJA							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	0	0,8	0,57	0,56	0,42	0,33	Dinas Koperasi UMKM dan Ketenaga Kerjaan
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	0	200	150	200	133,33	166,67	
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	105,98	76,47	80,00	81,40	82,77	85,06	
1.4	Keselamatan dan Perlindungan (%)	0	0	0	0	0	0	
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	16,55	16,66	16,67	16,71	16,75	16,79	
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	-	-	-	-	-	-	
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	-	-	-	-	-	-	
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	-	-	-	-	-	-	
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	74,42	68,97	75,00	76,92	78,95	85,71	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	61,22	57,14	58,82	66,67	28,57	80,00	
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	88,89	66,67	69,57	71,43	72,73	76,19	
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)							
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	Dinas P3AP2KB
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	18,75	25	25	28	28	31	
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	81,66	81	81	81	81	81	
2.4	Rasio KDRT (%)	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah um ur (%)	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	0,0309	
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)							
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	0	0	0	0	0	0	
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (%)	0	0	0	0	0	0	
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum (%)	0	100	100	100	100	100	
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	99,02	99,02	100	100	100	100	
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	88,77	88,65	90,77	90,77	92,71	93,11	
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	87,77	99,08	99,08	99,08	99,08	99,08	
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0	0	0	0	0	0	
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	20,16	20,01	20,74	20,77	20,80	20,76	
3	PANGAN							
3.1	Persentase Ketersediaan pangan utama (%)	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	0	0	0	0	0	0	
3.3	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	62	70	75	81	83	83	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR		TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4		LINGKUNGAN HIDUP							
4.1	Tersedianya dokumen RPPLH Kab/Kota		-	-	-	Ada			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kab./Kota		-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (%)		-	60	60	60	60	60	
4.5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (%)		-	89	89,3	90	90,5	91	
4.6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)		-	54,15	56,10	55,15	55,20	55,30	
4.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. (%)		-	10	20	30	40	50	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kab. (%)	-	-	-	-	-	1	
4.9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	3	-	-	-		-
4.10	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	-	3	-	-	-		-
4.11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	1	-	-	-	-	
4.12	Penetapan hak MHA	-	-	1	-	-	-	
4.13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	-	-	-	-	-	
4.14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	-	-	-	-	-	
4.15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-	1	1	1	1	
4.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan	-	100	100	100	100	100	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani (%)							
4.18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	-	75	74	74	73	72	
4.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	-	20	22	24	26	27	
4.20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	-	100	100	100	100	100	
4.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	80	75	74	73	72	
4.22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	72	73	74	74	75	
4.23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	20,83	41,67	62,50	83,33	100	
4.24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangundangan	-	100	100	100	100	100	
5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
5.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	45,95	54.89	53.31	51.62	50.05	48.68	Dinas Kependudukan dan Capil

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	0,98	0.99	0.98	0.98	0.97	0.95	
5.3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	0,08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
5.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	97,49	99.42	99.69	99.78	99.8	99.96	
5.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	98,38	98.91	98.31	97.51	96.53	95.4	
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	97,01	95,52	97,01	98,51	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100	100	100	100	100	100	
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	42,56	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	
6.4	Persentase LSM aktif (%)	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6.5	Persentase LPM Berprestasi (%)	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	
6.6	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	
6.7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	100	
6.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	25,84	46,25	47,50	48,75	50,00	51.25	
6.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	0	0	0	0	0	0	
7	PERHUBUNGAN							
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	253..807	294.362	326.742	356.148	395.325	438.810	Dinas Perhubungan
7.2	Rasio ijin trayek	673	482	434	391	352	317	
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum (%)	100	100	100	100	100	100	
7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Unit)	15	14	15	15	15	15	
7.5	Persentase layanan angkutan darat (%)	1,83	1,86	1,84	1,86	1,84	1,83	
7.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	100	100	100	100	100	100	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
7.7	Persentase Pemasangan Rambu rambu	8,81	11,24	0	14,49	16,95	20,41	
7.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,91	1,84	1,80	1,77	1,74	1,70	
7.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	3.168.891	3.493.702	3.668.387	3.851.806	4.044.396	4,246.616	
7.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	0	0	0	0	0	0	
8	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
8.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
8.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	
8.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
8.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
8.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0	0	0	0	0	0	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
9	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
9.1	Persentase koperasi aktif	83,69	59,23	68,18	76,87	86,03	94,20	Dinas Koperasi UMKM dan Ketenaga Kerjaan
9.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	1.671,29	2589,14	2746,43	3127,57	3321,29	3657,00	
9.3	Persentase BPR/LKM aktif	0	0	0	0	0	0	
9.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	88,69	89,91	89,61	91,61	92,10	92,78	
10	PENANAMAN MODAL							
10.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	383	380	400	420	440	460	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2.628.749.620.665	1.312.938.813.787	1.339.197.590.063	1.367.557.274.392	1.394.908.419.880	1.422.806.588.277	
10.3	Rasio daya serap tenaga kerja	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	
10.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4.631.668.282.906	1.312.938.813.787	1.339.197.590.063	1.367.557.274.392	1.394.908.419.880	1.422.806.588.277	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
11	STATISTIK							
11.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	BPS
11.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
11.3	Buku "PDRB"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	PARIWISATA							
1.1	Kunjungan wisata	40,75	80.8	92.92	106.858	117.544	129.298	Dinas Pariwisata
1.2	Lama kunjungan Wisata		5,00	10,00	15,00	15,00	10,00	
1.3	PAD sektor pariwisata		100	100	100	100	100	
2	PERTANIAN							
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	46,22	45,75	45,52	45,30	45,07	44,84	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
								dan Perkebunan
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	17,34	16,13	15,55	15,00	14,47	13,95	
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	11,56	10,75	10,37	10,00	9,64	9,30	
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	87,09	85,41	84,58	83,76	82,94	82,14	
2.5	Posentase Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	51,37	52,38	52,90	53,42	53,94	54,47	
2.6	Cakupan bina kelompok petani	58,13	60,29	61,41	62,54	63,70	64,87	
3	KEHUTANAN							
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	-	-	-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-		-

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	Proyeksi Tahun					OPD PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
3.3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	-	-	-	-	-		-
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik (%)	83,50	83,70	83,90	84,20	84,60	84,60	Dinas Perindag dan ESDM
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	80,30	80,40	80,42	80,46	80,60	80,60	
4.3	Persentase pertambangan tanpa ijin (%)	0	0	0	0	0	0	

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Sinjai lima tahun ke depan melanjutkan RPJMD periode sebelumnya (2013-2018). Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019, disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Dalam hal terdapat perbedaan substansi antara RKPD 2019 dengan Perda RPJMD 2018-2023, maka penyusunan APBD Tahun 2019 mengacu pada Perda RPJMD 2018-2023, dan akan dilaksanakan penyesuaian terhadap substansi RKPD 2019. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sinjai pada tahun 2018, perlu disusun RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 akan didasarkan pada RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2023, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai 2013- 2018

9. 2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Bupati Sinjai berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 kepada masyarakat;
- b) Bupati Sinjai menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- c) Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- d) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ;
- e) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 setiap tahun.